PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026



## RKPK NAGAN RAYA 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025

# BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN
NAGAN RAYA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);

23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035;

26. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045;

27. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah kabupaten dan DPRK Nagan Raya dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) setelah disepakati dengan DPRK.

## BAB II
## TUJUAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPK

### Pasal 2

(1) RKPK bertujuan untuk terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Kabupaten serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

(2) RKPK Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026.

(3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rancangan Renja-Perangkat Kabupaten Tahun 2026;
   b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rancangan KUA Tahun 2026 dan rancangan PPAS Tahun 2026; dan
   c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan rancangan APBK Nagan Raya Tahun 2026.

(4). RKPK .....

(4) RKPK Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN NAGAN RAYA.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB VII : PENUTUP.

(5) Perincian Sistematika RKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbeda dengan KUA Tahun 2026 dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRK, maka KUA Tahun 2026 dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRK menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan APBK Nagan Raya Tahun 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Agustus 2025 M
19 Shafar 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR : 579

# KATA PENGANTAR

## *Bupati Nagan Raya*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, serta selawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga panitia pelaksana penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2026 telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

RKPK Nagan Raya Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPK adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan permasalahan aktual yang dihadapi selama kurun waktu satu tahun kedepan, rumusan potensi dan permasalahan tersebut dikaitkan dengan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029.

Kemudian kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen RKPK Nagan Raya Tahun 2026. Semoga penyusunan rencana program dan kegiatan yang kita rumuskan dalam RKPK untuk Tahun 2026, dapat menjadi sebuah harapan dalam upaya membangun daerah yang kita cintai ini, terimakasih.

Suka Makmue, 13 Agustus 2025

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H**

# DAFTAR ISI

Halaman

**DAFTAR ISI** ..... i-1

**DAFTAR GAMBAR** ..... i-5

**DAFTAR TABEL** ..... i-8

**BAB I PENDAHULUAN** ..... I-1
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-7
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPK Nagan Raya Tahun 2026 ..... I-10

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN NAGAN RAYA** ..... II-1
2.1. Kondisi Umum Kabupaten Nagan Raya ..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-4
2.1.1.1. Kondisi Geografis ..... II-4
A. Struktur Tanah ..... II-6
B. Topografi ..... II-7
C. Klimatologi ..... II-7
D. Hidrologi ..... II-9
E. Geologi ..... II-10
F. Penggunaan Lahan ..... II-11
2.1.1.2. Kondisi Demografi ..... II-14
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-16
2.1.2.1 Pengelolaan Kawasan Lindung ..... II-16
2.1.2.2 Pengelolaan Kawasan Budidaya ..... II-17
2.1.2.3 Kawasan Rawan Bencana Alam ..... II-18
2.1.2.4 Mitigasi Bencana ..... II-21
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-23
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-23
A. Pertumbuhan PDRB ..... II-23
B. Pendapatan Per Kapita ..... II-28
C. Laju Inflasi ..... II-29
D. Kemiskinan ..... II-32
E. Indeks Pembangunan Manusia ..... II-38
F. Ketimpangan Pendapatan ..... II-39
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-43
A. Angka Melek Huruf ..... II-43
B. Angka Rata-rata Lama Sekolah ..... II-44
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ..... II-47
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ..... II-47
2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan ..... II-47
A. Pendidikan Islami ..... II-47
B. Keagamaan Syariat Islam ..... II-49
2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ..... II-51

2.1.4.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ..... II-51
A. Pendidikan ..... II-51
B. Kesehatan ..... II-60
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-83
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II-91
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II-92
F. Sosial ..... II-93
2.1.4.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II-98
A. Ketenagakerjaan ..... II-98
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II-98
C. Pangan ..... II-104
D. Pertanahan ..... II-105
E. Lingkungan Hidup ..... II-106
F. Kependudukan dan Pencatatan Sipil .. II-107
G. Perhubungan ..... II-108
H. Komunikasi dan Informatika ..... II-110
I. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-112
J. Penanaman Modal ..... II-120
K. Kepemudaan dan Olah Raga..... II-123
L. Kebudayaan ..... II-124
M. Perpustakaan ..... II-125
2.1.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II-127
2.1.4.3.1. Pariwisata ..... II-127
2.1.4.3.2. Pertanian ..... II-129
2.1.4.3.3. Perkebunan..... II-134
2.1.4.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral..... II-139
2.1.4.3.5. Perdagangan ..... II-140
2.1.4.3.6. Perindustrian ..... II-141
2.1.4.3.7. Tenaga Kerja ..... II-142
2.1.4.3.8. Transmigrasi ..... II-144
2.1.4.3.9. Kelautan dan Perikanan ..... II-147
2.1.4.4. Penunjang Urusan..... II-158
2.1.4.4.1. Perencanaan Pembangunan ..... II-158
2.1.4.4.2. Keuangan ..... II-159
2.1.4.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan ..... II-159
2.1.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan ..... II-161
2.1.4.4.5. Pengawasan ..... II-161
2.1.4.4.6. Sekretariat Dewan ..... II-161
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-162
2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II-162
2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ..... II-163
2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-164
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II-167
2.2. Realisasi Capaian RKPD 2024 dan RPD 2023-2026 ..... II-168
2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Nagan Raya Tahun 2025 ..... II-170

2.3. Permasalahan Pembangunan Nagan Raya ..... II-192
2.3.1. Penguatan Nilai Syariat dan Sosial Budaya yang Inklusif ..... II-192
2.3.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ..... II-194
2.3.3. Mendorong Peningkatan Ekonomi Inklusif ..... II-196
2.3.4. Stabilitas Politik dan Keamanan ..... II-196
2.3.5. Infrastruktur dan Ketahanan Bencana ..... II-196
2.3.6. Tata Kelola Pemerintahan ..... II-196
2.3.7. Satu Data Indonesia (SDI) ..... II-197
2.3.8. Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-198
2.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan ..... II-202
2.4.1. Isu Strategis Pembangunan ..... II-202
2.4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nagan Raya (RPJMK) ..... II-202
2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ..... II-208

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH** ..... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1. Kondisi Dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya ..... III-2
A. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya ..... III-3
B. Produk Domistik Regional Bruto Perkapita ..... III-5
C. Struktur PDRB ..... III-5
D. Tingkat Pengangguran ..... III-7
E. Kemiskinan ..... III-7
F. Angka Kemiskinan ..... III-8
G. Gini Rasio ..... III-9
H. Indeks Pembangunan Manusia ..... III-10
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-11
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Nagan Raya ..... III-12
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-18
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-24

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ..... IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh ..... IV-3
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya ..... IV-5
4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-25
4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026 ..... IV-25
4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 ..... IV-27
4.2.2.1 Tema Pembangunan Aceh Tahun 2026 ..... IV-27
4.2.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 ..... IV-28
4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026 ..... IV-28
4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRK ..... IV-42
4.3 Inovasi Daerah ..... IV-273

**BAB V** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** ..... V-1

**BAB VI** **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** ..... VI-1
6.1. Indikator Makro ..... VI-1
6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah ..... VI-1

**BAB VII** **PENUTUP** ..... VII-1

# DAFTAR GAMBAR


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPK ..... | I-8 |
| Gambar 2.1 | Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan ..... | II-2 |
| Gambar 2.2 | Jumlah Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ..... | II-3 |
| Gambar 2.3 | Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya ..... | II-5 |
| Gambar 2.4 | Luas Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ..... | II-6 |
| Gambar 2.5 | Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya..... | II-11 |
| Gambar 2.6 | Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya ..... | II-13 |
| Gambar 2.7 | Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya ..... | II-20 |
| Gambar 2.8 | Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya ..... | II-21 |
| Gambar 2.9 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Milyar Rupiah) Tahun 2020 - 2024 ..... | II-23 |
| Gambar 2.10 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Milyar Rupiah) Tahun 2020 - 2024 ..... | II-24 |
| Gambar 2.11 | Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen)..... | II-26 |
| Gambar 2.12 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen) Tahun 2020-2024..... | II-27 |
| Gambar 2.13 | PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (Triliun rupiah) Tahun 2020-2024..... | II-29 |
| Gambar 2.14 | Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Meulaboh (Kabupaten Nagan Raya) Tahun 2020-2024..... | II-30 |
| Gambar 2.15 | Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-35 |
| Gambar 2.16 | Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-36 |
| Gambar 2.17 | Indeks Gini Kabupten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional..... | II-41 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.18 | Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 (persen) ..... | II-42 |
| Gambar 2.19 | Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024 (persen) ..... | II-44 |
| Gambar 2.20 | Jumlah Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, Tahun Ajaran 2023/2024 (Unit)..... | II-58 |
| Gambar 2.21 | Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ..... | II-98 |
| Gambar 2.22 | Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-99 |
| Gambar 2.23 | Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kab. Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-100 |
| Gambar 2.24 | Perbandingan Rasio KDRT Kabupaten Nagan Raya ..... | II-103 |
| Gambar 2.25 | Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Persen)..... | II-130 |
| Gambar 2.26 | Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-140 |
| Gambar 2.27 | Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-142 |
| Gambar 2.28 | Capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024..... | II-200 |
| Gambar 2.29 | Goal, Target, dan Indikator dalam 4 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia ..... | II-209 |
| Gambar 3.1 | Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024..... | III-4 |
| Gambar 3.2 | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 Nagan Raya, Provinsi dan Nasional..... | III-4 |
| Gambar 3.3 | PDRB Perkapita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | III-5 |
| Gambar 3.4 | Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Nagan Raya Menurut Lapangan Usaha ADHK (Persen) Tahun 2020-2024 .... | III-6 |
| Gambar 3.5 | Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024 ..... | III-7 |
| Gambar 3.6 | Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | III-8 |
| Gambar 3.7 | Perbandingan Persentase Kemiskinan Tahun 2020-2024..... | III-9 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 3.8 | Indeks Gini Rasio Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | III-10 |
| Gambar 4.1 | 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat | IV-2 |
| Gambar 4.2 | 9 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 | IV-28 |
| Gambar 4.3 | Alur Penyampaian Pokir Pokir Dewan Dalam SIPD | IV-42 |
| Gambar 4.4 | Fokus Pembangunan Nagan Raya Tahun 2026 | IV-45 |

## DAFTAR TABEL

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ..... | II-1 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya ..... | II-2 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Status Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-3 |
| Tabel 2.4 | Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ..... | II-5 |
| Tabel 2.5 | Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Tahun 2024..... | II-8 |
| Tabel 2.6 | Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2024 ..... | II-8 |
| Tabel 2.7 | Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya..... | II-10 |
| Tabel 2.8 | Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya..... | II-10 |
| Tabel 2.9 | Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya ..... | II-12 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kab. Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2024..... | II-14 |
| Tabel 2.11 | Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2024..... | II-15 |
| Tabel 2.12 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagan Raya Per Kecamatan Tahun 2024 ..... | II-15 |
| Tabel 2.13 | Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya ..... | II-17 |
| Tabel 2.14 | Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya ..... | II-18 |
| Tabel 2.15 | Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024 (persen) ..... | II-30 |
| Tabel 2.16 | Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-33 |
| Tabel 2.17 | Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024 ..... | II-37 |
| Tabel 2.18 | Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024..... | II-38 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.19 | Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional ..... | II-40 |
| Tabel 2.20 | Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan Nasional, Tahun 2020-2024 (Tahun)..... | II-46 |
| Tabel 2.21 | Jumlah Penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2020-2024..... | II-47 |
| Tabel 2.22 | Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2020-2024..... | II-50 |
| Tabel 2.23 | Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-50 |
| Tabel 2.24 | Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-52 |
| Tabel 2.25 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-53 |
| Tabel 2.26 | Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-55 |
| Tabel 2.27 | Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya ..... | II-57 |
| Tabel 2.28 | Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun Ajaran 2020-2024 (orang) ..... | II-58 |
| Tabel 2.29 | Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-59 |
| Tabel 2.30 | Kualifikasi Guru di Kab. Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-60 |
| Tabel 2.31 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-61 |
| Tabel 2.32 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-63 |
| Tabel 2.33 | Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-64 |
| Tabel 2.34 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-65 |
| Tabel 2.35 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya | |

| | | |
|---|---|---|
| | Tahun 2020 – 2024 | II-66 |
| Tabel 2.36 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 | II-66 |
| Tabel 2.37 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-68 |
| Tabel 2.38 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-69 |
| Tabel 2.39 | Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-70 |
| Tabel 2.40 | Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-71 |
| Tabel 2.41 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-72 |
| Tabel 2.42 | Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-73 |
| Tabel 2.43 | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-74 |
| Tabel 2.44 | Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-74 |
| Tabel 2.45 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-76 |
| Tabel 2.46 | Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-76 |
| Tabel 2.47 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-77 |
| Tabel 2.48 | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-78 |
| Tabel 2.49 | Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-79 |
| Tabel 2.50 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-80 |
| Tabel 2.51 | Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-81 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.52 | Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 ... | II-82 |
| Tabel 2.53 | Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 (Km) ..... | II-84 |
| Tabel 2.54 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-85 |
| Tabel 2.55 | Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-86 |
| Tabel 2.56 | Proporsi akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-86 |
| Tabel 2.57 | Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023..... | II-88 |
| Tabel 2.58 | Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-89 |
| Tabel 2.59 | Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk ..... Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-90 |
| Tabel 2.60 | Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-91 |
| Tabel 2.61 | Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-91 |
| Tabel 2.62 | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-92 |
| Tabel 2.63 | Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-93 |
| Tabel 2.64 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-94 |
| Tabel 2.65 | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-96 |
| Tabel 2.66 | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-101 |
| Tabel 2.67 | Proporsi Kursi yang Dididuki Perempuan di DPRK Tahun 2020-2024..... | II-102 |
| Tabel 2.68 | Rasio KDRT Tahun 2020-2024..... | II-102 |
| Tabel 2.69 | Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-104 |
| Tabel 2.70 | Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-106 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.71 | Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri Tahun 2020-2024 | II-106 |
| Tabel 2.72 | Jumlah kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | II-107 |
| Tabel 2.73 | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 | II-109 |
| Tabel 2.74 | Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat di Kabupaten Nagan Raya tahun 2019-2023 | II-110 |
| Tabel 2.75 | Kondisi Industri Makanan dan Tembakau di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-113 |
| Tabel 2.76 | Kondisi Industri Kain dan Kulit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-113 |
| Tabel 2.77 | Kondisi Industri Kayu di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-114 |
| Tabel 2.78 | Kondisi Industri dari Besi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-115 |
| Tabel 2.79 | Kondisi Industri Dari Bahan Galian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-115 |
| Tabel 2.80 | Kondisi Industri Dari Kertas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 (Unit) | II-116 |
| Tabel 2.81 | Kondisi Industri Barang Lainnya di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-116 |
| Tabel 2.82 | Kondisi Industri Jasa di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit) | II-117 |
| Tabel 2.83 | Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 | II-118 |
| Tabel 2.84 | Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 | II-120 |
| Tabel 2.85 | Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2020-2024 | II-120 |
| Tabel 2.86 | Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2019-2023 | II-121 |
| Tabel 2.87 | Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 | II-123 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.88 | Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 ..... | II-124 |
| Tabel 2.89 | Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022..... | II-125 |
| Tabel 2.90 | Jumlah Pustaka Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 (Unit)..... | II-126 |
| Tabel 2.91 | Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 ..... | II-127 |
| Tabel 2.92 | Jumlah Sarana/ Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-129 |
| Tabel 2.93 | Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-130 |
| Tabel 2.94 | Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-132 |
| Tabel 2.95 | Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ..... | II-133 |
| Tabel 2.96 | Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024 (Ekor)..... | II-133 |
| Tabel 2.97 | Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024..... | II-135 |
| Tabel 2.98 | Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024..... | II-136 |
| Tabel 2.99 | Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024 ..... | II-137 |
| Tabel 2.100 | Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024 ..... | II-138 |
| Tabel 2.101 | Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2018-2022..... | II-139 |
| Tabel 2.102 | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin ..... | II-144 |
| Tabel 2.103 | Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-145 |
| Tabel 2.104 | Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Lokal Yang Menetap | |

| | | |
|---|---|---|
| | Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-145 |
| Tabel 2.105 | Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ..... | II-146 |
| Tabel 2.106 | Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2020-2024 ..... | II-148 |
| Tabel 2.107 | Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-149 |
| Tabel 2.108 | Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-150 |
| Tabel 2.109 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-152 |
| Tabel 2.110 | Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023 ..... | II-153 |
| Tabel 2.111 | Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-154 |
| Tabel 2.112 | Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-154 |
| Tabel 2.113 | Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2024 ..... | II-156 |
| Tabel 2.114 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-157 |
| Tabel 2.115 | Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 ..... | II-158 |
| Tabel 2.116 | Profil Kepegawaian dan Pengembangan ASN Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 ..... | II-161 |
| Tabel 2.117 | Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2019-2023 ..... | II-163 |
| Tabel 2.118 | Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2019-2023 ..... | II-164 |
| Tabel 2.119 | Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya ..... | II-165 |
| Tabel 2.120 | Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2019-2023 (%) ..... | II-168 |
| Tabel 2.121 | Data Realisasi Capaian Kinerja RKPK Nagan Raya Tahun 2025 ..... | II-171 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.122 | Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 | II-180 |
| Tabel 2.123 | Capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 | II-199 |
| Tabel 2.124 | Angka Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2025 | II-205 |
| Tabel 3.1 | Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2026 | III-2 |
| Tabel 3.2 | Perbandingan IPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 | III-11 |
| Tabel 3.3 | Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya | III-13 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Perusahaan Dana TJSLP/ CSR Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 | III-17 |
| Tabel 3.5 | Target Tahun 2025 dan Perencanaan Tahun 2026 Kabupaten Nagan Raya | III-23 |
| Tabel 3.6 | Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dan 2025 | III-24 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 s.d Tahun 2025 | III-26 |
| Tabel 4.1 | Keselarasan Antara Visi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029 | IV-4 |
| Tabel 4.2 | Keselarasan Antara Misi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029 | IV-4 |
| Tabel 4.3 | Penyelarasan Visi | IV-6 |
| Tabel 4.4 | Penyelarasan antar Misi RPJMN, RPJMA, RPJP dan Misi Bupati Nagan Raya | IV-7 |
| Tabel 4.5 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | IV-9 |
| Tabel 4.6 | Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada masing-masing tujuan Tahun 2023-2026 | IV-11 |
| Tabel 4.7 | Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 | IV-26 |
| Tabel 4.8 | Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026 | IV-27 |
| Tabel 4.9 | Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026 | IV-29 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 4.10 | Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2025-2030 | IV-31 |
| Tabel 4.11 | Laporan Kamus Usulan Pokir Tahun 2026 | IV-43 |
| Tabel 4.12 | Daftar Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 | IV-45 |
| Tabel 4.13 | Daftar Kegiatan/ Subkegiatan untuk Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 | IV-47 |
| Tabel 4.14 | Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dengan Prioritas Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2026 | IV-80 |
| Tabel 4.15 | Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPK Nagan Raya Pelaksanaan Tahun 2026 dan RKPK Nagan Raya Tahun 2026 | IV-166 |
| Tabel 4.16 | Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMK/ RPK Nagan Raya Pelaksanaan Tahun 2026 dan RKPK Nagan Raya Tahun 2026 | IV-251 |
| Tabel 4.17 | Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 | IV-276 |
| Tabel 5.1 | Rekapitulasi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan pada OPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 | V-2 |
| Tabel 5.2 | Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Nagan Raya Tahun 2026 | V-5 |
| Tabel 6.1 | Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026-2030 | VI-1 |
| Tabel 6.2 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024-2026 | VI-3 |
| Tabel 6.3 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026-2030 | VI-4 |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026 (BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR 579)

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPK disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPK disusun melalui persiapan penyusunan RKPK, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan akhir RKPK dan penetapan RKPK

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPK mempunyai kedudukan yang strategis sebagai berikut :

1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan turunan dari Rancangan RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029;
2. RKPK memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK);
3. RKPK merupakan acuan Penjabat Bupati Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);

4. RKPK merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun 2026.

Penyusunan RKPK Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya tahun 2025-2029. Disamping itu, perumusan RKPK Nagan Raya Tahun 2026 juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterkaitan antara sasaran dan prioritas Nagan Raya dalam RKPK Nagan Raya Tahun 2026 dengan sasaran dan Prioritas Aceh dan Prioritas Nasional;
2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya tahun 2025-2029;
3. Konsistensi antara Prioritas Nagan Raya dengan permasalahan, isu strategis, program prioritas serta pagu anggaran;
4. Tersedianya dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas nasional.

Bedasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Nagan Raya, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 sebesar 4,38 persen lebih rendah dari Provinsi Aceh yaitu sebesar 4.66 persen dan dibawah angka pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5.03 persen. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Nagan Raya pada Tahun 2024 sebesar 73.10 dan masuk dalam kategori "tinggi". Pencapaian ini meningkat 4,95 poin dari indeks Tahun 2018 yang tercatat 68.15. Angka tersebut menunjukkan angka IPM Nagan Raya berada di bawah rata-rata Aceh pada Tahun 2024 yaitu sebesar 75,36 dan Nasional 75,02. Indeks Gini Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dalam kategori dengan ketimpangan rendah yaitu sebesar 0.159 sedangkan Tahun 2024 untuk Provinsi dan Nasional masing-masing sebesar 0.294 dan 0.381*. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebesar 5.22 persen, lebih rendah dari tingkat Provinsi sebesar 5,75 persen dan lebih tinggi dari tingkat Nasional 4,91 persen. Untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 16,94 persen masih jauh tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 12,64 persen dan Nasional sebesar 8,57 persen pada Tahun 2024.

Disamping itu, untuk mendukung koordinasi dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan, penyusunan RKPA Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPK Nagan Raya tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
30. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
32. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68); dan
33. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh;
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus;
36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035;
37. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045;

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

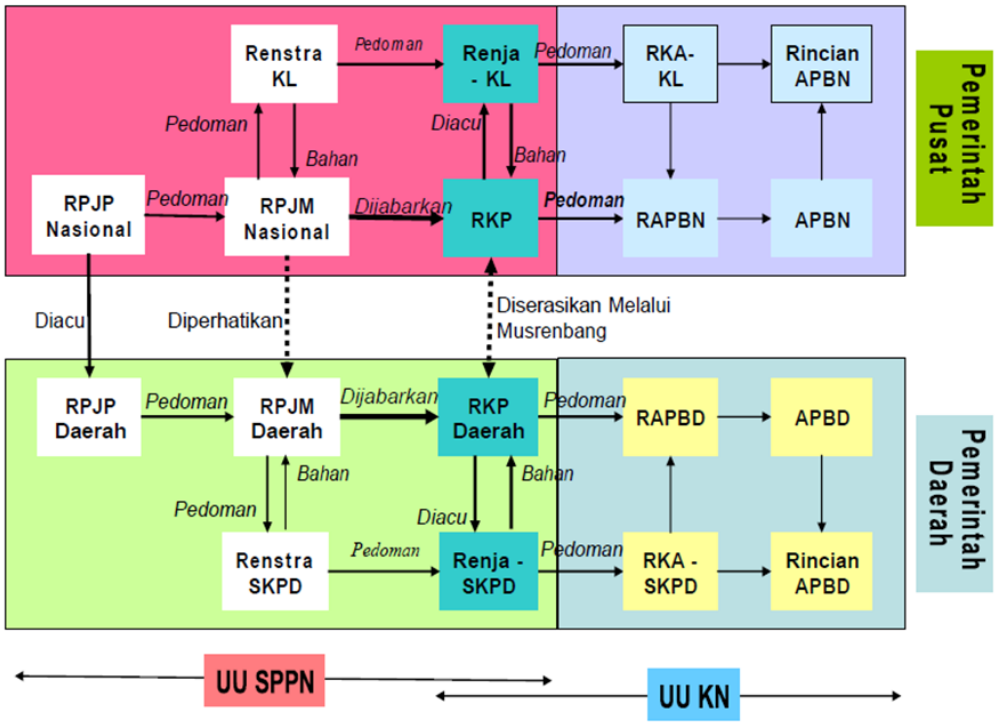
Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD, dimana Renja SKPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPK Nagan Raya Tahun 2026 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya,

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten, yang terdiri atas RPJPK, RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, dan Renja SKPK. Perencanaan pembangunan kabupaten juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan kabupaten. Untuk lebih jelasnya hubungan RKPK dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1**

**Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPK**




a. Hubungan dengan RKP dan RKPK Tahun 2026

RKPK Nagan Raya Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKPA dan RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

b. Hubungan dengan RKPK dan RKPA

RKPK Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029 yang meliputi sasaran, indicator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas Pembangunan dan target indikator kinerja urusan.

c. Hubungan dengan RPJMK

Rancangan RPJMK Nagan Raya 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam melakukan penyusunan dokumen RKPK Tahun 2026.

d. Hubungan dengan Renja SKPK Nagan Raya Tahun 2026

RKPK Nagan Raya Tahun 2026 menjadi pedoman bagi SKPK dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPK Tahun 2026. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif Tahun 2026.

e. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBK 2026

RKPK Nagan Raya Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan Raya (R-APBK) Tahun 2029. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBK Tahun 2026 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPK Tahun 2026.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPK Nagan Raya Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagan Raya, DPRK Nagan Raya, Dunia Usaha dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2026;
2. Memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
3. Pencerminan komitmen Pemerintah Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPK Nagan RayaTahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPK) Tahun 2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBK Tahun 2026;
3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;
4. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam Kebijakan Umum APBK 2026; dan
5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPK Nagan Raya Tahun 2026

RKPK Nagan Raya Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**,

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika dokumentasi RKPK serta maksud dan tujuan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN NAGAN RAYA**,

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan permasalahan pembangunan daerah, menggambarkan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat ,aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar-dasar analisis. Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen rancangan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029 dan dokumen RKPK tahun berjalan sebagai bahan acuan serta memuat permasalahan pembangunan daerah.

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**,

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta target tahun rencana yang anatara lain

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah daerah, pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2026 .

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,**

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 baik tingkat provinsi maupun kewilayahan kabupaten/kota. Sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPK, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi program prioritas dan kegiatan SKPK berdasarkan Prioritas.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPK) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029. Rencana program dan kegiatan prioritas ini harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan tentang matriks renja dari program dan kegiatan SKPK tahun 2026.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,**

Memuat Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN NAGAN RAYA

## 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Kabupaten yang beribukota Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong.

Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.021,85 $Km^2$ atau 29,00% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,26 $Km^2$ atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

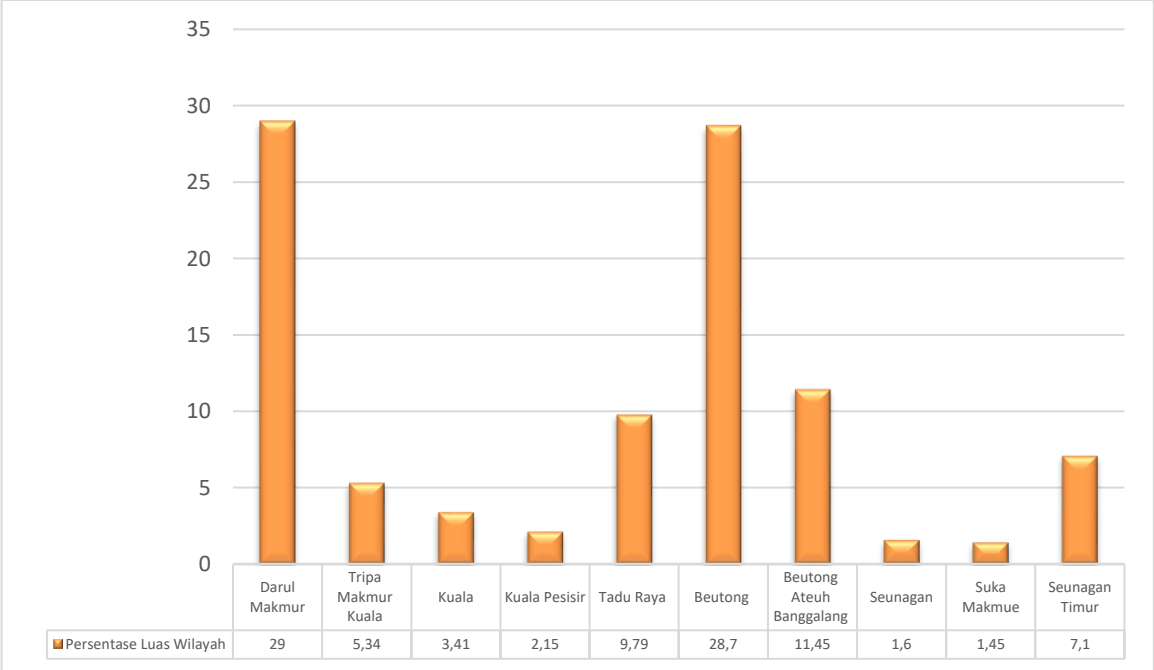
Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 2.1 dan 2.2; Gambar 2.1 dan 2.2.

**Tabel 2.1**
**Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya**

| KECAMATAN | IBU KOTA | LUAS WILAYAH ($KM^2$) | PERSENTASE LUAS WILAYAH |
|---|---|---|---|
| Darul Makmur | Alue Bilie | 1.027,93 | 29,00 |
| Tripa Makmur | Kabu | 189,41 | 5,34 |
| Kuala | Ujong Fatihah | 120,18 | 3,41 |
| Kuala Pesisir | Padang Rubek | 76,34 | 2,15 |
| Tadu Raya | Alue Bata | 347,19 | 9,79 |
| Beutong | Keude Seumot | 1.017,32 | 28,70 |
| Beutong Ateuh Banggalang | Kuta Teungoh | 405,92 | 11,45 |
| Seunagan | Jeuram | 56,73 | 1,60 |
| Suka Makmue | Lueng Baro | 51,26 | 1,45 |
| Seunagan Timur | Keude Linteung | 251,61 | 7,10 |
| ***Nagan Raya*** | **Suka Makmue** | **3.544,90** | **100,00** |

*Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2024*

**Gambar 2.1**
**Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan**



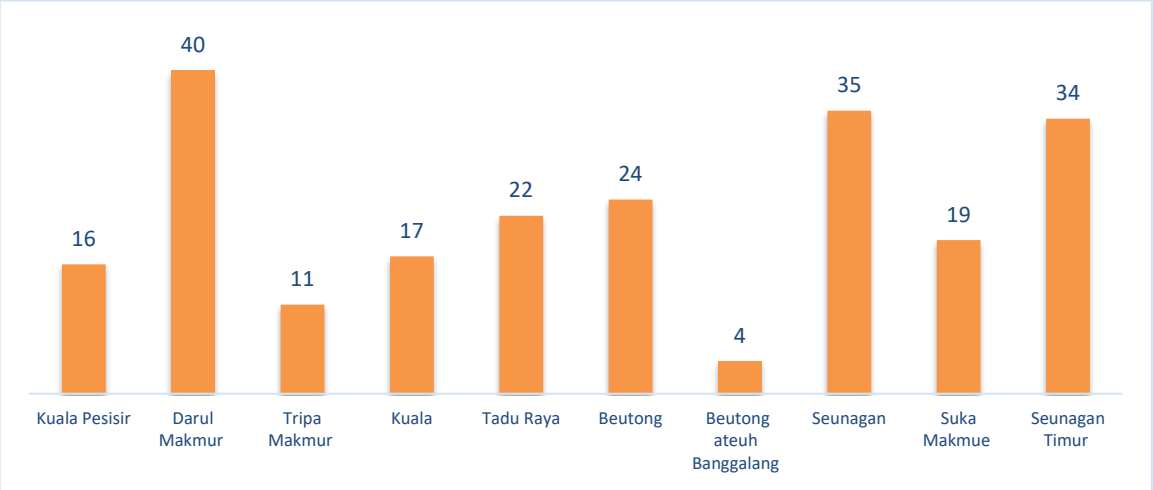

*Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah)*

**Tabel 2.2**
**Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan**
**Kabupaten Nagan Raya**

| No | Kecamatan | Kemukiman | Gampong/Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Pesisir | 3 | 16 |
| 2 | Darul Makmur | 5 | 40 |
| 3 | Tripa Makmur | 2 | 11 |
| 4 | Kuala | 2 | 17 |
| 5 | Tadu Raya | 2 | 22 |
| 6 | Beutong | 4 | 24 |
| 7 | Beutong ateuh Banggalang | 1 | 4 |
| 8 | Seunagan | 5 | 35 |
| 9 | Suka Makmue | 2 | 19 |
| 10 | Seunagan Timur | 4 | 34 |
| **Jumlah Total** | | **30** | **222** |

*Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

**Gambar 2.2**
**Jumlah Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya**




*Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

Dari 10 (sepuluh) wilayah administrasi kecamatan jumlah gampong terbanyak berada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 40 (empat puluh) gampong dan paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebanyak 4 (empat) gampong). Berdasarkan Indeks Membangun Desa (IMD), Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan terhadap desa yang statusnya sangat tertinggal dan tertinggal. Pada Tahun 2024, Kab. Nagan Raya tidak lagi desa dengan status tersebut, namun desa yang mandiri justru masuk ke kategori maju/berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Nagan Raya melakukan berbagai kolaborasi dan inovasi termasuk pemanfaatan dana desa yang baik untuk mengembangkan potensi desa/ekonomi lokal sehingga mendorong kemanjuan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**
**Rekapitulasi Status Gampong Dalam**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | STATUS DESA | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandiri | - | - | - | 10 | - |
| 2 | Maju | 16 | 15 | 16 | 56 | 52 |
| 3 | Berkembang | 107 | 72 | 109 | 125 | 170 |
| 4 | Tertinggal | 92 | 119 | 90 | 30 | - |
| 5 | Sangat Tertinggal | 7 | 16 | 7 | 1 | - |
| **Jumlah** | | | **222** | **222** | **222** | **222** |

*Sumber: Kemendes, 2025*

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1 Kondisi Geografis

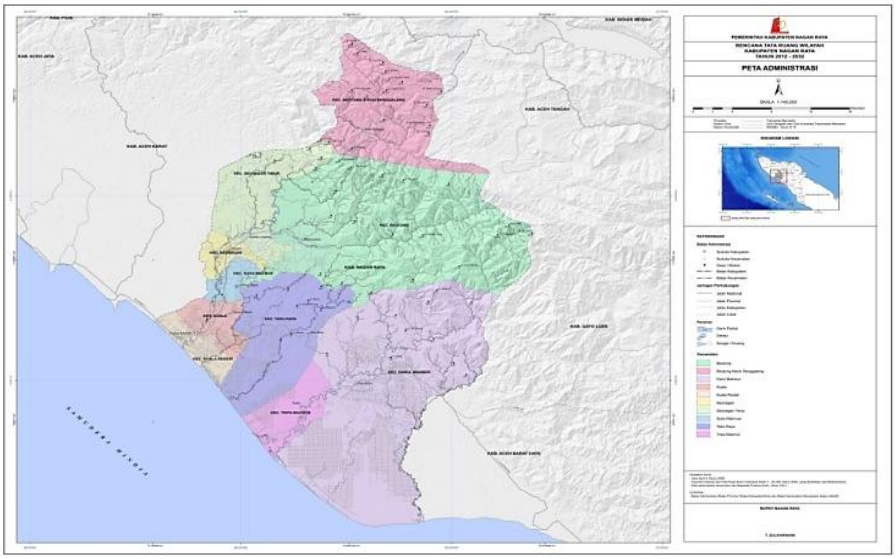
Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43′ 50″ – 04° 37′ 55″ Lintang Utara (LU) dan 96° 11′ 23″ – 96° 47′ 58″ Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 3,544,90 $Km^2$atau 354,490Ha atau sebesar 6,25 % dari luas Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan batas – batas wilayah administratif diatas. Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan. Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat – wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah.

Selain itu, posisi Kabupaten Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara.

**Gambar 2.3**
**Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya**



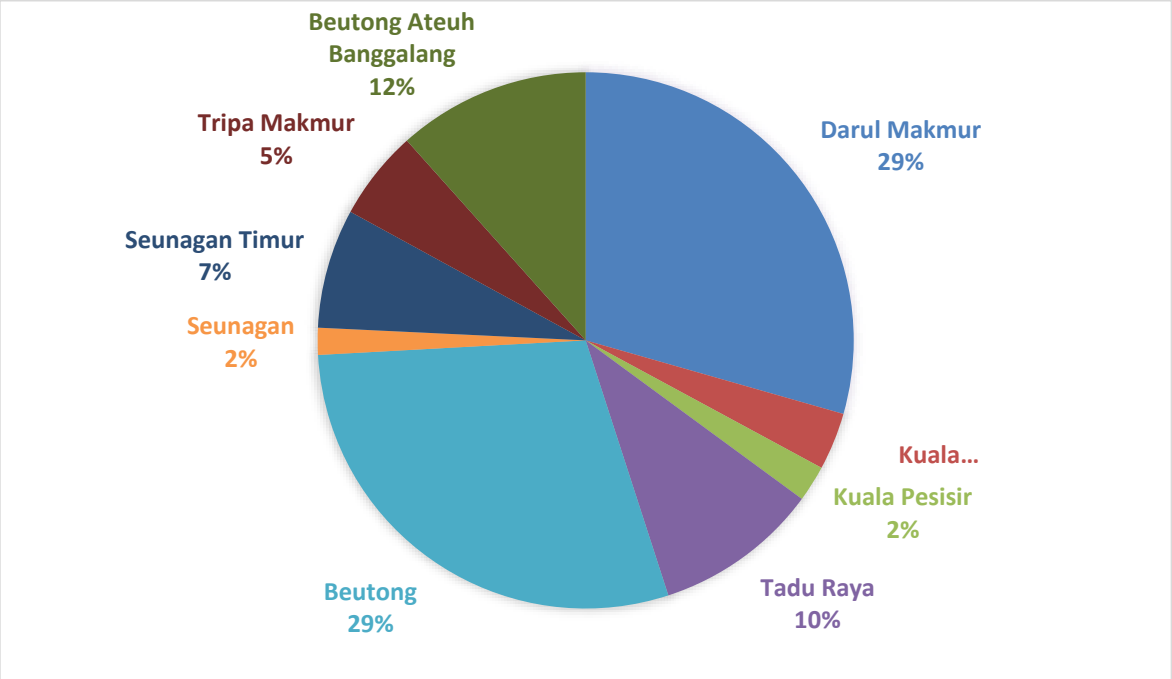

*Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035*

**Tabel 2.4**
**Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | IBUKOTA KECAMATAN | LUAS TOTAL AREA (km²) | PERSENTASE LUAS (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darul Makmur | Alue Bilie | 1.027,93 | 29,00 |
| 2 | Kuala | Ujong Fatihah | 120,89 | 3,41 |
| 3 | Kuala Pesisir | Padang Rubek | 76,34 | 2,15 |
| 4 | Tadu Raya | Alue Bata | 347,19 | 9,79 |
| 5 | Beutong | Keude Seumot | 1.017,32 | 28,70 |
| 6 | Seunagan | Jeuram | 56,73 | 1,60 |
| 7 | Seunagan Timur | Keude Linteung | 251,61 | 7,10 |
| 8 | Tripa Makmur | Kabu | 189,41 | 5,34 |
| 9 | Beutong Ateuh Banggalang | Kuta Teungoh | 405,92 | 11,45 |
| **Nagan Raya** | | **Suka Makmue** | **3.544,90** | **100,00** |

*Sumber: Nagan Raya dalam Angka, 2025*

**Gambar 2.4**
**Luas Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya**




*Sumber: Nagan Raya dalam Angka, 2025*

Bila dilihat dari struktur dan jenis,tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari jenis tanah Podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out Croups, Renzina, Litosol, Mediterandan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah ini berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi.

## A. Struktur Tanah

Bila dilihat dari struktur dan jenis,tanah diKabupaten Nagan Raya terdiri dari jenistanah Podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out Croups, Renzina,Litosol, Mediterandan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah ini berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan. Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa

jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi.

## B. Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0–2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64,636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2) Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1,525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3) Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10,196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
4) Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61,150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5) Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas ± 4,275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
6) Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas ± 2,180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

## C. Klimatologi

Pada tahun 2024, Kabupaten Nagan Raya mengalami kondisi cuaca yang cukup stabil, dengan rata-rata hari hujan mencapai 16 hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sering hujan, intensitas curah hujan tetap signifikan sepanjang tahun. Suhu rata-rata di Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 27,5°C, yang menunjukkan iklim tropis yang hangat dan lembap. Di samping itu, tingkat kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Nagan Raya cukup tinggi, yaitu 89,5%, mencerminkan atmosfer yang cenderung lembap sepanjang tahun. Kondisi suhu yang relatif konstan dan kelembaban yang tinggi berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang subur, mendukung pertumbuhan pada sektor pertanian.

Cuaca yang dominan lembap juga berdampak pada pola kehidupan masyarakat, yang terbiasa dengan iklim yang hangat dan kadang disertai hujan. Meskipun jumlah hari hujan tidak terlalu banyak, curah hujan yang terjadi cukup memberi dampak pada kualitas udara dan lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, Kabupaten Nagan Raya pada 2024

menghadapi cuaca yang relatif hangat dan lembap, tetapi tetap mendukung kehidupan masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam.

**Tabel 2.5**
**Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Tahun 2024**

| Bulan | Suhu (C) | | | Kelembaban (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Januari | 23,7 | 27,2 | 32,0 | 70,0 | 89,0 | 98,0 |
| Februari | 24,0 | 28,2 | 32,6 | 73,0 | 88,0 | 97,0 |
| Maret | 24,2 | 27,8 | 32,0 | 68,0 | 89,0 | 98,0 |
| April | 24,6 | 28,2 | 32,3 | 76,0 | 90,0 | 98,0 |
| Mei | 24,5 | 28,0 | 32,4 | 75,0 | 90,0 | 98,0 |
| Juni | 23,8 | 27,7 | 32,8 | 70,0 | 89,0 | 98,0 |
| Juli | 23,5 | 27,6 | 31,1 | 69,0 | 88,0 | 97,0 |
| Agustus | 23,4 | 26,7 | 31,7 | 77,0 | 91,0 | 97,0 |
| September | 23,4 | 26,9 | 31,7 | 73,0 | 90,0 | 97,0 |
| Oktober | 23,1 | 27,0 | 31,7 | 70,0 | 89,0 | 97,0 |
| November | 23,6 | 27,0 | 31,4 | 71,0 | 90,0 | 97,0 |
| Desember | 23,5 | 26,9 | 31,2 | 74,0 | 91,0 | 97,0 |

*Sumber : Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2025*

**Tabel 2.6**
**Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2024**

| Bulan | Jumlah Curah Hujan | Jumlah Hari Hujan | Penyinaran Matahari |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 16 |
| Januari | 450,0 | 15 | 73,6 |
| Februari | 390,0 | 15 | 81,3 |
| Maret | 435,0 | 21 | 69,1 |
| April | 407,0 | 19 | 74,6 |
| Mei | 516,0 | 19 | 63,4 |
| Juni | 231,0 | 10 | 70,3 |
| Juli | 34,0 | 6 | 74,0 |
| Agustus | 462,0 | 20 | 55,6 |
| September | 312,0 | 17 | 54,0 |
| Oktober | 475,0 | 17 | 73,3 |
| November | 274,0 | 18 | 64,1 |
| Desember | 607,0 | 16 | 61,5 |

*Sumber : Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2024*

## D. Hidrologi

Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Seumayam, Krueng Tadu dan Krueng Seuneuam.

Kabupaten Nagan Raya dialiri dua sungai yang relatif besar seperti Krueng Seunagan dan Krueng Tripa. Sebagai daerah hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan terutama di daerah hilir. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karakteristik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya di daerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah).

Danau yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau, sebagai berikut:

- Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
- Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
- Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
- Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha.

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan air tanah di Kabupaten Nagan Raya seluas 205.343,46 ha. Rincian CAT terlihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.7**
**Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya**

| NO | CAT | KABUPATEN | KECAMATAN | LUAS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulaboh | Nagan Raya | Darul Makmur | 73.547,25 |
| | | | Kuala | 12.089,35 |
| | | | Kuala Pesisir | 6.109,97 |
| | | | Tadu Raya | 34.420,65 |
| | | | Beutong | 24.041,59 |
| | | | Seunagan | 5.673,31 |
| | | | Seunagan Timur | 23.281,39 |
| | | | Tripa Makmur | 18.486,39 |
| 2 | Telege | Nagan Raya | Beutong Ateuh Banggalang | 2.537,25 |

*Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya*

Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.8**
**Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya**

| NO | KECAMATAN | TITIK LOKASI SUMBER AIR BAKU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUNGAI | RAWA | DANAU | AIR TERJUN | MATA AIR | EMBUNG |
| 1 | Darul Makmur | 10 | - | - | 1 | 2 | - |
| 2 | Kuala | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Kuala Pesisir | 4 | 2 | - | - | - | 1 |
| 4 | Tadu Raya | 8 | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Beutong | 9 | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Seunagan | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Suka Makmue | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Seunagan Timur | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 9 | Tripa Makmur | 4 | - | - | - | - | - |
| 10 | Beutong Ateuh Banggalang | 1 | - | - | 1 | 1 | - |

*Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016-2026*

## E. Geologi

Jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah Alluvial, Podsolik coklat, Grumosol, Regosol, Podsolik merah kuning, Andosol, Litosol, Mediteran, Organosol, dan Podsolik. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis

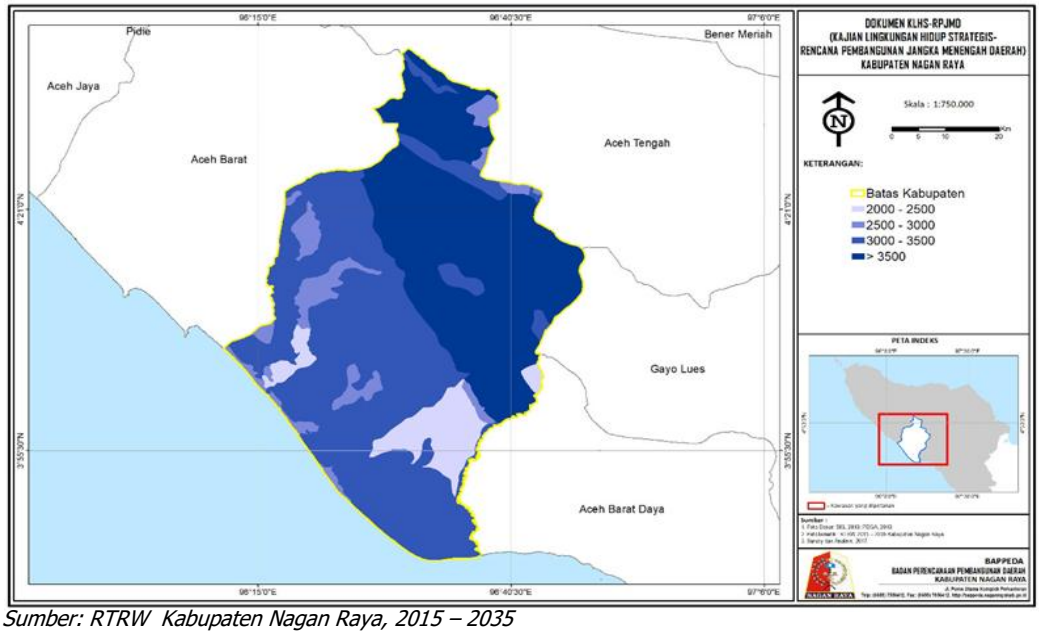
tanah mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

## F. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah diklasifikasikan peruntukkannya sesuai perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung dan kawasan lindung gambut seluas 129.103,91 Ha, sedangkan selebihnya dari total luas daerah tersebut merupakan kawasan budidaya. Secara umum pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya digunakan untuk keperluan areal permukiman, perkebunan, persawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Alokasi ruang terbesar berupa hutan lindung yaitu mencapai luas 129.103,91 Ha atau 36,41 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 54.662,31 Ha atau 15,42 persen. Sedangkan seluas 170.723,78 Ha atau 48,16 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan kebutuhan penggunaaan lahan oleh masyarakat setempat. Berikut di bawah ini gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya yang ditampilkan dalam bentuk Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya.

**Gambar 2.5**
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya**




*Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035*

Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Kabupaten Nagan Raya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

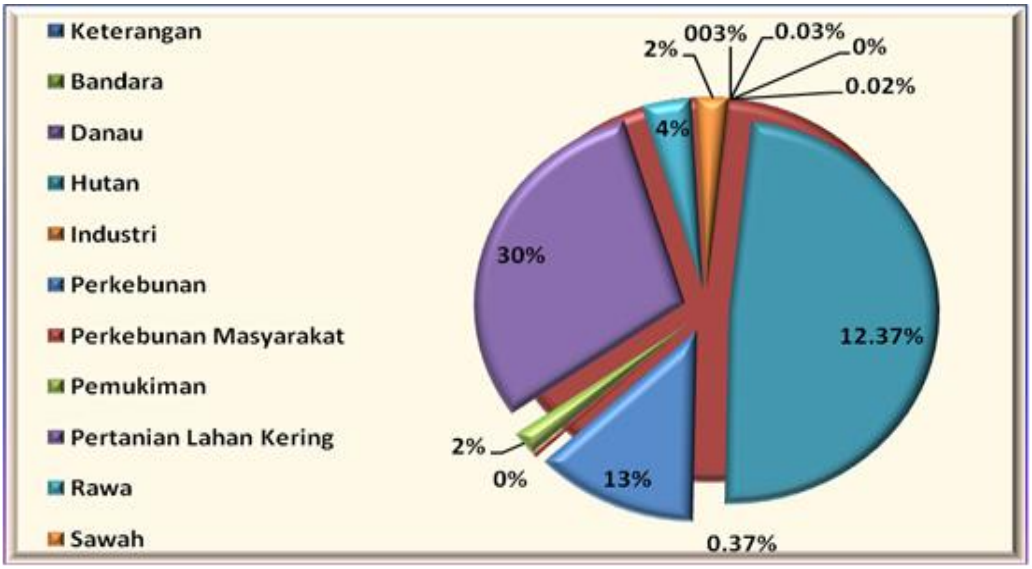
Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh hutan, perkebunan dan pertanian lahan kering. Sesuai dengan kondisi penggunaan lahan untuk Bandara sebesar 103,25 Ha atau 0,03%, danau sebesar 114,89 Ha atau 0,03 %, hutan sebesar 163.459,49 Ha atau 46,11 %, industri sebesar 334,80 Ha atau 0,09 %, perkebunan sebesar 54.417,29 Ha atau 15,35 %, perkebunan masyarakat 32.964,54 Ha atau 9,30%, pemukiman sebesar 8.517,18 Ha atau 2,40%, pertanian lahan kering 61.520,71 atau 17,35%, rawa sebesar 13.271,65 Ha atau 3,74%, sawah 12.777,64 Ha atau 3,60%, sungai 2.194,20 Ha atau 0,62% dan tanah terbuka 4.815,49 Ha atau 1,36 % dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut dan gambar berikut ini.

**Tabel 2.9**
**Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya**

| NO | KETERANGAN | LUAS LAHAN (HA) | PERSENTASE LUAS LAHAN (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandara | 103,25 | 0,03 |
| 2 | Danau | 114,89 | 0,03 |
| 3 | Hutan | 163.459,49 | 46,11 |
| 4 | Industri | 334,80 | 0,09 |
| 5 | Perkebunan | 54.417,29 | 15,35 |
| 6 | Perkebunan Masyarakat | 32.964,54 | 9,30 |
| 7 | Pemukiman | 8.517,18 | 2,40 |
| 8 | Pertanian Lahan Kering | 61.520,71 | 17,35 |
| 9 | Rawa | 13.271,65 | 3,74 |
| 10 | Sawah | 12.777,64 | 3,60 |
| 11 | Sungai | 2.194,20 | 0,62 |
| 12 | Tanah Terbuka | 4.815,49 | 1,36 |
| **Jumlah** | | **354.491,13** | **100,00** |

*Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

**Gambar 2.6**
**Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya**




*Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

Lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas 24.759,2 Ha yang terdiri dari :

a. Kecamatan Darul Makmur dengan luas 2.241,3 Ha; (Sawah 94,3 Ha, Tegalan 2.147 Ha;)
b. Kecamatan Tripa Makmur dengan luas 1.500,8 Ha; (Sawah 77,8 Ha, Tegalan 1.423 Ha);
c. Kecamatan Kuala dengan luas 2.236,2 Ha; (Sawah 822,2 Ha, Tegalan 1414 Ha);
d. Kecamatan Kuala Pesisir dengan luas 863,7 Ha; (Sawah 146,7 Ha, Tegalan 717 Ha);
e. Kecamatan Tadu Raya dengan luas 3.539,1 Ha; (Sawah 326,1 Ha, Tegalan 3213 Ha);
f. Kecamatan Beutong dengan luas 3.539,1 Ha; (Sawah 1.536,9 Ha, tegalan 4.368 Ha);
g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan luas 961,9 Ha; (Sawah 342,9 Ha, 618 Ha);
h. Kecamatan Seunagan dengan luas 1.757,1 Ha; (Sawah 1044,1 Ha, Tegalan 713 Ha);
i. Kecamatan Suka Makmue dengan luas 2.247,1Ha; (Sawah 1.541,1 Ha, Tegalan 706 Ha);
j. Kecamatan Seunagan Timur dengan luas 3.507,3 Ha; (Sawah 1.694,3 Ha, Tegalan 1813 Ha).

### 2.1.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2023 sebanyak 176.461 jiwa, sementara itu jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2023 sebesar 101,46%. Jika dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 51.655 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 2.112 jiwa.

Selanjutnya, untuk kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2023 mencapai 29,47 %. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan yang mencapai 290. Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.10**
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2024**

| KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2022-2023 |
|---|---|---|
| Darul Makmur | 51.655 | 3,11 |
| Tripa Makmur | 9.695 | 2,80 |
| Kuala | 23.237 | 1,73 |
| Kuala Pesisir | 18.251 | 1,77 |
| Tadu Raya | 15.592 | 2,00 |
| Beutong | 14.340 | 1,67 |
| Beutong Ateuh Banggalang | 2.112 | 2,03 |
| Seunagan | 16.449 | 0,43 |
| Suka Makmue | 10.330 | 1,12 |
| Seunagan Timur | 14.800 | 1,67 |
| **NAGAN RAYA** | **176.461** | **1,81** |

*Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2024*

**Tabel 2.11**
**Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2024**

| KECAMATAN | PERSENTASE PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK |
|---|---|---|
| Darul Makmur | 29,39 | 52,00 |
| Tripa Makmur | 5,49 | 82,00 |
| Kuala | 13,08 | 310,00 |
| Kuala Pesisir | 10,26 | 54,00 |
| Tadu Raya | 8,89 | 16,00 |
| Beutong | 8,16 | 206,00 |
| Beutong Ateuh Banggalang | 1,23 | 43,00 |
| Seunagan | 9,28 | 67,00 |
| Suka Makmue | 5,81 | 56,00 |
| Seunagan Timur | 8,30 | 37,00 |
| **NAGAN RAYA** | **100,00** | **51,09** |

*Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2025*

**Tabel 2.12**
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagan Raya Per Kecamatan Tahun 2024**

| KECAMATAN | RASIO JENIS KELAMIN |
|---|---|
| Darul Makmur | 103,13 |
| Tripa Makmur | 100,52 |
| Kuala | 102,40 |
| Kuala Pesisir | 103,76 |
| Tadu Raya | 102,44 |
| Beutong | 99,72 |
| Beutong Ateuh Banggalang | 101,53 |
| Seunagan | 99,26 |
| Suka Makmue | 96,02 |
| Seunagan Timur | 99,17 |
| **NAGAN RAYA** | **101,71** |

*Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2025*

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

#### 2.1.2.1 Pengelolaan Kawasan Lindung

Sebagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan Kawasan Lindung, sehingga dalam pemanfaatan kawasan harus mengacu pada pola pemanfaatan ruang kawasan lindung yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan Kawasan Lindung di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk:

a) Mengarahkan fungsi kawasan lindung yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana;
b) Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air;
c) Mengendalikan pemanfatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Nagan Raya seluas 126.108.96 Ha adalah:

a) Kawasan lindung

   Kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya terdapat wilayah Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 Ha berada di Gampong Pulo Teungoh; Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 Ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang; Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 Ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk dan Kuta Teungoh; dan Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 Ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem dan Krueng Seumanyam.
b) Kawasan perlindungan setempat

   Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam tiga jenis yaitu kawasan sempadan pantai seluas 497,45 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 8.961,28 Ha dan kawasan sekitar danau 156,71 Ha.

### 2.1.2.2 Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.13

**Tabel 2.13**
**Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya**
**Kabupaten Nagan Raya**

| No | Uraian | Luas Areal Kawasan Lindung(Ha) |
|---|---|---|
| **Kawasan Hutan Lindung** | | |
| **1** | Kawasan Hutan Lindung | 126.108,96 |
| **Kawasan Yang Memberi PerlindunganKawasan Bawahnya** | | |
| **1** | Kawasan Rawa gambut | 11.380,71 |
| **Kawasan Perlindungan Setempat** | | |
| **1** | Kawasan Spamdan Pantai | 497,45 |
| **2** | Kawasan Spamdan Sungai | 8.961,28 |
| **3** | Kawasan sekitar Danau | 156,71 |
| **Kawasan Hutan Produksi** | | |
| **1** | Hutan Produksi | 16.348.253 |
| **2** | Hutan Produksi Terbatas | 6.637.598 |
| **3** | Hutan Produksi Koversi | 4.658,14 |
| **Kawasan Rawan Bencana Alam** | | |
| **1** | Kawasan Rawan Longsor | 6.523,94 |
| **2** | Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi | 15.702,08 |
| **3** | Kawasan Rawan Kebakaran | 1.363,60 |
| **4** | Kawasan Rawan Banjir | 92.352,28 |
| **Kawasan Pertanian** | | |
| **1** | Kawasan Lahan Basah | 12.777,64 |
| **2** | Kawasan Lahan Kering | 64.520,71 |
| **Kawasan Perkebunan** | | |
| **1** | Perkebunan Besar | 54.417,29 |
| **2** | Perkebunan Rakyat | 2.064,40 |
| **Kawasan Peternakan** | | |
| **1** | Peternakan Besar | 113,33 |

*Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Status Penguasaan Lahan Budidaya di wilayah Kabupaten Nagan Raya saat ini yang terindentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH). Perkebunan Besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran.

**Tabel 2.14**
**Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya**

| NO | KECAMATAN | KAWASAN HUTAN LINDUNG | | KAWASAN BUDIDAYA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (HA) | (%) | (HA) | (%) |
| 1 | Darul Makmur | 21.486.159 | 16,6 | 4.608,15 | 29,69 |
| 2 | Kuala | - | - | - | - |
| 3 | Kuala Pesisir | - | - | - | - |
| 4 | Tadu Raya | - | - | - | - |
| 5 | Beutong | 75.149.446 | 58,2 | 5.986,29 | 37,79 |
| 6 | Seunagan | - | - | - | - |
| 7 | Suka Makmue | - | - | - | - |
| 8 | Seunagan Timur | 2.446.702 | 1,9 | 5.246,36 | 33,12 |
| 9 | Beutong Ateuh Banggalang | 30.026.599 | 23,3 | 5.246,36 | 33,12 |
| 10 | Tripa Makmur | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **129.108,96** | **100** | **1.584.080** | **100** |

*Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

### 2.1.2.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam).

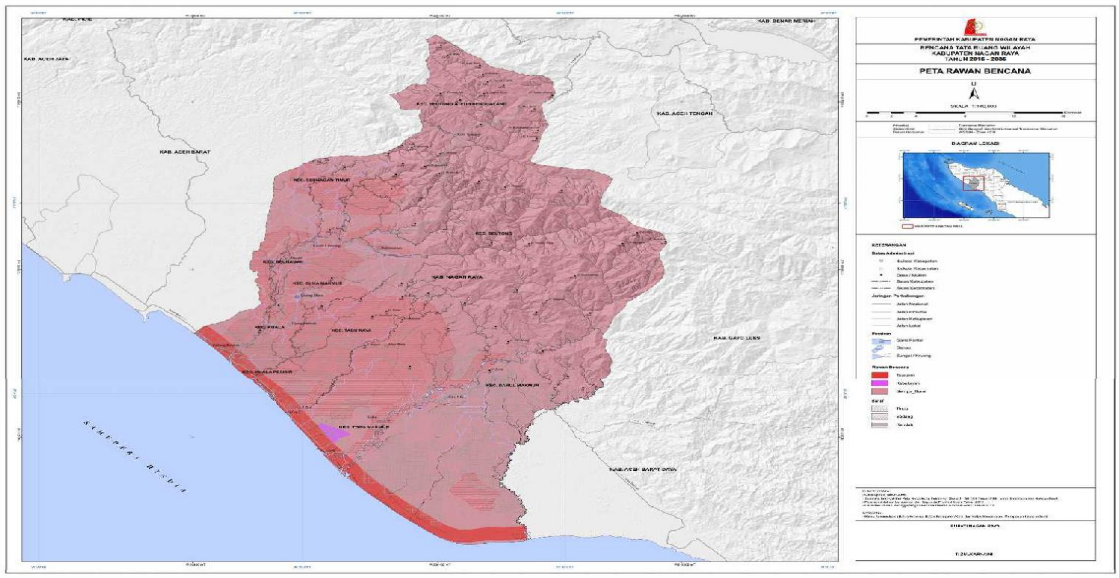
Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kacamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai.

**Gambar 2.7**
**Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya**




*Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035*

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

**Gambar 2.8**
**Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya**




*Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2018*

### 2.1.2.4 Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan serangkaian langkah strategis yang direncanakan dan dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko, menghindari atau meminimalkan kerugian manusia, harta benda, lingkungan, dan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana. Kabupaten Nagan Raya telah melakukan beberapa hal terkait mitigasi bencana. Langkah-langkah yang dilakukan berupa melakukan identifikasi risiko bencana dengan mengidentifikasi jenis jenis bencana yang mungkin akan terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Pemahaman terkait penilaian risiko untuk potensi kerusakan juga membantu dalam penentuan prioritas mitigasi bencana.

Mitigasi Bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari beberapa kategori bencana, sebagai berikut:

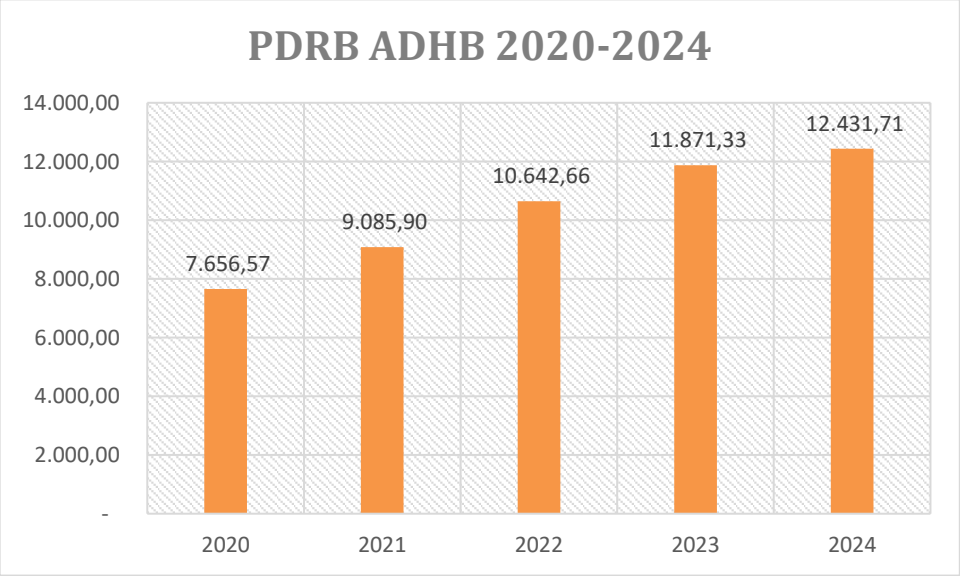
a. Untuk penanganan banjir, mitigasi bencana yang telah dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi struktural melalui restorasi sungai, revitaslisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota.
b. Pada penanganan kebakaran lahan dan hutan, Kabupaten Nagan Raya melakukan mitigasi bencana melalui pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem gambut serta sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya kampanye penyadaran masyarakat dan peningkatan teknologi pencegahan kebakaran lahan dan hutan
c. Untuk penanganan bencana gempabumi, pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan kerjasama dengan OPD untuk menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan bangunan tahan gempabumi sebagai upaya mitigasi bencana gempabumi. Selain itu, penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi salah satu upaya dalam pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB di Kabupaten Nagan Raya.
d. Dalam memitigasi cuaca ekstrim di Kabupaten Nagan Raya, BPBD dan BMKG beserta perangkat desa melakukan sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana mengenai bahaya cuaca ekstrim sebagai langkah awal dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman cuaca ekstrim serta dampak negattif yang mungkin akan muncul di Kabupaten Nagan Raya.
e. Terkait tsunami, Kabupaten Nagan Raya melakukan mitigasi bencana tsunami melalui perawatan dan pemeliharaan mangrove dan vegetasi pantai. Selain itu, sosialisasi dan uji lapangan untuk bahaya tsunami juga dilakukan pada setiap Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
f. Kabupaten Nagan Raya juga melakukan mitigasi bencana longsor melalui inisiasi pembuatan batu halang pada wilayah rawan tanah longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Selain itu, untuk kesiapsiagaan penanganan longsor uga dilakukan sosialisasi berupa bahaya, dampak negatif dan langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif longsor.

### 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
### 2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

**A. Pertumbuhan PDRB**

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya.

**Gambar 2.9**
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya**
**(Milyar Rupiah) Tahun 2020–2024**




*Sumber : Nagan Raya dalam Angka 2025*

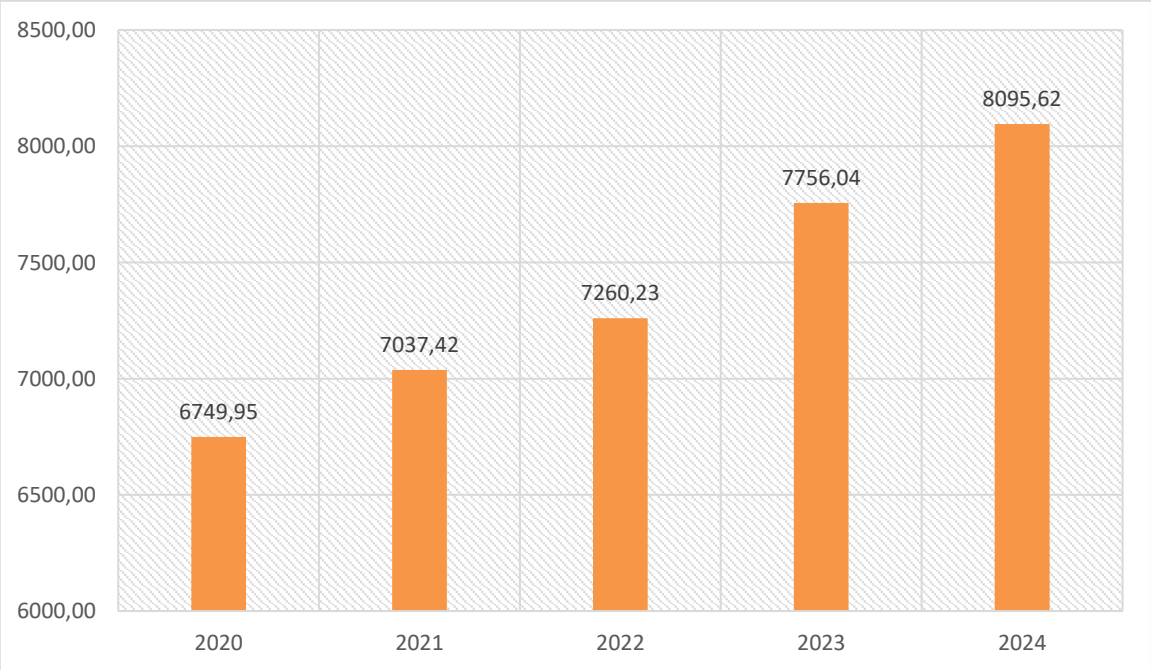
Grafik 2.9 menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang disajikan menunjukkan tren peningkatan nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar Rp7.284,66 miliar. Nilai ini meningkat menjadi Rp7.936,10 miliar pada tahun 2021, atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,95%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan nilai PDRB mencapai Rp8.931,29 miliar, naik sebesar 12,55% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, PDRB kembali mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp9.992,51 miliar, atau tumbuh sebesar 11,87% dari tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2024, PDRB tercatat sebesar Rp11.136,82 miliar, mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,45% dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, dalam rentang lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Nagan Raya meningkat sebesar 52,8%, dari Rp7.284,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp11.136,82 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, perbaikan infrastruktur, serta kontribusi positif dari berbagai sektor unggulan daerah.

Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk melihat nilai PDRB yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (perkembangan riil) maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 seperti pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Kenaikan ini menunjukkan selama tahun 5 tahun terakhir PDRB mengalami peningkatan produktivitas (*output*) ekonomi secara agregat (menyeluruh) dari keseluruhan kategori lapangan usaha di kabupaten Nagan Raya.

Apabila diperbandingkan maka didapati hasil bahwa secara rata-rata, PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebaliknya PDRB ADBH mengalami peningkatan yang sedikit lamban sehingga dapat disimpulkan bahwa harga lebih dominan dibandingkan dengan kenaikan produksi di Kabupaten Nagan Raya.

**Gambar 2.10**
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya**
**(Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024**




*Sumber : Nagan Raya dalam Angka 2025*

Grafik 2.10 menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020 hingga 2024. Data ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil daerah tanpa dipengaruhi oleh inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap perubahan volume produksi barang dan jasa.

Pada tahun 2020, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar Rp6.812,84 miliar. Nilai ini meningkat menjadi Rp6.990,68 miliar pada tahun 2021, menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61%. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai PDRB sebesar Rp7.225,87 miliar, atau tumbuh 3,37% dibandingkan tahun sebelumnya.

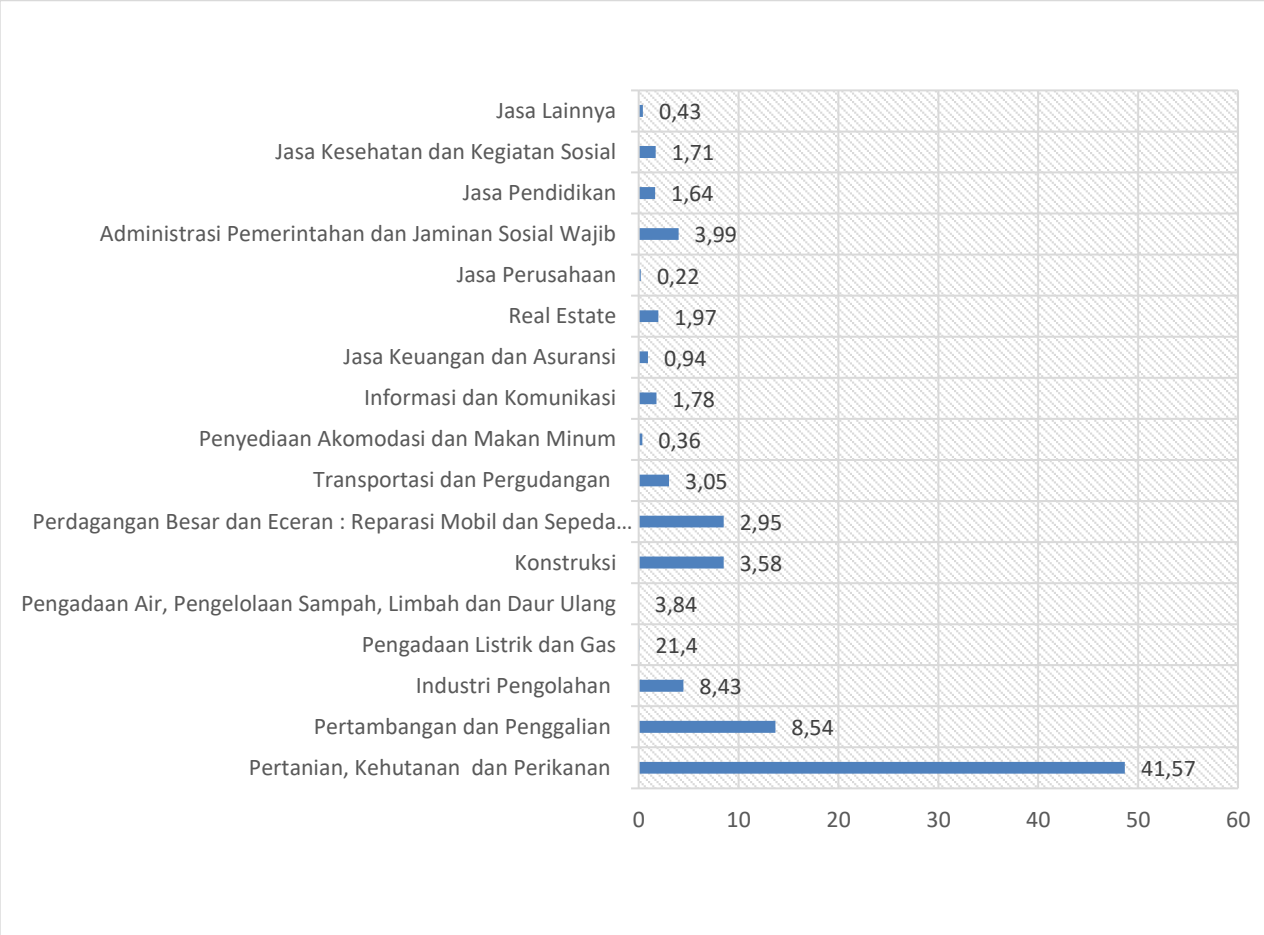
Selanjutnya, pada tahun 2023, PDRB mencapai Rp7.493,36 miliar, mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,70%. Pertumbuhan positif ini masih berlanjut hingga tahun 2024, dengan nilai PDRB sebesar Rp7.780,08 miliar, meningkat sebesar 3,83% dari tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan sebesar 14,18% selama periode lima tahun terakhir, dari Rp6.812,84 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7.780,08 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara riil, perekonomian daerah Kabupaten Nagan Raya terus mengalami pertumbuhan meskipun dalam skala yang moderat dan stabil.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB suatu daerah. Struktur ekonomi disebut berubah jika terjadi perubahan kategori atau lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB digantikan dengan kategori lainnya pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Hingga tahun 2024 struktur ekonomi masyarakat Nagan Raya masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari yang paling besarnya kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Kategori ini masih menjadi andalan bagi masyarakat Nagan Raya yang ditunjukkan dengan kontribusinya yang tinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2024 kontribusi kategori ini sudah mencapai 41,57% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan kategori ini bersifat padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya.

**Gambar 2.11**
**Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen)**




*Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Grafik pada Gambar 2.11 menunjukkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nagan Raya berdasarkan persentase kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Data ini memberikan gambaran mengenai sektor-sektor dominan dalam perekonomian daerah serta peran relatif setiap sektor dalam membentuk total output regional.

Dari grafik terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya. Sektor ini berkontribusi sekitar 41,57%, menegaskan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor primer, khususnya kegiatan agraris.

Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalian juga memberikan kontribusi signifikan, berkisar di angka 15%, yang menunjukkan keberadaan sumber daya alam yang cukup besar di wilayah ini. Sektor konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran; reparasi

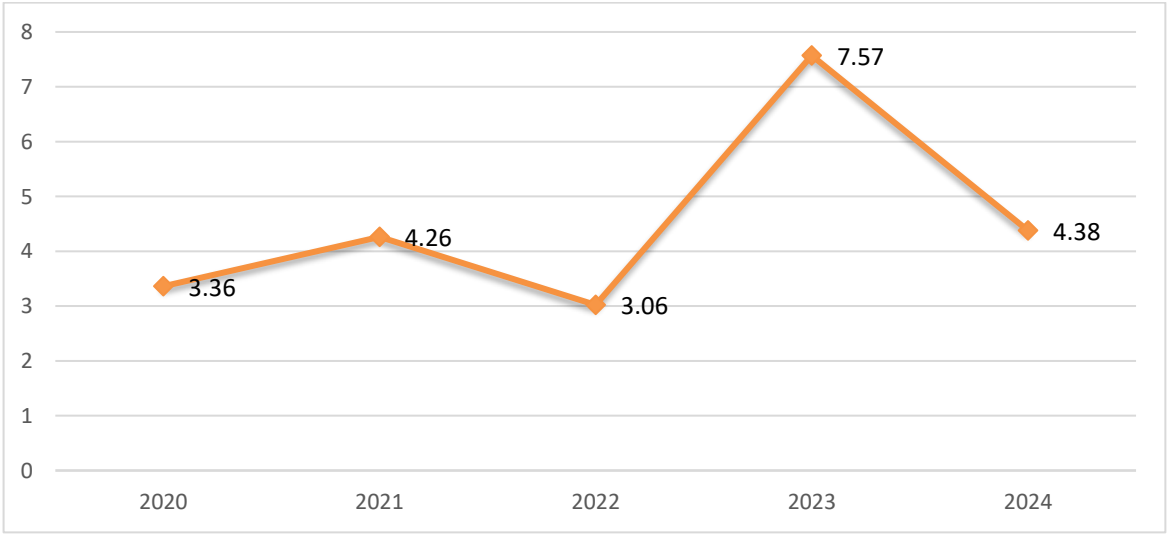
mobil dan sepeda motor juga memberikan kontribusi yang cukup berarti, masing-masing berada pada kisaran 10%.

Sektor-sektor lain seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang dalam persentase yang lebih kecil namun tetap penting dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Secara umum, struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya masih didominasi oleh sektor-sektor primer, dengan kontribusi yang lebih terbatas dari sektor sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan potensi pengembangan ekonomi ke arah hilirisasi industri dan jasa guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berdaya saing.

Selanjutnya, terdapat indikator yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu yang tercermin melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya ekspansi kegiatan ekonomi, sementara pertumbuhan negatif mencerminkan kontraksi atau penurunan aktivitas ekonomi.

**Gambar 2.12**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen)**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber : Nagan Raya dalam Angka 2025*

Grafik 2.12 menyajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, yakni tahun 2020,

perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar -0,50%, yang mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi, baik di sektor primer maupun sekunder.

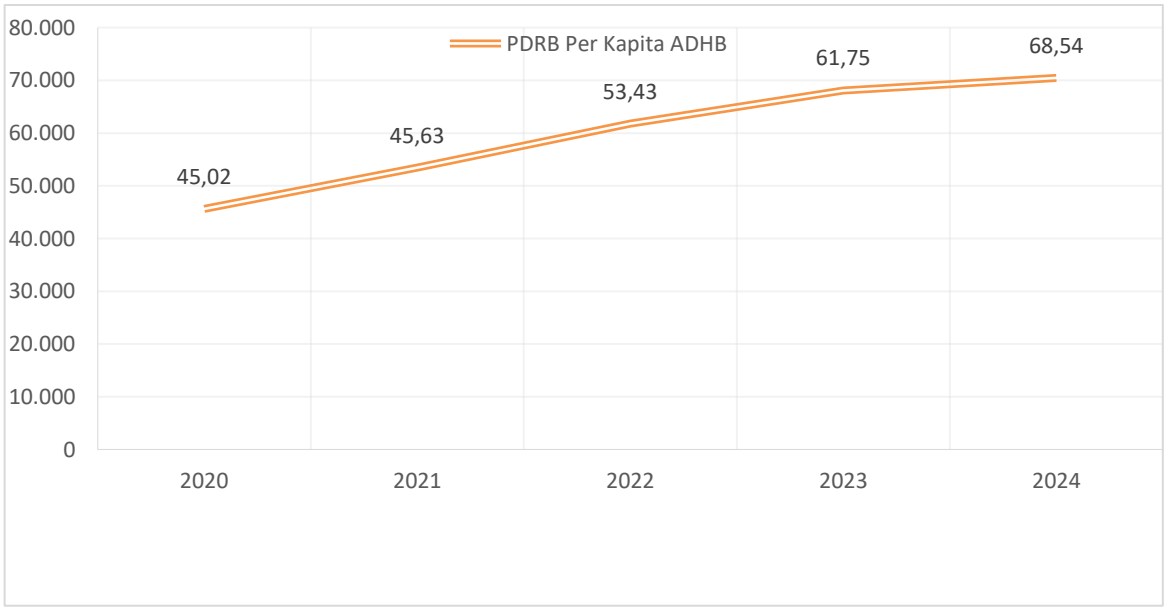
Namun, pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Nagan Raya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan mencatat pertumbuhan sebesar 2,61%. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,37%, yang mencerminkan mulai stabilnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Tren pertumbuhan positif berlanjut pada tahun 2023, mencapai 3,70%, dan meningkat menjadi 3,83% pada tahun 2024—menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, data dalam grafik menunjukkan arah pemulihan ekonomi yang konsisten dan bertahap setelah mengalami tekanan akibat krisis kesehatan global. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan pelaku ekonomi dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi baru serta upaya pemulihan ekonomi yang berjalan secara efektif. Meskipun demikian, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan transformasi ekonomi ke arah peningkatan produktivitas, investasi, dan diversifikasi sektor unggulan.

## B. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Nagan Raya, pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mencerminkan nilai rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk berdasarkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah. Kenaikan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan produktivitas, serta perbaikan distribusi pendapatan. Secara umum, tren yang meningkat pada indikator ini menjadi cerminan dari membaiknya taraf hidup masyarakat dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Gambar 2.13**
**PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah)**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Aceh Tahun 2025*

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 45,02 juta rupiah dan meningkat secara bertahap menjadi 45,63 juta pada 2021, 53,43 juta pada 2022, 61,75 juta pada 2023, hingga mencapai 68,54 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB ini didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Kabupaten Nagan Raya, seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan, serta dukungan dari sektor jasa yang mulai berkembang. Selain itu, kontribusi program pembangunan daerah yang terfokus pada peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan sumber daya manusia turut memperkuat daya saing daerah. Secara umum, tren ini menjadi indikator meningkatnya kapasitas produksi daerah dan distribusi pendapatan masyarakat, yang berimplikasi pada perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Nagan Raya.

## C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kestabilan ekonomi suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu tertentu, yang pada akhirnya

memengaruhi daya beli masyarakat. Perubahan inflasi dari tahun ke tahun dapat memberikan gambaran mengenai tekanan ekonomi yang dihadapi, efektivitas kebijakan pengendalian harga, serta kondisi pasokan dan permintaan di pasar.

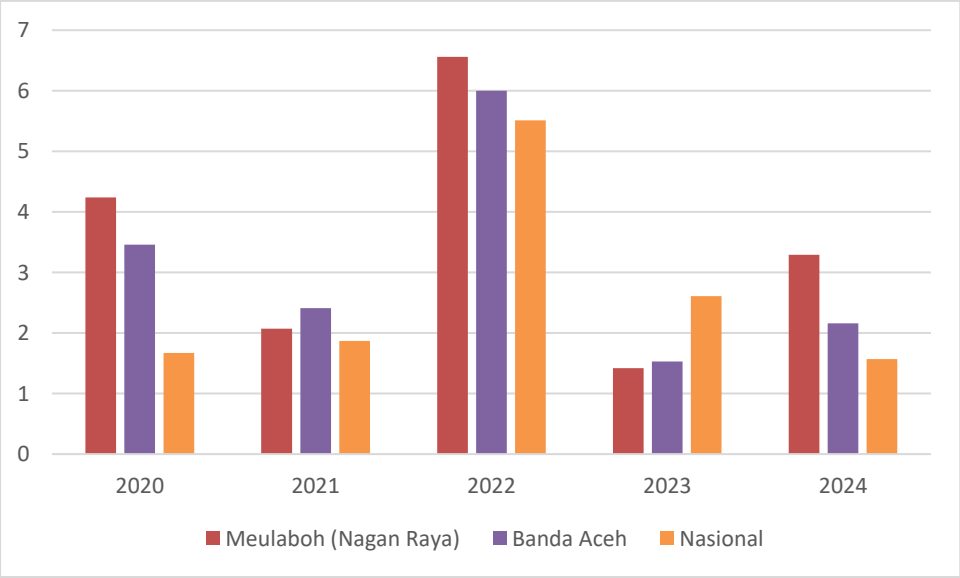
Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Nagan Raya yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

**Tabel 2.15**
**Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024 (persen)**

| DAERAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meulaboh (Nagan Raya)** | 4,24 | 2,07 | 6,56 | 1,42 | 3,29 |
| **Banda Aceh** | 3,46 | 2,41 | 6,00 | 1,53 | 2,16 |
| **Nasional** | 1,67 | 1,87 | 5,51 | 2,61 | 1,57 |

*Sumber : BPS Tahun 2025*

**Gambar 2.14**
**Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Meulaboh (Kabupaten Nagan Raya) Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Tahun 2025*

Mengutip data dari BPS pada tabel 2.15 menyajikan data tingkat inflasi tahunan di wilayah Meulaboh (sebagai representasi Kabupaten Nagan Raya), Banda Aceh, dan tingkat nasional selama periode tahun 2020 hingga 2024. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan harga barang dan jasa konsumen dari tahun ke tahun, yang mencerminkan laju inflasi di masing-masing wilayah. Secara umum, laju inflasi di Meulaboh menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, tingkat inflasi di Meulaboh tercatat sebesar 4,24%, lebih tinggi dibandingkan Banda Aceh (3,46%) maupun tingkat inflasi nasional (1,67%). Hal ini menunjukkan adanya tekanan harga yang relatif tinggi di daerah tersebut, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan barang serta faktor eksternal lainnya.

Tahun 2021, inflasi di Meulaboh turun menjadi 2,07%, sejalan dengan tren penurunan inflasi di Banda Aceh (2,41%) dan nasional (1,87%). Penurunan ini mengindikasikan adanya stabilisasi harga, didukung oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan perbaikan rantai distribusi. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang signifikan di semua wilayah. Meulaboh mengalami inflasi sebesar 6,56%, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Banda Aceh (6,00%) dan nasional (5,51%). Kenaikan tajam tersebut mencerminkan adanya tekanan harga akibat pemulihan global pasca-COVID-19, kenaikan harga energi dan pangan, serta dampak lanjutan dari krisis logistik internasional. Pada tahun 2023, laju inflasi di Meulaboh menurun drastis menjadi 1,42%, menunjukkan keberhasilan pengendalian harga dan stabilisasi pasokan barang pokok. Tren penurunan ini juga terjadi di Banda Aceh (1,53%) dan nasional (2,61%). Tahun 2024, inflasi kembali meningkat moderat di Meulaboh menjadi 3,29%, namun masih berada dalam kategori inflasi terkendali. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Banda Aceh (2,16%) dan nasional (1,57%).

Secara keseluruhan, laju inflasi di Kabupaten Nagan Raya (Meulaboh) cenderung mengikuti pola nasional, namun dengan fluktuasi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktural dan geografis wilayah, seperti ketergantungan pada pasokan luar daerah, turut memengaruhi volatilitas harga. Stabilitas inflasi tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi fluktuasi inflasi yang cukup tinggi di Kabupaten Nagan Raya, pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal dan efisiensi distribusi barang. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur, serta memperbaiki infrastruktur logistik agar

pasokan barang tidak terganggu. Selain itu, diversifikasi sumber pangan dan pemberdayaan petani lokal juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Sebagai pengendali inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat pemantauan harga pasar, dan melaksanakan intervensi seperti operasi pasar secara tepat waktu. Edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi bijak dan transparansi informasi harga juga perlu diperluas guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Dengan langkah strategis dan responsif, stabilitas harga dapat dijaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

## D. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

### 1. Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya.

Sektor pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Begitu halnya dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung lebih diarahkanpada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan, pegunungan dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir.

**Tabel 2.16**
**Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | 9,22 | 10,19 | 9,71 | 9,57 | 9,36 |
| **Provinsi Aceh** | 15,01 | 15,43 | 15,53 | 14,75 | 14,45 |
| **Kab.Nagan Raya** | 17,70 | 18,23 | 17,38 | 17,25 | 16,94 |

*Sumber : BPS Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 2.16, dapat dilihat bahwa Kabupaten Nagan Raya mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka kemiskinan berada di 17,70% dan meningkat tajam pada 2021 menjadi 18,23%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian lokal. Namun, setelah itu terlihat tren penurunan bertahap: 17,38% pada 2022, 17,25% pada 2023, dan 16,94% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih belum cukup signifikan untuk keluar dari posisi rentan.

Fluktuasi tingkat kemiskinan di Nagan Raya menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat masih belum stabil. Penurunan sejak 2021 menandakan bahwa program pemulihan dan bantuan sosial mulai menunjukkan hasil, tetapi tingginya angka di atas 16% mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada dalam kondisi rentan terhadap guncangan ekonomi, inflasi, atau akses terbatas terhadap sumber pendapatan yang berkelanjutan. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan ketimpangan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Apabila dibandingkan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya selalu lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Aceh dan jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun 2024, kemiskinan nasional tercatat 9,36%, Provinsi Aceh 14,45%,

sedangkan Nagan Raya masih di 16,94%. Hal ini menunjukkan bahwa Nagan Raya tertinggal cukup jauh dalam pencapaian target penanggulangan kemiskinan. Bahkan, ketika tingkat kemiskinan nasional dan provinsi menunjukkan penurunan relatif konsisten, Nagan Raya masih menghadapi tantangan besar untuk menyamai laju penurunan tersebut.

Salah satu penyebab lambatnya penurunan penduduk miskin dan lahirnya kemiskinan ekstrem dikarenakan naiknya Garis Kemiskinan secara reguler setiap 2 tahun sekali yang belum koheren dengan keadaan sesungguhnya kehidupan masyarakat khusus masyarakat miskin. Kenaikan GK ini adalah karena naiknya harga komoditas makanan yang menjadi konsumsi utama rakyat antara lain; beras, lauk-pauk, gula, dan rokok. Itu artinya, Garis Kemiskinan Makanan menjadi salah satu pemicu naiknya Garis Kemiskinan Nagan Raya. Sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan tidak terlalu besar pengaruhnya.

Apabila dilihat dari Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Dalam pandangan BPS, Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

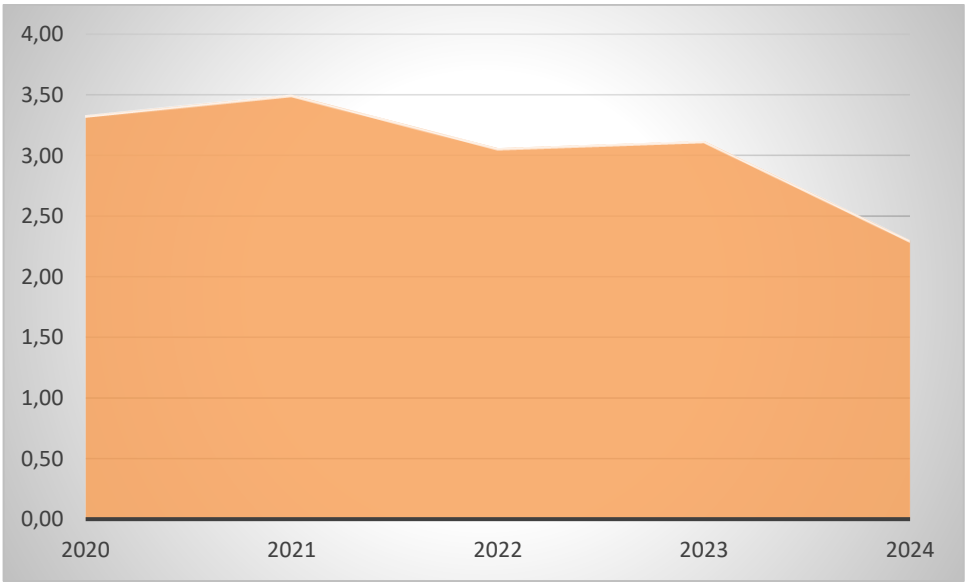
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren penurunan setelah 2021, tetapi masih berada pada level yang mengkhawatirkan dan tertinggal dari capaian provinsi dan nasional. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan intervensi sosial yang lebih tepat sasaran, perbaikan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM lokal agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan tidak kembali jatuh dalam kemiskinan struktural.

## 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan

kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

**Gambar 2.15**
**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS, 2025*

Berdasarkan data dalam Grafik 2.14, P1 di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 berada pada angka 1,51, kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,72 pada tahun 2021. Hal ini terjadi seiring dengan dampak pandemi COVID-19 yang tidak hanya menambah jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperdalam tingkat kemiskinan. Penduduk miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya karena penurunan pendapatan, keterbatasan akses pekerjaan, dan terganggunya aktivitas ekonomi lokal.

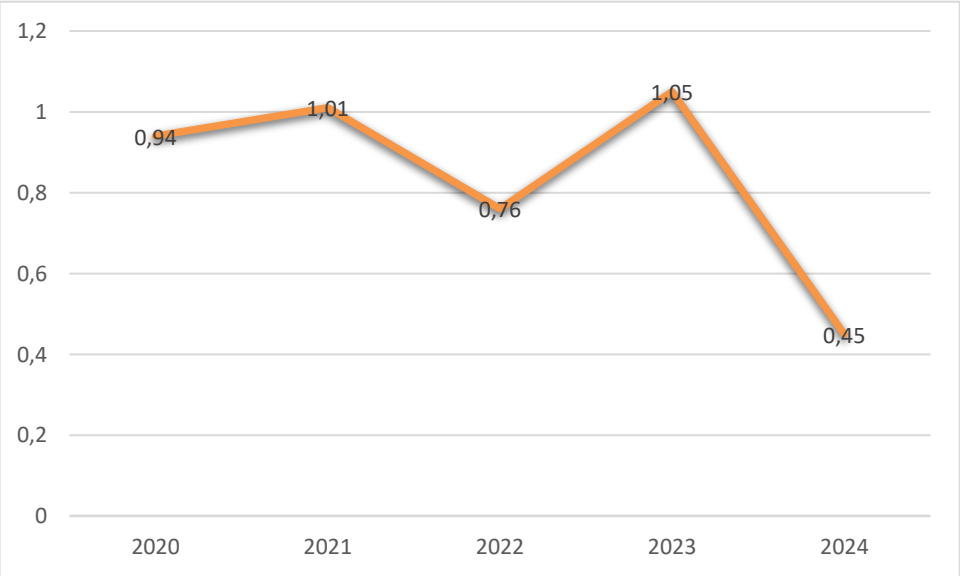
Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, nilai P1 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,42, kemudian turun menjadi 1,33 di tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 1,28 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kemampuan ekonomi penduduk miskin, di mana rata-rata pengeluaran mereka mulai mendekati garis kemiskinan. Hal ini mencerminkan efektivitas dari berbagai program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, serta peningkatan daya beli masyarakat miskin di tingkat lokal.

Berdasarkan tren lima tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan perbaikan yang positif. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi, nilai P1 terus menurun dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, yang mencerminkan membaiknya daya beli dan efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Penurunan P1 menjadi indikator bahwa pengentasan kemiskinan di daerah ini tidak hanya fokus pada jumlah, tetapi juga pada kedalaman kemiskinan yang dialami.

### 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

**Gambar 2.16**
**Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Grafik 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, P2 di Kabupaten Nagan Raya berada pada angka 0,34, kemudian meningkat menjadi 0,45 pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan bahwa selain semakin banyak masyarakat yang jatuh ke dalam kemiskinan, ketimpangan antarpenduduk miskin juga memburuk selama masa pandemi. Dalam kondisi ini, terdapat kelompok miskin yang mengalami keterpurukan ekonomi jauh lebih berat dibandingkan kelompok lainnya.

Tren perbaikan mulai terlihat pada tahun 2022 hingga 2024, di mana nilai P2 secara berturut-turut menurun menjadi 0,31, 0,28, dan 0,25. Penurunan ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya tidak hanya berhasil mengurangi rata-rata kedalaman kemiskinan, tetapi juga memperkecil ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Artinya, upaya pemerintah daerah dalam menyasar kelompok miskin ekstrem serta mendorong pemerataan kesejahteraan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Penurunan P2 menandakan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin semakin mengecil di Kabupaten Nagan Raya, sehingga kesejahteraan dalam kelompok miskin menjadi lebih merata. Kondisi ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan menyasar kelompok miskin ekstrem. Perbaikan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengurangan kemiskinan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

**Tabel 2.17**
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024**

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
|---|---|---|---|
| **2020** | 493.121 | 29,99 | 17,70 |
| **2021** | 508.801 | 30,71 | 18,23 |
| **2022** | 544.300 | 29,63 | 17,38 |
| **2023** | 594.374 | 29,78 | 17,25 |
| **2024** | 638.820 | 29,60 | 16,94 |

*Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2025*

Tabel 2.17 menunjukkan data garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020 hingga 2024. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kemiskinan merupakan dinamika yang penting dalam melihat arah pembangunan sosial ekonomi daerah. Garis kemiskinan terus mengalami kenaikan setiap

tahunnya, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat akibat perubahan harga dan pola konsumsi seiring inflasi dan perkembangan biaya hidup.

Sementara itu, jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang lebih stabil, bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat meningkat pada masa awal pandemi, kedua indikator tersebut mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap. Penurunan ini menandakan adanya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat miskin serta peran intervensi pemerintah, baik melalui bantuan sosial, program pemulihan ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Perbaikan ini juga sejalan dengan tren positif pada Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang telah menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga tingkat kesenjangan di antara mereka semakin mengecil. Hal ini memberikan sinyal bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya mulai menunjukkan hasil yang berkelanjutan dan merata di berbagai lapisan masyarakat.

## E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dalam rangka untuk dapat melihat dan mengukur proses pembangunan manusia yang terjadi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak. IPM menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

**Tabel 2.18**
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nasional | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 74,39 | 75,36 |
| 2 | Provinsi Aceh | 73,29 | 73,48 | 74,11 | 74,70 | 75,36 |
| 3 | Kab. Nagan Raya | 70,54 | 70,67 | 71,46 | 72,15 | 73,10 |

*Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.17 , Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren positif selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, yakni tahun 2020, IPM tercatat sebesar 70,54 dan mengalami kenaikan tipis di tahun 2021 menjadi 70,67. Peningkatan yang moderat ini menunjukkan bahwa pada masa awal pandemi, pembangunan manusia di daerah masih terdampak, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan yang mengalami gangguan pelayanan. Namun mulai tahun 2022, capaian IPM mengalami akselerasi yang lebih baik, yaitu mencapai 71,46, kemudian naik lagi menjadi 72,15 pada tahun 2023, dan mencapai 73,10 pada tahun 2024. Kenaikan secara konsisten ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan dasar mulai membuahkan hasil.

Apabila ditinjau dari kategori klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IPM dibagi menjadi empat kelompok, yakni: rendah (di bawah 60), sedang (60–<70), tinggi (70–<80), dan sangat tinggi (80 ke atas). Dengan nilai IPM sebesar 73,10 pada tahun 2024, Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam kategori IPM tinggi. Artinya, pembangunan manusia di daerah ini sudah berada pada tingkat yang cukup baik dan menunjukkan kemajuan. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh dan nasional yang sama-sama berada di angka 75,36, posisi Nagan Raya masih berada sedikit di bawah rata-rata. Selisih sekitar dua poin ini menunjukkan bahwa meskipun tren peningkatannya cukup positif, percepatan pembangunan manusia masih diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Untuk meningkatkan IPM secara lebih optimal, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memprioritaskan penguatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam hal akses, fasilitas, dan kompetensi guru. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas Puskesmas dan layanan kesehatan ibu dan anak, juga harus diperkuat secara merata di seluruh kecamatan. Selain itu, untuk mendorong dimensi standar hidup layak, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, serta pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja muda dapat menjadi strategi penting. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, upaya peningkatan IPM di Kabupaten Nagan Raya tidak hanya akan mendorong angka capaian yang lebih tinggi, tetapi juga menghasilkan pembangunan manusia yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

## F. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan

didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Menurut (Todaro dan Smith, 2006), seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

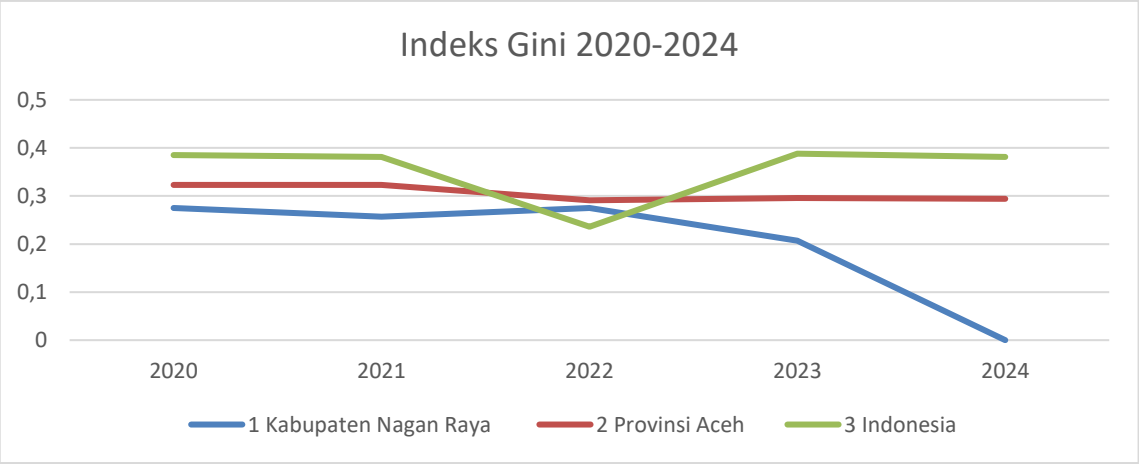
Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan kemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Indeks Gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan

**Tabel 2.19**
**Perbandingan Rasio Gini**
**Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kabupaten Nagan Raya | 0,275 | 0,257 | 0,275 | 0,207 | 0, 294 |
| 2 | Provinsi Aceh | 0,323 | 0,323 | 0,291 | 0,296 | 0,294 |
| 3 | Indonesia | 0,385 | 0,381 | 0,236 | 0,388 | 0,381 |

*Sumber: BPS Tahun 2025*

**Gambar 2.17**
**Indeks Gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional**




*Sumber: BPS Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.19, perkembangan rasio gini di Indonesia, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan dinamika yang beragam dalam kurun waktu 2020–2024. Secara nasional, rasio gini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 0,236, sebelum kembali meningkat ke angka 0,388 pada 2023 dan 0,381 pada 2024. Fluktuasi ini menggambarkan adanya perubahan tingkat ketimpangan yang cukup tajam, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, dampak pandemi, serta kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Di tingkat Provinsi Aceh, rasio gini cenderung lebih stabil dibandingkan nasional. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio gini tercatat sama yaitu 0,323, kemudian menurun menjadi 0,291 pada 2022, sebelum sedikit meningkat menjadi 0,296 pada 2023, dan kembali naik tipis ke 0,294 pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Aceh relatif terkendali dengan tren fluktuasi yang tidak terlalu ekstrem, meskipun tetap perlu perhatian khusus untuk menurunkan ketimpangan secara berkelanjutan.

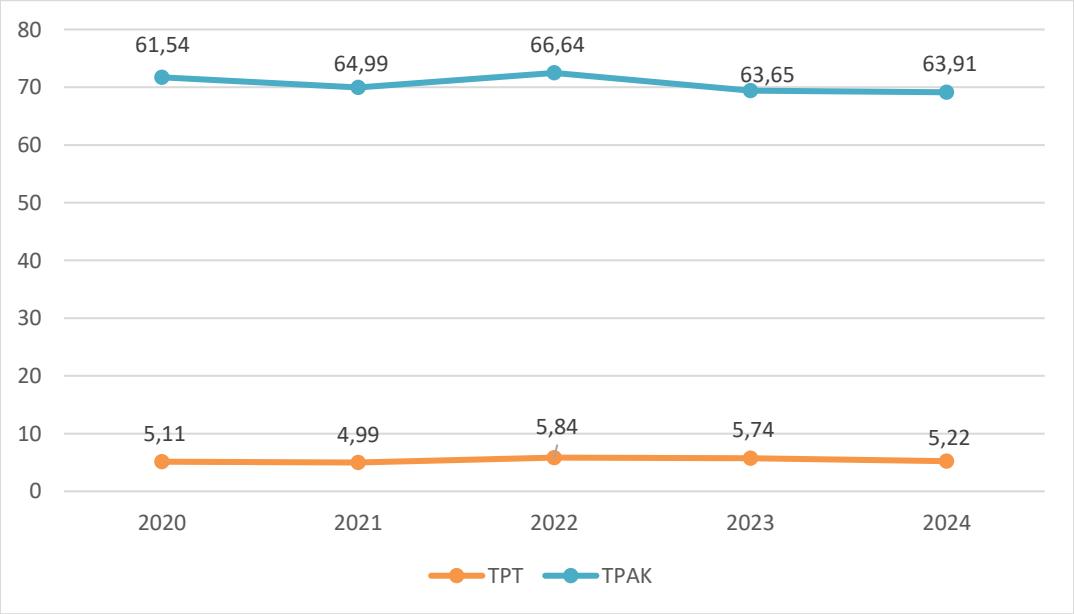
Jika dilihat pada Kabupaten Nagan Raya, rasio gini menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh dan nasional. Pada tahun 2020, rasio gini berada di angka 0,275, turun menjadi 0,257 pada 2021, lalu kembali ke 0,275 pada 2022. Namun pada tahun 2023, angka ini menurun drastis hingga 0,207, yang mencerminkan ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali ke angka 0,294, sehingga menunjukkan adanya dinamika dalam distribusi pendapatan di daerah ini.

Tren yang ditunjukkan Kabupaten Nagan Raya mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan pada tahun 2023, namun belum konsisten hingga tahun 2024. Hal ini memberikan pesan penting bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan

pembangunan yang inklusif, khususnya pada sektor ekonomi produktif masyarakat, agar penurunan ketimpangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari dinamika indikator ketenagakerjaan, khususnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, serta kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja secara merata. Dalam konteks ini, TPAK menjadi cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam dunia kerja, sedangkan TPT menunjukkan efektivitas penciptaan lapangan kerja di daerah. Oleh karena itu, memahami hubungan antara ketiga indikator ini menjadi penting untuk melihat secara menyeluruh bagaimana struktur ketenagakerjaan berkontribusi terhadap distribusi kesejahteraan di Kabupaten Nagan Raya.

**Gambar 2.18**
**Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024 (persen)**




*Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Berdasarkan data Gambar 2.18, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nagan Raya mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun sempat menurun pada tahun 2020, TPAK menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Kenaikan TPAK mencerminkan bertambahnya kesadaran dan kesempatan kerja di masyarakat, yang pada

gilirannya memperkuat basis produktivitas daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

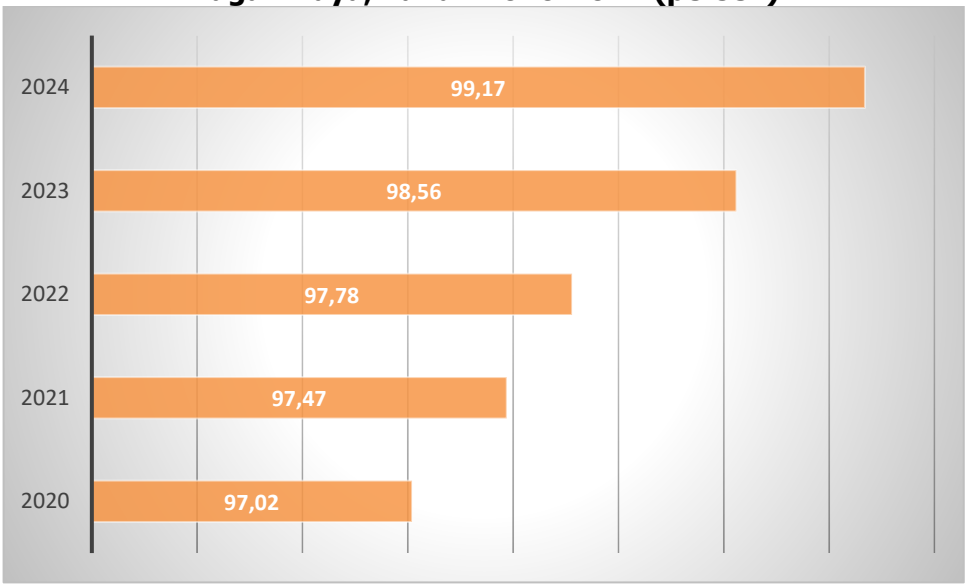
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan dalam periode yang sama, yang menandakan semakin baiknya daya serap pasar kerja di Kabupaten Nagan Raya. Penurunan TPT menjadi sinyal positif bahwa penciptaan lapangan kerja mulai sejalan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Perbaikan indikator ini juga berpotensi memperbaiki distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, sebagaimana tercermin dalam penurunan Rasio Gini. Dengan meningkatnya partisipasi kerja dan menurunnya pengangguran, struktur ketenagakerjaan yang lebih inklusif mulai terbentuk, yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

#### 2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

**A. Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun.

**Gambar 2.19**
**Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024 (persen)**




*Sumber Data : BPS Tahun 2025*

Selama periode 2020 hingga 2024, angka melek huruf dewasa di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan. Pada tahun 2020, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf tercatat sebesar 95,86 persen. Angka ini meningkat menjadi 96,42 persen pada tahun 2021, kemudian mencapai 96,95 persen di tahun 2022. Kenaikan tahunan yang konsisten menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan dasar serta keberlanjutan program pemberantasan buta huruf.

Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian 97,54 persen, dan mencapai 98,02 persen pada tahun 2024. Kenaikan total sebesar 2,16 % dalam lima tahun terakhir mencerminkan upaya yang sistematis dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan literasi masyarakat dewasa, termasuk melalui pendidikan nonformal, program keaksaraan, dan dukungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dewasa dan masyarakat di daerah terpencil. Capaian ini juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Nagan Raya semakin mendekati kondisi literasi penuh, yang menjadi landasan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

## B. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator lainnya dalam bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut termasuk juga dalam komponen pembentuk IPM, sebagai variabel baru menggantikan variabel angka melek huruf dalam

perhitungan IPM, untuk dimensi pengetahuan (pendidikan). Mengutip BPS, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS *(Expected Years of Schooling -EYS)* didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Meskipun angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi pembangunan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan pendidikan gratis yang telah gulirkan selama ini, kebijakan pendidikan lainnya yang pro-masyarakat miskin terus diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan beasiswa (diupayakan berlanjut ke perguruan tinggi), pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan pembangunan PAUD, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai di setiap jenjang pendidikan dan antar wilayah.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, kendati belum mencapai angka ideal. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya keras meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. Program penyetaraan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dipandang juga bermanfaat dalam memperbaiki kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

**Tabel 2.20**
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan Nasional, Tahun 2020-2024 (Tahun)**

| TAHUN | NAGAN RAYA | ACEH | NASIONAL |
|---|---|---|---|
| **2020** | 8,68 | 9,33 | 8,48 |
| **2021** | 8,69 | 9,37 | 8,54 |
| **2022** | 8,95 | 9,44 | 8,69 |
| **2023** | 8,96 | 9,55 | 8,77 |
| **2024** | 9,26 | 9,64 | 9,64 |

*Sumber : Nagan Raya dalam Angka, 2025*

Berdasarkan tabel 2.20, dapat dilihat bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan progresif, sebagaimana tercermin dari dua indikator utama, yaitu angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini menjadi komponen penting dalam dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Angka melek huruf dewasa mengalami peningkatan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun awal, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf masih berada di bawah 96 persen. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan yang stabil, hingga pada tahun 2024 mencapai lebih dari 98 persen. Lonjakan ini mencerminkan efektivitas program keaksaraan fungsional, peningkatan akses pendidikan dasar, serta perhatian terhadap kelompok rentan yang sebelumnya tertinggal secara literasi. Peningkatan ini juga menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan literasi antargender dan antardaerah, yang selama ini menjadi tantangan di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis yang cukup beragam.

Sementara itu, indikator rata-rata lama sekolah juga menunjukkan perbaikan ke arah yang positif. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Nagan Raya tercatat 8,68 persen dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 9,26 persen pada tahun 2024. Capaian ini bukan hanya menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah, tetapi juga mencerminkan berkurangnya angka putus sekolah. Hingga tahun 2024, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Nagan Raya berhasil menyamai angka nasional, menandakan bahwa gap antara daerah dan pusat dalam hal pendidikan mulai menyempit. Meskipun masih sedikit di bawah capaian Provinsi Aceh, tren ini memperlihatkan potensi kuat untuk mencapai kesetaraan pendidikan dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, peningkatan dua indikator pendidikan ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus memperkuat strategi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal infrastruktur, tenaga pendidik, serta perluasan akses pendidikan menengah dan kejuruan. Dengan mempertahankan tren yang telah terbentuk, Nagan Raya memiliki peluang besar untuk tidak hanya meningkatkan IPM secara kuantitatif, tetapi juga secara substansial memperkuat kualitas kehidupan masyarakat melalui pendidikan yang merata dan inklusif.

#### 2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Posisi geografis yang strategis dan ditunjang oleh beragamnya etnis masyarakat di Provinsi Aceh menggambarkan peninggalan keragaman budaya dan seni dengan nilai sejarah yang tinggi, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki keragaman budaya dan seni yang diwariskan oleh leluhur. Adapun beberapa keragaman budaya dan seni tersebut perlu dijaga dan dilestarikan keberdaannya sebagai bentuk identitas dari suatu daerah.

Adapun keragaman budaya dan seni yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat terlihat dari beberapa kebiasaan masyarakat terutama dalam perayaan pesta perkawinan, sunat rasul, keragaman makanan khas, dan tradisi lainnya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu terdapat juga beberapa situs sejarah budaya antara lain berupa 8 (delapan) makam, 1 (satu) rumah tradisional, 1 (satu) benteng dan 3 (tiga) tempat bersejarah.

### 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

**A. Pendidikan Islami**

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelolah oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.21**
**Jumlah Penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2020-2024**

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Penghafal penghafal Al-Qur`an | 70 orang | 80 orang | 95 orang | 110 orang | 125 orang |
| 2 | Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 3 | Angka melek Al-Qur`an penduduk usia > 21 tahun | 85% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 4 | Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah | 57% | 85% | 85% | 85% | 85% |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Dari tabel 2.21 dapat dilihat bahwa capaian pembangunan keagamaan di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang konsisten pada beberapa indikator utama, khususnya dalam hal peningkatan jumlah penghafal Al-Qur'an. Jumlah hafiz 30 juz terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 70 orang pada tahun 2020 menjadi 125 orang pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menandakan adanya perhatian serius terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dan keberhasilan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan dayah dan lembaga tahfiz.

Namun, pada saat yang sama, terdapat indikator yang menunjukkan tren stagnan, seperti angka melek Al-Qur'an di kalangan penduduk usia 6–21 tahun yang bertahan pada angka 90 persen selama lima tahun berturut-turut. Begitu pula pada kelompok usia di atas 21 tahun yang sejak tahun 2022 tetap berada pada angka 87 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya perluasan literasi Al-Qur'an sudah mencapai sebagian besar sasaran, namun menghadapi tantangan untuk mendorong peningkatan lebih lanjut. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan metode pembelajaran yang adaptif, atau belum meratanya akses terhadap fasilitas pembelajaran Al-Qur'an di semua wilayah.

Selanjutnya terkait dengan tren standarisasi pendidikan dayah yang meningkat pesat dari 57 persen pada tahun 2020 menjadi 85 persen pada 2021, namun stagnan hingga tahun 2024. Meskipun capaian awalnya signifikan, stagnasi ini mengindikasikan perlunya langkah lanjutan yang lebih strategis untuk mendorong pemenuhan standar pada dayah-dayah yang tersisa. Dalam konteks ini, Dinas Syariat Islam telah melakukan hal-hal yang mendorong peningkatan penghafalan Al-Qur'an secara kolektif dan terorganisir, seperti penyelenggaraan program-program tahfiz yang terstruktur, pelatihan rutin bagi para pengajar dan pembimbing, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti perpustakaan Al-Qur'an, ruang belajar yang nyaman, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

## B. Keagamaan Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari`at Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari`at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaanya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan Syari`at Islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari`at Islam. Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.22**
**Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam**
**Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2020-2024**

| No | Uraian Kegiatan | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan | 458 Unit | 463 Unit | 70 Unit | 63 Unit | 85 Unit |
| 2 | Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat | 217 orang | 220 orang | 220 orang | 1.120 orang | 1.120 orang |
| 3 | Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat | 35 orang | 38 orang | 40 orang | 40 orang | 40 orang |
| 4 | Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin | 50 Mesjid | 55 Mesjid | 90 Mesjid | 90 Mesjid | 90 Mesjid |
| 5 | Pembinaan Dinul Islam | 280 orang | 280 orang | 280 orang | N/A | N/A |
| 6 | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam | 70% | 80% | 80% | 70% | N/A |
| 7 | Jumlah Kader Ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | 200 orang | 210 orang | 210 orang | 382 orang | 382 orang |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Salah satu bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat adalah dengan telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , dimana Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, perwalian (Ziswaf dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Realisasi dari penerimaan zakat/infaq/sadaqah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.23**
**Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | TAHUN | REALISASI PENERIMAAN ZIS (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6.916.300.000 |
| 2 | 2021 | 7.928.152.239 |
| 3 | 2022 | 8.238.909.124 |
| 4 | 2023 | 7.582.669.454 |
| 5 | 2024 | 7.778.454.782 |

*Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Realisasi penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun diwarnai oleh fluktuasi antar tahun. Pada tahun 2020, total penerimaan ZIS tercatat sebesar Rp6,91 miliar dan mengalami peningkatan signifikan pada dua tahun berikutnya, yakni mencapai Rp7,92 miliar pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi Rp8,23 miliar pada 2022. Kenaikan selama tiga tahun berturut-turut ini mencerminkan adanya pertumbuhan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan sedekah, serta efektivitas Baitul Mal dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan penghimpunan dana keagamaan.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi penerimaan ZIS menjadi Rp7,58 miliar, yang kemudian sedikit meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi Rp7,77 miliar. Penurunan pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak oleh tekanan inflasi maupun perubahan sistem distribusi ZIS. Meski nilai penerimaan ZIS kembali meningkat di tahun berikutnya, tren ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem penghimpunan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat.

Secara umum, meskipun realisasi penerimaan ZIS belum menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, nilai yang dihimpun tetap berada pada tingkat yang cukup signifikan. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Nagan Raya. Ke depan, optimalisasi peran Baitul Mal melalui inovasi digitalisasi layanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kemitraan strategis dengan tokoh agama dan lembaga sosial, menjadi kunci untuk mendorong penghimpunan zakat yang lebih efektif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

#### 2.1.4.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

**A. Pendidikan**

**1. Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Kabupaten Nagan Raya, perhatian terhadap penguatan pendidikan usia dini terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia,

khususnya dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi kelompok usia 4 hingga 6 tahun.

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah lembaga TK/RA di Kabupaten Nagan Raya meningkat signifikan dari hanya 50 unit menjadi 218 unit. Kenaikan ini mencerminkan dorongan kuat dari pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan pendidikan pada kelompok usia dini. Sejalan dengan itu, jumlah siswa juga bertambah hampir tiga kali lipat, dari 2.482 menjadi 6.327 anak. Namun, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk yang tetap berada pada angka 0,01 menandakan bahwa perluasan lembaga belum sepenuhnya merata secara geografis, dan sebagian wilayah kemungkinan masih kekurangan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.

Lebih lanjut, rasio partisipasi anak usia dini terhadap jumlah penduduk usia 4–6 tahun di Kabupaten Nagan Raya mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan tren yang stabil. Setelah berada pada angka 3,45 persen pada 2020, rasio ini sempat turun drastis dan kembali menurun menjadi 1,73 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga dan siswa meningkat, tingkat partisipasi pendidikan usia dini masih rendah jika dibandingkan dengan potensi jumlah anak. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menambah jumlah lembaga, tetapi juga memastikan keterjangkauan, kualitas layanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini sebagai pondasi menuju sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

Selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**
**Rasio Pendidikan Anak Usia Dini**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | JENIS | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | TK/RA | 50 | 47 | 180 | 218 | 218 |
| 2 | Siswa | 2,482 | 4.735 | 4.745 | 5.845 | 6.327 |
| 3 | Penduduk Usia 4-6 Tahun | 8,575 | 8.436 | 10.138 | 12.818 | 10.965 |
| 4 | Rasio (%) | 3,45 | 1,78 | 2,14 | 2,19 | 1,73 |
| 5 | Rasio Ketersedian sekolah per 10.000 penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2024*

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

**Tabel 2.25**
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| Jenjang Pendidikan | APK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SD/MI/ Sederajat | 104.71 | 104.87 | 103.74 | 104.71 | 102.15 |
| SMP/MTs/Sederajat | 104.95 | 104.87 | 108.53 | 107.29 | 104.39 |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 95.49 | 93.88 | 100.15 | 98.15 | 101.77 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Berdasarkan tabel 2.24, APK untuk jenjang SD/MI/sederajat berada di atas 100% selama lima tahun terakhir, yang berarti terdapat peserta didik di luar kelompok usia ideal yang turut mengakses pendidikan dasar. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 104,87%, dan terendah pada tahun 2024 dengan 102,15%. Terjadi penurunan pada 2022 (103,74%), kemudian sedikit pulih pada 2023 (104,71%), sebelum kembali menurun pada 2024. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh dinamika demografi, seperti masuknya anak usia di luar jenjang ideal ke sekolah dasar atau perpindahan penduduk, serta penanganan drop out yang belum merata di seluruh wilayah.

Selanjutnya, APK jenjang SMP/MTs/sederajat juga konsisten di atas 100%, menandakan keterlibatan siswa di luar kelompok usia sekolah menengah pertama. Tahun 2022 mencatat angka tertinggi (108,53%), diikuti 2023 (107,29%), yang kemudian turun menjadi 104,39% pada 2024. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan dari tahun 2020 dan 2021 yang berada di kisaran 104,9%. Tren ini mencerminkan meningkatnya daya jangkau layanan pendidikan menengah pertama, meski penurunan pada 2024 perlu dicermati sebagai sinyal potensi hambatan baru, seperti keterbatasan daya tampung atau perubahan kebijakan penerimaan peserta didik.

Sementara itu, APK untuk jenjang pendidikan menengah atas menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Angka pada tahun 2020 sebesar 95,49% mengalami penurunan pada 2021 menjadi 93,88%, namun melonjak pada 2022 hingga mencapai 100,15%, yang menunjukkan pencapaian luar biasa karena berhasil menampung siswa melebihi usia ideal. Meskipun terjadi penurunan pada 2023 (98,15%), capaian kembali naik ke 101,77% pada 2024. Fluktuasi ini menggambarkan perbaikan akses dan kapasitas satuan pendidikan, tetapi juga bisa mencerminkan ketidakteraturan dalam transisi siswa dari jenjang sebelumnya, serta variasi implementasi program wajib belajar 12 tahun.

Secara umum, tren APK di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi di semua jenjang, bahkan melampaui 100% yang menandakan inklusivitas pendidikan. Namun, fluktuasi tahunan menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam penyerapan peserta didik, yang dapat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kondisi sosial ekonomi, kapasitas lembaga pendidikan, dan efektivitas program intervensi pemerintah. Untuk memastikan kestabilan dan peningkatan kualitas partisipasi, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan dan pemetaan kebutuhan, memperluas akses di daerah tertinggal, meningkatkan kapasitas sekolah, serta menjalankan program retensi siswa untuk mencegah putus sekolah, terutama di jenjang menengah atas.

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2020-2024 bervariasi antar jenjang pendidikan. Dalam 5 tahun terakhir, angka partisipasi naik dan turun dari tahun ke tahun. Secara garis besar, APM adalah indikator yang mengukur persentase populasi dalam kelompok usia tertentu yang terlibat dalam suatu tingkat pendidikan tertentu, misalnya tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk perkembangan APM di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 2.25.

**Tabel 2.26**
**Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| JENJANG PENDIDIKAN | APM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SD/MI/ Sederajat | 99,70 | 99,15 | 97,79 | 92,30 | 90,53 |
| SMP/MTs/Sederajat | 86,02 | 86,61 | 82,06 | 82,21 | 79,16 |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 68,37 | 68,05 | 67,51 | 60,78 | 71,42 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan tabel 2.25 dapat dilihat bahwa untuk jenjang SD/MI/sederajat di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan angka yang relatif tinggi pada periode 2020 hingga 2024, meskipun terjadi fluktuasi. Pada tahun 2020, APM berada di angka 99,70% dan sedikit menurun menjadi 99,15% pada 2021. Penurunan lebih signifikan terjadi pada 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 97,79% dan 92,30%. Namun, pada tahun 2024 terlihat adanya upaya pemulihan dengan kenaikan APM menjadi 90,53%. Meskipun masih tinggi, tren ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi anak usia sekolah dasar secara murni.

Selanjutnya, APM pada jenjang SMP/MTs/sederajat juga menunjukkan penurunan selama periode lima tahun terakhir. Tahun 2020 mencatat angka partisipasi sebesar 86,02%, yang sedikit meningkat pada 2021 menjadi 86,61%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan berturut-turut: 82,06% pada 2022, 82,21% pada 2023, dan turun lebih tajam menjadi 79,16% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa usia SMP secara tepat waktu, yang bisa berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi, geografis, atau ketersediaan fasilitas pendidikan.

Sementara itu, APM pada jenjang pendidikan menengah atas merupakan yang terendah dibanding dua jenjang sebelumnya. APM pada 2020 berada di angka 68,37% dan menurun sedikit menjadi 68,05% pada 2021. Penurunan berlanjut pada 2022 dan mencapai titik terendah di 60,78% pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 71,42%. Meskipun kenaikan ini patut diapresiasi, angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir 3 dari 10 anak usia SMA di Kabupaten Nagan Raya belum berpartisipasi secara tepat waktu dalam pendidikan formal. Ini menandakan perlunya intervensi yang lebih kuat untuk mengatasi hambatan akses atau motivasi pada kelompok usia ini.

Berdasarkan tabel 2.25 dapat diambil kesimpulan bahwa Tren Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya penurunan partisipasi pendidikan di semua jenjang, terutama pada tahun 2022–2023. Jenjang SD/MI/sederajat masih mencatat partisipasi tertinggi, meskipun sempat mengalami penurunan cukup tajam. Jenjang SMP/MTs/sederajat cenderung stabil namun tetap menunjukkan tren menurun, sedangkan jenjang SMA/SMK/MA/sederajat menghadapi tantangan terbesar dengan APM terendah, meskipun sempat membaik pada 2024. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan afirmatif dan strategi yang lebih intensif untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, khususnya di tingkat menengah dan atas, agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah atau keterlambatan dalam menyelesaikan pendidikan sesuai usia.

### 4. Persentase Penduduk Usia 17-24 Tahun menurut jenis kelamin, kelompok, umur sekolah, dan partisipasi Sekolah

Penduduk usia 17-24 tahun adalah kelompok yang vital dalam masyarakat, di mana partisipasi mereka dalam pendidikan dapat mempengaruhi masa depan ekonomi dan sosial suatu negara. Data menunjukkan bahwa persentase partisipasi sekolah di kalangan remaja ini bervariasi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Secara umum, tingkat partisipasi pendidikan tinggi, tetapi tantangan dalam hal kesetaraan gender dan akses masih ada. Perbandingan antara siswa yang bersekolah dan mereka yang tidak dapat memberikan pandangan yang jelas tentang efektivitas kebijakan pendidikan dan upaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

**Tabel 2.27**
**Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya**

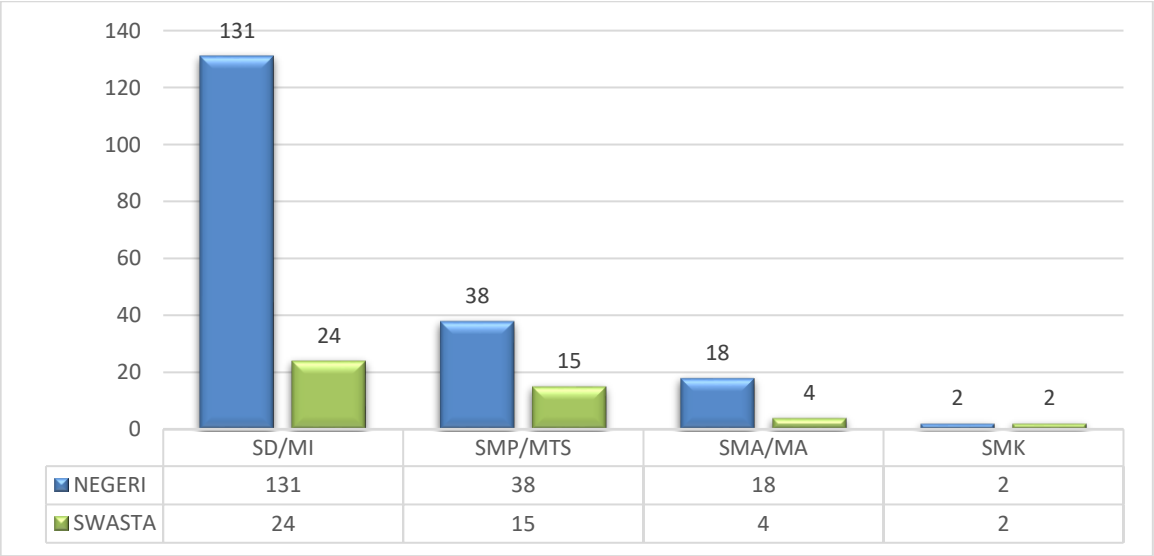
| JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR SEKOLAH | TAHUN 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH | MASIH SEKOLAH | TIDAK SEKOLAH LAGI |
| **Laki-laki** | | | |
| **7-12** | - | 97,00 | 13,00 |
| **13-15** | - | 82,06 | 17.94 |
| **16-18** | - | 82.10 | 17.90 |
| **19-24** | - | 21.13 | 78.87 |
| **7-24** | - | 68.64 | 31.36 |
| **Perempuan** | | | |
| **7-12** | - | 100.00 | - |
| **13-15** | - | 100.00 | - |
| **16-18** | 2.21 | 86.52 | 11.27 |
| **19-24** | - | 29.78 | 70.22 |
| **7-24** | 0.40 | 76.32 | 23.29 |
| **Jumlah Total** | | | |
| **7-12** | - | 99.94 | 0.06 |
| **13-15** | - | 99.38 | 0.62 |
| **16-18** | 1.22 | 84.55 | 14.23 |
| **19-24** | - | 24.82 | 75.18 |
| **7-24** | 0.19 | 72.27 | 27.54 |

*Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2022*

## 5. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Jumlah Sekolah Tahun Ajaran di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar berkut :

**Gambar 2.20**
**Jumlah Sekolah di Kabupaten Nagan Raya,**
**Tahun Ajaran 2023/2024 (Unit)**




*Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2024*

Perkembangan peserta didik/ murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif. Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.28**
**Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan**
**di Kabupaten Nagan Raya, Tahun Ajaran 2020-2024 (orang)**

| NO | JUMLAH PESERTA DIDIK | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | SD | 14.981 | 14.490 | 15.127 | 15.598 | 15.751 |
| 2 | SMP | 5.650 | 4.625 | 5.636 | 6.066 | 6.582 |
| **Jumlah** | | **20.631** | **19.115** | **20.763** | **21.664** | **22.333** |

*Sumber: Nagan Raya dalam Angka, 2025*

Berdasarkan tabel 2.28 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan pada penambahan murid di Kabupaten Nagan Raya, Jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 17 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2021). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 28 murid per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).

Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien.

Namun berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya mengenai rasio peserta didik-ruang kelas. Masih banyak sekolah yang memerlukan ruang kelas baru. Karena jumlah peserta didiknya banyak.

**Tabel 2.29**
**Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas di Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| NO | RASIO PESERTA DIDIK - RUANG KELAS | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sekolah Dasar | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama delapan tahun terakhir (2012-2022), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2018, pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdi sebanyak 136 orang untuk guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 1.286 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana jumlah guru SD yang kualifkasi D1/D2/D3 sebanyak 101 orang berkurang dan guru dengan kualifikasi guru DIV/S1 meningkat sebanyak 1.312 orang.

Guru SMP yang mengajar pada tahun 2018 sebanyak 64 orang dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 541 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 sejumlah 30 orang, sedangkan guru dengan kualifikasi DIV/S1 sejumlah 583. Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30**
**Kualifikasi Guru di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023**

| NO | JUMLAH GURU | TAHUN KUALIFIKASI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | D1/ D2/ D3 | DIV/ S1 | D1/ D2/ D3 | DIV/ S1 | D1/ D2/ D3 | DIV/ S1 | D1/ D2/ D3 | DIV/ S1 | D1/ D2/ D3 | DIV/ S1 |
| 1 | SD | 136 | 1.286 | 135 | 1.248 | 183 | 826 | 194 | 811 | 101 | 1.312 |
| 2 | SMP | 64 | 541 | 62 | 551 | 45 | 310 | 45 | 315 | 30 | 583 |
| **Jumlah** | | 200 | 1.827 | 197 | 1.799 | 228 | 1.136 | 239 | 1.126 | 131 | 1.895 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

## B. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,94 %. Dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 5%. Tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 3,34 %. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama.

Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan di antaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan

terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31**
**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | 52 | 52 | 20 | 6 | 39 |
| 2 | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu | 2.828 | 2.734 | 2.714 | 994 | 2.586 |
| **Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (%)** | | 18,38 | 19,01 | 7,3 | 5,59 | 15,08` |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Pada tabel 2.31 juga menunjukkan angka kelangsungan hidup bayi, atau dalam konteks medis lebih dikenal sebagai tingkat kelangsungan hidup bayi (survival rate), menggambarkan persentase bayi yang hidup setelah dilahirkan selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase atau per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini adalah indikator penting untuk mengukur kesehatan dan kualitas perawatan kesehatan ibu dan anak dalam suatu populasi.

Pada tahun 2024, angka kematian bayi di Kabupaten Nagan Raya tercatat sebanyak 39 kasus dari 2.586 kelahiran hidup, sehingga menghasilkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 15,08 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 15 bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup. Meskipun angka ini mengalami fluktuasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut tetap memberikan perhatian penting bagi pemerintah daerah, mengingat AKB merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Pencapaian ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi penurunan kematian bayi melalui berbagai pendekatan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperluas akses terhadap pelayanan antenatal care (ANC) dan postnatal care (PNC), serta memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan rujukan yang memadai. Selain itu, intervensi gizi seimbang bagi ibu hamil dan bayi, pemberian ASI eksklusif, serta peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap menjadi faktor kunci dalam memperbaiki angka harapan hidup bayi.

Meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi bukan hanya tentang meningkatkan statistik, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang. Investasi dalam kesehatan ibu dan anak adalah investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**2. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, AKABA tercatat sebesar 1,4 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 menjadi 19,6 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya, indikator ini mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan nilai 5 per 1.000 kelahiran hidup, serta kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 3,34 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, pada tahun 2024 AKABA kembali meningkat menjadi 15,08 per 1.000 kelahiran hidup.

Perkembangan angka tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam tren mortalitas balita, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, status gizi, cakupan imunisasi, serta masih terbatasnya deteksi dini dan tata laksana penyakit pada balita. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan intervensi kesehatan balita secara komprehensif, baik dari sisi promotif, preventif, maupun kuratif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A, peningkatan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, penguatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS), serta penyediaan layanan rujukan gawat darurat balita yang lebih cepat dan efektif. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.32**
**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| Tahun | Angka Kematian Balita (%) |
|---|---|
| **2020** | 1,4 |
| **2021** | 19,6 |
| **2022** | 5 |
| **2023** | 3,34 |
| **2024** | 15,08 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

### 3. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi.

Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Nagan Raya dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 13,08 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan sebesar 6,2 persen menjadi 13,89 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2022 yang mencapai 17,68 per 1.000 kelahiran hidup, atau naik sekitar 27,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2023 AKN kembali meningkat menjadi 18,56 per 1.000 kelahiran hidup, dengan kenaikan sekitar 5 persen dibanding tahun 2022, sehingga menandai puncak angka kematian neonatal selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi 11,21 per 1.000 kelahiran hidup, atau turun sekitar 39,6 persen dibandingkan tahun 2023.

Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya intervensi kesehatan ibu dan anak, angka kematian neonatal masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan persalinan, akses rujukan neonatal, serta kondisi gizi ibu dan bayi baru lahir. Penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, namun konsistensi intervensi tetap perlu dijaga agar tren penurunan dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan

bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.33**
**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu | 37 | 38 | 48 | 50 | 29 |
| 2 | Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu | 2.828 | 2.734 | 2.714 | 2.693 | 2.586 |
| **Angka Kematian Neotal per 1000 kelahiran hidup** | | 13,08 | 13,89 | 17,68 | 18,56 | 11,21 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

### 4. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Kematian Ibu atau maternal *death* didefinisikan sebagai "kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan" (WHO, 2004). Konsep maternal *death* ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 141,44 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini kemudian melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi 438,91 per 100.000 kelahiran hidup, atau meningkat sekitar 210 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan masih adanya permasalahan serius terkait pelayanan kesehatan ibu, keterlambatan penanganan komplikasi, maupun akses rujukan medis pada periode tersebut.

Pada tahun 2022, AKI kembali menurun signifikan menjadi 147,38 per 100.000 kelahiran hidup, atau turun sebesar 66,4 persen dibandingkan tahun 2021. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana AKI tercatat sebesar 110,58 per 100.000 kelahiran hidup, atau berkurang sekitar 25 persen dari tahun 2022. Penurunan ini memperlihatkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan kematian ibu melalui peningkatan kualitas pelayanan antenatal care, persalinan yang lebih banyak dilakukan di fasilitas kesehatan, serta respons yang lebih baik terhadap kasus kegawatdaruratan obstetri.

Selanjutnya, pada tahun 2024 AKI kembali mengalami penurunan menjadi 77,34 per 100.000 kelahiran hidup, atau turun sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini menjadi capaian terbaik dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan bahwa upaya penguatan pelayanan kesehatan ibu di Kabupaten Nagan Raya telah memberikan hasil yang positif.

Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.34**
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| TAHUN | ANGKA KEMATIAN IBU (%) |
|---|---|
| 2020 | 141,44 |
| 2021 | 438,91 |
| 2022 | 147,38 |
| 2023 | 110,58 |
| 2024 | 77,34 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

## 5. Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu.

Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin. Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita. Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan Raya sampai Tahun 2023 berkurang menjadi 274 unit dengan

jumlah Balita 15.121 dengan rasio posyandu per satuan balita 18,12 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.35**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah posyandu | 257 | 275 | 275 | 274 | 274 |
| 2 | Jumlah balita | 18.402 | 18.582 | 14.933 | 15.121 | 15.000 |
| Rasio posyandu per satuan balita | | 69,84 | 13,96 | 14,80 | 18,41 | 18,27 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

## 6. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/ pustu). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.

Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa. Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 15 unit untuk jumlah penduduk 174.347 jiwa pada tahun 2013. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 adalah 0,09, rasio Poliklinik tahun 2023 adalah 0,06, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,28. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.36**
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,081 | 0,09 |
| 2 | Rasio Poliklinik per satuan penduduk | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,070 | 0,06 |
| 3 | Rasio Pustu per satuan penduduk | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,286 | 0,28 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

### 7. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 sebesar 0,0058 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

### 8. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2023 yaitu 21 dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 174.347 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 19/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 10 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 adalah 53 orang atau dengan rasio 53/100.000 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya.

Total jumlah Dokter gigi adalah 23 orang atau 23/100.000 penduduk, Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah kelebihan dokter gigi sebanyak 6 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.37**
**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Dokter Spesialis | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 2 | Jumlah Dokter Umum | 59 | 40 | 90 | 53 | 81 |
| 3 | Jumlah Dokter Spesialis Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah Dokter Gigi | 10 | 10 | 21 | 23 | 26 |
| 5 | Jumlah Penduduk | 168.392 | 170.055 | 172.219 | 174.347 | 176.461 |
| 6 | Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
| 7 | Rasio Dokter Umum per satuan penduduk | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,45 |
| 8 | Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,147 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

## 9. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis merupakan perbandingan antara jumlah tenaga medis yang tersedia dengan jumlah populasi yang dilayani di suatu wilayah atau institusi kesehatan. Rasio ini merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kapasitas sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Dalam konteks global, rasio tenaga medis sering kali menjadi cerminan dari aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Semakin tinggi rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk, semakin besar kemungkinan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara tepat waktu dan efektif. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menyebabkan peningkatan waktu tunggu, penurunan kualitas perawatan, dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2020-2024.

**Tabel 2.38**
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Perawat | 172 | 239 | 570 | 563 | 614 |
| 2 | Jumlah Bidan | 406 | 503 | 763 | 764 | 792 |
| 3 | Jumlah Perawat Gigi | 14 | 16 | 34 | 41 | 54 |
| 4 | Jumlah Teknis Kefarmasian | 22 | 34 | 53 | 99 | 122 |
| 5 | Jumlah Apoteker | 9 | 16 | 27 | 24 | 27 |
| 6 | Jumlah Kesehatan Masyarakat | 34 | 92 | 148 | 157 | 165 |
| 7 | Jumlah Kesehatan Lingkungan | 11 | 16 | 30 | 37 | 44 |
| 8 | Jumlah Nutrisionis | 17 | 23 | 47 | 51 | 54 |
| 9 | Jumlah Dietisien | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Jumlah Fisioterapis | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | Jumlah Okupasi Terapis | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Jumlah Terapis Wicara | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Jumlah Akupuntur | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Jumlah Radiografer | 3 | 0 | 12 | 16 | 16 |
| 15 | Jumlah Radioterapis | 11 | 0 | 0 | 5 | - |
| 16 | Jumlah Elektromdis | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Jumlah Teknisi Gigi | 13 | 0 | 12 | 6 | 3 |
| 18 | Jumlah Analis Kesehatan | 9 | 9 | 33 | 44 | - |
| 19 | Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 0 | 0 | 15 | 8 | 24 |
| 20 | Jumlah Penduduk | 168.392 | 168.392 | 171.047 | 173.151 | 176.461 |
| 21 | Rasio Perawat per satuan penduduk | 102 | 0,14 | 3,33 | 3.25 | - |
| 22 | Rasio Bidan per satuan penduduk | 242 | 0,3 | 4,46 | 4.41 | - |
| 23 | Rasio Perawat Gigi per satuan penduduk | 8 | 0,01 | 0,19 | 0.24 | - |
| 24 | Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk | 12 | 0,02 | 3,09 | 0.57 | - |
| 25 | Rasio Apoteker per satuan penduduk | 5 | 0,01 | 0,15 | 0.14 | - |
| 26 | Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk | 20 | 0,05 | 0,86 | 0.91 | - |
| 27 | Rasio Kesehatan Lingkungan per satuan penduduk | 6 | 0,01 | 0,17 | 0.21 | - |
| 28 | Rasio Nutrisionis per satuan penduduk | 10 | 0,01 | 0,27 | 0.29 | - |
| 29 | Rasio Fisioterapis per satuan penduduk | 5 | 0 | 0,076 | 0.00 | - |
| 30 | Rasio Radiografer per satuan penduduk | 2 | 0 | 0,070 | 0.08 | - |
| 31 | Rasio Elektromedis per satuan penduduk | 3 | 0 | 0,023 | 0.00 | - |
| 32 | Rasio Analisis Kesehatan per satuan penduduk | 4 | 0 | 0,19 | 0.00 | - |
| 33 | Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan per satuan penduduk | 0 | 0 | 0,087 | 0.00 | - |
| 34 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk | 0,51 | 0,56 | 0,76 | 0.09 | - |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

## 10. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020-2024 berfluktuasi. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.39**
**Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 530 | 258 | 279 | 429 | 505 |
| 2 | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 530 | 603 | 279 | 657 | 650 |
| **Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani** | | **100** | **100** | **42,79** | **100** | **78** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

## 11. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan indikator penting dalam menilai akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Indikator ini menggambarkan proporsi ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain yang berkompeten), dibandingkan dengan jumlah seluruh persalinan yang terjadi pada periode tertentu. Semakin tinggi cakupan ini, semakin baik pula jaminan keselamatan ibu dan bayi dalam proses persalinan.

**Tabel 2.40**
**Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 2817 | 2731 | 2721 | 2713 | 2713 |
| 2 | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 3541 | 3016 | 3128 | 3138 | 3138 |
| **Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan** | | **84.79** | **79.55** | **90.55** | **86.98** | **86.46** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi namun dengan tren perbaikan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan pertolongan persalinan mencapai 84,79 persen, lalu menurun pada 2021 menjadi 79,55 persen atau turun sekitar 6,2 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan, baik dari sisi keterbatasan akses pelayanan, perubahan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, maupun faktor eksternal seperti dampak pandemi yang berimbas pada pelayanan kesehatan ibu.

Selanjutnya, pada tahun 2022 cakupan pertolongan persalinan meningkat signifikan menjadi 90,55 persen, atau naik sekitar 13,8 persen dibandingkan 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu, terutama pada aspek ketersediaan tenaga kebidanan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Namun, pada tahun 2023 cakupan kembali mengalami penurunan menjadi 86,98 persen, atau turun 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompeten sedikit menurun menjadi 86,46 persen, atau berkurang tipis 0,6 persen dari 2023. Meski demikian, capaian ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021, serta mendekati standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional.

### 12. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan

tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif.

Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada, yakni tetap 222 desa/kelurahan sepanjang periode tersebut, terlihat bahwa jumlah desa/kelurahan yang mencapai status UCI justru semakin sedikit. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 73 desa/kelurahan, turun menjadi 52 pada 2021, kemudian hanya 63 di tahun 2022. Tahun 2023 sempat melonjak hingga 178 desa/kelurahan, namun pada 2024 kembali merosot menjadi hanya 41 desa/kelurahan. Dinamika ini menunjukkan adanya ketidakstabilan capaian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan vaksin, akses pelayanan kesehatan, hingga tingkat kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian UCI Kabupaten Nagan Raya pada periode 2020–2024 masih jauh dari target universal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk memperkuat program imunisasi dasar lengkap, baik melalui peningkatan peran puskesmas, optimalisasi kader posyandu, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. Tanpa langkah perbaikan yang serius, rendahnya cakupan UCI dikhawatirkan dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular pada anak di masa mendatang. Data Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.41**
**Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Desa / Kelurahan UCI | 73 | 52 | 63 | 178 | 41 |
| 2 | Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| **Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)** | | **40,99** | **32,88** | **23,42** | **28,82** | **18,47** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

## 13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 18 kasus gizi buruk dan tertangani 100 persen, tahun 2022 terdapat 23 kasus dan tertangani 100 persen.

Hingga Tahun 2024 cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas mencapai 100 persen dengan kasus meningkat mencapai 75 kasus. Upaya pemerintah kedepan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020-2024 di sajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42**
**Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 5 | 10 | 23 | 65 | 75 |
| 2 | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama | 5 | 10 | 23 | 65 | 75 |
| **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

## 14. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak

Imunisasi campak merupakan salah satu imunisasi wajib yang diberikan kepada anak usia 1 tahun untuk mencegah penyakit menular yang berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Capaian imunisasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian anak akibat penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Apabila ditinjau dari tren lima tahun terakhir, persentase anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, cakupan imunisasi campak tercatat 74,42 persen, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 60,01 persen dan kembali turun signifikan pada tahun 2022 menjadi hanya 51,62 persen. Menariknya, pada tahun 2023 terjadi lonjakan drastis hingga mencapai 100 persen, sebelum akhirnya kembali merosot pada tahun 2024 menjadi 52,06 persen.

**Tabel 2.43**
**Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun | 1996 | 1721 | 2101 | 2871 | 1515 |
| 2 | Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama | 3326 | 3334 | 2101 | 2871 | 2910 |
| **Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak** | | **74,42** | **60,01** | **51,62** | **100** | **52,06** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

## 15. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia pada balita merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap kualitas pembangunan manusia. Penyakit ini tidak hanya berkontribusi pada tingginya angka kesakitan dan kematian anak, tetapi juga mencerminkan masih adanya tantangan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar di suatu daerah. Cakupan penanganan pneumonia balita dijadikan salah satu indikator dikarenakan mampu menggambarkan sejauh mana sistem kesehatan mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan merata. Peningkatan cakupan balita pneumonia yang ditangani menjadi cerminan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan secara keseluruhan, khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian anak dan memperkuat ketahanan kesehatan daerah.

**Tabel 2.44**
**Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun | 205 | 197 | 335 | 201 | 13 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 756 | 765 | 1646 | 1664 | 787 |
| **Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani** | | **34,18** | **27,12** | **25,75** | **20,35** | **12,08** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.44 menunjukkan bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 cakupan mencapai 34,18%, namun menurun menjadi 27,12% pada 2021 dan kembali turun menjadi 25,75% di tahun 2022. Tren penurunan ini berlanjut hingga 2023 dengan capaian 20,35%, bahkan anjlok tajam pada 2024 hanya 12,08%. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun jumlah perkiraan kasus pneumonia balita cukup tinggi setiap tahunnya, persentase penanganan yang berhasil dilakukan justru terus melemah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar cakupan layanan kesehatan dasar, khususnya dalam penanganan pneumonia balita, dapat ditingkatkan secara berkesinambungan di masa mendatang.

### 16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+

Tuberkulosis Basil Tahan Asam positif atau TBC BTA(+) merupakan jenis TBC paru yang ditandai dengan adanya kuman *Mycobacterium tuberculosis* dalam dahak penderita. Kasus ini menjadi sangat penting karena sifatnya yang menular langsung melalui udara, sehingga penderita berpotensi besar menyebarkan penyakit kepada orang lain. Oleh sebab itu, TBC BTA(+) menjadi salah satu fokus utama dalam program kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA(+) digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah berhasil menemukan penderita baru dan memastikan mereka menjalani pengobatan. Semakin tinggi cakupan, semakin baik pula peluang untuk memutus rantai penularan, menurunkan angka kesakitan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencerminkan kinerja teknis sektor kesehatan, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas intervensi pembangunan kesehatan di suatu daerah.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung membaik. Pada tahun 2020, cakupan tercatat sebesar 100 persen, namun turun drastis pada tahun 2021 menjadi 37,2 persen. Tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan ke 39,0 persen, kemudian melonjak pada tahun 2023 hingga 55,58 persen. Capaian terakhir tahun 2024 menunjukkan angka 71,02 persen, yang berarti lebih dari dua pertiga penderita diperkirakan telah ditemukan dan ditangani. Tren ini menggambarkan adanya perbaikan kinerja deteksi dan penanganan TBC di Kabupaten Nagan Raya, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar cakupan dapat mencapai standar optimal.

**Tabel 2.45**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun | 166 | 174 | 337 | 424 | 424 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama | 446 | 446 | 606 | 597 | 597 |
| **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)** | | **100** | **37,2** | **39,0** | **55,58** | **71,02** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

## 17. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Kasus Tuberkulosis (TB) Paru pada tahun 2019 terdapat 284 kasus baru dan lama atau 0.14 persen per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2024 terdapat 348 kasus per 100.000 penduduk atau 0,19 persen. Dari data tersebut dapat dilihat kasus TBC baru dan lama bersifat fluktuatif. Hal ini sangat baik karena dilakukannya deteksi dini penyakit TBC yang bertujuan untuk penemuan dini dan mencegah terjadinya TBC kronis serta kegiatan tersebut harus tetap ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.46**
**Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama) | 166 | 174 | 337 | 424 | 348 |
| 2 | Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama | 168.392 | 170.055 | 172.219 | 174.347 | 175.682 |
| **Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)** | | **0,10** | **0,10** | **0,19** | **0,24** | **0,19** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

## 18. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian akibat Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Nagan Raya mengalami lonjakan signifikan dalam dua tahun terakhir, setelah sebelumnya berada dalam kondisi yang sangat rendah. Pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah kematian akibat TB tercatat sangat minim, yaitu hanya antara 4 hingga 5 kasus, dengan tingkat kematian kurang dari 0,003 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan keberhasilan pengendalian penyakit TB pada periode tersebut, yang kemungkinan besar didukung oleh deteksi dini, pengobatan yang teratur, serta dukungan layanan kesehatan yang memadai.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi lonjakan yang cukup mencolok dengan jumlah kematian masing-masing sebanyak 19 dan 20 kasus, atau setara dengan tingkat kematian sebesar 11 dan 11,38 per 100.000 penduduk. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam penanganan TB di tingkat daerah. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi lonjakan ini antara lain keterlambatan diagnosis, kepatuhan pasien yang menurun, munculnya TB resisten obat, serta dampak sisa pandemi yang dapat mengganggu layanan kesehatan dasar. Kenaikan ini menjadi perhatian serius karena TB merupakan penyakit menular yang dapat dicegah dan disembuhkan, sehingga kematian akibat TB sebenarnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan TB yang ada, termasuk penguatan surveilans kasus, pelacakan kontak erat, dan edukasi masyarakat mengenai gejala dan pentingnya menyelesaikan pengobatan. Perluasan layanan TB hingga ke tingkat Puskesmas dan pembinaan intensif bagi pasien juga menjadi langkah penting dalam mencegah kematian akibat TB di masa mendatang.

**Tabel 2.47**
**Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pasien TB yang meninggal | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 |
| 2 | Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama | 168.392 | 170.055 | 172.219 | 173.151 | 175.682 |
| **Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)** | | **0,002** | **0,002** | **0,003** | **11** | **11,38** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2025*

## 19. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Program DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) merupakan strategi global yang direkomendasikan oleh WHO untuk penanggulangan Tuberkulosis (TB). Program ini menekankan pengobatan langsung yang diawasi oleh petugas kesehatan, guna memastikan pasien TB menjalani pengobatan secara lengkap dan teratur. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan tingkat kesembuhan pasien serta mencegah resistensi obat. Di Kabupaten Nagan Raya, pelaksanaan program DOTS menjadi bagian penting dari upaya pengendalian TB, terutama dengan mengidentifikasi dan menangani kasus secara sistematis setiap tahunnya.

**Tabel 2.48**
**Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS | 166 | 174 | 337 | 424 | 348 |
| 2 | Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut | 446 | 446 | 606 | 579 | 511 |
| **Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS** | | **37,22** | **39,01** | **55,58** | **73,23** | **68,10** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.48, terlihat bahwa proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, proporsi kasus yang tertangani melalui DOTS hanya sebesar 37,22%, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 68,10% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam sistem deteksi dan pengobatan TB melalui program DOTS, yang dapat diasumsikan sebagai hasil dari penguatan kapasitas layanan kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengobatan TB yang tuntas. Meski demikian, angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30% kasus TB yang belum tertangani melalui program DOTS pada tahun terakhir, sehingga perlu upaya lanjutan dalam peningkatan cakupan dan efektivitas program.

## 20. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) Paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Selama 5 tahun terakhir, jumlah pasien TB Paru yang sembuh di Kabupaten Nagan Raya meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, Jumlah Pasien TB yang diobati terus menerus mengalami peningkatan. Angka yang fluktuatif ini dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita TB dalam pelaksanaan pengobatan dalam program DOTS. Kedepannya diharapkan peran serta petugas kesehatan untuk menjemput bola serta peran dari lintas sektor dalam mendukung program DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.49**
**Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pasien Tuberkulosis Paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun | 159 | 80 | 165 | 357 | 381 |
| 2 | Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama | 166 | 174 | 179 | 384 | 423 |
| **Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS** | | 90,14 | 95,78 | 45,98 | 92,18 | 90,10 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2025*

## 21. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aides Aegypti, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Dalam konteks pembangunan kesehatan daerah, keberhasilan penanganan kasus DBD yang konsisten perlu diimbangi dengan penguatan upaya promotif dan preventif. Berikut data terkait cakupan penyakit DBD:

**Tabel 2.50**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun | 23 | 11 | 17 | 67 | 24 |
| 2 | Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama | 23 | 11 | 17 | 67 | 24 |
| **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2025*

Berdasarkan tabel 2.50, Penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian cakupan yang sangat baik. Seluruh kasus DBD yang ditemukan setiap tahunnya berhasil ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan tingkat cakupan penemuan dan penanganan yang konsisten di angka 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini menandakan bahwa sistem respons cepat dan efektivitas pelacakan serta penanganan kasus telah berjalan optimal di wilayah kerja pelayanan kesehatan.

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah kasus, terdapat fluktuasi yang cukup tajam. Jumlah penderita DBD sempat menurun drastis dari 23 kasus di tahun 2020 menjadi hanya 11 kasus di 2021, lalu kembali naik menjadi 17 kasus pada 2022. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2023 dengan 67 kasus, kemudian turun kembali menjadi 24 kasus di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem penemuan dan penanganan sudah berjalan baik, faktor lingkungan dan pola hidup masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pencegahan penyakit berbasis vektor seperti DBD. Kenaikan kasus yang ekstrem di tahun 2023 dapat disinyalir akibat kondisi cuaca ekstrem, genangan air, atau lemahnya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu terus mendorong kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat, pembersihan lingkungan, serta keterlibatan berbagai sektor terkait dalam pencegahan DBD secara terpadu.

### 22. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus penderita malaria. Dalam kurun waktu 2 tahun berturut – turut 2020 hingga 2021 tidak ada kasus Penderita Malaria dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan 11 kasus

atau 6,4 persen per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.51**
**Angka Kejadian Malaria**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 2 | Jumlah penduduk pada pertengahan tahun | 167.912 | 170.016 | 172.089 | 173.151 | 175.682 |
| **Angka Kejadian Malaria** | | **0,00** | **0,00** | **6,4** | **-** | **9.68** |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2025*

## 23. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan

prevalensi stunting adalah Kemendagri telah menetapkan beberapa lokus stunting. Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 14% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Salah satu lokus stunting untuk lingkup Kabupaten/ Kota adalah kabupaten Nagan Raya Kenapa ditetapkannya lokus stunting untuk kabupaten Nagan Raya karena masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya untuk pencegahan dan penanganan stanting di kabupaten Nagan Raya tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 050/212/Kpts/2020 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, Pelaksana, Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Bupati Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevelensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut adalah daftar lokus intervensi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022.

**Tabel 2.52**
**Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023**

| NO | KECAMATAN | DESA | PERSENTASE STUNTING | JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TELAH MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK | JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA PADA TAHUN TERSEBUT | CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beutong ateuh | Kuta Teungoh | 34 | 185 | 185 | 100% |
| 2 | Beutong ateuh | Blang Meurandeh | 33 | 58 | 113 | 51% |
| 3 | Beutong ateuh | Babah Suak | 25 | 70 | 135 | 51,8% |
| 4 | Darul Makmue | Kuta Trieng | 21 | 442 | 450 | 98% |
| 5 | Darul Makmur | Geulanggang Gajah | 37 | 159 | 163 | 97,5% |
| 6 | Darul Makmur | Tuwi Buya | 36 | 146 | 164 | 89% |
| 7 | Darul Makmur | Kayee Unou | 24 | 98 | 125 | 78% |
| 8 | Darul Makmur | Suak Palembang | 29 | 254 | 322 | 78,8% |
| 9 | Darul Makmur | Lamie | 17 | 499 | 665 | 75% |
| 10 | Kuala | Simpang Peut | 11 | 1367 | 1400 | 97,6% |
| 11 | Kuala | Blang Muko | 27 | 254 | 359 | 70,7% |
| 12 | Kuala | Cot Kumbang | 30 | 192 | 248 | 77% |
| 13 | Kuala | Ujong Fatihah | 10 | 1348 | 1379 | 97,7% |
| 14 | Kuala Pesisir | Langkak | 6 | 360 | 449 | 80% |

| NO | KECAMATAN | DESA | PERSENTASE STUNTING | JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TELAH MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK | JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA PADA TAHUN TERSEBUT | CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kuala Pesisir | Padang Rubek | 3 | 428 | 460 | 93% |
| 16 | Kuala Pesisir | Padang Panyang | 8 | 407 | 407 | 100% |
| 17 | Kuala pesisir | Kuala Trang | 13 | 800 | 800 | 100% |
| 18 | Senagan Timur | Mon Bateung | 8 | 65 | 183 | 35% |
| 19 | Senagan Timur | Krung Kulu | 0 | 73 | 120 | 60,8% |
| 20 | Seunagan | Cot Kuta | 0 | 237 | 281 | 84% |
| 21 | Seunagan | Blang Baro | 0 | 373 | 476 | 78% |
| 22 | Suka Makmue | Blang Sapek | 16 | 137 | 234 | 58,5% |
| 23 | Suka Makmue | Alue Gajah | 27 | 33 | 33 | 100% |
| 24 | Tadu Raya | Alu Siron | 31 | 81 | 110 | 73,6% |
| 25 | Tadu Raya | Alue Sepeng | 24 | 107 | 155 | 69% |
| 26 | Tadu Raya | Sumber Daya | 23 | 256 | 256 | 100% |
| 27 | Tripa Makmur | Mon Dua | 12 | 114 | 152 | 75% |
| 28 | Tripa Makmur | Drien Tujoh | 14 | 293 | 328 | 89% |
| 29 | Tripa Makmur | Kabu | 24 | 329 | 383 | 85,9% |
| 30 | Tripa Makmur | Lueng Keubeu Jagat | 19 | 427 | 482 | 88,5% |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2024*

## C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1. Pekerjaan Umum

- **Jalan**

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2023, kondisi baik jalan kabupaten 603,589 Km mengalami peningkatan sepanjang 17,486 km dari kondisi awal tahun 2022. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.53**
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 (Km)**

| REKAP DATA KONDISI JALAN KAB. NAGAN RAYA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONDISI | TAHUN | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % |
| BAIK | 272,270 | 29,453 | 274,609 | 29,706 | 586,103 | 63,402 | 584,471 | 63,226 | 340.406 | 39.239 |
| SEDANG | 191,492 | 20,715 | 409,037 | 44,248 | 11,460 | 1,240 | 9,526 | 1,030 | 23.934 | 2.759 |
| RUSAK RINGAN | 189,171 | 20,464 | 213,183 | 23,061 | 10,990 | 1,189 | 18,119 | 1,960 | 7.546 | 0.870 |
| RUSAK BERAT | 271,488 | 29,368 | 27,592 | 2,985 | 315,868 | 34,169 | 312,305 | 33,784 | 495.636 | 57.132 |

*Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2025*

Berdasarkan tabel 2.53 dapat dilihat bahwa kondisi ruas jalan yang baik di Kabupaten Nagan Raya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ruas jalan yang kokoh dan terpelihara dengan baik memungkinkan aksesibilitas yang lancar antara berbagai wilayah dalam sebuah kabupaten. Hal ini mendukung aktivitas ekonomi seperti transportasi barang, distribusi produk pertanian, dan mobilitas penduduk untuk bekerja dan berbisnis. Dengan infrastruktur jalan yang baik, biaya logistik dapat ditekan dan efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan.

Kemantapan ruas jalan dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur tambahan seperti instalasi utilitas (listrik, air bersih, dan telekomunikasi) serta fasilitas pendukung lainnya (sekolah, rumah sakit, pasar). Jalan yang baik menjadi fondasi untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan yang baik mendukung akses penduduk terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Aksesibilitas yang lebih baik ke rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kemantapan ruas jalan bukan hanya masalah teknis konstruksi semata, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan suatu kabupaten secara keseluruhan. Investasi yang tepat dalam infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan lingkungan.

Selanjutnya, untuk mendukung perkembangan infrakstruktur juga diperlukan perkembangan rasio panjang jalan. Rasio ini merupakan indikator penting dalam evaluasi

infrastruktur transportasi suatu negara atau daerah, karena mempengaruhi konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, rasio panjang jalan menjadi cerminan dari seberapa baik infrastruktur transportasi mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Semakin tinggi rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, semakin baik aksesibilitas terhadap berbagai area dan potensi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menghambat pengembangan ekonomi, akses ke layanan dasar, dan integrasi sosial. Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada tabel 2.54.

**Tabel 2.54**
**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | Kondisi jalan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jalan Baik (km) | 274.609 | 246.124 | 1.152,031 | 584.471 | 1.152,031 |
| 2 | Jumlah Penduduk (jiwa) | 168.392 | 168.392 | 170.591 | 174.347 | 181.103 |
| **Rasio Panjang Jalan** | | **0.163** | **0.163** | **0.146** | **0.675** | **0.006** |

*Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2025*

Untuk Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 diantaranya meliputi kawasan Gampong Twi meulusong, Gampong Blang Teungku, Gampong Kila, Gampong Kandeh, Gampong Blang Lango, dan Gampong Gunong Kong. Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027.

- **Sanitasi**

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak pada tahun 2019 sebesar 67,64 %. Pada tahun 2022 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat menjadi sebesar 73, 48 %.

Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 tidak ada pendataan sehingga data tahun 2020 disamakan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021 meningkat sebesar 8,63 %. Secara umum dari tahun 2019 hingga tahun 2022 rata-rata peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya sebesar 12,90 % hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat seperti : Adanya upaya penurunan kasus stunting, peningkatan sanitasi perdesaan, peningkatan promosi kesehatan. Namun demikian masih terdapat permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat,

masih kurangnya pemicuan terhadap kesehatan masyarakat, masih terdapat desa yang belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). secara rinci akses sanitasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.55**
**Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| URAIAN | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Rasio Rumah Tinggal dengan Akses Sanitasi Layak (%)** | 67,64 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | 74,48 |
| **Pertumbuhan (%)** | 0 | 8,63 | 0,55 | 0,55 | 0,67 |

*Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Proporsi akses air minum layak di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian akses baru mencapai 72,24 persen dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai 82 persen pada tahun 2024. Secara kumulatif, dalam lima tahun terakhir terdapat kenaikan sebesar 9,76 poin persentase, yang mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

**Tabel 2.56**
**Proporsi akses Air Minum Layak**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | Akses Air Minum Layak | 72,24 | 76,74 | 81,04 | 81,80 | 82 |
| **2** | Pertumbuhan (%) | 6,37 | 5,86 | 5,31 | 0,93 | 0,24 |

*Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Jika ditinjau dari laju pertumbuhan tahunan, peningkatan akses air minum layak relatif tinggi pada periode 2020–2022 dengan pertumbuhan di atas 5 persen per tahun. Namun, sejak tahun 2023, laju pertumbuhan melambat secara signifikan, yaitu hanya 0,93 persen pada 2023 dan 0,24 persen pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perluasan akses mulai mendekati titik jenuh, di mana sebagian besar penduduk telah memperoleh layanan air minum layak.

- **Irigasi**

Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2023 terdiri dari 1 daerah irigasi kewenangan pusat (DI Jeuram) seluas ±6.000 Ha dan 37 daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang melayani hampir seluruh Kabupaten Nagan Raya menjadi kewenangan daerah seluas ±1.583 Ha. Adapun Kondisi Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2.57

## Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023

| No | Nama Daerah Irigasi | Status Irigasi | Luas Areal (Ha) | | Kondisi (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Berdasarkan Permen 14/2015 | Baku (Pemetaan IGT) | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | D.I Alue Buluh | Semi Teknis | 150 | 22 | 22.74 | 34.11 | 43.15 |
| 2 | D.I Alue Geureugah | - | 200 | - | | | |
| 3 | D.I Alue Jamok | - | 200 | - | | | |
| 4 | D.I Alue Paku | - | 200 | - | | | |
| 5 | D.I Alue We | Semi Teknis | 200 | 37 | 28 | 42 | 30.00 |
| 6 | D.I Babah Dua | - | 90 | - | | | |
| 7 | D.I Blang Meureundeh | - | 80 | - | | | |
| 8 | D.I Blang Seunong | Semi Teknis | 141 | 66 | 23.6 | 35.4 | 41.00 |
| 9 | D.I Blang Teungku | Semi Teknis | 75 | 19 | 27.6 | 41.4 | 31.00 |
| 10 | D.I Bungong Talo | Teknis | 485 | 418 | 23.08 | 34.62 | 42.30 |
| 11 | D.I Cot Mee | - | 70 | - | | | |
| 12 | D.I Gunong Kupok | - | 100 | - | | | |
| 13 | D.I Gunong Nagan | - | 102 | - | | | |
| 14 | D.I Gunung Reubo | Semi Teknis | 198 | 113 | 24.5 | 36.75 | 38.75 |
| 15 | D.I Karian | Semi Teknis | 100 | 23 | 23.32 | 34.98 | 41.70 |
| 16 | D.I Kila | Semi Teknis | 100 | 17 | 20.68 | 31.02 | 48.30 |
| 17 | D.I Krueng Alem | Semi Teknis | 200 | 50 | 26.04 | 39.06 | 34.90 |
| 18 | D.I Puloe Raga | Semi Teknis | 300 | 109 | 24.63 | 36.945 | 38.43 |
| 19 | D.I Rambong | Semi Teknis | 330 | 129 | 22.3 | 33.45 | 44.25 |
| 20 | D.I Semambek | Semi Teknis | 200 | 23 | 23.31 | 34.965 | 41.73 |
| 21 | D.I Seneuam | - | 334 | - | | | |
| 22 | D.I Twi Meuleusong | Semi Teknis | 200 | 34 | 21.81 | 32.715 | 45.48 |
| 23 | D.I Twi Pongoh | Semi Teknis | 100 | 51 | 17.6 | 26.4 | 56.00 |
| 24 | D.I Alue Meujein | - | 200 | - | | | |
| 25 | D.I Alue Lahu | - | 180 | - | | | |
| 26 | D.I Alue Rambot | - | 70 | - | | | |
| 27 | D.I Blang Aman Tadu | Semi Teknis | 200 | 37 | 23.02 | 34.53 | 42.45 |
| 28 | D.I Blang Neuang | Semi Teknis | 85 | 37 | 26.89 | 40.335 | 32.78 |
| 29 | D.I Blang Puuk | Semi Teknis | 200 | 177 | 15.2 | 22.8 | 62.00 |
| 30 | D.I Gunong Langoe | Semi Teknis | 175 | 39 | 28.9 | 43.35 | 27.75 |
| 31 | D.I Krueng Mangkom | - | 120 | - | | | |
| 32 | D.I Krueng Seumayam | - | 200 | - | | | |
| 33 | D.I Lawa Batu | - | 200 | - | | | |
| 34 | D.I Padang Rubek | Semi Teknis | 65 | 37 | 13.35 | 20.025 | 66.63 |
| 35 | D.I Pante Ara | Semi Teknis | 431 | 82 | 25.32 | 37.98 | 36.70 |
| 36 | D.I Suka Mulia | - | 300 | - | | | |
| 37 | D.I Teuminyeu (Alue Seupeng) | Semi Teknis | 350 | 67 | 21.07 | 31.605 | 47.33 |
| **JUMLAH** | | | **6,931** | **1,587** | **483** | **724** | **893** |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022*

Jaringan Irigasi merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagiaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua

kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Berdasarkan data dari tahun 2020-2024 total panjang jaringan irigasi mengalami perubahan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2021 sebesar 73.212 meter dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 140.600, sedangkan luas lahan budidaya juga mengalami perubahan, yaitu seluas 1.587 Ha. Adapun rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.58**
**Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Jaringan Irigasi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Total Panjang Jaringan Irigasi (m) | 73.212 | 73.212 | 73.212 | 76.465 | 140.600 |
| 2 | Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.587 | 1.587 |
| **Rasio Jaringan Irigasi** | | **45,39** | **45,70** | **45,70** | **48,30** | **88,59** |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2025*

Sebagai Kabupaten dengan penghasilan utama bidang pertanian, keberadaan irigasi di Kabupaten Nagan Raya sangat vital untuk mendukung pertanian yang produktif. Infrastruktur yang baik sangat penting dalam mendukung sistem irigasi yang efisien. Ini mencakup konstruksi dan pemeliharaan saluran irigasi, bendungan, embung atau waduk, serta jaringan pipa dan pompa air. Dengan infrastruktur yang memadai, air dari sungai atau mata air dapat diarahkan dan didistribusikan secara tepat waktu dan merata ke lahan pertanian yang membutuhkan.

Pengembangan infrastruktur irigasi juga melibatkan aspek teknis seperti desain drainase yang baik untuk menghindari banjir atau genangan air berlebih, serta konstruksi bangunan pengatur air untuk mengontrol aliran air sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan terintegrasi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Hal ini mencakup investasi jangka panjang dalam infrastruktur fisik, tetapi juga pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari para petani dan penduduk lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.

## 2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan sarana bagi umat beragama untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Nagan Raya secara resmi sebagian besar sarana tempat ibadah hanya dimiliki oleh umat Islam, berupa Mesjid, Mushalla. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017 rasio tempat ibadah sebesar 3,3 persen, tahun 2019 sebesar 3,1 persen dan Tahun 2020 sebesar 2.9 persen.

**Tabel 2.59**
**Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Tempat Ibadah | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 152.130 | 158.959 | 162.682 | 168.392 |
| **Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk** | | **3,3** | **3,1** | **3,1** | **2,9** |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2025*

## 3. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi:

- Kecamatan Suka Makmue;
- Kecamatan Kuala;
- Kecamatan Kuala Pesisir;
- Kecamatan Darul Makmur ;
- Kecamatan Seunagan;
- Kecamatan Beutong;
- Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang; dan
- Kecamatan Tadu Raya.

**Tabel 2.60**
**Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) | 75 Ha | 75 Ha | 75 Ha | 75 Ha | 75 Ha |
| 2 | Luas Kawasan Budidaya | - | - | - | - | - |
| **Rasio Ruang Terbuka Hijau** | | 0.00931 | 0.00932 | 0.00933 | 0.00934 | 0.00934 |

*Sumber : DLH Kab. Nagan Raya, 2025*

## D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### 1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi pisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.61**
**Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Rumah layak Huni | 724 | 318 | 365 | 370 | 415 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 168.392 | 170.591 | 173.316 | 176.461 | 179.110 |
| **Rasio Rumah Layak Huni** | | **0,43** | **0,19** | **0,21** | **0,21** | **0,23** |

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2025*

### 2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Areal kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh pada Tahun 2024 terdiri atas beberapa kawasan permukiman yang ada dalam 10 Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Adapun persentasenya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.62**
**Persentase Luas Kawasan Kumuh**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Luas Kawasan Kumuh (ha) | 108,33 | 105,73 | 108,33 | 260,93 | 260,93 |
| 2 | Luas wilayah (ha) | 354.491 | 354.491 | 354.491 | 354.491 | 354.490 |
| **Persentase areal kawasan kumuh** | | **0,031** | **0,031** | **0,030** | **0,030** | **0,030** |

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Permasalahan kawasan kumuh merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan permukiman dan tata ruang wilayah. Di Kabupaten Nagan Raya, luas kawasan kumuh yang tercatat selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dari sisi luasan, meskipun persentasenya terhadap total luas wilayah tampak relatif stabil. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh tercatat sebesar 108,33 hektare dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 105,73 hektare. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali ke angka awal, dan lonjakan drastis tercatat pada tahun 2023 dan 2024, di mana luas kawasan kumuh meningkat menjadi 260,93 hektare.

Meskipun peningkatan tersebut terlihat tinggi, persentase kawasan kumuh terhadap total luas wilayah Kabupaten Nagan Raya tetap berada di kisaran 0,030 hingga 0,031 persen. Hal ini dikarenakan luas wilayah Kabupaten Nagan Raya yang sangat besar, yaitu lebih dari 354 ribu hektare. Dengan demikian, secara proporsional, kawasan kumuh belum mendominasi ruang wilayah secara signifikan. Namun, dari sisi kualitas lingkungan hidup dan tata kelola permukiman, peningkatan luasan kawasan kumuh tetap menjadi indikator penting yang harus diperhatikan karena mencerminkan kesenjangan dalam pelayanan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, drainase, serta kondisi bangunan yang tidak layak huni.

## E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

**Tabel 2.63**
**Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | TAHUN | JUMLAH LINMAS (ORANG) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1.286 |
| 2 | 2021 | 1.286 |
| 3 | 2022 | 1.286 |
| 4 | 2023 | 1.222 |
| 5 | 2024 | 1.222 |

*Sumber : Satpol PP WH dan Linmas Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 2.63, jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan dalam dua tahun terakhir. Sejak tahun 2020 hingga 2022, jumlah anggota Linmas tercatat tetap sebanyak 1.286 orang. Namun, pada tahun 2023 dan tahun 2024, jumlah tersebut menurun menjadi 1.222 orang. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya proses rasionalisasi keanggotaan, rotasi kader, atau pembaruan data berbasis efektivitas kebutuhan lapangan di masing-masing wilayah desa dan kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mengambil langkah strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan Linmas. Beberapa solusi yang dilakukan berupa penyusunan program pelatihan rutin dan berjenjang guna meningkatkan kapasitas anggota Linmas di bidang penanggulangan bencana, keamanan lingkungan, dan penguatan kedisiplinan. Selain itu, pendataan ulang berbasis digital serta penguatan koordinasi dengan aparat desa dan kecamatan akan membantu memperjelas distribusi kebutuhan Linmas secara lebih merata.

## F. Sosial

### 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bedasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.64**
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Tahun/Jumlah (Jiwa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Anak Dengan Kecatatan | 49 | 55 | 59 | 343 | 343 |
| 2 | Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu | 750 | 800 | 950 | 2157 | 2167 |
| 3 | Anak Terlantar | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | Anak Berhadapan dengan Hukum | 16 | 8 | 13 | 8 | 8 |
| 5 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 768 | 768 | 778 | 2082 | 2086 |
| 6 | Korban Tindak Kekerasan | 2 | | - | 7 | 7 |
| 7 | Lanjut Usia Terlantar | | 1 | - | 188 | 188 |
| 8 | Penyandang Disabilitas | - | 2.592 | 2.132 | 1820 | 1820 |
| 9 | Tuna Susila | - | | - | - | - |
| 10 | Pengemis | - | 2 | - | - | - |
| 11 | Gelandangan | - | - | - | 5 | 5 |
| 12 | Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan | - | - | 3 | - | 84 |
| 13 | Korban Penyalahgunaan Napza | - | - | - | 12 | 14 |
| 14 | Fakir Miskin | 7 | - | 6.014 | 9.015 | 8665 |

| No | Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial | Tahun/Jumlah (Jiwa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15 | Rumah Tidak Layak Huni | 223 | - | - | 223 | 250 |
| 16 | Keluarga Rentan | 943 | - | - | 943 | 1242 |
| 17 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 13 | - | - | 10 | 33 |
| 18 | Korban Bencana Alam | 81 | - | - | 286 | 314 |
| 19 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | - | - | - | - | 37 |
| 20 | Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) | - | - | - | - | - |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2025*

Berdasarkan tabel 2.64 Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah dan ragam kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan perlindungan sosial. Beberapa kategori mengalami pertambahan yang signifikan, sementara lainnya relatif stabil atau baru mulai terdata. Peningkatan ini mencerminkan bahwa proses pendataan dan pencatatan sosial terus membaik, serta semakin banyaknya kelompok masyarakat rentan yang dapat diidentifikasi untuk mendapatkan layanan.

Pada tahun 2022, jumlah anak dengan kecatatan meningkat dari 59 jiwa menjadi 343 jiwa. Hal serupa terjadi pada anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang melonjak dari 950 jiwa (2022) menjadi lebih dari 2.100 jiwa pada tahun 2023-2024. Kategori lain yang mengalami kenaikan adalah perempuan rawan sosial ekonomi, yang naik tajam menjadi lebih dari 2.000 jiwa dalam dua tahun terakhir. Kenaikan pada kelompok-kelompok ini mengindikasikan adanya penambahan cakupan data dan semakin luasnya jangkauan pelayanan sosial. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas terlihat menurun, dari 2.592 jiwa di tahun 2021 turun menjadi 1.820 jiwa pada dua tahun terakhir. Beberapa kategori seperti bekas warga binaan, korban penyalahgunaan napza, dan pekerja migran bermasalah sosial mulai tercatat dalam dua tahun terakhir, menandakan adanya perluasan cakupan layanan sosial oleh pemerintah daerah.

Melihat perkembangan ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat layanan kesejahteraan sosial ke depan. Pemutakhiran data secara berkala melalui sistem berbasis digital perlu terus didorong untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, peningkatan kapasitas lembaga layanan sosial dan SDM pendamping sosial menjadi penting agar mampu menjangkau dan melayani kelompok-kelompok rentan dengan pendekatan yang inklusif. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Kabupaten Nagan Raya diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.

## 2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial hanya memiliki 5 jenis PSKS yang meliputi: Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Karang Tarusan dan TKSK, dengan keberadaan mereka sangat membantu untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bedasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.65**
**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | JENIS PSKS | JUMLAH/ ORANG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pekerja Sosial Profesional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 |
| 3 | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Lembaga Kesejahteraan Sosial | - | - | - | - | - |
| 5 | Karang Taruna | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Keluarga Pioner | - | - | - | - | - |
| 8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial | - | - | - | - | - |
| **10** | Penyuluh Sosial | - | - | - | - | 4 |
| **11** | TKSK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **12** | Dunia Usaha | - | - | - | - | - |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2025*

Melihat data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 hingga tahun 2024, tampak bahwa pemerintah daerah telah menjaga keberlanjutan peran kelembagaan sosial masyarakat seperti Karang Taruna dan TKSK yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan. Stabilnya jumlah kelompok Karang Taruna sebanyak 50 dan TKSK sebanyak 10 orang setiap tahun mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan adanya mitra sosial aktif di tingkat desa dan kecamatan. Meskipun terjadi penurunan pada jumlah anggota TAGANA sejak 2022, keberadaannya tetap dijaga sebagai bagian penting dari kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Upaya mempertahankan PSKS ini selaras dengan semangat pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung sebagai pelaku pembangunan sosial.

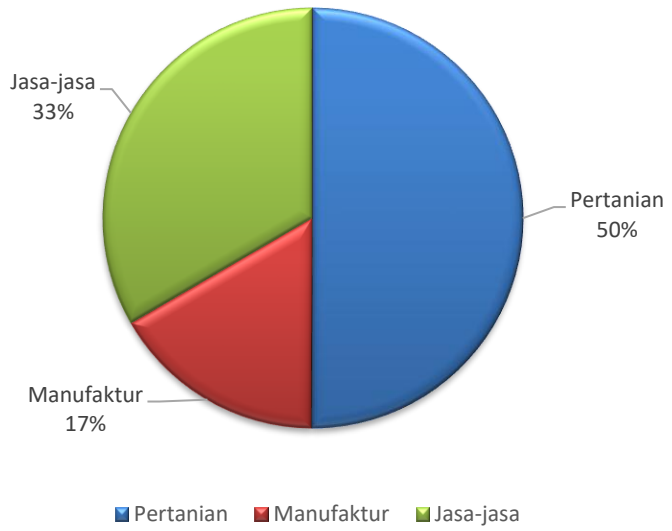
Namun demikian, jumlah dan keberadaan unsur PSKS lainnya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memperkuat tata kelola sosial yang lebih terarah. Penurunan drastis jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada tahun 2024, dari 50 menjadi hanya 2 orang, menjadi perhatian khusus mengingat PSM berperan langsung dalam mendampingi program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan PSKS yang kuat dan terorganisir akan sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, pengurangan angka kemiskinan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya melakukan berbagai upaya penguatan PSKS perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mendukung keberhasilan program prioritas daerah, termasuk pembangunan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan sosial dasar secara berkelanjutan.

### 2.1.4.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### A. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2021, berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 50 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen dan sektor manufaktur sebesar 17 persen.

**Gambar 2.21**
**Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021**




*Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2022*

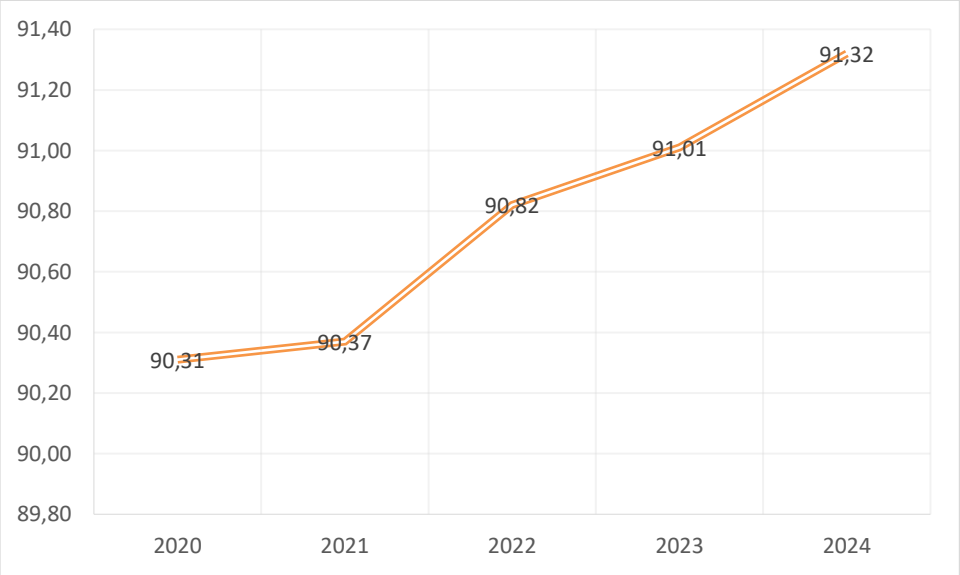
#### B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2022 lebih baik dari kurun waktu empat tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender.

Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antara lain APS SD sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir, sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA sederajat, dan rasio jenis kelamin sejak lahir. Selanjutnya, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan APS SD penduduk laki-laki dan APS SMA bagi penduduk perempuan. Kesenjangan Indek Pembangunan Gender pada tahun 2018 sebesar 89,92 persen meningkat hingga pada tahun 2022 sebesar 90,82 persen.

**Gambar 2.22**
**Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Kab. Nagan Raya, 2025*

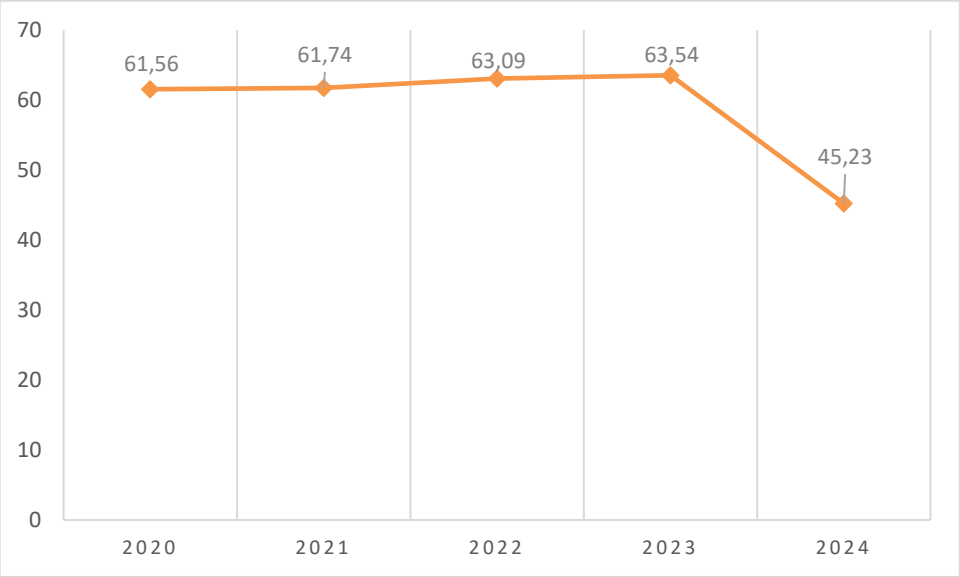
## 2. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pemberdayaan gender manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gende. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Selama 5 tahun terakhir, angka IDG di Kabupaten Nagan Raya terus menerus mengalami peningkatan. Dengan kata lain, partisipasi perempuan di Kabupaten Nagan Raya dalam bidang ekonomi dan politik terus menguat dari tahun ke tahun.

Selain itu, IPG adalah alat penting dalam mengevaluasi kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan untuk memperlihatkan area-area di mana perbaikan lebih

lanjut masih dibutuhkan. Perubahan nilai IPG dari waktu ke waktu dapat mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

**Gambar 2.23**
**Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kab. Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Kab. Nagan Raya, 2025*

Berdasarkan grafik 2.23, Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023, yakni 61,56 pada 2020; 61,74 pada 2021; 63,09 pada 2022; dan 63,54 pada 2023. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada 2022, sebesar 2,19% dibanding tahun sebelumnya, diikuti kenaikan sebesar 0,71% pada 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi 45,23, atau menurun sebesar 28,77% dibanding tahun 2023. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

Penurunan nilai IDG pada tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh melemahnya capaian pada dimensi partisipasi perempuan di bidang ekonomi formal dan kepemimpinan publik. Hal ini terlihat dari berkurangnya proporsi perempuan pada jabatan pengambil keputusan di sektor pemerintahan dan dunia usaha, serta masih terbatasnya akses perempuan terhadap peluang kerja layak. Selain itu, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor tertentu mengalami penurunan akibat pergeseran struktur ekonomi daerah yang lebih didominasi oleh sektor padat karya yang masih rendah penyerapan tenaga kerja perempuan.

Faktor lain yang berkontribusi adalah kesenjangan keterampilan yang belum sepenuhnya teratasi, khususnya pada bidang yang sedang berkembang pesat seperti teknologi informasi dan industri kreatif. Meskipun peluang kerja di sektor ini semakin terbuka, tingkat literasi digital perempuan di Kabupaten Nagan Raya belum merata, sehingga banyak posisi strategis diisi oleh tenaga kerja laki-laki. Keterbatasan program pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas perempuan juga turut membatasi percepatan capaian kesetaraan gender.

Dari sisi pendidikan, meskipun tingkat partisipasi sekolah bagi anak perempuan relatif tinggi, transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi masih belum optimal, yang berdampak pada rendahnya representasi perempuan di sektor pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Hal ini mempengaruhi salah satu komponen penting dalam perhitungan IDG, yaitu keterwakilan perempuan pada posisi strategis yang membutuhkan kualifikasi pendidikan lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan memperkuat intervensi kebijakan yang secara khusus mendorong pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, kepemimpinan, dan pendidikan. Program yang berbasis peningkatan keterampilan, perluasan akses terhadap sumber daya, dan penciptaan lingkungan kerja yang ramah gender akan menjadi kunci untuk memulihkan dan meningkatkan kembali capaian IDG di tahun-tahun mendatang.

### 3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan masih tergolong minim, dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Adapun keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terlihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.66**
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**
**Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pekerja perempuan di pemerintah | 2,824 | 2,034 | 2,824 | 3,852 | 4,286 |
| 2 | Jumlah Pekerja Perempuan | 18,993 | 25,239 | 27,505 | 25,239 | 27,505 |
| **Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah** | | 13.18 | 14.87 | 7,87 | 7,63 | 7,63 |

*Sumber : BKPSDM dan Disnaker Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 (data diolah)*

## 4. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRK

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam penyelenggaran pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.67**
**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Jumlah total kursi di anggota DPRK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRK** | | **16%** | **16%** | **16%** | **16%** | **4%** |

*Sumber : Bagian Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, 2024*

## 5. Rasio KDRT

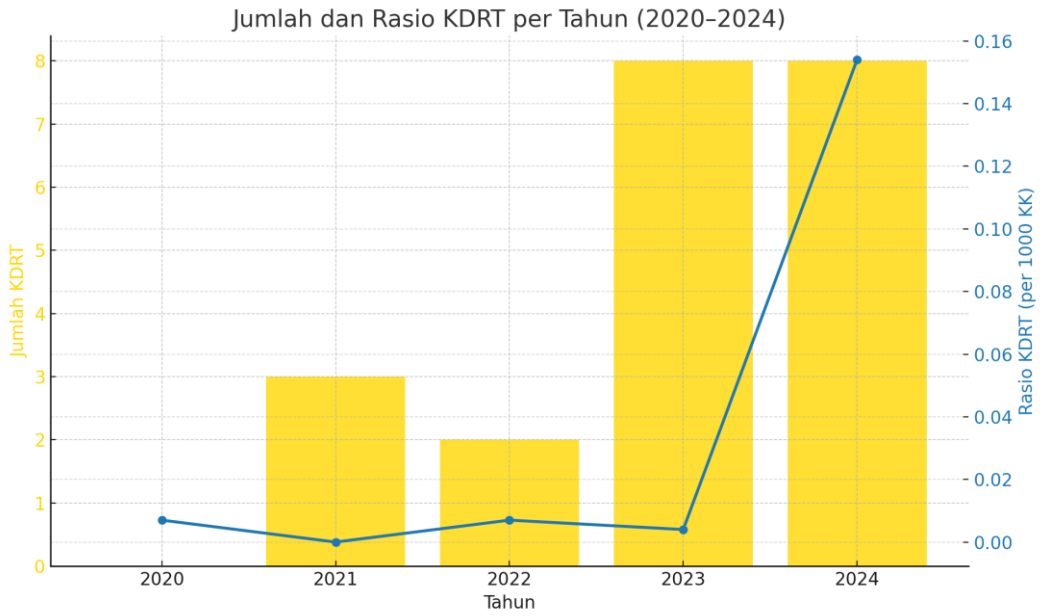
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

**Tabel 2.68**
**Rasio KDRT Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah KDRT | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 2 | Jumlah rumah tangga | 46.464 | 39.351 | 44.831 | 56.950 | 58.255 |
| **Rasio KDRT (per 1000KK)** | | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,004 | 0,154 |

*Sumber : DPMGP4 Kab. Nagan Raya tahun 2025*

**Gambar 2.24**
**Perbadingan Rasio KDRT Kabupaten Nagan Raya**




Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.68, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan fluktuasi sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tidak terdapat laporan kasus KDRT. Namun, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3 kasus, kemudian mengalami penurunan menjadi 2 kasus pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebanyak 8 kasus.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir juga mengalami perubahan. Jumlah rumah tangga terendah tercatat pada tahun 2021 sebanyak 39.351 rumah tangga, sedangkan tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 58.255 rumah tangga.

Apabila dilihat melalui grafik, pola fluktuatif jumlah kasus KDRT terlihat lebih jelas. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan dari nol kasus menjadi tiga kasus, kemudian menurun pada 2022, dan meningkat cukup tajam pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun jumlah kasus pada 2023 dan 2024 sama, yaitu sebanyak delapan kasus, rasio KDRT per 1.000 KK justru mengalami peningkatan signifikan pada 2024. Hal ini terjadi karena jumlah rumah tangga yang tercatat pada tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan rasio mengindikasikan adanya pertambahan kasus KDRT yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah rumah tangga.

Lonjakan rasio yang signifikan pada tahun 2024—sebesar 0,154 per 1.000 KK—dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi efektivitas program pencegahan KDRT, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan

penanganan kasus. Kecenderungan peningkatan ini juga bisa menunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Peningkatan ini dapat dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangga yang dipengaruhi oeh stress dan tekanan psikologis. Tekanan psikologis seperti stres berkepanjangan, masalah mental, atau ketidakmampuan untuk mengatasi masalah pribadi atau pekerjaan dapat mengarah pada peningkatan konflik dalam hubungan. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengurangi KDRT haruslah holistik dan mencakup upaya pencegahan yang menyeluruh, termasuk pendidikan, dukungan psikologis, kebijakan perlindungan korban, dan advokasi untuk kesetaraan gender yang dipayungi oleh SKPK terkait.

## C. Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2019-2023 terjadi surplus beras dan pangan. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya.

**Tabel 2.69**
**Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produksi Beras (kg) | 32.950.130 | 77.759.140 | 76.100.100 | 61.251.450 | 62.082.800 |
| 2 | Kebutuhan Beras (kg) | 20.120.640 | 18.669.388 | 19.100.100 | 20.739.240 | 14.492.923 |
| 3 | Surplus Beras (kg) | 12.829.490 | 59.089.752 | 57.000.000 | 40.512.210 | 47.589.877 |

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2024*

## D. Pertanahan

### 1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reformasi agraria.

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reformasi agraria.

### 2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Konflik atas tanah yang berkepanjangan, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik.

## E. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 sebesar 39.9% dan pada tahun 2023 persentase timbunan sampah yang ditangani naik sebesar 67.20%. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.70**
**Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020 – 2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Volume Timbulan Sampah yang ditangani ($m^3$) | 9.565 | 16.310 | 11.469 | 18.111 | 13.249 |
| 2 | Total Timbulan Sampah ($m^3$) | 42.158 | 42.434 | 43.488 | 26.951 | 25.763 |
| **Timbunan sampah yang ditangani (%)** | | **22,69** | **38,44** | **26,37** | **67,20** | **51,43** |

*Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Disamping pelayanan persampahan, Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga menangani tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha/ industri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini :

**Tabel 2.71**
**Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasus Pencemaran Air dari Limbah perusahaan | 10 Kasus | 4 Kasus | 2 Kasus | 9 Kasus | 1 Kasus |
| 2 | Kasus Pencemaran Air dari Limbah perusahaan yang tertangani | 10 Kasus | 4 Kasus | 2 Kasus | 9 Kasus | 1 Kasus |
| **Persentase Penyelesaian Pencemaran Air** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, 2025*

## F. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan seperti dari kepemilikan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan cakupan kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga dari Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.72**
**Jumlah kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran | 76.048 | 80.826 | 87.539 | 92.054 | 98.493 |
| 2 | Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk | 111.416 | 109.776 | 117.674 | 121.615 | 124.722 |
| 3 | Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga | 54.048 | 54.043 | 55.563 | 56.837 | 57.956 |
| 4 | Jumlah Kepemilikan Kartu Indentitas Anak | 11 | 10.077 | 18.033 | 20.671 | 22.175 |

*Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025*




Berdasarkan data pada Tabel 2.72, jumlah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Keempat jenis dokumen yang dicatat—Akte Kelahiran, Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)—menampilkan tren yang mayoritas meningkat, dengan beberapa fluktuasi minor. Jumlah kepemilikan Akte Kelahiran meningkat dari 76.048 pada tahun 2020 menjadi 98.493 pada tahun 2024. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 22.445 atau sekitar 29,51% dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sadar pentingnya pencatatan kelahiran serta adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, Kepemilikan KTP sempat mengalami penurunan dari 111.416 pada tahun 2020 menjadi 109.776 pada tahun 2021, atau turun sekitar -1,47%. Namun, jumlahnya kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai 124.722 pada tahun 2024, menghasilkan kenaikan sebesar 11,93% dari tahun awal. Penurunan awal kemungkinan disebabkan oleh validasi data atau kendala teknis, yang kemudian berhasil diatasi dalam tahun-tahun berikutnya.

Kepemilikan KK menunjukkan tren stabil dengan kenaikan dari 54.048 pada tahun 2020 menjadi 57.956 pada 2024. Selisih peningkatan sebanyak 3.908 menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,23% dalam lima tahun, yang selaras dengan peningkatan jumlah rumah tangga. Namun, perubahan paling mencolok terjadi pada kepemilikan KIA, dari hanya 11 pada tahun 2020 melonjak drastis menjadi 22.175 pada tahun 2024. Ini adalah peningkatan luar biasa sebesar 201.490,91%, yang mencerminkan efektivitas sosialisasi dan implementasi program identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

## G. Perhubungan

Sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jalur angkutan perairan/laut perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan jalur pengangkutan yang tersedia terutama untuk pengangkutan barang hanya lewat darat sehingga untuk mendukung pengembagan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kawasan Agro Industri maka pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga fasilitas lainnya yang dapat mendukung hadirnya tranportasi laut terutama untuk pengangkutan barang.

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Selama tahun 2018-2022, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan. Hal tersebut juga sangat

dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang.

**Tabel 2.73**
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jalan Kabupaten | 924,421 | 924,421 | 6,90 | 6,90 | 83,95 |
| 2 | Jumlah Kendaraan Penumpang | 205 | 216 | 5 | 7 | - |
| **Rasio** | | **4,51** | **4,28** | **1,38** | **1** | **-** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2022*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Nagan Raya tercatat pada tahun 2018 adalah 4,51 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sejumlah 1 persen.

### 1. Perhubungan Udara

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya. Bandar Udara Cut Nyak Dhien menjadi bandara utama, setelah bandar udara T. Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi primadona masyarakat/pengusaha dalam bepergian untuk wilayah barat, Aceh. Adapun jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 2.74**
**Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat**
**di Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Penumpang Datang | 18.725 | 4.733 | 854 | 6.697 | 7.239 |
| 2 | Penumpang Berangkat | 18.500 | 4.297 | 862 | 7.182 | 7.567 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya Tahun 2024*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penumpang datang dan penumpang berangkat melalui Bandara Cut Nyak Dhien dari tahun 2019-2023 berfluktuasi. Mobilitas penduduk yang bergantung pada faktor-faktor krusial seperti faktor ekonomi dapat menjadi sebuah penyebab mengapa kedatangan penumpang naik dan turun setiap tahun. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang baik agar perencanaan dan pengelolaan penumpang dapat efektif setiap tahunnya.

**2. Perhubungan Laut**

Di samping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang, dan jasa. Perannya juga begitu besar dalam percepatan ekonomi daerah di wilayah pesisir. Namun, aktivitas jasa transportasi laut di Nagan Raya belum ada. Kondisi ini berkait erat minimnya sarana dan prasarana pendukung.

## H. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat Layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Kendati demikian, telepon rumah juga masih diminati masyarakat sebagai sarana komunikasi.

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Untuk itu Kabupaten terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya seperti Satu Data adalah untuk:

1. Mengintegrasikan data dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam satu sistem atau platform. Hal ini membantu dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Menyediakan basis data yang konsisten dan akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah.
3. Memungkinkan monitoring yang lebih baik terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat kabupaten. Data yang terintegrasi memfasilitasi evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja program dan kebijakan yang telah diimplementasikan.
4. Meningkatkan transparansi dalam penyediaan informasi publik kepada masyarakat. SDI memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap data yang diperlukan untuk memverifikasi kinerja pemerintah daerah dan mempromosikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.
5. Memfasilitasi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten sehingga lahir kebijakan yang lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan dari implementasi SDI di level kabupaten adalah untuk menciptakan basis data yang terpadu, akurat, dan terpercaya, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Qanun Nagan Raya Nomor 39 tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga telah membentuk administrator portal satu data Nagan Raya mengenai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan keputusan bupati nomor 500.14.1/250/kpts/2023. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga membentuk Forum Satu Data melalui Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 188.45/480/kpts/2021 tentang Forum Satu Data Indonesia (SDI).

Adanya forum SDI menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi dalam upaya mengintegrasikan data dari berbagai sektor. Dengan demikian, Forum SDI memiliki peran strategis dalam memfasilitasi integrasi data lintas sektor, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui forum ini, diharapkan Kabupaten Nagan Raya dapat memanfaatkan potensi data secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayahnya.

## I. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah industri di Kabupaten Nagan raya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2029, terdapat 1.364 unit industri tradisional di Kabupaten Nagan Raya. Namun di tahun 2023 mengalami penurunan hanya terdapat 210 Industri di Kabupaten Nagan Raya.

Penurunan ini juga terjadi pada industri yang lain seperti kain dan kulit, kayu, hingga industri jasa. Penurunan ini diperkirakan karena permintaan konsumen yang menurun, perubahan arah teknologi, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menyebabkan penurunan dalam berbagai industri di Kabupaten Nagan Raya. Dalam mengatasi penurunan ini, industri tersebut mungkin perlu melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas, atau bahkan beralih ke sektor yang lebih ramah lingkungan atau kesehatan.

**Tabel 2.75**
**Kondisi Industri Makanan dan Tembakau**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri Makanan dan Tembakau | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 125 | 165 | 171 | 121 | 24 |
| 2 | Tripa Makmur | 40 | 46 | 46 | 13 | 9 |
| 3 | Kuala | 220 | 222 | 225 | 146 | 27 |
| 4 | Kuala Pesisir | 127 | 128 | 128 | 113 | 47 |
| 5 | Tadu Raya | 52 | 55 | 56 | 49 | 37 |
| 6 | Beutong | 115 | 120 | 120 | 95 | 10 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 |
| 8 | Seunagan | 299 | 302 | 302 | 275 | 17 |
| 9 | Suka Makmue | 150 | 151 | 151 | 111 | 12 |
| 10 | Seunagan Timur | 223 | 224 | 225 | 198 | 31 |
| | Jumlah | **1364** | **1426** | **1437** | **1129** | **210** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

**Tabel 2.76**

**Kondisi Industri Kain dan Kulit**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 - 2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri Kain dan Kulit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 109 | 112 | 123 | 107 | 16 |
| 2 | Tripa Makmur | 26 | 27 | 28 | 28 | 18 |
| 3 | Kuala | 81 | 84 | 84 | 103 | 11 |
| 4 | Kuala Pesisir | 62 | 63 | 64 | 76 | 8 |
| 5 | Tadu Raya | 41 | 44 | 44 | 54 | 22 |
| 6 | Beutong | 40 | 42 | 42 | 84 | 21 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 8 | Seunagan | 188 | 189 | 189 | 248 | 49 |

| No | Kecamatan | Industri Kain dan Kulit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9 | Suka Makmue | 71 | 71 | 71 | 118 | 50 |
| 10 | Seunagan Timur | 150 | 153 | 153 | 258 | 57 |
| | Jumlah | **230** | **772** | **791** | **804** | **257** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

**Tabel 2.77**
**Kondisi Industri Kayu**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri Kayu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 57 | 59 | 72 | 53 | 9 |
| 2 | Tripa Makmur | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 |
| 3 | Kuala | 24 | 26 | 27 | 21 | 4 |
| 4 | Kuala Pesisir | 34 | 36 | 36 | 25 | 20 |
| 5 | Tadu Raya | 15 | 17 | 18 | 20 | 17 |
| 6 | Beutong | 21 | 22 | 22 | 36 | 20 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Seunagan | 31 | 31 | 31 | 34 | 28 |
| 9 | Suka Makmue | 12 | 12 | 12 | 21 | 14 |
| 10 | Seunagan Timur | 30 | 32 | 33 | 43 | 25 |
| **Jumlah** | | **230** | **237** | **249** | **265** | **153** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

**Tabel 2.78**
**Kondisi Industri dari Besi**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 - 2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri dari Besi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 4 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| 2 | Tripa Makmur | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Kuala | 17 | 17 | 17 | 33 | 16 |
| 4 | Kuala Pesisir | 3 | 4 | 4 | 23 | 20 |
| 5 | Tadu Raya | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Beutong | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Seunagan | 7 | 7 | 7 | 20 | 9 |
| 9 | Suka Makmue | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 10 | Seunagan Timur | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 |
| **Jumlah** | | **45** | **51** | **51** | **122** | **115** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

**Tabel 2.79**
**Kondisi Industri Dari Bahan Galian**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri dari Bahan Galian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 109 | 112 | 112 | 4 | 0 |
| 2 | Tripa Makmur | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 3 | Kuala | 581 | 570 | 570 | 496 | 30 |
| 4 | Kuala Pesisir | 62 | 62 | 62 | 1 | 0 |
| 5 | Tadu Raya | 41 | 42 | 42 | 2 | 1 |
| 6 | Beutong | 40 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Seunagan | 188 | 180 | 180 | 2 | 0 |
| 9 | Suka Makmue | 71 | 72 | 72 | 6 | 6 |
| 10 | Seunagan Timur | 150 | 146 | 146 | 2 | 0 |
| **Jumlah** | | **1272** | **1250** | **1250** | **513** | **37** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

**Tabel 2.80**
**Kondisi Industri Dari Kertas**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 (Unit)**

| Kecamatan | Industri dari Kertas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Darul Makmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tripa Makmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beutong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beutong Ateuh Banggalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seunagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suka Makmue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seunagan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022*

**Tabel 2.81**
**Kondisi Industri Barang Lainnya**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri Barang Lainnya | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 35 | 38 | 40 | 17 | 20 |
| 2 | Tripa Makmur | 9 | 11 | 12 | 24 | 9 |
| 3 | Kuala | 51 | 54 | 55 | 110 | 21 |
| 4 | Kuala Pesisir | 35 | 37 | 39 | 78 | 33 |
| 5 | Tadu Raya | 4 | 6 | 6 | 32 | 4 |
| 6 | Beutong | 72 | 73 | 73 | 47 | 35 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 7 | 7 | 7 | 6 | 21 |
| 8 | Seunagan | 42 | 44 | 44 | 75 | 59 |
| 9 | Suka Makmue | 27 | 27 | 27 | 68 | 45 |
| 10 | Seunagan Timur | 32 | 35 | 35 | 21 | 62 |
| **Jumlah** | | **314** | **332** | **338** | **478** | **309** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

**Tabel 2.82**
**Kondisi Industri Jasa**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023 (Unit)**

| No | Kecamatan | Industri Jasa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Darul Makmur | 217 | 218 | 218 | 40 | 40 |
| 2 | Tripa Makmur | 29 | 30 | 32 | 4 | 4 |
| 3 | Kuala | 150 | 153 | 153 | 22 | 22 |
| 4 | Kuala Pesisir | 126 | 126 | 126 | 4 | 4 |
| 5 | Tadu Raya | 41 | 46 | 46 | 2 | 2 |
| 6 | Beutong | 46 | 48 | 48 | 16 | 16 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Seunagan | 184 | 186 | 186 | 9 | 9 |
| 9 | Suka Makmue | 82 | 82 | 82 | 6 | 6 |
| 10 | Seunagan Timur | 87 | 88 | 88 | 21 | 21 |
| **Jumlah** | | **967** | **983** | **985** | **125** | **125** |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2024*

Industri yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Sentra pengembangan industri makanan dan tembakau terdapat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Kuala Pesisir. Mayoritas industri kayu berada di Seunagan, Beutong Ateuh Banggalang, Seunagan Timur, dan Beutong.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.83**
**Jumlah dan Status Koperasi**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025**

| No | URAIAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Jumlah Koperasi | Unit | 143 | 183 | 207 | 231 | 457 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | Unit | 95 | 99 | 146 | 174 | 400 |
| 3 | Jumlah Koperasi Tidak Aktif | Unit | 48 | 88 | 61 | 57 | 57 |
| 4 | Jumlah Koperasi yang dibina | Unit | 30 | 50 | 55 | 63 | 326 |
| 5 | Jumlah Anggota Koperasi | Orang | 7.213 | 9.305 | 10.070 | 10.299 | 15.849 |

*Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2025*

Koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Di Kabupaten Nagan Raya, peran koperasi tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kemandirian masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan. Data pada Tabel 2.83 menunjukkan perkembangan jumlah dan status koperasi selama periode 2021–2025, yang mencerminkan dinamika pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

Jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya meningkat signifikan dari 143 unit pada 2021 menjadi 457 unit pada 2025. Lonjakan terbesar terjadi antara 2024 dan 2025, dengan kenaikan 226 unit atau 97,83%. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong pembentukan koperasi berbasis potensi lokal, seperti koperasi pertanian, perikanan, dan simpan pinjam, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi aktif menunjukkan tren yang cukup positif, dari 95 unit pada 2021 menjadi 400 unit pada 2025, meningkat 321,05% dalam kurun waktu empat tahun. Tahun 2025 mencatat peningkatan paling tajam sebesar 129,89% dibanding tahun sebelumnya. Menurut teori kelembagaan ekonomi, peningkatan koperasi aktif menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pendampingan, di mana koperasi mampu menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki manajemen yang sehat, dan melakukan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Jumlah koperasi tidak aktif mengalami fluktuasi, dari 48 unit pada 2021 menjadi 57 unit pada 2025. Peningkatan pada 2022 menjadi 88 unit (naik 83,33% dari 2021) mengindikasikan adanya tantangan dalam manajemen koperasi, seperti lemahnya permodalan dan rendahnya partisipasi anggota. Namun, pada 2023 dan 2024 terjadi penurunan jumlah koperasi tidak aktif sebelum kembali stagnan di 2025, yang menunjukkan perlunya intervensi berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk revitalisasi koperasi. Secara persentase, proporsi koperasi aktif terhadap total koperasi meningkat dari 66,43% pada 2021 menjadi 87,54% pada 2025. Sebaliknya, proporsi koperasi tidak aktif menurun dari 33,57% pada 2021 menjadi hanya 12,46% pada 2025. Hal ini sejalan dengan teori pembinaan kelembagaan yang menekankan bahwa penguatan kapasitas manajerial dan akses terhadap pembiayaan akan meningkatkan keberlangsungan koperasi.

Jumlah koperasi yang dibina meningkat dari 30 unit pada 2021 menjadi 326 unit pada 2025, dengan lonjakan terbesar pada 2025 sebesar 417,46% dibanding tahun sebelumnya. Data ini mengindikasikan bahwa program pembinaan pemerintah daerah, seperti pelatihan manajemen koperasi, bantuan modal bergulir, dan fasilitasi pemasaran, semakin diperluas cakupannya. Pembinaan intensif ini kemungkinan besar menjadi faktor kunci dalam peningkatan jumlah koperasi aktif. Jumlah anggota koperasi bertambah dari 7.213 orang pada 2021 menjadi 15.849 orang pada 2025, atau naik sebesar 119,65% dalam periode lima tahun. Peningkatan jumlah anggota mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai wadah usaha bersama. Dalam teori partisipasi anggota, semakin besar jumlah anggota yang aktif, semakin kuat modal sosial yang dimiliki koperasi untuk berkembang.

Pertumbuhan jumlah anggota per tahun bervariasi, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada 2025 sebesar 53,97% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dapat dihubungkan dengan keberhasilan program sosialisasi dan perluasan jaringan koperasi ke desa-desa. Perkembangan koperasi di Kabupaten Nagan Raya selaras dengan misi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, tren positif pada jumlah koperasi aktif, koperasi yang dibina, dan jumlah anggota menunjukkan keberhasilan strategi pemberdayaan koperasi di Kabupaten Nagan Raya. Namun, keberadaan koperasi tidak aktif yang masih bertahan menjadi catatan penting. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah melanjutkan program pembinaan intensif, memperkuat akses pembiayaan melalui kemitraan perbankan, dan meningkatkan literasi keuangan anggota koperasi agar koperasi tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing tinggi.

## J. Penanaman Modal

### 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya, baik Investor Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 49 perusahaan dan menurun pada tahun 2023 sejumlah 1.455 perusahaan yang merupakan Investor Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.84**
**Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMA | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | PMDN | 36 | 36 | 7 | 2.330 | 1.455 |
| **Jumlah** | | **49** | **47** | **47** | **2.336** | **1.455** |

*Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

### 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi di sektor Perkebunan merupakan investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diikuti investasi sektor kelistrikan seperti pembangunan PLTU di suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang dan Kecamatan Darul Makmur. Nilai investasi Berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.85**
**Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**
**Kabupaten Nagan Raya 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMA | 28.654.645.200 | 2.028.896.955.000 | 1.551.880.925.344 | 3.249.571.868.802 | 429.443.371.225 |
| 2 | PMDN | 77.943.047.896 | 107.935.867.235 | 1.002.754.224.418 | 503.825.573.384 | 575.412.771.962 |
| Nilai Investasi berskala Nasional (PMA+PMDN) | | 207.952.057.244 | 106.597.693.096 | 2.554.635.149.762 | 3.753.397.442.186 | 1.004.856.143.187 |

*Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025*

Jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja PMA ditambah dengan jumlah tenaga kerja PMDN. Jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan pada tenaga kerja PMA namun menurun pada tenaga kerja PMDN.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan, bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.86**
**Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA)**
**Kabupaten Nagan Raya 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenaga Kerja PMA | 1.761 | 2.164 | 190 | 2.627 | 1.584 |
| 2 | Tenaga Kerja PMDN | 5.704 | 6.147 | 58 | 7.772 | 736 |
| **Jumlah Tenaga Kerja** | | 7.465 | 8.311 | 248 | 10.399 | 2.320 |
| 4 | Jumlah PMA/PMDN | 47 | 47 | 7 | 6 | N/A |
| 5 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 15882,98 | 17682,98 | 3542,86 | 273.316,66 | 1,60 |

*Sumber : DPMTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Berdasarkan paparan diatas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Nagan Raya seperti:

1. Peningkatan bidang Infrastruktur: Pemerintah kabupaten dapat meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional bagi para investor.

2. Pemberian insentif fiskal untuk investor. Memberikan insentif pajak seperti pengurangan tarif pajak atau pajak keringanan untuk industri tertentu atau investasi

di daerah tertentu. Insentif ini dapat menarik investor dengan mengurangi biaya operasional mereka.

3. Mempermudah proses Perizinan. Membuat proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Langkah ini dapat mengurangi birokrasi yang membebani proses investasi dan mempercepat waktu untuk memulai operasi bisnis.

4. Pengembangan kawasan industri dan pusat bisnis. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat pengembangan kawasan industri atau pusat bisnis dengan menyediakan lahan yang siap pakai, fasilitas pendukung, dan infrastruktur dasar. Hal ini dapat menarik investasi dari berbagai sektor industri.

5. Promosi dan Pemasaran Daerah. Melakukan promosi aktif untuk menarik perhatian investor potensial tentang potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh kabupaten tersebut, baik melalui pameran, seminar, maupun media sosial dan platform digital lainnya.

6. Meningkatkan Kualitas SDM di Kabupaten Nagan Raya. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih akan meningkatkan daya tarik investasi di kabupaten tersebut.

7. Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur atau mengelola proyek bersama. Hal ini dapat mengurangi beban fiskal pemerintah daerah sambil mempercepat pengembangan daerah.

8. Lingkungan Bisnis yang Nyaman. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan mengurangi regulasi yang membatasi, memperbaiki perlindungan hukum bagi investor, serta mengatasi permasalahan korupsi dan birokrasi yang berlebihan.

9. Mengadakan Forum Dialog dengan Investor. Menyelenggarakan forum-dialog antara pemerintah daerah, investor, dan komunitas bisnis lokal untuk mendengarkan masukan, memecahkan masalah, dan mengidentifikasi peluang investasi potensial.

10. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara teratur terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilakukan untuk meningkatkan investasi. Evaluasi hasil dapat membantu pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan terkait penanaman modal.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini dengan baik, pemerintah kabupaten dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat sehingga penanaman modal di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat dari tahun ke tahun.

## K. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.87**
**Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2018-2022**

| No | Indikator | Unit | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah lapangan /sarana olahraga | Unit | 241 | 243 | 244 | 246 | 247 |
| 2 | Jumlah Klub Olah raga | Klub | 182 | 194 | 219 | 225 | 234 |
| 3 | Jumlah cabang Olah raga | cabang | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 |
| 4 | Jumlah Organisasi kepemudaan | Organisasi | 10 | 28 | 32 | 36 | 36 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/ sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2018 berjumlah 241 unit. Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2022 adalah sebanyak 234 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 28 cabang.

**Tabel 2.88**
**Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2018-2022**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Cakupan pembinaan olahraga | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.66 |
| 2 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | 88.2 | 89.96 | 90.48 | 90.50 | 100 |
| 3 | Cakupan pembinaan atlet muda | 32.90 | 45.80 | 50.38 | 60.38 | 143.75 |
| 4 | Jumlah atlet berprestasi | 17 | 19 | 22 | 69 | 28 |
| 5 | Jumlah prestasi olahraga | 17 | 22 | 8 | 9 | 28 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023*

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Nagan Raya sangat minim memperoleh prestasi di bidang olahraga. Namun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya untuk terus memberikan pembinaan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Nagan Raya.

## L. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang yang dikelola secara terpadu juga tidak mengalami peningkatan. Berdasarkankan data dari tahun 2012 s/d 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran. Untuk tahun 2018 s/d 2022 bahkan sudah tidak ada lagi cagar budaya yang dikelola secara terpadu . Untuk benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2020 dan 2021 berjumlah 3 dan bertambah menjadi 4 benda, situs dan kawasan benda, situs dan kawasan yang dilestarikan ditahun 2020. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya memiliki 17 tempat bersejarah, 18 mesjid dan 45 makam. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.89**
**Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2018-2022**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rasio Jumlah Cagar Budaya yang dikelola | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 |
| 2 | Rasio benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 3:80 | 4:80 | 4:80 | 4:80 | 0 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023*

Pengembangan sektor kebudayan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian.

## M. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan Kabupaten di Nagan Raya dalam kurun waktu 2018 hingga 202 hanya 1 (satu) unit, sedangkan perpustakaan gampong mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2018 jumlah perpustakaan gampong sebanyak 49 unit dan terus menurun menjadi 22 unit pada tahun 2022.

**Tabel 2.90**
**Jumlah Pustaka Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024 (Unit)**

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seunagan | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Beutong | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Seunagan Timur | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Suka Makmue | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Kuala | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Kuala Pesisir | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Tadu Raya | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Darul Makmur | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Tripa Makmur | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Beutong Ateuh Banggalang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **57** | **57** | **25** | **25** | **24** |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Perkembangan jumlah pustaka di Kabupaten Nagan Raya pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 57 unit pustaka yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, jumlah ini mengalami penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 24 unit pada tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada periode 2022–2024, di mana beberapa kecamatan mengalami pengurangan jumlah pustaka lebih dari separuh. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan fasilitas literasi di daerah.

Analisis per kecamatan menunjukkan bahwa penurunan jumlah pustaka tidak bersifat merata. Kecamatan dengan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan relatif mampu mempertahankan jumlah pustaka, meskipun tetap mengalami penurunan. Sebaliknya, kecamatan yang berlokasi di wilayah pinggiran atau dengan akses transportasi terbatas mengalami pengurangan unit pustaka yang lebih drastis. Fenomena ini menguatkan dugaan bahwa distribusi sarana literasi belum sepenuhnya merata, sehingga kelompok masyarakat di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesenjangan akses informasi dan literasi.

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, penurunan jumlah pustaka dapat berdampak langsung pada kualitas literasi masyarakat. Pustaka berfungsi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran masyarakat, sarana diskusi, dan penyedia akses informasi yang kredibel. Dengan berkurangnya jumlah pustaka, terdapat risiko melemahnya ekosistem literasi daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi capaian indikator pendidikan dan pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka mengatasi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu merumuskan langkah strategis yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup revitalisasi pustaka yang masih beroperasi, penambahan unit pustaka di wilayah yang kekurangan, serta pengembangan inovasi layanan literasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, penguatan peran pustaka diharapkan mampu mendukung pemerataan akses informasi, meningkatkan minat baca masyarakat, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

### 2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.4.3.1 Pariwisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Pada Tahun 2023, ada 18 objek wisata di Kabupaten Nagan Raya dengan sebaran obyek dan daya tarik yang dapat dilihat pada Tabel 2.92.

**Tabel 2.91**

**Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023**

| NO | KECAMATAN | JENIS OBJEK WISATA | JUMLAH OBJEK WISATA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beutong | Wisata Alam Krueng Isep | 5 |
| | | Panorama Gunung Singgah Mata | |
| | | Bendungan Irigasi Jeuram | |
| | | Masjid Dayah | |
| | | Makam Teungku Di Seumot | |
| 2 | Kuala Pesisir | Wisata Pantai Indah Naga Permai | 2 |
| | | Wisata Pantai Seunagan | |

| NO | KECAMATAN | JENIS OBJEK WISATA | JUMLAH OBJEK WISATA |
|---|---|---|---|
| 3 | Tripa Makmur | Wisata Pantai Suak Dama | 3 |
| | | Arung Jeuram Krueng Tripa | |
| | | Situs Kerajaan Islam Ujong Raja | |
| 4 | Tadu Raya | Danau Laut Tadu | 2 |
| | | Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani | |
| 5 | Seunagan Timur | Makam Habib Muda Seunangan | 1 |
| 6 | Kuala | Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh | 1 |
| 7 | Suka Makmue | Taman Makam Pahlawan | 1 |
| 8 | Darul Makmur | Air Terjun Alue Waki | 1 |
| 9 | Beutong Ateuh Banggalang | Batee Meucureh Cut Nyak Dhien | 1 |
| 10 | Seunagan | Makam Indatu Kuta Aceh | 1 |
| **Jumlah** | | | 18 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024*

Untuk objek wisata di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 di Kecamatan Beutong terdapat 5 objek wisata yaitu Wisata Alam Krung Isep, Panorama Gunung Singgah Mata, Bendungan Irigasi Jeuram dan Makam Teungku di Seumot. Sementara itu, di Kecamatan Kuala Pesisir terdapat 2 objek wisata yaitu Wisata Pantai Indah Naga Permai dan Wisata Pantai Seunagan. Selanjutnya objek wisata di Kecamatan Tripa Makmur terdapat 3 objek wisata yaitu Wisata Pantai Suak Dama, Arung Jeuram Krueng Tripa dan Situs Kerajaan Islam Ujong Raja.

Kecamatan Tadu Raya terdapat 2 objek wisata yaitu Danau Laut Tadu dan Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani. Untuk Kecamatan Seunagan Timur terdapat 1 objek wisata yaitu Makam Habib Muda Seunagan dan Kecamatan Kuala juga terdapat 1 objek wisata yaitu Mesjid Jami' Syaikhunna Gudang Buloh. Selanjutnya, objek wisata di Kecamatan Suka Makmue terdapat 1 objek wisata yaitu Taman Makam Pahlawan dan di Kecamatan Darul Makmur juga terdapat 1 objek wisata yaitu Air Terjun Alue Waki. Sementara di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang terdapat 1 objek wisata yaitu Batee Meucureh Cut Nyak Dhien dan di Kecamatan Seunagan terdapat 1 objek wisata yaitu Makam Indatu Kuta Aceh.

**Tabel 2.92**
**Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Sarana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Hotel/Wisma/Losmen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Rumah Makan / Restoran | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Warung Kopi/Café | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | Mushalla | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | MCK | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |

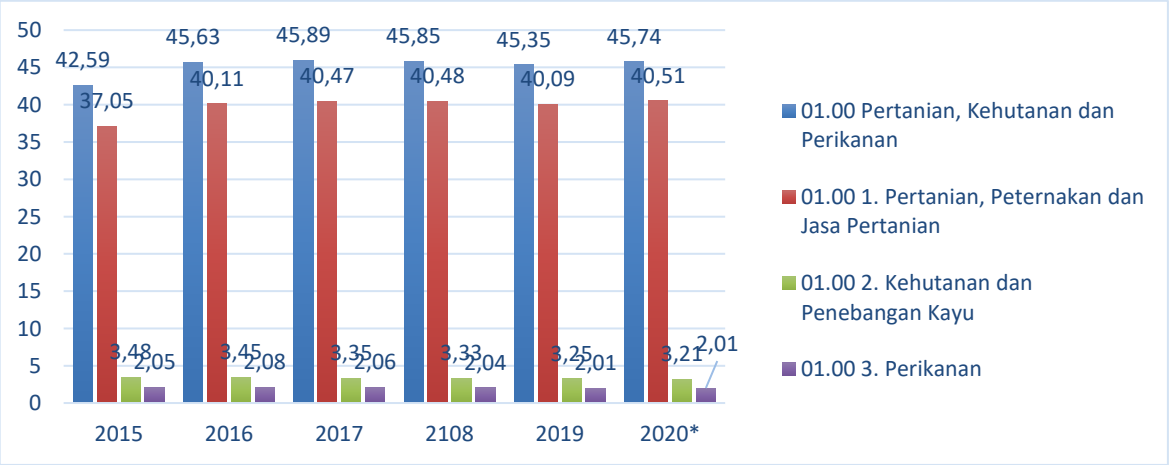
*Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024*

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel/wisma/losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 4 unit hotel/wisma/losmen yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata memadai.

### 2.1.4.3.2 Pertanian

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih memberi kontribusi terbesar dan terus meningkat terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 40-50 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian juga masih merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 40-45 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam beberapa tahun terakhir.

**Gambar.2.25**
**Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Persen)**




*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2021*

**Tabel 2.93**
**Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi | | | | | |
| | Produksi (ton) | 130.582 | 144.648 | 107.023 | 95.512 | 60.838 |
| | Luas areal tanam(ha) | 29.199 | 7.569 | 13.226 | 13.689 | 11.751 |
| | Luas areal panen (ha) | 17.888 | 19.685 | 14.561 | 12.749 | 10.731 |
| | Produktivitas padi (ton/ha) | 7,30 | 7,35 | 7,35 | 7,49 | 5,70 |
| 2 | Jagung | | | | | |
| | Produksi(ton) | 5.600 | 5.267 | 3.223,90 | 1.471,40 | 1.218 |
| | Luas areal tanam (ha) | 745 | 369 | 471 | 116 | 204 |
| | Luas areal panen (ha) | 640 | 602 | 399 | 7 | 203 |
| | Produktivitas jagung(ton/ha) | 8,75 | 8,75 | 8,08 | 210,20 | 6,00 |
| 3 | Kedelai | | | | | |
| | Produksi (ton) | 782,9 | N/A | 42 | 21 | 271,2 |
| | Luas areal tanam (ha) | 450 | N/A | 11 | 16 | 111 |
| | Luas areal panen (ha) | 412 | N/A | 21 | 12 | 113 |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktivitas kedelai(ton/ha) | 1,90 | N/A | 2,00 | 1,75 | 2,40 |
| 4 | Kacang Tanah | | | | | |
| | Produksi (ton) | 1.500 | 388 | 319,5 | 102 | 101,1 |
| | Luas areal tanam (ha) | 450 | 97 | 60 | 53 | 62 |
| | Luas areal panen (ha) | 375 | 97 | 71 | 51 | 57 |
| | Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 2,00 | 1,60 |
| 5 | Kacang Hijau | | | | | |
| | Produksi (ton) | 37,5 | 30 | N/A | 33 | 3 |
| | Luas areal tanam (ha) | 30 | 32 | N/A | 12 | 3 |
| | Luas areal panen (ha) | 25 | 20 | N/A | 22 | 2 |
| | Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) | 1,50 | 1,50 | N/A | 1,50 | 1,50 |
| 6 | Ubi Kayu | | | | | |
| | Produksi (ton) | 2.547 | 1.251 | 288 | 315 | 260 |
| | Luas areal tanam (ha) | 309 | 60 | 17 | 23 | 32 |
| | Luas areal panen (ha) | 283 | 139 | 32 | 21 | 26 |
| | Produktivitas ubi kayu (ton/ha) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 15,00 | 10 |
| 7 | Ubi Jalar | | | | | |
| | Produksi (ton) | 695,5 | 156 | 208 | 180 | 95,2 |
| | Luas areal tanam (ha) | 126 | 25 | 22 | 17 | 13 |
| | Luas areal panen (ha) | 107 | 24 | 32 | 18 | 15 |
| | Produktivitas ubi jalar (ton/ha) | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 10,00 | 6,5 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Tabel di atas menggambarkan jenis komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar.

Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2.94**
**Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN) | 446 | 119 | 274 | 400 | 67 |
| **2** | Jumlah kelompok tani | 1.481 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 952 |
| Cakupan bina kelompok tani (%) | | **30,11** | **9,58** | **38,7** | **32,21** | **7,04** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.94 terkait pembinaan kelompok tani Kabupaten Nagan Raya tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi signifikan pada jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari APBA, OTSUS, maupun APBN. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 446 kelompok tani menerima bantuan dari total 1.481 kelompok tani yang ada, sehingga cakupan pembinaan mencapai 30,11%. Namun pada tahun 2021, jumlah penerima bantuan menurun drastis menjadi hanya 119 kelompok dari 1.242 kelompok tani, sehingga persentase cakupan pembinaan merosot tajam ke angka 9,58%. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan alokasi bantuan atau penyesuaian kebijakan yang berdampak langsung pada jangkauan pembinaan.

Memasuki tahun 2022, jumlah kelompok tani penerima bantuan meningkat menjadi 274 kelompok dengan total kelompok tani tetap 1.242 unit, sehingga cakupan pembinaan naik ke 22,06%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi bantuan dan penambahan dukungan pemerintah. Pada tahun 2023, bantuan kembali meningkat signifikan, diterima oleh 400 kelompok tani dari total 1.242 kelompok, sehingga persentase cakupan pembinaan naik menjadi 32,21%, mendekati kondisi ideal yang lebih proporsional dibandingkan awal periode.

Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok tani penerima bantuan kembali turun drastis menjadi 67 kelompok dari total 952 kelompok tani yang ada, dengan cakupan pembinaan hanya sebesar 7,04%. Penurunan ini berpotensi menghambat keberlanjutan pembinaan dan penguatan kapasitas petani, terutama dalam menghadapi tantangan produksi, akses pasar, dan adaptasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih konsisten dan terukur, agar keberpihakan kepada kelompok tani dapat berjalan optimal dan berkelanjutan sepanjang tahun.

Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi kelompok tani sebanyak 952 kelompok, UPJA tidak ada, kios pertanian 20 unit, KTNA tidak ada, koperasi tani tidak ada unit, BPP 10 unit, dan BBU 1 unit, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.95**
**Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024**

| NO | JENIS KELEMBAGAAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | BBU | Unit | 1 |
| 2 | Koperasi Tani | Unit | 0 |
| 3 | UPJA | Unit | 0 |
| 4 | Badan Penyuluh Pertanian (BPP) | Unit | 10 |
| 5 | Kios Pertanian | Unit | 20 |
| 6 | Kelompok Tani | Unit | 952 |
| 7 | Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) | Unit | 0 |
| Jumlah | | | 983 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2025*

**Tabel 2.96**
**Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024 (Ekor)**

| Kecamatan | Jenis Ternak (ekor) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sapi | | | Kerbau | | | Kambing | | | Domba | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Darul Makmur | 1.719 | 1.611 | 3.039 | 1.719 | 1.611 | 1.091 | 1.719 | 1.611 | 1.695 | 282 | 274 | 296 |
| Tripa Makmur | 1.217 | 1.129 | 1.575 | 1.217 | 1.129 | 765 | 1.217 | 1.129 | 1.188 | 267 | 239 | 256 |
| Kuala | 1.863 | 1.813 | 1.795 | 1.863 | 1.813 | 1.227 | 1.863 | 1.813 | 1.911 | 426 | 431 | 462 |
| Kuala Pesisir | 6.503 | 6.416 | 2.305 | 6.503 | 6.416 | 4.348 | 6.503 | 6.416 | 6.754 | 142 | 127 | 136 |
| Tadu Raya | 960 | 951 | 3.206 | 960 | 951 | 645 | 960 | 951 | 1.000 | 413 | 376 | 403 |
| Beutong | 495 | 407 | 249 | 495 | 407 | 278 | 495 | 407 | 430 | 148 | 107 | 115 |
| Beutong Ateuh Banggalang | 287 | 265 | 60 | 287 | 265 | 181 | 287 | 265 | 279 | 57 | 77 | 83 |
| Seunagan | 1.706 | 1.651 | 1.338 | 1.706 | 1.651 | 1.119 | 1.706 | 1.651 | 1.739 | 316 | 332 | 356 |
| Suka Makmue | 1.607 | 1.548 | 903 | 1.607 | 1.548 | 1.048 | 1.607 | 1.548 | 1.630 | 463 | 424 | 455 |
| Seunagan Timur | 769 | 735 | 679 | 769 | 735 | 498 | 769 | 735 | 775 | 205 | 171 | 483 |
| **Total** | **17.126** | **16.526** | **15.194** | **17.126** | **16.526** | **11.200** | **17.126** | **16.526** | **17.401** | **2.719** | **2.558** | **2.745** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.96 terlihat bahwa persentase populasi ternak tahun 2024, kategori sapi didominasi oleh Kecamatan Tadu Raya dengan kontribusi 20,73% dari total populasi sapi di Kabupaten Nagan Raya. Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Darul Makmur dengan 19,65% dan Kuala Pesisir sebesar 14,90%. Kecamatan lain seperti Kuala, Tripa Makmur, dan Seunagan memberikan kontribusi sedang di kisaran 8–11%, sedangkan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang, Suka Makmue, dan Seunagan Timur memiliki kontribusi di bawah 6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sentra peternakan sapi terkonsentrasi di wilayah tengah hingga barat kabupaten.

Untuk kategori kerbau, distribusi populasi sangat timpang, di mana Kecamatan Kuala Pesisir menjadi pusat terbesar dengan 45,09% dari total populasi kerbau. Sementara itu, Kuala (8,72%) dan Seunagan (7,95%) berada jauh di bawahnya, diikuti Darul Makmur (7,75%) dan Tadu Raya (6,82%). Kecamatan lainnya mencatat kontribusi di bawah 6%, menunjukkan bahwa peternakan kerbau terkonsentrasi secara dominan di Kuala Pesisir dengan kontribusi hampir setengah dari total kabupaten.

Pada populasi kambing, Kecamatan Kuala Pesisir juga menempati peringkat pertama dengan kontribusi 38,89%, disusul oleh Kuala sebesar 11,00% dan Seunagan 10,01%. Sementara itu, untuk kategori domba, posisi teratas dipegang oleh Seunagan Timur dengan 15,86%, diikuti Kuala (15,17%) dan Suka Makmue (14,94%). Distribusi ini memperlihatkan bahwa Kuala Pesisir memiliki peran ganda sebagai sentra kambing sekaligus kerbau, sedangkan Seunagan Timur unggul dalam pengelolaan domba.

Secara keseluruhan, pola distribusi populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 menunjukkan adanya sentra-sentra komoditas ternak yang berbeda antar kecamatan, yang dapat menjadi basis pengembangan subsektor peternakan berbasis potensi lokal. Kuala Pesisir menonjol sebagai pusat utama kerbau dan kambing, Tadu Raya menjadi lumbung sapi terbesar, sementara Seunagan Timur unggul pada komoditas domba. Konsentrasi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi pembinaan dan pengembangan yang lebih spesifik per wilayah, sehingga efisiensi produksi, pengelolaan sumber daya, dan pemasaran hasil ternak dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

#### 2.1.4.3.3 Perkebunan

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup

luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.97**
**Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Luas Areal (ha) | Produksi Kelapa Sawit (ton) | Produktifitas Kelapa Sawit (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 51.198,00 | 520.272,00 | 14.312 |
| 2 | 2021 | 52.228,00 | 547.888,00 | 14.750 |
| 3 | 2022 | 53.151,18 | 100.217,64 | 2.655 |
| 4 | 2023 | 2.640,90 | 271.000,01 | 2.655 |
| 5 | 2024 | 2.640,90 | 100.217,64 | 2.655 |

*Sumber : Dinas Perkebunan, 2025*

Berdasarkan tabel 2.97 perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020–2024, terlihat bahwa pada periode 2020–2021 terjadi peningkatan kinerja subsektor perkebunan kelapa sawit. Luas areal meningkat dari 51.198 hektare pada tahun 2020 menjadi 52.228 hektare pada tahun 2021, diikuti dengan kenaikan produksi dari 520.272 ton menjadi 547.888 ton. Produktivitas juga menunjukkan tren positif dari 14,31% menjadi 14,75%, mencerminkan perbaikan pengelolaan dan optimalisasi lahan.

Memasuki tahun 2022, meskipun luas areal tercatat meningkat menjadi 53.151,18 hektare, produksi mengalami penurunan signifikan menjadi 100.217,64 ton, sehingga produktivitas merosot tajam menjadi 2,66%. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024 dengan data luas areal yang tercatat hanya 2.640,90 hektare dan produktivitas stagnan di angka 2,66%. Perubahan ini menggambarkan adanya perbedaan signifikan dalam kinerja subsektor kelapa sawit dibandingkan periode sebelumnya yang memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan dan program pembinaan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memastikan konsistensi dan akurasi data statistik subsektor kelapa sawit melalui penguatan sistem pendataan dan pemantauan lapangan secara berkala. Selain itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui program peremajaan tanaman, penerapan teknologi budidaya modern, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan pekebun. Dengan langkah tersebut, diharapkan mampu menjaga keberlanjutan subsektor kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat dan daerah.

**Tabel 2.98**
**Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Luas Areal (ha) | Produksi Karet (ton) | Produktifitas Karet (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 2020 | 8.835 | 4.078 | 0,751 |
| **2** | 2021 | 6.725 | 4.276,89 | 0,820 |
| **3** | 2022 | 5.509 | 4.138 | 0,820 |
| **4** | 2023 | 6.509 | 4.138 | 0,820 |
| **5** | 2024 | 6.509,55 | 4.138,28 | 0,820 |

*Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.98, perkembangan luas areal karet di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 8.835 hektar pada tahun 2020 menjadi sekitar 6.509,55 hektar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan atau kurang optimalnya pemeliharaan kebun karet. Di sisi lain, produksi karet relatif stabil di kisaran 4.078–4.276 ton per tahun, sementara produktivitas karet mengalami peningkatan dari 0,751% pada tahun 2020 menjadi 0,820% pada tahun 2021 dan bertahan pada angka tersebut hingga 2024. Stabilitas produktivitas ini menunjukkan adanya perbaikan teknik budidaya atau pemanfaatan bibit unggul, meskipun tidak diiringi dengan perluasan areal tanam.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor perkebunan karet di Kabupaten Nagan Raya masih memiliki potensi untuk dipertahankan, namun memerlukan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Penurunan luas areal yang terjadi perlu diimbangi dengan program intensifikasi dan rehabilitasi tanaman, agar produksi tetap terjaga atau bahkan meningkat. Mengingat produktivitas telah mencapai titik stabil dalam beberapa tahun terakhir, inovasi teknologi dan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha perkebunan karet.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti penyediaan bibit unggul secara berkelanjutan, pendampingan teknis kepada petani, serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta untuk mendukung pemasaran hasil karet. Selain itu, upaya diversifikasi produk turunan karet dapat menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor perkebunan di tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian, meskipun luas areal cenderung menurun, kontribusi sektor karet terhadap perekonomian daerah dapat tetap terjaga melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan.

**Tabel 2.99**
**Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao**
**Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Luas Areal (ha) | Populasi Kakao (ton) | Produktifitas Kakao (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 2020 | 2.820 | 576 | 0,20 |
| **2** | 2021 | 1.725 | 108,55 | 0,35 |
| **3** | 2022 | 1.725 | 66,39 | 497,42 |
| **4** | 2023 | 1.725 | 66,39 | 497,42 |
| **5** | 2024 | 1.725 | 66,39 | 497,43 |

*Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.99, perkembangan luas areal karet di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 8.835 hektar pada tahun 2020 menjadi sekitar 6.509,55 hektar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan atau kurang optimalnya pemeliharaan kebun karet. Di sisi lain, produksi karet relatif stabil di kisaran 4.078–4.276 ton per tahun, sementara produktivitas karet mengalami peningkatan dari 0,751% pada tahun 2020 menjadi 0,820% pada tahun 2021 dan bertahan pada angka tersebut hingga 2024. Stabilitas produktivitas ini menunjukkan adanya perbaikan teknik budidaya atau pemanfaatan bibit unggul, meskipun tidak diiringi dengan perluasan areal tanam.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor perkebunan karet di Kabupaten Nagan Raya masih memiliki potensi untuk dipertahankan, namun memerlukan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Penurunan luas areal yang terjadi perlu diimbangi dengan program intensifikasi dan rehabilitasi tanaman, agar produksi tetap terjaga atau bahkan meningkat. Mengingat produktivitas telah mencapai titik stabil dalam beberapa tahun terakhir, inovasi teknologi dan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha perkebunan karet. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 2.100**
**Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Luas Areal (ha) | Populasi Kelapa Dalam (ton) | Produktifitas Kelapa Dalam (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 2020 | 2.785,98 | 560,22 | 0,20 |
| **2** | 2021 | 2.785,98 | 560,22 | 0,20 |
| **3** | 2022 | 2.750 | 287.50 | 0,25 |
| **4** | 2023 | 2.640,90 | 271.01 | 250.88 |
| **5** | 2024 | 2.640,91 | 271.01 | 250.88 |

*Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2023*

Berdasarkan tabel 2.100 terlihat adanya perubahan signifikan baik pada luas areal maupun populasi kelapa dalam selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020–2021, luas areal tetap di angka 2.785,98 hektar dengan populasi kelapa dalam sebesar 560,22 ton, namun produktivitas masih rendah di kisaran 0,20%. Tahun 2022 terjadi penurunan luas areal menjadi 2.750 hektar dan populasi anjlok menjadi 287,50 ton, meskipun produktivitas naik sedikit menjadi 0,25%. Memasuki tahun 2023–2024, luas areal turun lebih lanjut hingga 2.640,91 hektar, populasi tetap di 271,01 ton, dan produktivitas melonjak drastis di atas 250%. Perubahan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengurangan areal tanam dan peningkatan efisiensi produksi.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa meskipun luas areal mengalami penyusutan, tingkat produktivitas per satuan lahan meningkat signifikan pada dua tahun terakhir. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbaikan teknik budidaya, pemilihan varietas unggul, dan peningkatan perawatan tanaman, sehingga hasil produksi per hektar meningkat. Namun, penurunan populasi kelapa dalam yang cukup tajam sejak 2022 menjadi perhatian, karena dapat berdampak pada keberlanjutan produksi dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu mempertahankan bahkan memperluas lahan produktif untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku industri berbasis kelapa dalam.

Pengembangan komoditi perkebunan di Nagan Raya terutama untuk perkebunan rakyat selama ini masih dihadapkan beberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen. Sebagian besar bibit unggul masih harus didatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yang relatif

mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukan klon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnya harga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan terutama akibat rendahnya kualitas pengolahan hasil panen, lemahnya sistem kelembagaan petani, dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.

#### 2.1.4.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

**1. Fasilitas Listrik**

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Selama tahun 2018-2022, produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Untuk kategori produksi listrik Kabupaten Nagan Raya terhitung sebesar 86.555.701 Kwh dan pada Tahun 2022 produksi listrik tersebut meningkat menjadi 115.317.134 Kwh. Pada Tahun 2018, daya terpasang listrik terhitung sebesar 42.883.950 VA dan mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 115.317.134 VA.

**Tabel 2.101**
**Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2018-2022**

| Tahun | Daya Terpasang (VA) | Produksi Listrik (Kwh) | Listrik Terjual (Kwh) |
|---|---|---|---|
| **2018** | 42.883.950 | 86.555.701 | 75.910.966 |
| **2019** | 47.168.200 | 93.401.590 | 83.516.568 |
| **2020** | 49.555.350 | 87.495.323 | 76.760.240 |
| **2021** | N/A | N/A | N/A |
| **2022** | 115.317.134 | 115.317.134 | 97.837.311 |

*Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2023*

Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt

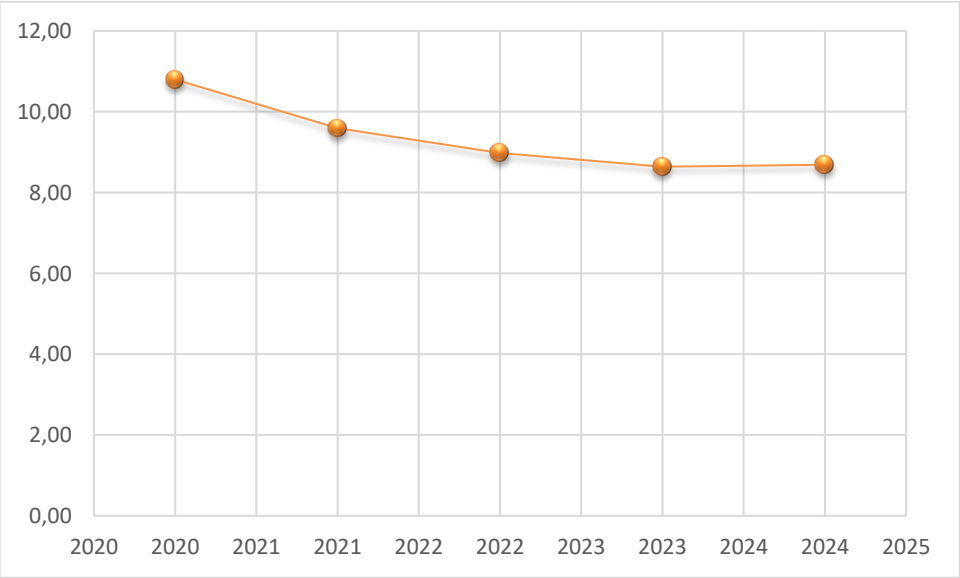
(MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

### 2.1.4.3.5 Perdagangan

Di tengah posisi Kabupaten Nagan Raya yang dapat dikatakan strategis, perdagangan menjadi jantung ekonomi yang memompa kehidupan ke setiap sudut. Bisnis kecil dan menengah juga bertahan dengan peran mereka yang khas. Secara keseluruhan, perdagangan di Nagan Raya mencerminkan keberagaman ekonomi dan budaya masyarakatnya. Dari pasar tradisional hingga toko-toko modern, perdagangan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut.

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Seunagan. Selanjutnya untuk kontribusi perdagangan besar dapat dilihat pada Gambar 2.24.

**Gambar 2.26**
**Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen),**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**




*Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2025*

Dari Gambar 2.23 dapat dilihat bahwa kontribusi perdagangan di Kabupaten Nagan Raya pada sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 tingkat kontribusi perdagangan di kabupaten Nagan Raya menyentuh angka 11,44%. Namun hingga Tahun 2023, kontribusi perdagangan turun ke angka 8,50%.

Penurunan ini dapat dikarenakan penurunan permintaan barang terhadap mobil dan sepeda motor. Faktor kehadiran berbagai merek menghasilkan persaingan yang lebih kuat. Persaingan penjualan yang berasal dari *online shopping* membuat pedagang lokal di Kabupaten Nagan Raya mengharuskan untuk menyesuaikan strategi harga dan pemasaran mereka, yang dapat mengurangi kontribusi perdagangan. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi penurunan sektor ini sehingga masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang non-esensial seperti mobil baru atau perbaikan mobil. Penurunan daya beli masyarakat ini dapat mengurangi volume penjualan dan pendapatan bisnis di sektor perdagangan.

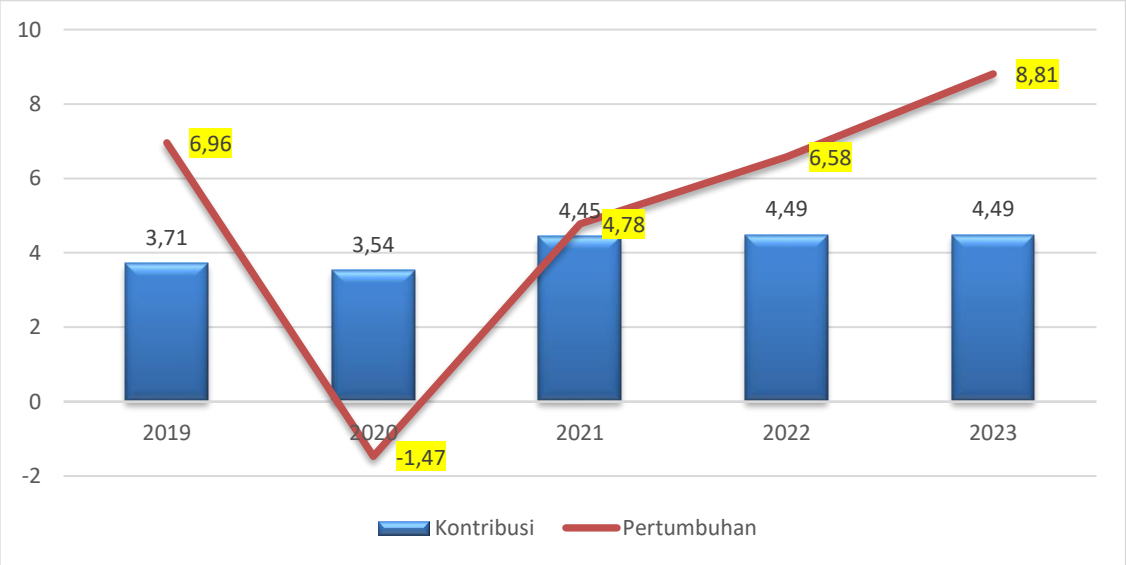
Selanjutnya perkembangan teknologi, seperti peningkatan keandalan kendaraan atau perbaikan yang lebih jarang diperlukan, dapat mengurangi frekuensi kunjungan ke bengkel. Kemajuan dalam teknologi juga bisa memungkinkan orang untuk melakukan perbaikan sendiri dengan bantuan tutorial *online* se mengurangi kebutuhan untuk menggunakan jasa reparasi profesional. Kondisi-kondisi seperti yang telah disebutkan diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kontribusi perdagangan di Kabupaten Nagan Raya.

#### 2.1.4.3.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah. Ini melibatkan serangkaian proses produksi, termasuk pemrosesan, manufaktur, dan penyusunan kembali bahan baku menjadi produk yang siap dijual atau digunakan.

Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Kontribusi nonmigas di sebuah kabupaten merujuk pada sektor ekonomi selain industri migas atau minyak dan gas bumi. Ini mencakup berbagai bidang ekonomi yang tidak tergantung pada eksploitasi atau ekstraksi sumber daya alam migas. Di Kabupaten Nagan Raya, kontribusi nonmigas berupa di sektor pertanian dan perdagangan. Gambar 2.24 menunjukkan tren kontribusi dan laju pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Nagan Raya.

**Gambar 2.27**
**Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023**




*Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2024*

Dari Gambar 2.27 dapat dilihat bahwa kontribusi dan laju pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Nagan Raya berfluktuasi. Pada Tahun 2019, kontribusi dan laju pertumbuhan berada pada angka 3,71 dan 6,96. Namun pada Tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan sebanyak -1,47%. Penurunan ini disebabkan oleh munculnya COVID-19 yang mengakibatkan kontribusi industri pengolahan mengalami kemacetan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, pada Tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya mampu melakukan pemulihan ekonomi dengan peningkatan laju pertumbuhan secara drastis naik sebesar 4,78% dengan kontribusi sebesar 4,45. Angka ini terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan yang berada pada 8,81%.

### 2.1.4.3.7 Tenaga Kerja

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, sejatinya pemerintah dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan agar program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Tenaga kerja merujuk pada semua individu yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja, buruh, atau pengusaha. Secara umum, konsep tenaga kerja mencakup semua orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan tenaga kerja:

Tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan komposisi seperti tenaga kerja terampil (dengan keterampilan khusus), tenaga kerja terlatih (yang memiliki pelatihan formal), dan tenaga kerja tidak terampil (tanpa keterampilan khusus). Kualifikasi dan kemampuan mereka mempengaruhi jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan kontribusi mereka terhadap ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan memainkan peran penting dalam menentukan jenis pekerjaan yang dapat diakses seseorang, serta dalam menentukan produktivitas dan pendapatan.

Capaian pencari kerja yang terdaftar, lowongan kerja yang terdaftar, serta penempatan tenaga kerja yang terdaftar merupakan indikator penting dalam analisis pasar tenaga kerja. Analisis terhadap ketiga capaian ini memberikan gambaran tentang dinamika pasar tenaga kerja suatu wilayah. Jika jumlah pencari kerja yang terdaftar melebihi jumlah lowongan kerja yang terdaftar, ini bisa menunjukkan adanya ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, jika jumlah penempatan tenaga kerja meningkat, ini bisa mencerminkan perbaikan dalam efisiensi sistem penempatan tenaga kerja atau adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Ketiga indikator ini penting dalam merancang kebijakan ekonomi dan sosial yang tepat, serta untuk memonitor dan mengevaluasi keberhasilan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Capaian pencari kerja serta pemenuhan tenaga kerja menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.102**
**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

| KECAMATAN | PENCARI KERJA TERDAFTAR | | | LOWONGAN KERJA TERDAFTAR | | | JUMLAH TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| DARUL MAKMUR | 1 | 1 | **2** | - | - | **-** | - | 1 | **1** |
| TRIPA MAKMUR | - | - | **0** | - | - | **-** | - | - | **0** |
| KUALA | 4 | - | **4** | 3 | - | **3** | - | - | **0** |
| KUALA PESISIR | 14 | 1 | **15** | 17 | - | **17** | 13 | - | **13** |
| TADU RAYA | - | 2 | **2** | 1 | - | **1** | - | - | **0** |
| BEUTONG | - | 2 | **2** | - | - | **0** | - | 1 | **1** |
| BEUTONG ATEUH BANGGALANG | - | - | **0** | - | - | **0** | - | - | **0** |
| SEUNAGAN | 7 | - | **7** | - | - | **0** | - | - | **0** |
| SUKA MAKMUE | 5 | 1 | **6** | - | - | **0** | - | - | **0** |
| SEUNAGAN TIMUR | 3 | - | **3** | - | - | **0** | - | - | **0** |
| **NAGAN RAYA** | **34** | **7** | **41** | **21** | **0** | **21** | **13** | **2** | **15** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2024*

### 2.1.4.3.8 Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 5 lokasi transmigrasi dari tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019, penempatan jumlah KK pada 5 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 538 KK. Selanjutnya pada Tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 860 kepala keluarga dari 5 kolasi tersebut. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.103**
**Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Lokasi | Jumlah Kepala Keluarga | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti | 352 | 339 | 495 | 612 | 612 |
| 2 | UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk | 30 | 30 | 31 | 45 | 31 |
| 3 | UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep | 90 | 85 | 81 | 82 | 81 |
| 4 | UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie | 90 | 90 | 89 | 93 | 93 |
| 5 | UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango | 25 | 27 | 26 | 28 | 35 |
| **Jumlah** | | **556** | **587** | **614** | **860** | **852** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Adapun jumlah Transmigrasi lokal Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2020-2024 ada 4 (empat) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.104**
**Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Lokal Yang Menetap**
**Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| NO | NAMA TRANSMIGRASI LOKAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk | 30 | 42 | 45 | 45 | 31 |
| 2 | UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep | 90 | 85 | 81 | 82 | 81 |
| 3 | UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie | 90 | 88 | 89 | 93 | 93 |
| 4 | UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango | 25 | 25 | 26 | 28 | 35 |
| **Jumlah** | | **226** | **235** | **240** | **241** | **240** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Adapun fasilitasi dilokasi transmigrasi tersebut belum memadai, sarana dan prasarana masih kurang, Status sekolah dasar belum Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.105**
**Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal**
**di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024**

| No | Nama Transmigrasi Lokal | Kondisi Jalan | Jembatan | Gorong Gorong | Listrik | Status Sekolah Dasar (Swasta) | Sarana Air Bersih | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk | Kurang Baik | Kurang Baik | Kurang Baik | Baik | Tidak Ada | Rusak Berat | |
| 2 | UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep | Kurang Baik | Tidak Ada | Rusak | Baik | Swasta | Rusak Berat | |
| 3 | UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie | Kurang Baik | Rusak | Rusak | Tidak Ada | Swasta | Rusak Berat | 25 KK Belum Ada Listrik |
| 4 | UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango | Kurang Baik | Rusak | Rusak | Baik | Swasta | Tidak Ada | |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Secara garis besar, program transmigrasi di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang tidak hanya mencerminkan pertumbuhan angka semata, tetapi juga realitas kompleks mengenai kesiapan wilayah dan keberlanjutan permukiman. Beberapa lokasi transmigrasi mengalami pertumbuhan jumlah kepala keluarga yang cukup signifikan, seperti UPT IV Seneuam Gampong Sumber Bakti yang meningkat tajam dari 352 KK pada tahun 2020 menjadi 612 KK pada 2023 dan bertahan di angka tersebut hingga 2024. Sementara itu, lokasi lain seperti UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep cenderung stagnan, dan UPT Beutong Ateuh Blang Puuk bahkan mengalami penurunan jumlah KK pada tahun terakhir. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa faktor penerimaan sosial, kondisi geografis, serta ketersediaan infrastruktur sangat memengaruhi minat dan ketetapan tinggal para transmigran di masing-masing lokasi.

Meski secara administratif jumlah kepala keluarga terus bertambah, data mengenai jumlah transmigran lokal yang benar-benar menetap justru menunjukkan grafik yang cenderung datar. Sejak tahun 2020 hingga 2024, peningkatannya hanya sekitar belasan jiwa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa proses adaptasi sosial dan kualitas kehidupan pasca-relokasi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi keluarga transmigran. Beberapa di antaranya mungkin kembali ke tempat asal atau berpindah ke wilayah lain yang dianggap lebih layak huni. Maka dari itu, keberhasilan transmigrasi bukan hanya ditentukan oleh

keberadaan populasi yang dipindahkan, melainkan sejauh mana wilayah tujuan mampu memberikan kepastian hidup yang layak, nyaman, dan berkelanjutan.

Faktor yang paling menentukan dalam konteks ini adalah kualitas sarana dan prasarana permukiman. Berdasarkan data fasilitas di lokasi-lokasi transmigrasi, masih banyak jalan utama yang dikategorikan dalam kondisi kurang baik, jembatan dan gorong-gorong yang rusak, serta keterbatasan akses air bersih yang mayoritas berada pada kondisi rusak berat atau bahkan tidak tersedia. Ketiadaan atau kerusakan fasilitas dasar ini secara langsung berdampak pada rendahnya kenyamanan dan produktivitas masyarakat transmigran. Bahkan, pada beberapa lokasi, masih terdapat kepala keluarga yang belum teraliri listrik secara permanen hingga tahun 2024. Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam membangun permukiman yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mendorong ketahanan sosial-ekonomi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memandang transmigrasi sebagai proses pembangunan wilayah jangka panjang, bukan sekadar pemindahan penduduk. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki kondisi fisik infrastruktur secara bertahap namun terarah, memperluas layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas, serta mendorong pembentukan unit-unit ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, peran masyarakat perlu dikuatkan melalui pembinaan kelembagaan lokal, agar tercipta ekosistem sosial yang solid dan saling mendukung. Dengan pendekatan yang komprehensif, kawasan transmigrasi dapat tumbuh menjadi pusat-pusat baru yang tidak hanya menampung, tetapi juga memberdayakan warganya secara berkelanjutan.

#### 2.1.4.3.9 Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya. Sektor perikanan seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi komunitas pesisir di banyak kabupaten. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan produksi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya berfluktuasi. Perkembangan nilai produksi dan produksi perikanan laut di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 2.106

**Tabel 2.106**
**Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2020-2024**

| No | Tahun | Nilai Produksi (Rp) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 36.277.598.000 | 2.570,52 |
| 2 | 2021 | 9.345.920.000 | 549,76 |
| 3 | 2022 | 48.757.894.006 | 1.541,97 |
| 4 | 2023 | 69.285.261.500 | 2.151,21 |
| 5 | 2024 | 69.285.261.500 | 2.231,19 |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.106, perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan laut di Kabupaten Nagan Raya selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, volume produksi tercatat sebesar 2.570,52 ton dengan nilai produksi mencapai Rp36,27 miliar. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis, di mana produksi hanya mencapai 549,76 ton atau menurun sekitar 78,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini juga tercermin pada nilai produksi yang merosot menjadi Rp9,34 miliar, turun sebesar 74,23 persen. Kondisi tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19, keterbatasan aktivitas nelayan, atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Meski sempat menurun tajam, sektor perikanan laut mulai menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, produksi meningkat menjadi 1.541,97 ton atau naik sekitar 180,50 persen dari tahun sebelumnya. Nilai produksinya pun melonjak signifikan hingga mencapai Rp48,76 miliar, atau meningkat 421,85 persen. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi meningkat menjadi 2.151,21 ton (naik 39,51 persen), disertai dengan kenaikan nilai produksi menjadi Rp69,28 miliar (naik 42,06 persen). Kemudian pada tahun 2024, volume produksi kembali mengalami kenaikan meskipun lebih moderat, yakni sebesar 2.231,19 ton atau meningkat 3,72 persen dari tahun sebelumnya. Menariknya, nilai produksi tetap berada pada angka Rp69,28 miliar, sama seperti tahun 2023, yang mengindikasikan stabilitas harga jual komoditas perikanan laut.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa sektor perikanan laut di Kabupaten Nagan Raya mampu pulih secara bertahap dari keterpurukan tahun 2021 dan kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi volume maupun nilai produksi. Stabilitas yang mulai terbentuk pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya tahan dan potensi yang kuat untuk terus berkembang.

Produksi perikanan laut yang berfluktuatif ini dapat di sebabkan oleh perubahan iklim yang berakibat perikanan laut turun secara signifikan. Ketika jumlah ikan yang ditangkap melebihi kapasitas pemulihan populasi ikan, maka stok ikan dapat menurun drastis dalam waktu singkat. *Overfishing* yang menyebabkan fluktuasi dalam produksi perikanan laut dari tahun ke tahun. Kerusakan habitat laut yang diikuti oleh penyakit dan parasit juga mempengaruhi produksi ikan. Kombinasi dari faktor-faktor ini juga dapat menyebabkan fluktuasi dalam produksi perikanan laut. Oleh karena itu, manajemen perikanan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup industri perikanan dan memastikan ketersediaan ikan bagi generasi mendatang.

**Tabel 2.107**
**Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Produksi ikan (ton) | 4.641,87 | 2.036,14 | 3.737,81 | 4.417,64 | 4.350,45 |
| 2 | Budidaya | 1.211,30 | 1.095,30 | 1.181,30 | 1.201,50 | 1.010,40 |
| 3 | Perikanan tangkap | 3.430,57 | 940,84 | 2.556,51 | 3.216,14 | 3.340,05 |
| 4 | Target Daerah (ton) | 3.769 | 4.032 | 3.340,13 | 4.344,57 | 4.316,79 |
| 5 | Capaian Produksi Ikan (%) | 123,15 | 50,50 | 88,30 | 101,68 | 100,78 |

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 2.107, Selama periode tahun 2020 hingga 2024, produksi ikan di Kabupaten Nagan Raya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total produksi ikan mencapai 4.641,87 ton dengan capaian sebesar 123,15% terhadap target daerah, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam, di mana produksi turun menjadi 2.036,14 ton atau hanya mencapai 50,50% dari target. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kendala teknis, terbatasnya aktivitas penangkapan, serta potensi gangguan pada sistem distribusi atau logistik perikanan yang menghambat optimalisasi produksi.

Memasuki tahun 2022, produksi mulai menunjukkan tren pemulihan dengan total produksi sebesar 3.737,81 ton dan capaian 88,30% dari target. Kinerja produksi terus meningkat pada tahun 2023, di mana capaian kembali melampaui target yaitu sebesar 101,68% dengan produksi mencapai 4.417,64 ton. Pada tahun 2024, total produksi ikan sedikit menurun menjadi 4.350,45 ton namun tetap berhasil mencapai target daerah dengan capaian sebesar 100,78%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan tajam, sektor perikanan di Nagan Raya mampu pulih dan mempertahankan konsistensi dalam dua tahun terakhir.

Jika ditinjau dari jenisnya, produksi perikanan tangkap masih menjadi kontributor utama dibandingkan budidaya. Selama lima tahun terakhir, produksi perikanan tangkap menunjukkan pola yang mirip dengan total produksi, dengan lonjakan signifikan pasca-2021. Sebaliknya, perikanan budidaya cenderung lebih stabil, meskipun pada tahun 2024 tercatat mengalami sedikit penurunan menjadi 1.010,40 ton. Hal ini memberikan gambaran bahwa sektor perikanan tangkap masih menjadi tumpuan utama produksi ikan di Nagan Raya, sementara sektor budidaya perlu mendapat perhatian lebih agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal di masa mendatang.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparatur dinas. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/ cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (*trip*) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk.

**Tabel 2.108**
**Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Jenis | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Panjang garis pantai | 74,4 km | 74,4 km | 74,4 km | 74,4 km | 74,4 km |
| 2 | Luas laut | 446,4 km² | 446,4 km² | 446,4 km² | 446,4 km² | 446,4 km² |
| 3 | Luas perairan umum | 814 km² | 814 km² | 814 km² | 814 km² | 814 km² |
| 4 | Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI) | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 1 unit | 1 unit |
| 5 | Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI) | 2 unit | 2 unit | 4 unit | 3 unit | 3 unit |

| No | Jenis | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Jumlah kapal motor | 125 unit | 111 unit | 114 Unit | 125 Unit | 110 Unit |
| 7 | Jumlah perahu motor | 146 unit | 146 unit | 146 Unit | 103 Unit | 71 Unit |
| 8 | Jumlah nelayan tetap | 538 Orang | 536 Orang | 585 Orang | 581 Orang | 581 Orang |
| 9 | Jumlah nelayan tidak tetap | 2016 Orang | 2248 Orang | 2.248 Orang | 2.248 Orang | 2.248 Orang |
| 10 | Jumlah pemasar ikan | 900 Orang | 900 Orang | 900 Orang | 900 Orang | 900 Orang |
| 11 | Jumlah kelompok pengolahan ikan | 46 Orang | 46 Orang | 46 Orang | 46 Orang | 46 Orang |
| 12 | Jumlah unit pengolahan | 46 unit | 46 unit | 46 unit | 46 unit | 46 unit |
| 13 | Jumlah produksi ikan olahan | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 229,9 | 229,9 |
| 14 | Jumlah pasar ikan / depo | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit |

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025*

Berdasarkan analisis data pada tabel 2.108 menunjukkan bahwa potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Nagan Raya dari sisi geografis tergolong stabil, ditunjukkan dengan tidak berubahnya panjang garis pantai, luas laut, dan luas perairan umum selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam secara fisik tersedia secara konsisten dan dapat terus dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan tangkap. Infrastruktur penunjang seperti pangkalan dan tempat pendaratan ikan sempat mengalami penyesuaian, namun jumlahnya tetap dalam kisaran yang masih memungkinkan kegiatan operasional berjalan. Sementara itu, sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seperti pasar ikan, unit pengolahan, dan kelompok pengolah, juga cenderung stabil tanpa perubahan jumlah.

Pada aspek armada dan sumber daya manusia, terdapat kecenderungan penurunan, khususnya pada jumlah perahu motor dan kapal motor yang menjadi alat utama nelayan dalam menangkap ikan. Jumlah nelayan tetap relatif stabil dengan sedikit peningkatan, sementara nelayan tidak tetap mengalami peningkatan dan kemudian bertahan pada jumlah yang sama. Di sisi hilir, distribusi dan pengolahan hasil tangkapan berjalan konsisten, ditandai dengan stabilnya jumlah pemasar ikan dan volume produksi ikan olahan. Meskipun demikian, penurunan jumlah armada tangkap perlu menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi kinerja produksi secara keseluruhan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pengolah ikan agar lebih berdaya saing, serta

pengembangan sistem distribusi dan pemasaran hasil tangkapan yang lebih luas. Upaya ini penting agar sektor kelautan dan perikanan tetap menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Rumah tangga perikanan budidaya memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas sektor perikanan di Kabupaten Nagan Raya. Selain berkontribusi langsung terhadap produksi ikan, kelompok ini juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal, serta membuka peluang usaha di tingkat masyarakat. Melihat sebaran rumah tangga perikanan budidaya di setiap kecamatan menjadi langkah awal yang penting untuk memahami potensi, tantangan, dan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah. Dengan begitu, program penguatan sektor budidaya ke depan dapat disusun secara lebih terarah dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

**Tabel 2.109**
**Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darul Makmur | 131 | 125 | 251 | 251 | 251 |
| 2 | Tripa Makmur | 49 | 49 | 152 | 152 | 152 |
| 3 | Kuala | 83 | 80 | 191 | 191 | 191 |
| 4 | Kuala Pesisir | 59 | 53 | 58 | 58 | 58 |
| 5 | Tadu Raya | 71 | 67 | 179 | 179 | 179 |
| 6 | Beutong | 161 | 148 | 422 | 422 | 422 |
| 7 | Beutong Ateuh Banggalang | 50 | 52 | 110 | 110 | 110 |
| 8 | Seunagan | 89 | 87 | 252 | 257 | 252 |
| 9 | Suka Makmue | 103 | 98 | 251 | 251 | 196 |
| 10 | Seunagan Timur | 181 | 186 | 413 | 422 | 422 |
| **JUMLAH** | | **867** | **895** | **977** | **2.279** | **2.233** |

*Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025*

Dalam periode lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada tahun 2023. Kecamatan Beutong mencatat lonjakan paling tinggi, dari 161 rumah tangga pada 2020 menjadi 422 pada 2024, tumbuh sebesar 162%. Kecamatan lainnya yang juga

menunjukkan peningkatan mencolok adalah Seunagan Timur (133%), Tripa Makmur (210%), Tadu Raya (152%), dan Darul Makmur (91%). Sementara itu, Kecamatan Kuala Pesisir hanya mengalami sedikit perubahan, dan Suka Makmue mengalami penurunan pada tahun terakhir.

Secara keseluruhan, jumlah rumah tangga budidaya meningkat dari 867 pada 2020 menjadi 2.233 pada 2024, atau naik sekitar 157,6%. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2023, di mana angka total hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perhatian serius terhadap pengembangan sektor budidaya, baik melalui dukungan program pemerintah maupun peningkatan minat masyarakat. Namun, dinamika antar kecamatan juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual agar pengembangan budidaya dapat merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2.110**
**Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan**
**Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023**

| No | Budidaya Perikanan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perairan Umum | 35.299.200.000 | 34.424.400.000 | 15.643.280.000 | 53.197.999.500 | - |
| 2 | Air Tawar | 30.177.500.000 | 34.453.500.000 | 26.287.200.000 | 32.313.420.000 | 38.772.500.000 |
| 3 | Laut | 47.478.519.000 | 36.277.598.000 | 9.345.920.000 | 48.614.337.000 | - |
| | Jumlah | 114.725.736.215 | 112.955.219.000 | 105.155.498.000 | 134.125.756.500 | 38.772.500.000 |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2024*

**Tabel 2.111**
**Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023**

| | Jenis Ikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lele | 200,00 | 150,00 | 149 | 303 | 328 |
| 2 | Mujair | - | - | - | - | - |
| 3 | Ikan Mas | 268,5 | 205,3 | 190,3 | 247,3 | 255 |
| 4 | Nila | 588,00 | 856 | 756 | 636 | 618,5 |
| 5 | Ikan Lainnya | 1.056,50 | 1.211,30 | 1.095,30 | - | - |
| **Jumlah** | | **2.422,60** | **1245,49** | **1056,50** | **1.181,30** | **1.201,50** |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2024*

Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2022, tercatat nelayan tetap di Kabupaten Nagan Raya mencapai 585 orang jumlah nelayan. Sedangkan rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam mengalami peningkatan , dari 1,058 rumah tangga tahun 2020 menjadi 2,279 rumah tangga tahun 2022.

Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Selain itu, pelatihan teknis budidaya, pengolahan pasca panen, dan penyediaan fasilitas perikanan diupayakan terus meningkat sehingga berperan signifikan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat nelayan.

**Tabel 2.112**
**Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nelayan Tetap** | Orang | 538 | 536 | 585 | 581 | 472 |
| **Nelayan Tidak Tetap** | Orang | 2016 | 2248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| **Jumlah Petambak** | RT | 185 | 185 | - | 185 | - |
| **Jumlah Petani Ikan Kolam** | RT | 1,058 | 1,075 | 2,279 | 2,293 | 2,293 |
| **Jumlah Petani Ikan Perairan Umum** | RT | 170 | 200 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| **Kelompok Nelayan** | Kelompok | 46 | 50 | 16 | 18 | 15 |
| **Jumlah Nelayan yang dibina** | Orang | 46 | 46 | 160 | 200 | 189 |
| **Jumlah Petambak yang dibina** | Orang | 20 | 20 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah petani ikan yang dibina** | Orang | 550 | 551 | 342 | - | - |
| **Jumlah kelompok Budidaya Ikan** | Kelompok | 91 | 93 | 25 | 43 | 43 |
| **Jumlah kelompok pengolahan Ikan** | Kelompok | 46 | 46 | 4 | 2 | 2 |
| **Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina** | Kelompok | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 2.112 dapat dilihat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, dinamika jumlah nelayan di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren yang beragam. Jumlah nelayan tetap sempat mengalami peningkatan hingga tahun 2022, namun kemudian menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi 472 orang, dari angka tertingginya 585 orang. Sebaliknya, jumlah nelayan tidak tetap terpantau stabil sejak tahun 2021 di angka 2.248 orang. Di sisi pembudidaya, jumlah petani ikan kolam meningkat cukup tajam dari 1.058 rumah tangga pada tahun 2020 menjadi 2.293 rumah tangga pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor budidaya perikanan semakin diminati masyarakat.

Namun, dinamika kelompok nelayan dan pembinaannya justru memperlihatkan penurunan. Jumlah kelompok nelayan yang aktif menurun dari 50 kelompok di tahun 2021 menjadi hanya 15 kelompok di tahun 2024. Begitu pula kelompok pengolahan ikan yang semula stabil sebanyak 46 kelompok hingga 2021, turun drastis menjadi hanya 2 kelompok aktif dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, jumlah nelayan yang dibina sempat meningkat pada 2023, tetapi kembali turun pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan pelaku budidaya dan melemahnya kelembagaan serta pengolahan pascapanen.

Tren ini menyiratkan perlunya perhatian lebih terhadap kelembagaan perikanan dan kesinambungan pembinaan nelayan di Kabupaten Nagan Raya. Meskipun jumlah pelaku budidaya terus tumbuh, tanpa penguatan kelompok dan pembinaan yang konsisten, keberlanjutan usaha perikanan akan sulit terjaga. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali program penguatan kapasitas, dukungan kelembagaan, dan insentif terhadap kelompok nelayan dan pengolah agar perkembangan sektor ini tidak hanya berhenti di tingkat produksi, tetapi juga berlanjut hingga ke tahap distribusi dan pengolahan.

**Tabel 2.113**
**Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2024**

| Kecamatan | Nama PPI | Nama Pasar | Lokasi |
|---|---|---|---|
| **Darul Makmur** | - | - Pasar Alue Bilie<br>- Pasar Pekan<br>-Pasar Seumayam | - Desa Alue Bilie<br>- Desa Lamie<br>- Desa Serbajadi |
| **Tripa Makmur** | TPI Babah Lueng TPI Kuala Tripa | - Pasar Kamis | - Desa Kabu |
| **Kuala** | - | - Pasar Simpang Peut | - Desa Simpang Peut |
| **Kuala Pesisir** | PPI Kuala Tuha | - Pasar Langkak<br>- Pasar Kamis | - Desa Langkak<br>- Desa Arongan |
| **Tadu Raya** | PPI Kuala Tadu | - Pasar Sabtu<br>- Pasar Minggu | - Desa Kuala Tadu<br>- Desa Alue Itam |
| **Beutong** | - | - Pasar Beutong | - Desa Ulee Jalan |
| **Beutong Ateuh Banggalang** | - | - | - |
| **Seunagan** | - | Pasar Jeuram | - Desa Cot Meugat |
| **Suka Makmue** | - | Pasar Lueng Baro | - Desa Lueng Baro |
| **Seunagan Timur** | - | Pasar Uteun Pulo | - Desa Uteun Pulo |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2025*

Tabel 2.113 menunjukkan bahwa persebaran fasilitas pendaratan ikan (PPI dan TPI) serta pasar ikan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024. Secara umum, fasilitas PPI dan TPI masih terbatas dan tidak merata di semua kecamatan. Hanya Kuala Pesisir dan Tadu Raya yang memiliki PPI aktif, sementara Tripa Makmur memiliki dua TPI. Kecamatan lainnya seperti Darul Makmur, Beutong, dan Suka Makmue tidak memiliki fasilitas pendaratan ikan, meskipun beberapa di antaranya memiliki potensi laut yang besar.

Sementara itu, pasar ikan lebih tersebar luas dan hampir hadir di seluruh kecamatan. Darul Makmur, Kuala Pesisir, dan Tadu Raya bahkan memiliki lebih dari satu pasar. Ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan hasil perikanan tetap berjalan, meskipun minimnya fasilitas PPI dan TPI bisa menjadi hambatan dalam efisiensi logistik dan kualitas hasil tangkapan. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang menjadi satu-satunya wilayah tanpa fasilitas PPI, TPI, maupun pasar ikan yang tercatat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan memaksimalkan fasilitas dalam pemerataan infrastruktur perikanan. Pengembangan PPI dan TPI di kecamatan yang belum memilikinya sangat penting untuk mendukung kelancaran rantai pasok, menjaga mutu hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi nelayan. Di sisi lain, optimalisasi pasar ikan yang sudah ada melalui revitalisasi dan integrasi dengan sistem distribusi modern juga akan sangat membantu meningkatkan daya saing sektor perikanan lokal.

**Tabel 2.114**
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan | 46 | 50 | 11 | 3 | 3 |
| 2 | Jumlah kelompok nelayan | 46 | 50 | 16 | 18 | 15 |
| **Cakupan pembinaan kelompok nelayan (%)** | | **100** | **100** | **68,75** | **16,67** | **13,33** |

*Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025*

Selanjutnya, cakupan pembinaan kelompok nelayan di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan penurunan yang cukup tajam selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, seluruh kelompok nelayan yang terdaftar mendapat pembinaan, dengan cakupan mencapai 100%. Namun pada tahun 2022, cakupan tersebut turun menjadi 68,75%, lalu anjlok drastis menjadi 16,67% pada 2023 dan hanya 13,33% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok nelayan aktif tidak lagi mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan.

Penurunan cakupan pembinaan ini juga sejalan dengan menurunnya jumlah kelompok nelayan aktif dari 50 kelompok pada tahun 2021 menjadi hanya 15 kelompok pada 2024. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kurangnya pembinaan dan pendampingan berdampak langsung pada keberlangsungan kelompok. Keberadaan kelompok yang tidak dibina secara rutin akan kesulitan dalam mengakses bantuan, pelatihan, maupun program peningkatan kapasitas lainnya.

Dengan kondisi ini, diperlukan langkah strategis untuk kembali menghidupkan peran kelompok nelayan sebagai ujung tombak pembangunan perikanan rakyat. Pemulihan cakupan pembinaan tidak hanya penting untuk keberlanjutan usaha nelayan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir. Revitalisasi program

pembinaan kelompok nelayan dapat menjadi investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan sektor perikanan secara menyeluruh di Kabupaten Nagan Raya.

**Tabel 2.115**
**Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah produksi ikan (ton) hasil kelompok nelayan | 3.184,79 | 3.000,54 | 1.730,72 | 1.541.971 | 2.151,21 |
| 2 | Jumlah produksi ikan (ton) | 3.747,99 | 3.430,57 | 2.036,14 | 2.556.510 | 3.216,14 |
| **Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan (%)** | | 84,97 | 87,46 | 85 | 60,31 | 66,89 |

*Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2024*

### 2.1.4.4 Penunjang Urusan

#### 2.1.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan tugas umum ketatausahaan badan, melakukan koordinasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian, infrastruktur, pemerintahan, sumber daya manusia, keistimewaan, sosial budaya dan penelitian, evaluasi pengembangan pembangunan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dari tugas pokok dan fungsi yaitu: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan

Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

#### 2.1.4.4.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2012-2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008-2024, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan kententuan yang berlaku.

#### 2.1.4.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan *e-government* (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan *simona* (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi

pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.116**
**Profil Kepegawaian dan Pengembangan ASN**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**

| Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan** | Orang | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| **ASN yang Diberikan Tanda Jasa** | Orang | 80 | 60 | 30 | 65 | 185 |
| **ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan** | Orang | 40 | 55 | 72 | 80 | 131 |
| **ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi** | Orang | 18 | 20 | 15 | 20 | 25 |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Nagan Raya Tahun 2025*

#### 2.1.4.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

#### 2.1.4.4.5 Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan.

#### 2.1.4.4.6 Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya; Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya maupun RKPK Nagan Raya; dan Terintegrasi Program-

Program DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRK Nagan Raya.

### 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2019 sampai 2023 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita ini tahun 2023 telah mencapai 25,39 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya mencapai 20,39 juta rupiah.

Peningkatan nilai konsumsi rumah tangga perkapita dapat menunjukkan peningkatan daya beli penduduk di Kabupaten Nagan Raya dan juga peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh kenaikan harga dan gaya hidup. Dilihat dari laju pertumbuhan per kapita, laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga perkapita menurun pada 2020, yaitu menurun sebesar 0,39%. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 11,66%. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga per kapita mencapai angka 7,90%.

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita digunakan untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah. Konsumsi rumah tangga perkapita dapat menjadi ukuran mengenai pendapatan penduduk. Semakin tinggi pengeluaran/konsumsi rumah tangga per kapita maka semakin tinggi pendapatan penduduk tersebut.

Dengan kata lain, berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa nilai konsumsi rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara tidak langsung, kemampuan ekonomi daerah nagan raya juga meningkat sehingga kedepannya stakeholder dapat membuat kebijakan-kebijakan baru dalam merencanakan pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

### 2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/ infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability)* fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi.

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini dapat disinggahi pesawat sejenis Fokker, dan diupayakan dalam jangka panjang mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung berfluktuatif. Untuk tahun 2019-2023 barang yang dibongkar muat bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.117**
**Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien**
**Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | Barang | Bagasi | Barang | Bagasi | Barang | Bagasi | Barang | Bagasi | Barang | Bagasi |
| 1 | Muat | 11.651 | 68.850 | 10.052 | 16.440 | N/A | 3.868 | N/A | 38.531 | N/A | 42.107 |
| 2 | Bongkar | 2.967 | 50.870 | 574 | 9.519 | N/A | 4.638 | N/A | 41.889 | N/A | 40.774 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024*

Adapun jumlah penumpang untuk tahun 2019 sampai 2023 melalui Bandara Cut Nyak Dhien bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.118**
**Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien**
**Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Penumpang Datang | 18.725 | 4.733 | 854 | 6.697 | 7.239 |
| 2 | Jumlah Penumpang Berangkat | 18.500 | 4.297 | 862 | 7.182 | 7.567 |

*Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Kab. Nagan Raya 2024*

### 2.1.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain: a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); c) IUI (Izin Usaha Industri); d) TDI (Tanda Daftar Industri); e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan e) HO (Izin Gangguan).

Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagan Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 065/252/2015 tanggal 1 Nopember 2015.

**Tabel 2.119**
**Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya**

| No. | Jenis Perizinan | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **1** | SIUP | Waktu proses pelayanan (hari) | **7** |
| | | Jumlah persyaratan (berkas) | **1** |
| | | Biaya mengurus persyaratan | **Tidak dipungut biaya** |
| **2** | TDP | Waktu proses pelayanan (hari) | **2** |
| | | Jumlah persyaratan (berkas) | **4** |
| | | Biaya mengurus persyaratan | **Tidak dipungut biaya** |
| **3** | IUI | Waktu proses pelayanan (hari) | **3** |
| | | Jumlah persyaratan (berkas) | **9** |
| | | Biaya mengurus persyaratan | **Tidak dipungut biaya** |
| **4** | TDI | Waktu proses pelayanan (hari) | **12** |
| | | Jumlah persyaratan (berkas) | **6** |
| | | Biaya mengurus persyaratan | **Tidak dipungut biaya** |
| **5** | IMB | Waktu proses pelayanan (hari) | **14** |
| | | Jumlah persyaratan (berkas) | **14** |
| | | Biaya mengurus persyaratan | **225.000xkoefesien(sesuai Qanun)** |
| **6** | HO | Waktu proses pelayanan (hari) | **7** |
| | | Jumlah persyaratan (berkas) | **7** |
| | | **Biaya mengurus persyaratan** | **Tidak dipungut biaya** |

*Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023*

Pajak daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi pajak hotel , pajak restoran (Rumah Makan dan Katering); pajak hiburan (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari, Pameran, Balap Kendaraan Bermotor); pajak reklame (reklame papan, kain, melekat/stiker, baliho dan billboard); pajak penerangan jalan PLN; pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum dan jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum terdiri dari:

a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
d. Retribusi Pelayanan Pasar;
e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terdiri dari :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
c. Retribusi penyediaan dan / atau peneyedotan Kakus;
d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
e. Retribusi Tempat Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Kebangsaan (Pas Kecil).

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha adalah :

1) Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
2) Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan peternakan;
3) Qanun Nomor 17 Tahun 2007 Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagan Raya antara lain adalah:

1) belum optimalnya promosi investasi;
2) lemahnya dukungan regulasi investasi dan
3) belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor.
4) Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan.

Karena itu, Pemerintah harus melakuk9 evaluasi an beberapa hal: 1) peningkatan promosi investasi; 2) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

### 2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi ( S1, S2, S3)

   Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan 0,01 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S3.

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

   Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Nagan Raya yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung paling kurang 56 orang yang tidak produktif. Kondisi ini mengalami perubahan yang sangat drastis dengan tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2012, rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 penduduk tidak produktif. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) dan naiknya proporsi penduduk produktif.

Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) semakin berkurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen.

**Tabel 2.120**
**Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan**
**Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2019-2023 (%)**

| Tahun | Komposisi Penduduk | | | Jumlah Penduduk | Angka Ketergantungan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-14 tahun | 15-64 tahun | 65 tahun + | | |
| **2019** | 28.93 | 66.44 | 4.63 | 164.483 | 50.50 |
| **2020** | 28.78 | 66.53 | 4.76 | 167.294 | 50.31 |
| **2021** | 42,60 | 115,68 | 9,55 | 167.840 | 45,08 |
| **2022** | 42,95 | 117,12 | 9,98 | 170.060 | 45,20 |
| **2023** | 43,25 | 118,49 | 10,47 | 172.220 | 45,34 |

*Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2024*

## 2.2 Realisasi Capaian RKPD 2024 dan RPD 2023-2026

Secara umum, realisasi capaian kinerja dan anggaran pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas perangkat daerah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hampir seluruh urusan pelayanan dasar, urusan wajib non-dasar, hingga urusan pilihan mencatat predikat capaian kinerja yang masih dalam kategori "sangat rendah". Hal ini menandakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target perencanaan dan kemampuan realisasi di lapangan.

Pada urusan pelayanan dasar, bidang pendidikan, kesehatan, dan rumah sakit daerah belum mampu menunjukkan capaian yang optimal. Realisasi anggaran relatif kecil dibandingkan pagu yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja juga rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam penyerapan anggaran, baik karena keterlambatan proses administrasi, kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, maupun

keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Tantangan lain adalah masih terbatasnya infrastruktur pendukung, khususnya pada sekolah, puskesmas, dan rumah sakit yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Pada sektor pekerjaan umum, perumahan, permukiman, dan kebencanaan, capaian realisasi juga masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan karena sektor ini erat kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, irigasi, perumahan layak huni, air minum, dan sanitasi. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas kontraktor lokal, lamanya proses pengadaan barang dan jasa, serta cuaca dan kondisi geografis yang memengaruhi pelaksanaan proyek fisik.

Di sisi urusan sosial dan ketenteraman masyarakat, capaian yang relatif lebih baik ditunjukkan oleh Dinas Sosial dan Kesbangpol, meskipun secara umum masih jauh dari memadai. Ini menandakan bahwa program bantuan sosial dan penguatan kelembagaan masyarakat relatif lebih cepat terealisasi dibanding sektor lain. Namun tantangan yang muncul adalah konsistensi data penerima manfaat, akurasi penyaluran bantuan, serta koordinasi lintas sektor.

Untuk urusan ekonomi, seperti perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, capaian kinerja juga masih rendah. Hal ini menandakan bahwa transformasi ekonomi daerah belum berjalan optimal. Hambatan utama dalam sektor ini adalah rendahnya minat investasi, masih minimnya dukungan infrastruktur kawasan ekonomi, serta terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Pada aspek pemerintahan, termasuk Bappeda, BPKD, BKPSDM, dan Inspektorat, capaian juga belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur masih menghadapi hambatan kelembagaan. Tantangan terbesar adalah birokrasi yang panjang, keterbatasan sistem informasi terintegrasi, serta rendahnya kualitas SDM dalam mengelola perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat kualitas perencanaan agar lebih realistis, serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur maupun pelaksana program. Hambatan yang paling menonjol adalah keterlambatan proses administrasi keuangan, lemahnya koordinasi lintas sektor, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan daerah.

### 2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Nagan Raya Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2025 menunjukkan capaian pembangunan yang relatif progresif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal, dinamika sosial-ekonomi, maupun faktor eksternal lainnya. Beberapa indikator prioritas menunjukkan tren yang positif, khususnya pada sektor peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Namun demikian, masih terdapat sejumlah target yang belum tercapai secara optimal, terutama pada aspek penyelarasan program lintas sektor dan keterbatasan daya dukung infrastruktur. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi penyesuaian dan penguatan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025, Tingkat Realisasi Capaian Kinerja RKPK sebesar 87,00 % dengan predikat sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 2.121
## Data Realisasi Capaian Kinerja RKPK Nagan Raya Tahun 2025

Berikut merupakan matrik Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPK Nagan Raya hingga Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD | | | | Realisasi Capaian Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anggaran RKPK | Realisasi APBK(Triwulan I) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | |
| | | | | | | | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) |
| 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN | 276.775.484.615,00 | 33.442.435.667,00 | 17,40 | 15,95 | SR | SR | 19,34 | 22,78 | SR | SR |
| | | | 2 | DINAS KESEHATAN | 119.892.007.234,00 | 12.653.211.283,00 | 19,32 | 2,41 | SR | SR | 19,32 | 33,94 | SR | SR |
| | | | 3 | RSUD SULTAN ISKANDAR MUDA | 126.598.331.024,00 | 6.680.262.666,00 | 1,78 | 1,90 | SR | SR | 1,78 | 1,60 | SR | SR |
| | | | 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 81.643.568.911,00 | 2.046.841.619,00 | 1,97 | 6,19 | SR | SR | 0,49 | - | SR | #N/A |
| | | | 5 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 18.347.066.423,00 | 527.655.035,00 | 20,83 | 1,13 | SR | SR | 16,43 | 3,75 | SR | SR |
| | | | 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 4.487.592.131,00 | 560.399.945,00 | 5,33 | 5,33 | SR | SR | 5,33 | 7,56 | SR | SR |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD | Realisasi Capaian Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran RKPK | Realisasi APBK(Triwulan I) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | |
| | | | | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 7 KESBANGPOL | 5.404.280.569,00 | 354.151.120,00 | 43,38 | 32,78 | SR | SR | 33,84 | 10,88 | SR | SR |
| | 8 DINAS SOSIAL | 8.473.934.796,00 | 2.681.230.466,00 | 50,8 | 46,25 | R | SR | 10,8 | 89,9 | SR | T |
| | 9 DINAS SYARIAT ISLAM | 30.241.353.868,00 | 783.901.319,00 | 9,17 | 9,19 | SR | SR | 6,17 | 3,78 | SR | SR |
| | 10 BPBD | 6.806.125.309,00 | 632.728.000,00 | 9,53 | 2,09 | SR | SR | 4,69 | - | SR | #N/A |
| | 11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 3.759.031.673,00 | 384.691.921,00 | 3,1 | 2,58 | SR | SR | 2,58 | 3,04 | SR | SR |
| | 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15.213.213.481,00 | 3.445.278.612,00 | 7,14 | 8,46 | SR | SR | 5,07 | 18,44 | SR | SR |
| | 13 DISDUKCAPIL | 3.842.067.630,00 | 533.434.037,00 | 2,15 | 4,93 | SR | SR | - | - | #N/A | #N/A |
| | 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 10.905.086.752,00 | 572.782.919,00 | 55,10 | 6,78 | R | SR | 22,64 | 5,48 | SR | SR |
| | 15 DINAS PERHUBUNGAN | 6.145.846.035,00 | 543.394.566,00 | 17,01 | 17,01 | SR | SR | 11,34 | 4,35 | SR | SR |
| | 16 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 4.219.126.850,00 | 304.680.159,00 | 1,86 | 2,21 | SR | SR | 0,43 | 0,09 | SR | SR |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD | Realisasi Capaian Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran RKPK | Realisasi APBK(Triwulan I) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | |
| | | | | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 17 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 6.755.100.291,00 | 479.701.751,00 | 3,97 | 3,97 | SR | SR | 3,97 | 5,20 | SR | SR |
| | 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.569.806.046,00 | 272.562.053,00 | 0,27 | 0,41 | SR | SR | 0,22 | 0,34 | SR | SR |
| | 19 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 8.481.002.529,00 | 371.121.027,00 | 0,00 | 2,62 | SR | SR | 0,00 | 2,06 | SR | SR |
| | 20 DINAS PERPUSATAKAAN DAN ARSIP | 3.764.304.807,00 | 413.576.291,00 | 1,08 | 1,02 | SR | SR | 1,08 | 1,21 | SR | SR |
| | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | |
| | 21 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 4.096.628.566,00 | 667.178.569,00 | 11,80 | 9,84 | SR | SR | 9,84 | 6,39 | SR | SR |
| | 22 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 21.100.643.592,00 | 1.546.108.052,00 | 80,45 | 10,38 | T | SR | 80,46 | 15,46 | T | SR |
| | 23 DINAS PERKEBUNAN | 4.732.099.737,00 | 170.791.439,00 | 0,28 | 0,25 | SR | SR | 0,28 | 0,21 | SR | SR |
| | 24 SEKRETARIAT DAERAH | 32.610.498.550,00 | 2.627.770.139,00 | 31,86 | 24,49 | SR | SR | 39,81 | - | SR | #N/A |
| | 25 SEKRETARIAT DPRK | 17.810.061.716,00 | 1.999.379.336,00 | 2,67 | 5,81 | SR | SR | 4,47 | 1,91 | SR | SR |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD | Realisasi Capaian Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran RKPK | Realisasi APBK(Triwulan I) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | |
| | | | | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 26 SEKRETARIAT MPU | 1.710.575.905,00 | 212.625.168,00 | - | 2,84 | #N/A | SR | - | - | #N/A | #N/A |
| | 27 SEKRETARIAT MAA | 1.832.689.128,00 | 143.298.081,00 | 130,26 | 15,63 | ST | SR | 65,98 | 1,59 | R | SR |
| | 28 SEKRETARIAT MPD | 1.419.577.154,00 | 104.814.156,00 | 7,26 | 3,16 | SR | SR | 7,26 | 13,68 | SR | SR |
| | 29 BAITUL MAL | 9.697.439.661,00 | 1.635.515.809,00 | 18,68 | 20,38 | SR | SR | 9,34 | 2,38 | SR | SR |
| | 30 KECAMATAN BEUTONG BANGGALANG | 1.595.486.343,00 | 204.983.341,00 | 1,44 | 1,44 | SR | SR | 1,44 | - | SR | #N/A |
| | 31 KECAMATAN BEUTONG | 3.427.033.469,00 | 528.839.930,00 | - | 6,99 | #N/A | SR | - | - | #N/A | #N/A |
| | 32 KECAMATAN DARUL MAKMUR | 3.389.907.057,00 | 148.275.452,00 | 7,14 | 0,39 | SR | SR | 7,14 | - | SR | #N/A |
| | 33 KECAMATAN TADU RAYA | 2.127.472.372,00 | 292.025.838,00 | 502,91 | 5,03 | ST | SR | 224,00 | - | ST | #N/A |
| | 34 KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR | 2.651.724.956,00 | 153.934.704,00 | 0,56 | 0,56 | SR | SR | 0,56 | 0,68 | SR | SR |
| | 35 KECAMATAN SEUNAGAN | 2.566.669.906,00 | 437.937.485,00 | 1,27 | 2,21 | SR | SR | 1,27 | - | SR | #N/A |
| | 36 KECAMATAN KUALA | 2.306.197.267,00 | 799.820.609,00 | 18,17 | 18,17 | SR | SR | 4,54 | - | SR | #N/A |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD | Realisasi Capaian Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran RKPK | Realisasi APBK(Triwulan I) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%) | | Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR) | |
| | | | | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) | K | (Rp) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 37 KECAMATAN KUALA PESISIR | 2.761.051.140,00 | 366.243.055,00 | 0,00 | 1,06 | SR | SR | 0,00 | - | SR | #N/A |
| | 38 KECAMATAN TRIPA MAKMUR | 1.616.189.599,00 | 203.267.296,00 | 0,80 | 1,55 | SR | SR | 0,80 | - | SR | #N/A |
| | 39 KECAMATAN SUKA MAKMUE | 2.375.944.512,00 | 347.000.392,00 | 0,61 | 1,05 | SR | SR | 0,61 | 0,00 | SR | SR |
| | 40 INSPEKTORAT | 11.477.327.422,00 | 974.294.261,00 | 8,00 | 8,11 | SR | SR | 5,00 | 4,60 | SR | SR |
| | 41 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 12.789.688.452,00 | 1.065.801.938,00 | 4,47 | 1,76 | SR | SR | 2,47 | - | SR | #N/A |
| | 42 BADAN PENGELOLAAN KEKAYAAN KEUANGAN DAERAH | 268.411.207.750,00 | 3.869.392.459,00 | 76,20 | 42,36 | T | SR | 21,88 | 4,12 | SR | SR |
| | 43 BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6.345.308.389,00 | 358.019.801,00 | 1,39 | 1,10 | SR | SR | 1,39 | 2,4 | SR | SR |
| | 44 DINAS PERTANAHAN | 1.945.968.744,00 | 224.541.874,00 | 2,96 | 2,54 | SR | SR | 2,54 | 45,47 | SR | SR |
| | **Total** | **1,162,406,651,814** | **86.765.899.640** | **28,10** | **8,19** | **SR** | **SR** | **16,01** | **10,44** | **SR** | **SR** |

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah, terlihat bahwa masih terdapat sejumlah indikator kinerja yang belum memenuhi target, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kondisi ini menjadi gambaran nyata atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan ke depan. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) perlu menjadikan temuan evaluasi tersebut sebagai acuan dalam merumuskan fokus program dan kegiatan.

Evaluasi pada Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah menengah masih rendah, kualitas guru belum merata, serta kondisi bangunan sekolah banyak yang belum layak. Fokus program harus diarahkan pada peningkatan akses pendidikan menengah, rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar, pemerataan distribusi guru, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi.

Selanjutnya, hasil evaluasi Dinas Kesehatan & RSUD menunjukkan angka kematian ibu dan bayi masih relatif tinggi, cakupan imunisasi dan gizi balita rendah, serta fasilitas pelayanan dasar belum memadai. Fokus program diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi dan gizi, penambahan tenaga medis spesialis, serta perbaikan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan kondisi jalan dan jaringan irigasi masih terbatas, sehingga memengaruhi distribusi barang dan produktivitas pertanian. Fokus kegiatan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, peningkatan kualitas jaringan irigasi, serta penguatan infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi masyarakat.

Hasil evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperlihatkan akses air minum layak dan sanitasi masih sangat rendah, serta banyak rumah tidak layak huni. Fokus program diarahkan pada penyediaan air minum aman, peningkatan sanitasi layak, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Sementara itu, hasil evaluasi Dinas Sosial menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi dan banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum tertangani. Fokus program diarahkan pada penguatan basis data kemiskinan, peningkatan cakupan bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan keluarga miskin, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperlihatkan bahwa pengangguran masih cukup tinggi dan serapan tenaga kerja di sektor formal rendah. Fokus program diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan iklim investasi daerah.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD, Indeks kualitas lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan, pengelolaan sampah baru menjangkau sebagian masyarakat, serta daerah masih rentan bencana. Fokus program diarahkan pada peningkatan pengelolaan persampahan,

rehabilitasi lingkungan, edukasi masyarakat tentang kebersihan dan mitigasi bencana, serta penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya untuk Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Produktivitas padi, palawija, dan perikanan belum mencapai target, serta diversifikasi produk pertanian masih lemah. Fokus program diarahkan pada penyediaan sarana produksi pertanian, peningkatan teknologi budidaya, rehabilitasi irigasi pertanian, penguatan kelompok tani/nelayan, serta hilirisasi produk perkebunan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.

Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM memperlihatkan Kontribusi sektor industri dan perdagangan masih rendah serta daya saing UMKM belum optimal. Fokus program diarahkan pada penguatan kapasitas UMKM, akses permodalan, promosi produk lokal, serta pengembangan industri pengolahan berbasis potensi unggulan daerah.

Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Evaluasi menunjukkan rendahnya realisasi investasi. Fokus program diarahkan pada perbaikan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, promosi potensi daerah, serta fasilitasi investor untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutkan untuk Dinas Syariat Islam, MPU, MAA, Baitul Mal menunjukkan program syariat, dakwah, serta pengelolaan zakat belum optimal. Fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dayah, pembinaan generasi muda berbasis syariat, optimalisasi penghimpunan dan distribusi zakat, serta pelestarian adat dan budaya Aceh.

Potensi wisata belum tergarap maksimal, jumlah wisatawan masih rendah, serta pembinaan olahraga masih terbatas. Fokus program pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diarahkan pada pengembangan destinasi wisata berbasis alam dan budaya, promosi pariwisata, pembinaan atlet muda, serta penguatan organisasi kepemudaan.

Untuk Bappeda, BPKD, BKPSDM, dan Inspektorat, Hasil evaluasi menunjukkan perencanaan, pengelolaan keuangan, kapasitas ASN, serta tindak lanjut pengawasan masih terbatas. Fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, penguatan akuntabilitas keuangan, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Tantangan dalam pembangunan daerah masih menghadapi tantangan utama berupa dominasi struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ini membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta terbatasnya nilai tambah yang dihasilkan. Transformasi menuju sektor industri pengolahan dan perdagangan modern belum berjalan optimal, sehingga daya saing daerah masih lemah.

Di sisi sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Meskipun akses pendidikan dasar relatif merata, tingkat partisipasi pendidikan menengah dan kualitas pembelajaran masih rendah. Hal ini diperburuk oleh kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum seluruhnya layak, serta kompetensi guru yang masih memerlukan

peningkatan. Pada sektor kesehatan, pelayanan dasar masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya cakupan imunisasi, serta keterbatasan tenaga kesehatan spesialis menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Dalam bidang infrastruktur dasar, akses terhadap air minum layak dan sanitasi masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jalan, irigasi, dan permukiman juga masih membatasi pergerakan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan antarwilayah.

Aspek ketenagakerjaan dan investasi juga menghadapi tantangan besar. Rendahnya daya tarik investasi menyebabkan peluang penciptaan lapangan kerja terbatas. Hal ini berdampak pada tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Di sisi lingkungan hidup, tantangan yang muncul adalah meningkatnya volume sampah, degradasi kualitas lingkungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam.

Selain itu, sebagai daerah dengan keistimewaan dan kekhususan, Nagan Raya juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan pendidikan dayah, memperkuat penerapan syariat Islam, serta melestarikan adat dan budaya lokal. Tantangan ini bukan hanya terkait aspek keagamaan dan sosial budaya, tetapi juga menyangkut integrasi nilai-nilai lokal ke dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan daerah.

Hambatan utama dalam pembangunan daerah terletak pada keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya. Anggaran pembangunan yang tersedia belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur publik serta kurangnya dukungan terhadap program sosial yang bersifat strategis.

Selain itu, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja terampil dan tenaga profesional, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Kualitas aparatur sipil negara dan tenaga teknis yang belum merata mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Rendahnya tingkat literasi digital dan kompetensi masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi modern juga menjadi hambatan tersendiri di era transformasi digital.

Hambatan lain adalah birokrasi yang masih belum sepenuhnya efisien dan responsif. Proses perizinan dan tata kelola investasi masih dianggap berbelit, sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sementara itu, koordinasi antar perangkat daerah terkadang belum optimal, mengakibatkan program pembangunan berjalan parsial dan tidak terintegrasi dengan baik.

Dari sisi sosial, hambatan besar juga muncul dari rendahnya kesadaran masyarakat. Partisipasi dalam program kesehatan seperti imunisasi, perilaku hidup bersih, maupun penggunaan fasilitas pendidikan masih belum maksimal. Hal ini diperburuk dengan kondisi

geografis dan keterisolasian sebagian wilayah yang membuat pelayanan publik sulit menjangkau seluruh penduduk.

Hambatan lain juga muncul dalam aspek lingkungan. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta rendahnya peran swasta membuat permasalahan lingkungan sulit ditangani secara menyeluruh. Begitu pula dalam pengembangan potensi lokal berbasis syariat dan adat, masih terdapat hambatan berupa lemahnya dukungan regulasi dan pembiayaan, sehingga integrasi nilai keistimewaan Aceh dalam pembangunan belum sepenuhnya optimal.

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu tahun anggaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan anggaran itu sendiri. Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMK Nagan Raya sampai tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.122**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024**

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1 | PDRB per kapita ADHB | Juta Rupiah | 70,46 | 45,75 | BPS |
| 2 | Indek Gini Ratio | Indeks | 0,159 | 0,265 | BPS |
| 3 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa (Ribu) | 29,60 | 29,21 | BPS |
| 4 | Angka Melek Huruf | % | 97,21 | 98,5 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,25 | 9,24 | Dinas Pendidikan |
| 6 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,18 | 14,45 | Dinas Pendidikan |
| 7 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | % | 23,561 | 4,500 | Dinas Sosial |
| 8 | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB | % | 50,29 | 45,55 | BPS |
| 9 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB | % | 4,69 | 4,61 | BPS |
| 10 | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB | % | 8,69 | 10,80 | BPS |
| 11 | Produksi sektor pertanian palawija | Ton | 2.052 | 3.844 | DISTANNAK |
| 12 | Produksi pertanian padi | Ton | 65.459 | 104.178 | DISTANNAK |
| 13 | Produksi perkebunan sawit rakyat | Ton | N/A | 579.310 | DISBUN |
| 14 | Produksi perkebunan | Ton | N/A | 5.735,29 | DISBUN |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | % | | 57,00 | BPS |
| 2 | Pengeluaran Per Kapita | Rp (Ribu) | 2.031.301 | 8402,00 | BPS |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | |
| 1.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 57,7 | 43,61 | Dinas Pendidikan |
| 1.2. | Angka partisipasi kasar | | | | |
| | APK SD/MI/Paket A | % | 110,09 | 100,00 | Dinas Pendidikan |
| | APK SMP/MTs/Paket B | % | 98,81 | 100,00 | Dinas Pendidikan |
| | APK SMA/SMK/ | % | 80,64 | 96,78 | Dinas Pendidikan |
| 1.3. | Angka pendidikan yang ditamatkan | | | | |
| | Tamat SD Sederajat | % | 98.76 | 99,32 | Dinas Pendidikan |
| | Tamat SLTP sederajat | % | 96.81 | 95,96 | Dinas Pendidikan |
| | Diploma I/II/III | % | 5.83 | 5,72 | Dinas Pendidikan |
| | Diploma IV/S1 | % | 61.18 | 61,12 | Dinas Pendidikan |
| | S2/S3 | % | 3.16 | 3,58 | Dinas Pendidikan |
| 1.4. | Angka Partisipasi Murni | | | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 98,16 | 90,43 | Dinas Pendidikan |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 79,24 | 70,74 | Dinas Pendidikan |
| 1.5. | Angka partisipasi sekolah | | | | |
| | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 98.62 | 97,71 | Dinas Pendidikan |
| | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 98,62 | 85,89 | Dinas Pendidikan |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Angka Melanjutkan (AM): | | | | |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 97,68 | 99,38 | Dinas Pendidikan |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 92,37 | 92,97 | Dinas Pendidikan |
| 1.7 | Fasilitas Pendidikan: | | | | |
| | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 47,79 | 98,56 | Dinas Pendidikan |
| | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 50,36 | 98,08 | Dinas Pendidikan |
| 1.8 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 78,14 | 76,81 | Dinas Pendidikan |
| 1.9 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Rasio Index | 63,21 | 61,99 | Dinas Pendidikan |
| 1.1 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 1:10 | 75,12 | Dinas Pendidikan |
| 1.11 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio Index | 1:20 | 61,93 | Dinas Pendidikan |
| 1.12 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Rasio Index | 1:10 | 73,71 | Dinas Pendidikan |
| 1.13 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | Rasio Index | 1:21 | 56,87 | Dinas Pendidikan |
| 1.14 | Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 | % | 97,12 | 99,54 | Dinas Pendidikan |
| 1.15 | Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) | % | 0 | 84,03 | Dinas Pendidikan |
| **2** | **Kesehatan** | | | | |
| 2.1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 15,08 | 5,1 | Dinas Kesehatan |
| 2.2. | Angka kelangsungan hidup bayi | /1000 Kelahiran | 994 | 13,8 | Dinas Kesehatan |
| 2.3. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 15,08 | 13,3 | Dinas Kesehatan |
| 2.4. | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 11,21 | 15,5 | Dinas Kesehatan |
| 2.5. | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100000 Kelahiran | 77,34 | 280,4 | Dinas Kesehatan |
| 2.6. | Rasio posyandu per satuan balita | /1000 Balita | 18,27 | 28,00 | Dinas Kesehatan |
| 2.7. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | | | |
| | Puskesmas | /1000 Penduduk | 0,09 | 0,09024 | Dinas Kesehatan |
| | Puskesmas | Unit | 15 | 16 | Dinas Kesehatan |
| | Poliklinik | /1000 Penduduk | 0,07 | 0,05640 | Dinas Kesehatan |
| | Poliklinik | Unit | 0,28 | 10 | Dinas Kesehatan |
| | Pustu | /1000 Penduduk | 0,28 | 0,27637 | Dinas Kesehatan |
| | Pustu | Unit | 49 | 49 | Dinas Kesehatan |
| 2.8. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | /1000 Penduduk | 0,0058 | 0,00564 | Dinas Kesehatan |
| | Rumah Sakit | Unit | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
| 2.9. | Rasio dokter per satuan penduduk | /1000 Penduduk | 0,31 | | |
| | Dokter Umum | /1000 | 31,17 | 0,37225 | |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Penduduk | | | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Umum | Orang | 55 | 66 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Spesialis | /1000 Penduduk | 11,90 | 0,14100 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Spesialis | Orang | 21 | 25 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi | /1000 Penduduk | 13,04 | 0,09588 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi | Orang | 23 | 17 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi Spesialis | /1000 Penduduk | - | 0,01692 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi Spesialis | Orang | - | 3 | Dinas Kesehatan |
| 2.11. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 78 | 76 | Dinas Kesehatan |
| 2.12. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 83,96 | 94 | Dinas Kesehatan |
| 2.13. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 18,47 | 94,1 | Dinas Kesehatan |
| 2.14. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 75 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.15. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | 52,6 | 95,00 | Dinas Kesehatan |
| 2.16. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 1,65 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.17. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 81,4 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2.18. | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | /100.000 penduduk | 198,1 | 190 | Dinas Kesehatan |
| 2.19. | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | /100.000 penduduk | 11,38 | 27 | Dinas Kesehatan |
| 2.20. | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 68,1 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.21. | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | % | 90,1 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2.22. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.23. | Angka kejadian Malaria | /100.000 penduduk | 9,68 | <1 | Dinas Kesehatan |
| 2.24. | Cakupan kunjungan bayi | % | 81 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.26. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 82,84 | 97 | Dinas Kesehatan |
| 2.27. | Cakupan pelayanan nifas | % | 85,49 | 93 | Dinas Kesehatan |
| 2.28. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 90 | 50,00 | Dinas Kesehatan |
| 2.29. | Cakupan pelayanan anak balita | % | 91,79 | 73,00 | Dinas Kesehatan |
| 2.30. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 95 | 21,00 | Dinas Kesehatan |
| 2.31. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.32. | Persentase balita gizi buruk | % | 0 | 0,60 | Dinas Kesehatan |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | |
| **3.1.** | **Pekerjaan Umum:** | | | | PU PR |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 64,37 | 44,85 | PU PR |
| 3.1.2. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Rasio Index | 0,006 | 0,007 | PU PR |
| 3.1.3. | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | % | 55,701 | 31,48 | PU PR |
| 3.1.4 | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | % | 27,42 | 29,85 | PU PR |
| 3.1.5 | Rasio jaringan irigasi | Rasio Index | 88,59 | 45,69 | PU PR |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | |
| 4.1 | Jumlah rumah layak huni yang terbangun | Unit | N/A | 150 | PERKIM/Baitul Mal |
| 4.2 | Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab | Unit | 45 | 100 | PERKIM |
| 4.3 | Persentase penduduk berakses air minum | % | 19,59 | 8,41 | PERKIM |
| 4.4 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | % | N/A | 13,81 | PERKIM |
| 4,5 | Persentase Rumah Tangga bersanitasi | % | 9,53 | 74,98 | PERKIM |
| **5** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| 5.1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) | % | 77 | 75 | SATPOL PP dan WH |
| 5.2 | Persentase Penegakan PERDA | % | 32 | 67 | SATPOL PP dan WH |
| **6** | **Sosial** | | | | |
| 6.1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 23 | 100 | DINSOS |
| 6.2. | Persentase PMKS yang tertangani (BPNT) | % | - | 100 | DINSOS |
| 6.3. | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (BNPT) | % | 10 | 100 | DINSOS |
| 6.4. | Adanya regulasi santunan kematian | Ada/ Tidak ada | Ada | ada | Bagian Keisra |
| **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | kasus | 180 | 47,62 | Disnakertrans |
| 1.2 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 79,77 | 64,33 | Disnakertrans |
| 1.3 | Jumlah tenaga kerja di sektor industri | Orang | 9.791 | 8,013 | Disnakertrans |
| 1.4 | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | N/A | 13,33 | Disnakertrans |
| 1.5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,22 | 3,78 | Disnakertrans |
| 1.6 | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 78,43 | 23,42 | Disnakertrans |
| 1.7 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 63,91 | 69,58 | Disnakertrans |
| 1.8 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 0,40 | 0,062 | Disnakertrans |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | |
| 2.2. | Kabupaten Layak Anak | Level | Belum keluar pengumuman resmi dari Kemen PPPA | Madya | DPMGP4 |
| 2.3. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 0 | 20,00 | DPMGP4 |
| 2.4. | Rasio KDRT | % | 0,154 | 0,014 | DPMGP4 |
| **3** | **Pangan** | | | | |
| 3.1. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Skor | 98,42 | 73,9 | DKPP |
| **4** | **Penanggulangan Bencana dan Kerusakan Lingkungan dan Penanganan** | | | | |
| 4.1 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Ada/ tidak<br>Ada | Tidak Ada | Ada | DLH |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan | Ada/ tidak | Tidak Ada | Ada | DLH |
| | kabupaten/kota | ada | | | |
| 4.3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Ada/ tidak | ada (KLHS RPJM) | Ada | DLH |
| | | ada | | | |
| 4.4 | Indeks Kapasitas ketahanan Bencana | Indeks | 0.36 | 0,40 | BPBD |
| 4.5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 79,65 | 83,15 | DLH |
| 4.6 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 51,43 | 70 | DLH |
| 4.7 | Jumlah Sarana prasarana persampahan | Unit | 4,137 | 4,310 | DLH |
| 4.8 | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 10,81 | 15 | DLH |
| **5** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | |
| 5.1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 98,47 | 98,95 | Disdukcapil |
| 5.2 | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 93,35 | 93,25 | Disdukcapil |
| 5.3 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | Sudah | Sudah | Disdukcapil |
| 5.4 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 98,47 | 98,95 | Disdukcapil |
| **6** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| 6.1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 78 | 100 | DPMGP4 |
| 6.2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 222 | 222 | DPMGP4 |
| 6.3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 222 | 222 | DPMGP4 |
| 6.4 | Persentase LSM aktif | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.5 | Persentase LPM Berprestasi | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.6 | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.7 | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.8 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.9 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| **7** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | |
| 7.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 1,81 | 2,40 | DPMGP4 |
| 7.2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 1,35 | 2 | DPMGP4 |
| 7.3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Anak | 3,97 | 2 | DPMGP4 |
| 7.4 | Rasio Akseptor KB | % | 66,55 | 72 | DPMGP4 |
| 7.5 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | % | 66,55 | 72,0 | DPMGP4 |
| 7.6 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | /1.000 perempuan | 5,12 | 0,65 | DPMGP4 |
| 7.7 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 | 100 | DPMGP4 |
| **8** | **Perhubungan** | | | | |
| 8.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | | |
| | Angkutan Darat | Trayek | 4 | 8 | Dishub |
| | Angkutan Udara | Frek | 258 | 1152 | Dishub |
| 8.1 | Rasio ijin trayek | Indeks | 2 | 25 | Dishub |
| 8.2 | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | N/A | 549 | Dishub |
| 8.3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | |
| | Jumlah Bandar Udara | Unit | 1 | 1 | Dishub |
| | Jumlah Terminal Tipe B | Unit | N/A | 1 | Dishub |
| | Pelabuhan Laut | Unit | N/A | 2 | Dishub |
| 8.4 | Persentase layanan angkutan darat | % | 5,8 | 9,60 | Dishub |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | N/A | 7,5 | Dishub |
| 8.6 | Pemasangan Rambu-rambu | % | 12 | 42 | Dishub |
| 8.7 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio Index | 3.13 | 90,25 | Dishub |
| 8.8 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | | | | |
| | Angkutan Udara | Orang | 15,333 | 86.400 | Dishub |
| 8.9 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | | | | |
| | Bandara | Kg | 87,2448 | 257.373 | Dishub |
| **9** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 9.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 0,70 | DISKOMINFOTIK |
| 9.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 87 | 88 | DISKOMINFOTIK |
| 9.3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 79 | 88 | DISKOMINFOTIK |
| **10** | **Koperasi, UMKM** | | | | |
| 10.1 | Persentase koperasi aktif | % | 75,32 | 76,43 | Disperindagkop dan UKM |
| 10.2 | Persentase koperasi tidak aktif | % | 24,67 | 23,57 | Disperindagkop dan UKM |
| 10.3 | Persentase pelatihan untuk pelaku UMKM | % | 6,89 | 9,46 | Disperindagkop dan UKM |
| 10.4 | Jumlah pemasaran UMKM | Unit | 94 | 99 | Disperindagkop dan UKM |
| **11** | **Penanaman Modal** | | | | |
| 11.1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 1173 | 70 | DPMPTSP |
| 11.2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp (Milyar) | 9.99 | 2580 | DPMPTSP |
| 11.3 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Rp (Milyar) | 194 | 201 | DPMPTSP |
| 11,4 | Rasio daya serap tenaga kerja | % | 15 | 19,00 | DPMPTSP |
| 11,5 | Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan | Indeks | 120 | 150 | DPMPTSP |
| **12** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | |
| 12.1 | Jumlah Organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 100 | 29 | Disbudparpora |
| 12.2 | Cakupan pembinaan olahraga | % | 50,00 | 100 | Disbudparpora |
| 12.3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | % | 46,15 | 92,34 | Disbudparpora |
| 12.4 | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 92,34 | 55,57 | Disbudparpora |
| 12.5 | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 13 | 25 | Disbudparpora |
| 12.6 | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 13 | 15 | Disbudparpora |
| **13** | **Statistik** | | | | |
| 13.1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada | Ada | BPS |
| 13.2 | Buku ”kabupaten dalam angka” | Ada/tidak | Ada | Ada | BPS |
| 13.3 | Buku ”PDRB” | Ada/tidak | Ada | Ada | BPS |
| **14** | **Persandian** | | | | |
| 14.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 54 | 55 | Diskominfotik |
| **15** | **Kebudayaan** | | | | |
| 15.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 2 | 2 | Disbudparpora |
| 15.2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | - | 4 | Disbudparpora |
| 15.3 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | unit | - | 6 | Disbudparpora |
| **16** | **Perpustakaan** | | | | |
| 16.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 4.118 | 4.500 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | koleksi | 40.723 | 43.430 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | /1.000 Penduduk | 0,16 | 1,8 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.4 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 2.336 | 1.250 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 11,897 | 12.121 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 5 | 15 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **17** | **Kearsipan** | | | | |
| 17.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 13,63 | 12,22 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 17.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 4 | 4 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | |
| **1** | **Pariwisata** | | | | |
| 1.1. | Kunjungan wisata | % | 86,05 | 91,15 | Disbudparpora |
| 1.2. | Lama kunjungan Wisata | Hari | 14,1 | 15,70 | Disbudparpora |
| 1.3. | Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan | Lokasi | 3 | 4 | Disbudparpora |
| **2** | **Pertanian** | | | | |
| 2.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | ton/ha | 6,60 | 6,70 | Distannak |
| 2.2. | Cakupan bina kelompok petani | % | 55,4 | 56,30 | Distannak |
| **4** | **Perdagangan** | | | | |
| 4.1. | Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang | Unit | 53 | 104 | Disperindagkop dan UKM |
| **5** | **Perindustrian** | | | | |
| 5.1. | Cakupan Bina kelompok pengrajin | % | 82,61 | 91,30 | Disperindagkop dan UKM |
| 5.2. | Jumlah industri Pengolahan | Unit | 1884 | 4295 | Disperindagkop dan UKM |
| 5.3. | Kawasan Industri | Unit | 0 | 1 | Disperindagkop dan UKM |
| **6** | **Tansmigrasi** | | | | |
| 6.1. | Jumlah transmigran lokal | KK | 240 | 410 | Disnakertrans |
| 6.2 | Jumlah transmigrasi | UPT | 4 | 4 | Disnakertrans |
| 6.3 | Jumlah Pengembangan Kawasan Trasmigrasi | Kawasan | 1 | 1 | Disnakertrans |
| **7** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| 7.1. | Produksi perikanan | Ton | 4.350,46 | 4.789,46 | DKPP |
| | - Perikanan Tangkap | Ton | 3.340,05 | 3.756,18 | DKPP |
| | - Perikanan Budidaya | Ton | 1.010,41 | 1.033,28 | DKPP |
| **8** | **Peternakan** | | | | |
| 8.1. | Populasi ternak besar (sapi dan kerbau**)** | ekor | 26.394 | 22,474 | Distannak |
| 8.2 | Populasi ternak kecil (kambing dan domba) | ekor | 20.146 | 17,713 | Distannak |
| **9** | **Pertanahan** | | | | |
| 9.1 | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 68,28 | 74,56 | Dinas Pertanahan |
| 9.2 | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 63 | 72 | Dinas Pertanahan |
| **Penunjang Urusan** | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | Ada | Bappeda |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Tidak | tidak | Bappeda |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB | Ada/ tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK | Ada/ tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.7. | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Ada/ tidak | Ada | Ada | Bappeda |
| **2** | **Keuangan** | | | | |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP/WDP | WTP | WTP | BPKD |
| 2.2. | Persentase SILPA | % | 1,57 | 1,59 | BPKD |
| 2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 1,74 | 1,76 | BPKD |
| 2.4. | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | % | 9,47 | 9,51 | BPKD |
| 2.5. | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20,59 | 21,42 | BPKD |
| 2.6. | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 19,20 | 19,60 | BPKD |
| | | | | | |
| 2.7. | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | % | 0,72 | 0,70 | BPKD |
| 2.8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 0,18 | 0,58 | BPKD |
| 2.9. | Penetapan APBD | Tepat/Tidak<br>Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKD |
| **3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | |
| 3.1. | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | jam | 0 | 120 jam | BKPSDM |
| 3.2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 0 | 4,672 | BKPSDM |
| 3.3. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 8,54 | 10,273 | BKPSDM |
| 3.4. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | jabatan | 34 | 37 | BKPSDM |
| 3.5. | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | jabatan | 2612 | 2612 | BKPSDM |
| 3.6. | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | jabatan | 2048 | 2182 | BKPSDM |
| 3.7. | Indeks profesionalitas ASN | Indeks | 65,41 | 67 | BKPSDM |
| 3.8. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,94 | 2,45 | Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi) |
| 3.8. | Meningkatnya nilai SAKIP | Skor | 60<br>B | 65<br>B | Setdakab (Bag. Organisasi) |
| **4** | **Penelitian dan pengembangan** | | | | |
| 4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | | | | |
| | Penerapan SIDa: | Sudah/ Belum | sudah | sudah | Bappeda |
| 4.3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | % | | 50 | Bappeda |
| 4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | % | | 75 | Bappeda |
| **5** | **Pengawasan** | | | | |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | % | 91,54 | 92 | Inspektorat |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | % | N/A | 0,39 | Inspektorat |
| 5.3. | Jumlah temuan BPK | Temuan | 22 | 16 | Inspektorat |
| **6** | **Sekretariat Dewan** | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2025 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | Ada | Sekretariat DPRK |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda | Ada/Tidak | Ada | Ada | Sekretariat DPRK |
| 6.3. | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran | Ada/Tidak | Ada | Ada | Sekretariat DPRK |
| 6.4. | Jumlah Qanun yang disahkan | Peraturan Daerah/ Qanun | 6 | 9 | Sekretariat DPRK |
| **Keistimewaan dan Kekhususan Aceh** | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | |
| 1.1. | Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz | Orang | 15 | 100 | DSI |
| 1.2. | Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam | % | 90 | 96 | DSI |
| 1.3. | Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam | % | 87 | 90 | DSI |
| 1.4. | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada | Ada | DSI |
| 1.5. | Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) | % | 85 | 88 | DSI |
| **2** | **Kebudayaan** | | | | |
| 2.1. | Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi | gampong | N/A | 50 | Disbudparpora |
| 2.2. | Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim | % | N/A | 45 | Disbudparpora |
| 2.3. | Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah | % | N/A | 60 | Disbudparpora |
| 2.4. | Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni , Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur | wilayah | N/A | 30 | Disbudparpora |
| 2.5 | Jumlah warisan budaya lokal yang ditetapkan | Unit | N/A | 29 | Disbudparpora |
| **3** | **Keagamaan** | | | | |
| 3.1. | Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) | Unit | 63 | 463 | DSI |
| 3.2. | Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat | Orang | 1120 | 222 | DSI |
| 3.3. | Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat | Orang | 40 | 60 | DSI |
| 3.4. | Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin | Mesjid | 90 | 70 | DSI |
| 3.5. | Pembinaan Dinul Islam | Orang | N/A | 25 | Satpol PP dan WH |
| 3.6. | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam | % | 67 | 81 | Satpol PP dan WH |
| 3.7. | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 382 | 110 | Baitul Mal/DSI |
| 3.8. | Jumlah Penghimpunan ZISWAF | Rp (000) | 7.778 | 918 | Baitul Mal |
| 3.9. | Jumlah ZISWAF yang disalurkan | Rp (000) | 4.647 | 918 | Baitul Mal |
| **Keistimewaan dan Kekhususan Aceh** | | | | | |
| **1** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | |
| 1.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Ada/tidak | Ada | Ada | Kesbangpol |
| 1.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | Kegiatan | Ada | Ada | Kesbangpol |
| 1.3. | Jumlah LSM | LSM | 5 | 13 | Kesbangpol |
| 1.4. | Meningkatnya partispasi pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak | persen | 89 | 89% | Kesbangpol |

Berdasarkan tabel 2.120 yaitu hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Nagan Raya tahun 2024, terlihat bahwa pembangunan daerah telah

menunjukkan sejumlah capaian positif, namun masih terdapat tantangan signifikan yang perlu segera ditangani melalui perencanaan yang lebih komprehensif.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp70,46 juta. Angka ini relatif tinggi dibanding target tahun 2025 sebesar Rp45,75 juta, namun perlu dicermati bahwa struktur PDRB masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya mencapai 50,29%. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer menandakan struktur ekonomi yang belum beragam, karena sektor industri pengolahan hanya menyumbang 4,69% dan sektor perdagangan besar serta eceran sebesar 8,69%. Kondisi ini menjelaskan mengapa transformasi ekonomi daerah belum berlangsung optimal.

Dari sisi distribusi pendapatan, Indeks Gini Nagan Raya pada 2024 tercatat 0,159, lebih rendah dibanding target 0,265 pada 2025. Secara positif, hal ini menunjukkan ketimpangan relatif rendah. Namun, jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, yakni 29,6 ribu jiwa, sehingga isu pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, angka melek huruf telah mencapai 97,21% dan diproyeksikan naik menjadi 98,5% pada 2025. Indikator pendidikan lainnya seperti rata-rata lama sekolah (9,25 tahun) dan harapan lama sekolah (14,18 tahun) menunjukkan peningkatan, meskipun capaian lama sekolah masih terbatas pada tingkat menengah pertama.

Di sektor produksi pertanian, hasil panen palawija hanya mencapai 2.052 ton, jauh di bawah target 3.844 ton, sementara produksi padi baru 65.459 ton dari target 104.178 ton. Hal ini menggambarkan bahwa produktivitas pertanian masih rendah dan sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti iklim, sarana produksi, dan infrastruktur irigasi. Sementara itu, produksi perkebunan sawit rakyat belum tercatat, padahal pada 2025 ditargetkan mencapai 579.310 ton.

Aspek daya saing daerah juga menghadapi tantangan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita relatif rendah, sedangkan pengeluaran per kapita masyarakat pada 2024 tercatat Rp2.031.301 ribu, dengan target 2025 Rp8.402 ribu. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat masih terbatas sehingga perlu peningkatan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi.

Dari sisi pelayanan umum, capaian sektor pendidikan memperlihatkan adanya disparitas. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 110,09% dan SMP/MTs 98,81%, namun APK SMA/SMK masih 80,64%, menandakan partisipasi di jenjang pendidikan menengah belum optimal. Kondisi sarana prasarana sekolah juga masih menjadi masalah: sekolah dasar dalam kondisi baik hanya 47,79% dan SMP/SMK/MA hanya 50,36%. Rasio guru terhadap murid di tingkat dasar 1:10 dan di tingkat menengah 1:20 masih sesuai standar, tetapi kualitas guru masih perlu ditingkatkan karena persentase kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 2024 tercatat 0%.

Pada sektor kesehatan, beberapa indikator dasar masih memerlukan perhatian serius. Angka kematian bayi (AKB) masih 15,08 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian balita

sama yaitu 15,08 per 1.000 kelahiran hidup, meskipun target 2025 menurun menjadi 13,3. Angka kematian ibu mencapai 77,34 per 100.000 kelahiran hidup, relatif tinggi dan jauh dari target 280,4 pada 2025, menunjukkan adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan maternal. Cakupan imunisasi masih rendah, misalnya imunisasi campak baru 52,6% dari target 95%. Penanganan pneumonia pada balita hanya 1,65%, padahal target 100%. Demikian pula cakupan Universal Child Immunization (UCI) baru 18,47% dari target 94,1%. Kondisi ini menggambarkan pelayanan kesehatan dasar belum merata dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Akses infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi juga sangat terbatas. Hanya 19,59% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, dan baru 9,53% rumah tangga memiliki sanitasi layak. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi besar dalam sektor permukiman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Pada sisi pekerjaan umum, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 64,37% namun masih perlu ditingkatkan, begitu juga dengan jaringan irigasi yang baru 27,42% dalam kondisi baik.

Dari aspek tenaga kerja dan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2024 tercatat 5,22% dengan target penurunan menjadi 3,78% di 2025. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 63,91% juga menunjukkan perlunya penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah tenaga kerja sektor industri masih terbatas pada 9.791 orang. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya realisasi investasi yang hanya Rp9,99 miliar dari target Rp2.580 miliar pada 2025, yang berarti Nagan Raya masih belum menjadi tujuan menarik bagi investor.

Dari sisi lingkungan hidup, Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana berada pada level 0,36 dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) pada 79,65. Angka ini menunjukkan adanya upaya yang sudah baik, tetapi penanganan sampah baru mencakup 51,43% sehingga masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, ketersediaan dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) serta integrasinya dalam perencanaan pembangunan masih terbatas.

Dalam aspek keistimewaan dan kekhususan Aceh, indikator keagamaan dan budaya masih berproses. Jumlah hafiz Al-Qur'an 30 juz baru 15 orang dengan target 100 pada 2025, sedangkan angka melek Al-Qur'an penduduk usia 6–21 tahun 90%. Persentase dayah yang memenuhi standar 85% dan ditargetkan 88% pada 2025. Pemahaman nilai adat dan budaya masih perlu diperkuat, begitu juga pengelolaan warisan budaya lokal.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan 2024 di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan adanya keberhasilan di bidang literasi, pemerataan akses pendidikan dasar, serta sebagian besar layanan infrastruktur dasar, namun juga memperlihatkan tantangan serius di bidang kesehatan, infrastruktur dasar (air dan sanitasi), produktivitas pertanian, daya tarik investasi, serta penguatan keistimewaan Aceh dalam bidang agama dan budaya. Oleh sebab itu, isu-isu strategis ini perlu diturunkan secara sistematis ke dalam RPJMK dan RKPK, dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, transformasi

ekonomi menuju sektor hilir, penguatan layanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola berbasis syariat dan budaya lokal.

Dengan demikian, evaluasi ini menjadi penting dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan dampak yang berkelanjutan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Nagan Raya. Proses ini mengarah pada pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Nagan Raya

### 2.3.1 Penguatan Nilai Syariat dan Sosial Budaya yang Inklusif

#### 2.3.1.1 Belum Optimalnya Perlindungan Khazanah Budaya

Kabupaten Nagan Raya dengan julukan "kota Rameunee" memiliki kekayaan khazanah budaya yang tumbuh dari akar tradisi lokal dan nilai-nilai Islam yang kental. Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian nilai-nilai tersebut menghadapi tantangan yang nyata. Banyak artefak budaya, tradisi lisan, dan kearifan lokal mulai terlupakan, terutama di kalangan generasi muda. Minimnya dokumentasi dan upaya konservasi menyebabkan warisan budaya yang berharga tersebut perlahan terpinggirkan dari ruang publik.

Kelemahan dalam perlindungan budaya juga tercermin dari kurangnya dukungan institusional, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi anggaran yang memadai. Lembaga adat, tokoh budaya, dan komunitas seni belum sepenuhnya dilibatkan sebagai garda terdepan pelestarian budaya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya dan pelaku budaya masih terbatas pada kegiatan seremonial, belum menyentuh aspek yang lebih strategis seperti pendidikan budaya atau pengarsipan digital.

Dalam konteks pembangunan daerah, khazanah budaya seharusnya menjadi pondasi identitas dan karakter daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan budaya, pelibatan aktif generasi muda, serta integrasi nilai-nilai lokal yang ada di Kabupaten Nagan Raya dalam sistem pendidikan dan ruang-ruang publik menjadi krusial.

#### 2.3.1.2 Masih Terdapat Pelanggaran Syariat

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, Aceh telah menempuh langkah strategis dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai religius. Namun demikian, implementasi syariat Islam di Aceh belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang merata. Masih ditemui sejumlah pelanggaran yang menunjukkan adanya celah antara regulasi normatif dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Ini menjadi penanda bahwa pembangunan hukum dan moral belum sepenuhnya berjalan selaras.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Nagan Raya perlu menempatkan dimensi nilai dan budaya lokal sebagai pusat penguatan karakter masyarakat. Sinergi antara regulasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan keteladanan dari para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan yang hidup dan membumi di Kabupaten Nagan Raya.

#### 2.3.1.3 Masih Rendahnya Standarisasi Dayah

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan spiritualitas generasi muda di Nagan Raya. Namun, belum semua dayah memiliki standar mutu pendidikan yang seragam. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan kualitas antar lembaga, baik dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, maupun fasilitas pendukung. Sebagian besar dayah masih mengandalkan sistem pembelajaran tradisional yang belum terintegrasi dengan penguatan kompetensi, sehingga ketimpangan ini menyebabkan lulusan dayah kurang siap bersaing di ruang sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Permasalahan lain terletak pada minimnya regulasi dan sistem akreditasi yang mampu menjamin mutu lembaga secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran dan minimnya dukungan teknis turut memperlambat proses standarisasi. Perlu ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan komunitas ulama untuk mendorong perbaikan menyeluruh. Selanjutnya, diperlukan langkah ke depan dengan memperkuat sinergi antara tradisi keilmuan dayah dengan inovasi pendidikan modern. Penataan manajemen, peningkatan kompetensi pengajar, serta penyediaan infrastruktur layak menjadi elemen kunci menuju standarisasi yang merata dan berkeadilan.

#### 2.3.1.4 Belum Optimalnya Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Nagan Raya belum menunjukkan kinerja yang optimal sebagai instrumen pendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun potensi pengumpulan ZIS dari sektor pertanian, perkebunan, dan pegawai pemerintah daerah relatif besar, realisasi penghimpunan masih rendah akibat keterbatasan sistem kelembagaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum terintegrasinya data muzakki dan mustahik secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan ZIS belum mampu berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat di tingkat lokal.

Potensi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Nagan Raya sangat besar jika dikelola secara sistematis dan profesional. Namun, pemanfaatannya hingga kini masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang menyalurkan ZIS secara individual atau informal tanpa melalui lembaga resmi, sehingga kurang efektif dalam menjawab persoalan struktural kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Belum efektifnya fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan peran edukasi, penghimpunan, dan penyaluran secara profesional dan terukur menjadi penyebab utama. Di sisi lain, mekanisme pelaporan serta transparansi pengelolaan masih perlu ditingkatkan guna membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola.

Kondisi ini menuntut pembenahan kelembagaan yang kuat dan kolaboratif, termasuk sinergi antara pemerintah daerah, Baitul Mal, maupun lembaga Islam lainnya. Dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak pada penguatan ekosistem ZIS juga menjadi faktor kunci dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 2.3.1.5 Tingginya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan data sebelumnya, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Nagan Raya masih tergolong tinggi, hal ini mencerminkan tantangan multidimensi dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. PMKS mencakup kelompok rentan seperti lansia terlantar, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan rumah tangga miskin. Ketidakberdayaan mereka seringkali diperparah oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan jaminan sosial.

Belum terjangkaunya secara maksimal sistem perlindungan sosial yang tersedia menyebabkan penanganan yang bersifat sektoral dan karitatif belum menyentuh akar permasalahan, seperti pengangguran, rendahnya pendidikan, atau keterasingan sosial. Selain itu, pendataan yang belum mutakhir menghambat penyusunan program intervensi yang tepat sasaran.

### 2.3.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

**a. Rata-rata Siswa Hanya Bersekolah Hingga Kelas 2 SMP**

Kondisi pendidikan di Kabupaten Nagan Raya masih menghadapi tantangan serius, salah satunya ditandai dengan rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk, yang hanya mencapai tingkat setara kelas 2 SMP. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan akses, rendahnya minat belajar, dan keterbatasan dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan formal, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

Keterbatasan ekonomi keluarga, jarak tempuh ke sekolah, serta kurangnya infrastruktur pendidikan turut menjadi faktor pendorong tingginya angka putus sekolah. Banyak anak-anak yang terpaksa membantu orang tua mencari nafkah sejak usia dini, yang mengorbankan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal, membatasi peluang kerja produktif dan mendorong ketergantungan terhadap sektor informal. Tanpa intervensi kebijakan yang serius dan menyeluruh, permasalahan ini akan terus menghambat daya saing daerah di masa mendatang.

**b. Kurangnya Kemampuan Literasi dan Numerasi**

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Nagan Raya, masih banyak siswa yang belum mencapai kompetensi minimum dalam dua aspek ini. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan memahami pelajaran, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan secara logis.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga menjalar hingga pendidikan menengah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya inovasi dalam metode pengajaran, rendahnya kualitas pelatihan guru, serta keterbatasan bahan ajar yang kontekstual dan menarik. Literasi dan numerasi yang lemah akan berdampak jangka panjang terhadap kemampuan individu dalam mengakses pekerjaan, teknologi, dan layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan dua kemampuan dasar ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah.

**c. Belum Optimalnya Literasi Digital Masyarakat**

Di luar lingkungan sekolah, literasi masyarakat juga menunjukkan capaian yang belum optimal. Banyak masyarakat dewasa, khususnya di wilayah pedesaan, yang masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi tertulis, baik dari media cetak, formulir layanan publik, hingga informasi kesehatan.

Hal ini menunjukkan belum meratanya manfaat pendidikan sepanjang hayat dan kurangnya fasilitas pendukung literasi di tingkat komunitas, seperti taman bacaan, pusat belajar masyarakat, atau program pelatihan berbasis desa. Kebiasaan membaca belum menjadi budaya yang mengakar, terlebih dengan terbatasnya akses terhadap bahan bacaan yang relevan dan mudah dipahami.

Kurangnya kegiatan literasi berbasis komunitas juga menjadi penyebab lambannya kemajuan kemampuan literasi warga di Kabupaten Nagan Raya. Kondisi seperti ini secara berkelanjutan akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi warga dalam pembangunan dan keterbatasan dalam menyerap informasi kebijakan publik. Diperlukan revitalisasi gerakan literasi daerah yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

**d. Belum Optimalnya Literasi Digital Masyarakat**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia mengakses pengetahuan dan berinteraksi sosial. Namun, di Nagan Raya, literasi digital masyarakat masih tergolong rendah. Banyak warga, khususnya generasi tua dan masyarakat desa, belum memahami cara menggunakan perangkat digital secara efektif dan aman.

Rendahnya kemampuan ini berisiko memperbesar kesenjangan informasi dan membatasi akses terhadap berbagai layanan digital, seperti pendidikan daring, layanan administrasi publik, dan transaksi ekonomi digital. Selain itu, ketidaktahuan terhadap etika digital juga menimbulkan potensi penyebaran hoaks dan pelanggaran privasi.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap jaringan internet dan perangkat digital yang memadai turut memperparah kesenjangan digital ini. Banyak dari lembaga pendidikan resmi seperti sekolah belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran..

### 2.3.3 Mendorong peningkatan Ekonomi Inklusif

Peningkatan ekonomi inklusif diarahkan pada upaya pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Pendekatan ini menekankan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta penciptaan lapangan kerja produktif yang merata di wilayah pedesaan dan perkotaan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan partisipasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada sektor formal, melainkan juga memberdayakan sektor informal secara berkelanjutan, sehingga mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

### 2.3.4 Stabilitas Politik dan Keamanan

Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya menjaga kondusivitas wilayah melalui sinergi antara unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Penanganan potensi konflik sosial, penguatan nilai-nilai kebhinekaan, serta peningkatan peran forum-forum dialog masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial. Dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan, iklim investasi menjadi lebih kondusif dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

### 2.3.5 Infrastruktur dan Ketahanan Bencana

Penguatan infrastruktur yang andal dan responsif terhadap risiko bencana menjadi salah satu prioritas penting dalam mendukung konektivitas wilayah serta menjamin keselamatan masyarakat. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan sarana pelayanan dasar, yang diselaraskan dengan upaya mitigasi bencana berbasis risiko. Pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan resiliensi, agar mampu menghadapi tantangan perubahan iklim, bencana alam, dan tekanan lingkungan lainnya secara lebih adaptif.

### 2.3.6 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Penguatan sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan

berbasis kinerja terus diupayakan melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis data. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pengawasan publik terhadap proses pemerintahan juga diperkuat guna mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan tata kelola yang adaptif dan berintegritas, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

### 2.3.7 Satu Data Indonesia (SDI)

Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Nagan Raya merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. SDI menjadi landasan penting dalam mendukung sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam konteks daerah, pengelolaan SDI berperan sebagai instrumen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki basis data yang kuat dan terintegrasi, sehingga program dan kegiatan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Sebagai kerangka kerja nasional dalam tata kelola data, SDI menuntut adanya konsistensi, standarisasi, dan integrasi lintas sektor. Di dalamnya, statistik memegang peran strategis karena menjadi bentuk data kuantitatif yang dapat menggambarkan y faktual masyarakat secara terukur. Dengan dukungan statistik yang berkualitas, proses identifikasi permasalahan, penetapan prioritas, hingga evaluasi hasil pembangunan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terarah. Kabupaten Nagan Raya juga senantiasa aktif melakukan pembaruan data secara berkala, terlebih dengan adanya kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) yang mendorong sinkronisasi data antar level pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga semakin mengoptimalkan pemanfaatan data pembangunan sebagai basis perencanaan yang lebih presisi dan terukur.

Statistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi SDI, karena menjadi instrumen utama dalam menyediakan gambaran kuantitatif kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Data statistik yang dihasilkan secara konsisten, terstandar, dan dapat diverifikasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan prioritas, menetapkan target, serta mengevaluasi capaian pembangunan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas menjadi pilar penting dalam memperkuat ekosistem SDI di daerah.

Di Kabupaten Nagan Raya, penerapan SDI dilakukan melalui koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Koordinator data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) sebagai Walidata, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku produsen data, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data. Mekanisme ini diperkuat dengan pemanfaatan portal e-Walidata sebagai media pengumpulan, verifikasi, dan penyebarluasan data sektoral yang bersumber dari masing-masing OPD. Proses tersebut diawali dengan Forum Satu Data yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menetapkan daftar data prioritas tahunan, menyepakati standar data, dan memastikan keterpaduan antar sektor.

Selama ini, pencapaian pengelolaan SDI di Kabupaten Nagan Raya antara lain ditandai dengan pengaktifan Forum Data secara rutin, bersinergi dengan BPS dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), mendukung program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) untuk memperkuat kapasitas desa dalam pengelolaan data, serta memaksimalkan pemanfaatan E-Walidata SIPD RI sebagai pusat integrasi data sektoral daerah. Langkah-langkah tersebut secara langsung mendorong peningkatan kualitas, keterpaduan, dan keterbaruan data pembangunan.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, upaya penguatan SDI di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan perkembangan positif, antara lain melalui peningkatan jumlah dataset sektoral yang terdokumentasi, peningkatan kualitas metadata, serta keterlibatan aktif OPD dalam proses validasi data. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, keterlambatan pembaruan data, dan perbedaan format antar OPD masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penguatan komitmen lintas sektor, peningkatan literasi data, serta modernisasi infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas dalam agenda SDI ke depan.

Dengan mengoptimalkan SDI, Kabupaten Nagan Raya diharapkan mampu membangun ekosistem data yang terbuka, terstandar, dan terintegrasi sehingga setiap keputusan pembangunan berbasis pada bukti yang valid (evidence-based policy). Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

### 2.3.8 Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan

kebutuhan dasar masyarakat. Capaian SPM menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan dasar, serta sejauh mana hak-hak dasar warga negara dapat dipenuhi secara adil dan merata.

Perencanaan pembangunan dan standar pelayanan minimal memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. SPM merupakan dasar pengukuran dalam menilai kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Dalam perencanaan pembangunan, SPM menjadi acuan untuk menentukan target-target yang ingin dicapai. Dengan mengacu pada SPM, pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat menentukan prioritas pembangunan yang harus dilakukan.

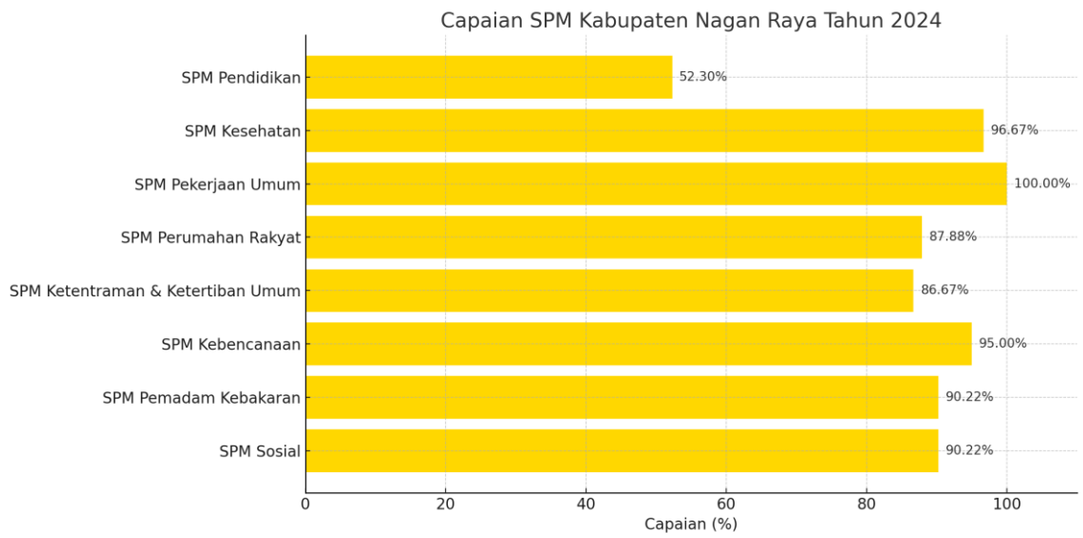
Selain itu, adanya SPM dapat menjadi acuan untuk mengukur sektor/wilayah yang masih belum memenuhi standar tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan maupun pengembangan lebih lanjut. SPM membantuk pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada SPM membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan pengalokasian anggaran secara proporsional. Berikut adalah capaian SPM Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024.

**Tabel 2.123**
**Capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024**

| No | Jenis SPM | Capaian | Keterangan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | SPM Pendidikan | 52.30 % | |
| **2.** | SPM Kesehatan | 96.67 % | |
| **3.** | SPM Pekerjaaan Umum | 100.00 % | |
| **4.** | SPM Perumahan Rakyat | 87.88 % | |
| **5.** | SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas :<br>• SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>• SPM Sub Urusan Bencana Daerah :<br>➢ Kebencanaan<br>➢ Pemadam Kebakaran | <br>86.67 %<br>95.00 % | |
| **6.** | SPM Sosial | 90.22 % | |

*Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024*

**Gambar 2.28**
**Capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024**




Berdasarkan analisis dari grafik diatas, SPM bidang pendidikan bertujuan menjamin hak setiap anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang layak dan berkualitas. Namun, capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya baru mencapai 52,30%, menandakan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan. Rendahnya capaian ini perlu menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan sumber daya manusia.

Selanjutnya, SPM bidang kesehatan mengatur standar pelayanan dasar untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh. Capaian SPM Kesehatan pada Tahun 2024 sebesar 96,67% menunjukkan bahwa sebagian besar indikator layanan telah dipenuhi, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam bidang kesehatan masyarakat.

Sementara itu, SPM bidang Pekerjaan Umum berfungsi dalam menjamin ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air minum, dan sanitasi untuk masyarakat. Capaian maksimal sebesar 100% pada SPM Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa seluruh indikator layanan telah terpenuhi sepenuhnya, menandakan keberhasilan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas di Kabupaten Nagan Raya.

SPM Perumahan Rakyat ini bertujuan memberikan akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian sebesar 87,88% menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menunjukkan komitmen dalam penyediaan rumah layak huni, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam pemerataan layanan.

SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mencakup upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana dan pemadaman kebakaran memberikan hasil cukup memuaskan dengan persentase capaian sebesar 86,67%, mencerminkan pelayanan yang cukup optimal dalam menjaga ketertiban sosial. SPM

Kebencanaan mencatat capaian 95,00%, menunjukkan kesiapsiagaan yang baik dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, dan SPM Pemadam Kebakaran mencapai 90,22% dengan jelas memperlihatkan responsivitas layanan terhadap risiko kebakaran.

Pada SPM bidang Sosial yang berfokus pada pelayanan bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan, Kabupaten Nagan Raya mampu meraih capaian sebesar 90,22%. Dengan ini menandakan bahwa pelayanan sosial di Kabupaten Nagan Raya dinilai sangat baik dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus.

Secara umum, capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 menunjukkan progres yang positif dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Mayoritas sektor telah mencapai angka di atas 85% dapat mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah efektif dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program pelayanan publik. Namun demikian, capaian SPM bidang Pendidikan yang masih rendah menjadi perhatian khusus dengan menyediakan berbagai pendekatan yang lebih terarah dan inklusif. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana seluruh penduduk mendapatkan akses pendidikan yang layak sebagai fondasi masa depan yang berkelanjutan.

Berdasarkan paparan dan uraian diatas, berikut permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya terkait SPM :

1. SPM tidak termuat pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah sehingga SPM tidak menjadi bagian dari prioritas rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
2. Penerapan dan pemenuhan SPM belum menjadi Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan termasuk belum menjadi indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. SPM hanya diuraikan secara naratif dalam gambaran umum terkait sarana dan prasarana pendidkan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
4. Penerapan dan Pemenuhan SPM tidak menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang seharusnya menjadi target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagan Raya.
5. Tidak optimalnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya terkait penerapan dan pemenuhan SPM terutama terhadap perencanaan jangka menengah menyebabkan tidak fokusnya penerapan dan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan (RKPK).

Secara garis besar, total anggaran untuk SPM Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp.64.257.362.962. Anggaran yang terealisasi untuk SPM sebesar 86,75% atau sebesar Rp. 55.616.191.575. hal ini menunjukkan bahwa sebagian program SPM telah dijalankan dengan baik.

## 2.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan

### 2.4.1 Isu Strategis Pembangunan

Dalam konteks global, pembangunan dihadapkan pada berbagai isu strategis yang saling terkait. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menuntut transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon, sementara krisis pangan serta energi menjadi ancaman serius bagi stabilitas dunia. Transformasi digital yang begitu cepat juga menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam kompetisi global berbasis teknologi. Di sisi lain, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antarnegara maupun di dalam negara masih tinggi, ditambah dengan ancaman kesehatan global seperti pandemi serta masalah gizi. Dinamika geopolitik, migrasi, dan keamanan maritim turut memperkuat kompleksitas tantangan global, sementara pencapaian target SDGs 2030 menuntut komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pada tingkat nasional, Indonesia masih menghadapi isu strategis berupa ketahanan ekonomi yang mengandalkan hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, serta pengembangan energi baru terbarukan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, terutama melalui pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan, serta penguatan layanan kesehatan untuk menghadapi bonus demografi. Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan infrastruktur konektivitas, transformasi digital, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing bangsa.

Sementara itu, di tingkat Provinsi Aceh, isu strategis pembangunan menekankan pada optimalisasi potensi daerah yang berbasis pada sumber daya alam, pengembangan ekonomi syariah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca-konflik dan pasca-bencana. Penguatan kualitas SDM, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, juga masih menjadi perhatian utama, sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Aceh juga menghadapi tantangan lingkungan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan hutan dan pesisir, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam.

### 2.4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nagan Raya (RPJMK)

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

a. Produktivitas rendah
b. IPTEKIN dan Riset Lemah
c. Deindustrial Dini
d. Pariwisata dibawah Potensi
e. Ekonomi Laut Belum Optimal
f. Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah
g. Insfrastruktur dan literasi rendah
h. Pembangunan belum berkelanjutan
i. Integrasi domestik terbatas
j. Kualitas SDM masih rendah
k. Tata kelola pemerintahan belum optimal
l. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
m. Demokratisasi belum optimal
n. Kesenjangan jawa dan luar jawa

Dalam upaya transformasi tata kelola, terdapat 11 (sebelas) isu strategis yaitu:

1. Regulasi
2. kelembagaan yang efektif
3. proses bisnis yang adaptif
4. manajemen talenta
5. meritokrasi dan integritas
6. manajemen ASN Strategis
7. pelayanan publik yang berkualitas
8. pelayanan bidang strategis
9. digitalisasi
10. integritas partai politik, dan
11. relasi pemerintah dan masyarakat sipil

Selanjutnya terdapat 18 (delapan belas) Isu Strategis Pembangunan Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting
2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

5. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital
6. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat
7. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekport
8. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau
9. Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas
11. Memperkuat Otonomi Khusus
12. Kemandirian Dalam Ruang Fiskal
13. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh
14. Penangganan PMKS dan Disablitas, Memperkuat Gender dan Keluarga
15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan
16. Pengurangan Risiko Bencana
17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan
18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis di Aceh dan Nasional, maka disusun isu-isu strategis Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

**1. Penguatan Syariat Islam**

Penguatan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan politik, serta memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif untuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan. Tantangan lainnya termasuk bagaimana memastikan penerapan syariat yang adil dan tidak diskriminatif, serta menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dengan hak-hak individual. Upaya untuk meningkatkan implementasi Syariat Islam ini penting dilakukan mengingat masih sering terjadinya pelanggaran Syariat Islam, masih rendahnya standarisasi dayah, dan belum optimalnya pengelolaan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

**2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing**

Upaya untuk meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Nagan Raya akan menghadapi tantangan yang kompleks. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa IPM Kabupaten Nagan Raya masih berada di bawah IPM Provinsi Aceh. Sementara rata-rata lama sekolah setara dengan pendidikan anak SMP kelas 2. Kondisi demikian tidak lepas dari berbagai faktor seperti aksesibilitas, asupan gizi yang kurang, sarana prasarana pendidikan yang belum terdistribusi merata serta berkualitas, dan faktor lingkungan lainnya. Di sisi lain, Kabupaten Nagan Raya perlu segera mengoptimalkan

bonus demografi yang masih akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi ( S1, S2, S3) Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan 0,01 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S3.

**Tabel 2.124**

**Angka Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2025**

| No | Indikator | Jenjang | Capaian 2023 | Target 2023 | Target 2024 | Adjusted Target 2024 | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.1 Skor Kemampuan Literasi | SD | 47.7 | 45.33 | 47.49 | 48,92 | 50.14 |
| 2 | A.1 Skor Kemampuan Literasi | SMP | 60.45 | 59.15 | 61.96 | Tetap | 66.21 |
| 3 | A.2 Skor Kemampuan Numerasi | SD | 38.93 | 33.88 | 35.19 | 39,46 | 39.98 |
| 4 | A.2 Skor Kemampuan Numerasi | SMP | 57.24 | 58.58 | 60.84 | Tetap | 65.22 |

Berdasarkan data capaian tahun 2023, terlihat bahwa kemampuan literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan perkembangan yang beragam, baik terhadap target tahun berjalan maupun proyeksi target ke depan. Untuk indikator A.1 Skor Kemampuan Literasi, capaian literasi jenjang SD pada tahun 2023 mencapai 47,7, melampaui target tahun tersebut yang hanya sebesar 45,33. Kinerja ini menunjukkan tren positif dan memberikan dasar optimisme terhadap pencapaian target tahun 2024 dan 2025, yang masing-masing ditetapkan sebesar 47,49 dan 50,14. Sementara itu, capaian literasi jenjang SMP tercatat sebesar 60,45, juga melampaui target 2023 yang berada di angka 59,15. Target tahun 2024 dan 2025 untuk jenjang ini mengalami kenaikan signifikan, masing-masing menjadi

61,96 dan 66,21, yang mengindikasikan adanya komitmen peningkatan kualitas literasi tingkat menengah pertama secara berkelanjutan.

Pada indikator A.2 Skor Kemampuan Numerasi, capaian numerasi SD tahun 2023 adalah 38,93, jauh melampaui target tahun tersebut sebesar 33,88. Target untuk tahun 2024 mengalami penyesuaian dari 35,19 menjadi adjusted target sebesar 39,46, serta meningkat kembali menjadi 39,98 pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat dasar numerasi masih relatif rendah, laju perbaikannya tergolong signifikan.

Adapun untuk numerasi jenjang SMP, capaian tahun 2023 adalah 57,24, sedikit di bawah target 2023 sebesar 58,58. Namun target 2024 tetap ditetapkan optimis di angka 60,84, dan meningkat menjadi 65,22 pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan strategi pembelajaran numerasi di tingkat SMP, khususnya dalam aspek intervensi kurikulum, pelatihan guru, serta ketersediaan sarana belajar yang kontekstual dan adaptif.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator literasi di semua jenjang telah melampaui target, sedangkan indikator numerasi menunjukkan kemajuan signifikan khususnya di jenjang SD, meskipun masih terdapat tantangan pada jenjang SMP. Upaya peningkatan literasi dan numerasi ini sejalan dengan prioritas nasional dalam peningkatan kualitas SDM, dan perlu terus didorong melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik, digitalisasi pembelajaran, serta pendekatan berbasis komunitas.

### 3. Ekonomi Inklusif

Perekonomian Kabupaten Nagan Raya masih ditopang dari sektor perkebunan dan pertambangan. Ke depannya, perlu didukung mesin pertumbuhan ekonomi baru dari sektor lainnya. Pengembangan ekonomi ini untuk memberikan pemerataan ekonomi kepada masyarakat sejalan dengan paradigma keberlanjutan dan didukung dengan adanya potensi besar yang dimilikinya. Pengembangan ekonomi ini misalnya pada sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

### 4. Pengelolaan SDA dan Investasi Berkelanjutan

Kabupaten Nagan Raya dianugerahi potensi SDA yang melimpah. Untuk mengeksploitasinya perlu didukung dengan perspektif yang baru yaitu tidak hanya berorientasi pada ekonomi semata tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, diperlukan investasi yang berkelanjutan dengan didukung kondusifitas daerah. Hal ini penting mengingat iklim investasi menjadi syarat penting dalam meningkatkan daya saing daerah.

**5. Konektivitas dan Pemerataan Infrastruktur**

Konektivitas dan pemerataan infrastruktur akan tetap menjadi tantangan dalam pemenuhannya. Kondisi demikian didasarkan pada fakta bahwa konektivitas wilayah belum optimal terkoneksi dengan seluruh wilayah sehingga biaya logistik menjadi mahal. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis yang sulit sehingga penyediaan infrastruktur dasar juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah serta biaya pembangunannya yang mahal.

**6. Ketahanan Bencana dan Ekologi**

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten dengan risiko bencana yang tinggi. Kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana mutlak diperlukan dan perlu peningkatan berkesinambungan. Di sisi lain, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan gambut yang perlu untuk dijaga dan dikelola dengan baik mengingat kawasan ini merupakan tempat penyimpanan karbon yang besar. Dalam kondisi alami, gambut menstabilkan karbon yang disimpannya selama ribuan tahun, sehingga berperan penting dalam mengatur kadar karbon dioksida (CO2) di atmosfer.

**7. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif**

Tata kelola pemerintahan yang adaptif merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Kondisi demikian tentunya memerlukan pengelolaan pemerintahan agar adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Selanjutnya, Kabupaten Nagan Raya juga mempunyai Isu strategis dalam mendukung pembangunan yang menjadi prioritas nasional, yaitu :

1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## 2.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan kesepakatan global yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari **Millennium Development Goals** (MDGs). SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, yang dirancang untuk menjadi kerangka pembangunan dunia hingga tahun 2030. Tujuan tersebut mencerminkan komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, SDGs menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Tujuan-tujuan dalam SDGs sejalan dengan misi pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, di mana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dipertimbangkan secara terpadu.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pencapaian SDGs melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa pencapaian SDGs menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil.

Integrasi SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan mencerminkan komitmen terhadap upaya menciptakan pembangunan yang inklusif (tidak meninggalkan siapa pun), berbasis data dan bukti, serta berorientasi pada hasil jangka panjang. Misalnya, upaya pengentasan kemiskinan (Tujuan 1), penguatan akses terhadap layanan kesehatan (Tujuan 3), peningkatan kualitas pendidikan (Tujuan 4), hingga pembangunan infrastruktur yang tangguh dan inovatif (Tujuan 9) menjadi fondasi penting dalam penyusunan arah dan sasaran pembangunan di berbagai sektor.

Lebih lanjut, SDGs juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (Tujuan 16) dan penguatan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat (Tujuan 17), yang merupakan pilar penting dalam menjamin keberhasilan implementasi pembangunan.

Selanjutnya, terdapat beberapa alasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) untuk menyempurnakan MDG's;

a. Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang;
b. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta;
c. Menekankan pada Hak Asasi Manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya;

d. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – *no one left behind*;
e. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi;
f. MDGs hanya menargetkan pengurangan "setengah", SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator "*Zero Goals*";
g. Tidak hanya memuat *Goals* tetapi juga Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Pelaksaanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan berdasarkan atas 3 prinsip;

a. *Universal*, dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang;
b. *Integration*, Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait); dan
c. *No-One Left Behind*, Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

**Gambar 2.29**
***Goal*, Target, dan Indikator dalam 4 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**




Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional dan provinsi sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten.

Dengan demikian, penyelarasan antara program/kegiatan dalam dokumen perencanaan dengan tujuan dan target SDGs bukan hanya memenuhi komitmen internasional,

tetapi juga menjadi strategi konkret untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kini dan di masa yang akan datang.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Kabupaten Nagan Raya, perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan besaran pendapatan dari berbagai sumber pendapatan pada sektor-sektor potensial, perkiraan belanja daerah yang akan dilakukan pemerintah, dan pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Nagan RayaTahun 2026. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Gambaran perkembangan perekonomian daerah sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintah. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IPM, TPTdan Indeks Gini Rasio.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan atau di sinkronkan dengan arah kebijakan ekonomi yang ada dalam RKP Tahun 2026. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 "**Memantapkan Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan untuk Kemandirian Ekonomi serta Pengentasan Kemiskinan**", maka sasaran yang harus dicapai pada tahun 2026 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 4.50%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 5.00%
3. Rasio Gini : 0,150

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73.20
5. Tingkat Kemiskinan : 16,50% dan
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : 83,33%.

### 3.1.1. Kondisi Dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya

Prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya sesuai tema Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 yaitu " **"Memantapkan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan"**. Dengan tema pembangunan tersebut kebijakan pembangunan diharapkan dapat mencapai indikator makro di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026. Berdasarkan hasil kesepakatan desk indikator makro dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKRENBANG) Aceh Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 disepakati target indikator makro Kabupaten Nagan Raya dalam RKPK Tahun 2026 sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**
**Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2026**

| No | Indikator Makro | Satuan | Capaian 2023/2024 | Target 2026 | | | Catatan | Kesepakatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPD | Ranwal RPJMD | RKPD | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | 4,5-4,9 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 16.94 | 17 | 16.50 | 16.50 | | 15,90-16,50 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5.22 | 3.64 | 5.00 | 5.00 | | 4,39-5,00 |
| 4 | Rasio Gini | Indeks | 0.159 | 0.264 | 0.150 | 0.150 | | 0,150-0,157 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73.10 | 72.420 | 73.20 | 73.20 | | 73,50-74,57 |
| 6 | Indeks Kualitas | % | 79,65 | N/A | N/A | N/A | Target dari kementrian 83,33 | 80,00-83,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lingkungan Hidup (IKLH) | | | | | | | |

*Sumber : Hasil Rakortekbang Aceh Tahun 2025*

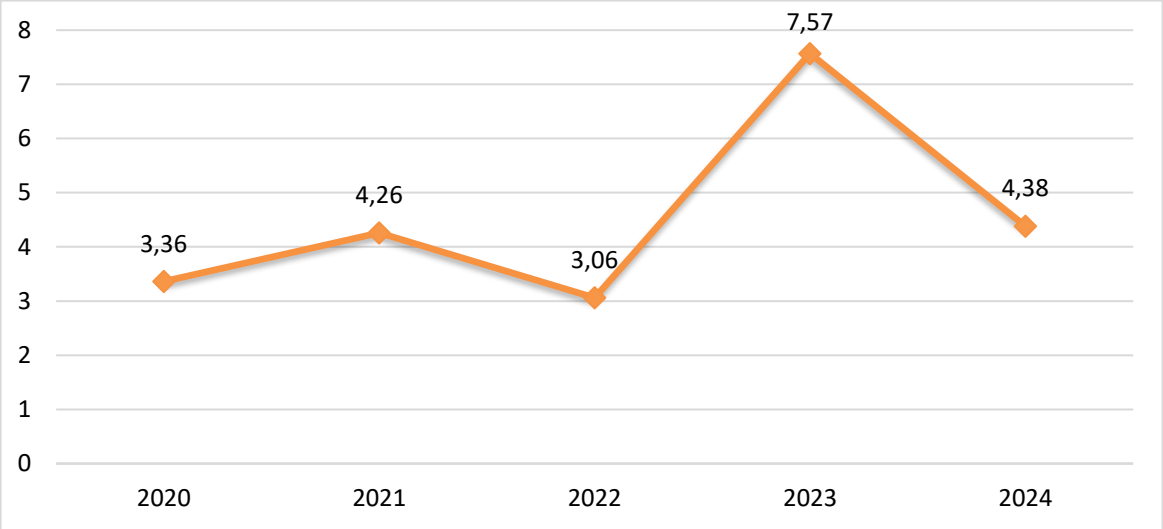
Target indikator makro daerah yang ada di dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 untuk Tahun 2026 sudah tercapai dan melampaui pada Tahun 2024. Untuk itu target makro pembangunan Kabupaten Nagan Raya harus di sesuaikan kembali sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 di atas. Target indikator pertumbuhan ekonomi mengacu pada target yang ada dalam dokumen RPKA Tahun 2025, karena realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 4,38 persen.

## A. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi di hitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar konstant tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapanagn usaha kegiatan ekonomi yang ada di satu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya pada periode waktu 2020-2024 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,36 persen dan pada tahun 2021 menjadi 4,26 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 yaitu 3,06 persen dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 7,57 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan sebesar 4,38 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar yaitu 4,66 persen dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen dan mendekati target RPK Nagan Raya Tahun 2025 yaitu sebesar 4,4 persen. Seperti terlihat pada grafik berikut ini.

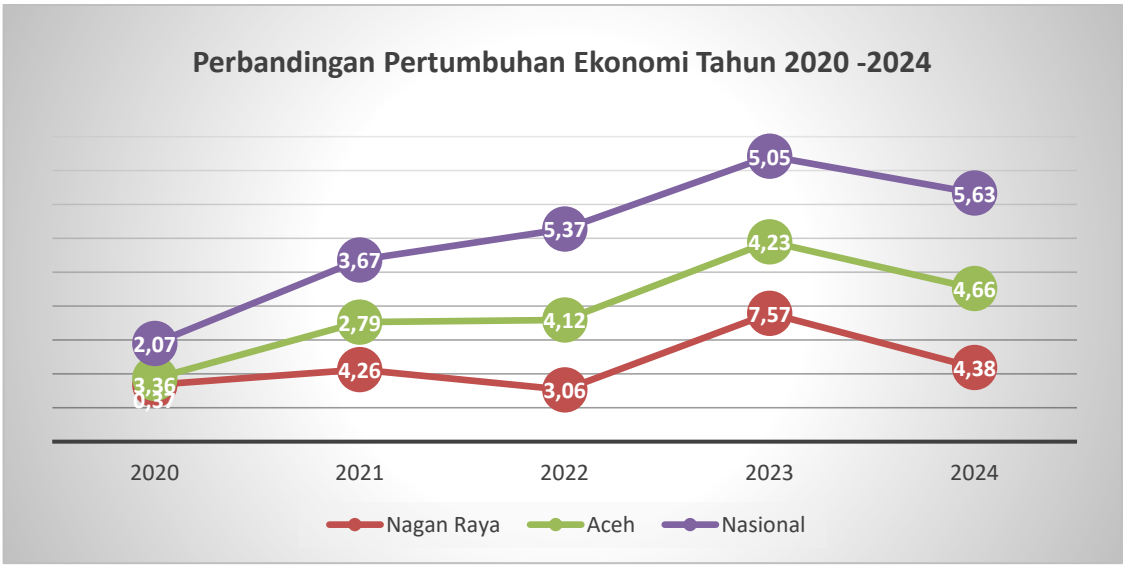
**Gambar 3.1**
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional. Rata rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren yang positif dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional, kecuali di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional yaitu 3.06 persen.

**Gambar 3.2**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024**
**Nagan Raya, Provinsi dan Nasional**



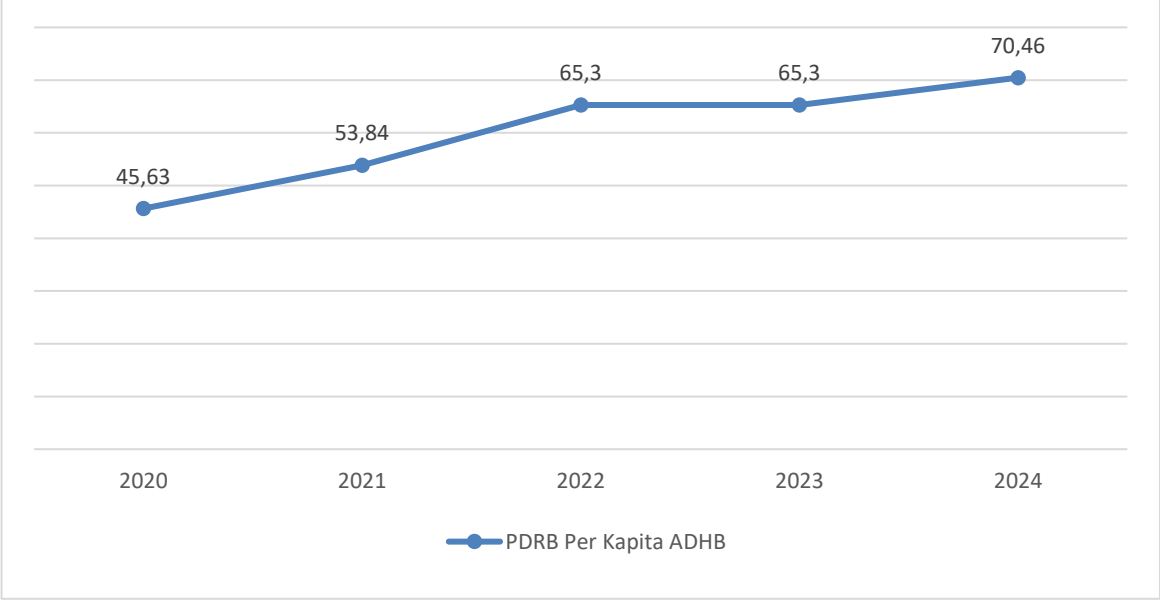

*Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya*

## B. Produk Domistik Regional Bruto Perkapita

Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Nagan Raya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Nagan Raya rata-rata mampu menghasilkan nilai tambah.

Tahun 2020 PDRB perkapita Kabupaten Nagan Raya sebanyak 45.63 juta rupiah terus meningkat dan tahun 2022 meningkat menjadi 53,83 juta rupiah. Pada Tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 53.84 juta rupiah. Kenaikan PDRB perkapita Tahun 2023 meningkat menjadi 65.30 persen. Kondisi ini menunjukkkan bahwa rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terus meningkat.

**Gambar 3.3**
**PDRB Perkapita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**



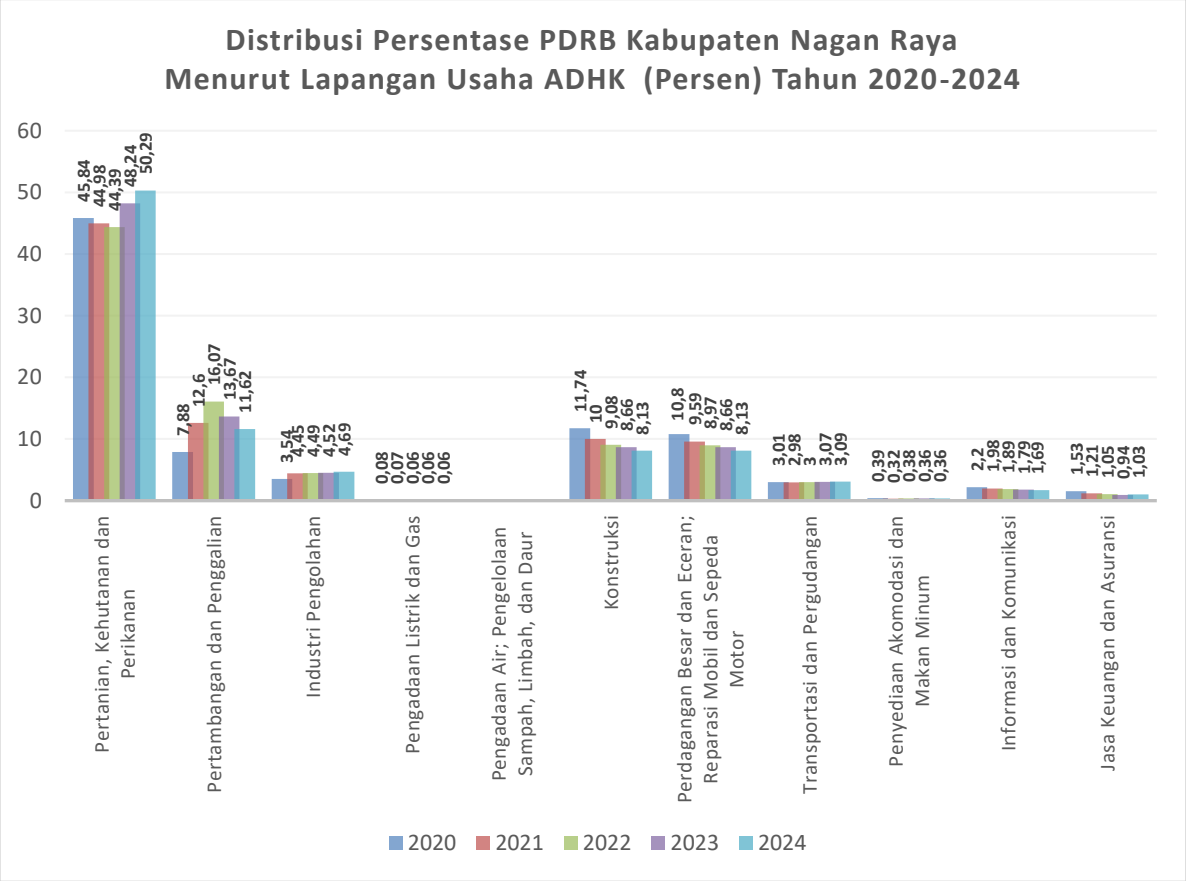

*Sumber: PDRB BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023*

## C. Struktur PDRB

Unit produksi yang kontribusi terhadap jumlah PDRB di Kabupaten Nagan Raya tersebut dikelompokkan kedalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (17) Jasa lainnya.

**Gambar 3.4**
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Nagan Raya**
**Menurut Lapangan Usaha ADHK (Persen) Tahun 2020-2024**




*Sumber: PDRB BPS Kabupaten Nagan Raya, 2024*

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan usaha kontruksi yaitu mencapai 50,29 persen. Naik dari tahun sebelumnya sebesar 48,24 persen. Peranan lapangan usaha Pertanian, perikanan, dan kehutanan meningkat 2.05 persen dari tahun 2023. Untuk sektor pertambangan dan penggalian memiliki tren menurun dari sebelumnya. Sektor usaha ini membentuk PDRB Kabupaten Nagan Raya yang relatif besar yaitu produksi batu bara.

Urutan ketiga peranan lapangan usaha kontruksi dalam PDRB, dengan pertumbuhan sebesar 2.74 persen dibandingkan tahun sebelumnya 0.38 persen. Selanjutnya lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 21.4 persen

Prioritas penganggaran untuk program dan kegiatan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan berdampak pada peningkatan PDRB sektor lapangan usaha pada sektor tersebut, karena pada sektor ini banyak tenaga kerja yang akan diserap. Berdasarkan data BPS Tahun 2024 ada sekitar 45.137 penduduk Kabupaten Nagan Raya yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini akan meningkatkan pendapat masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

## D. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nagan Raya tahun sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terus menurun dari 5.11 persen menjadi 4.99 persen. Tahun 2022 TPT Kabupaten Nagan Raya naik dari 4.99 persen menjadi 5.89 persen. Tahun 2024 TPT Kabupaten Nagan Raya turun menjadi 5.22 persen.

**Gambar 3.5**
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya*

## E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

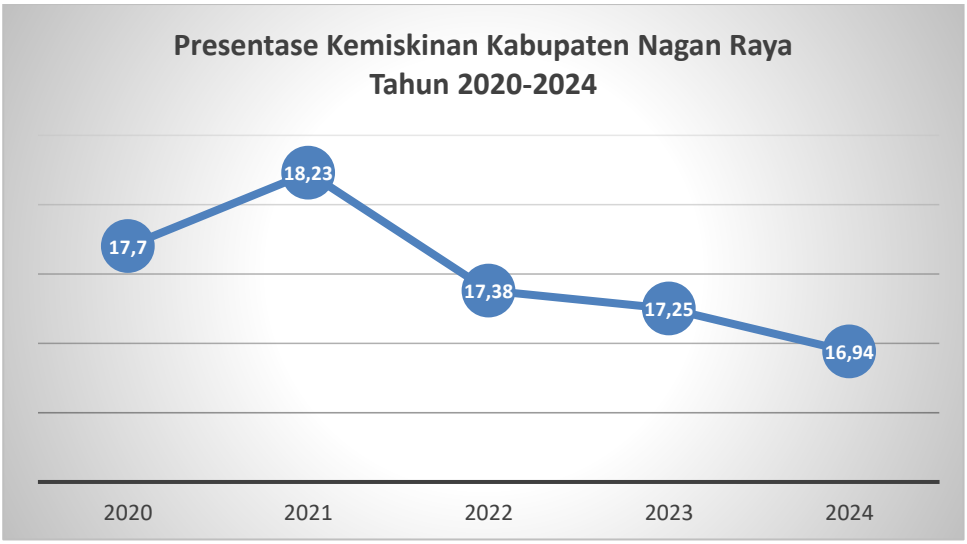
Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

## F. Angka Kemiskinan

Implementasi kegiatan pembangunan dalam kaitannya dengan upaya mengurangi jumlah penduduk miskin masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Hal ini didasarkan pada fenomena bahwa, meskipun persentase angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, seperti pada Gambar 3.6. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di tingkat kemiskinan terus mengikuti tren menurun yaitu masing-masing di angka 17.7 persen, 18.23 persen, 17.38 persen, 17.25 persen dan 16.94 persen.

**Gambar 3.6**
**Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

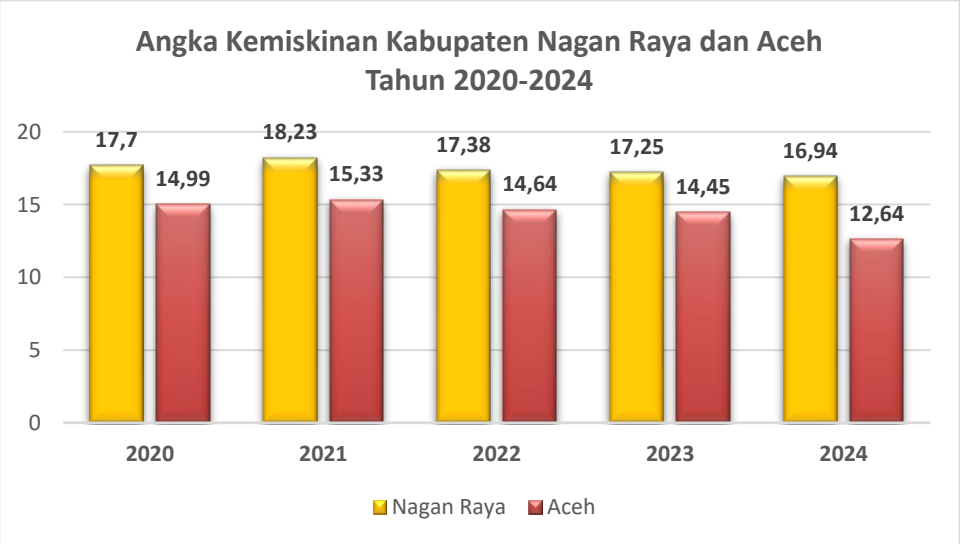



*Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2024*

Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Aceh rata-rata angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya masih berada di atas angka kemiskinan provinsi Aceh.

**Gambar 3.7**

**Perbandingan Persentase Kemiskinan Tahun 2020-2024**



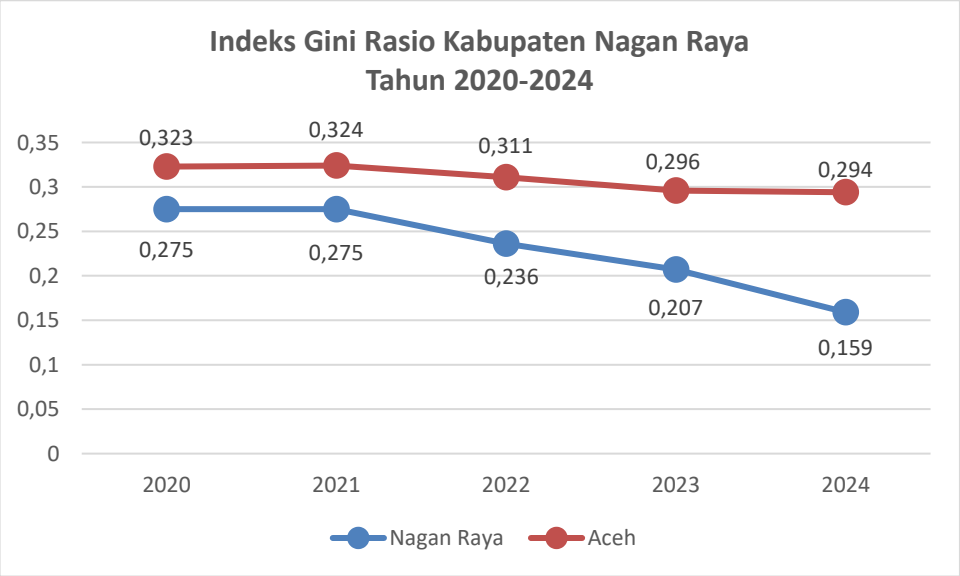

*Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2024*

## G. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis.

Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa, menurut (Todaro dan Smith, 2006), bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

**Gambar. 3.8**
**Indeks Gini Rasio Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024**




*Sumber: PDRB BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023*

Indeks Gini Rasio Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Tahun 2020 Indeks Gini Rasio 0,275 kemudian menurun pada Tahun 2022 menjadi 0,236. Pada Tahun 2023 Indeks Gini Rasio Kabupaten Nagan Raya turun 0,207 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0.159.

## H. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak yang dikumpulkan dalam 1 nilai yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu wilayah.

**Tabel 3.2**
**Perbandingan IPM Kabupaten Nagan Raya**
**Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nasional | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 74,39 | 74,20 |
| 2 | Provinsi Aceh | 71,99 | 72,18 | 72,80 | 74,70 | 75,36 |
| 3 | Kab. Nagan Raya | 70,54 | 70,67 | 71,46 | 72,15 | 73,10 |

*Sumber: PDRB BPS Kabupaten Nagan Raya, 2024*

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Nagan Raya selama 5 tahun menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan denga IPM Nasional dan Provinsi Aceh IPM Kabupaten masih berada di bawah nasional dan provinsi.

Secara garis besar, indikator makro Kabupaten Nagan Raya tergolong masih rendah dibandingkan Aceh dan Nasional sehingga perlu perhatian dan intervensi yang mendalam untuk menjawab tantangan tersebut agar indikator ekonomi makro Kabupaten Nagan Raya lebih optimal. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap capaian indikator makro pembangunan Nagan Raya yaitu terhadap penyerapan dan realisasi terhadap kegiatan prioritas yang mengacu pada target indikator-indikator ekonomi makro tersebut. Untuk itu, berbagai cara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berusaha untuk berkoordinasi dari tingkat pusat maupun provinsi untuk dapat membantu dalam merealisasikan kegiatan yang menjerumus terhadap pencapaian target tersebut, seperti penyerapan sumber dana pusat melalui Dana Hibah, Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik serta Pengalokasian Sumber Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Aceh yang selama ini didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi tujuan daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPK Nagan Raya Tahun 2023-2026, dimana dalam Rancangan akhir RKPK Nagan Raya Tahun 2025 kerangka pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam RPK Nagan Raya di Tahun 2025. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Nagan Raya

Pendapatan Daerah, adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah meliputi : (a). Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); (b). Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, dan transfer antar-daerah); (c). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (terdiri dari hibah, dana darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pendapatan terbesar dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berasal dari dana perimbangan, namun dana perimbangan tersebut berada diluar kendali Pemerintah Daerah, karena pengalokasian dana perimbangan ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Maka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nagan Raya harus berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 3.3**
**Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya**

| KODE | URAIAN | APBK 2025 | RKPK 2026 | Bertambah/ (Berkurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (4-3) | 6 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | |
| **4:01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **117,637,122,558.00** | **131,032,309,014.00** | **13,395,186,456.00** | **1.11** |
| 4:01:01 | Pajak Daerah | 27,785,358,369.00 | 36,158,221,424.00 | 8,372,863,055.00 | 1.30 |
| 4:01:02 | Retribusi Daerah | 923,257,475.00 | 59,766,547,672.00 | 58,843,290,197.00 | 64.73 |
| 4:01:03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2,037,246,764.00 | 2,037,246,764.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4:01:04 | Lain-lain PAD yang Sah | 86,891,259,950.00 | 33,070,293,154.00 | -53,820,966,796.00 | 0.38 |
| **4:02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1,058,551,971,868.00** | **1,007,799,446,833.00** | **-50,752,525,035.00** | **0.95** |
| 4:02:01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1,020,515,989,133.00 | 970,186,990,041.00 | -50,328,999,092.00 | 0.95 |
| 4:02:02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 38,035,982,735.00 | 37,612,456,792.00 | -423,525,943.00 | 0.99 |
| **4:03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 4:03:03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0.00 | | 0.00 | **0** |
| | | **1,176,189,094,426.00** | **1,138,831,755,847.00** | **-37,357,338,579.00** | |

*Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya 2025*

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga.

Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur.

Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui penajaman pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nagan Raya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyempurnakan dan memberlakukan Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada;
2) Percepatan Pembentukan BUMD;
3) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disintensif;
4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPK penghasil;
5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan.
6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penerbitan;
7) Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
8) Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
9) Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
10) Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan;
11) Pemanfaatan aset-aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;

12) Mengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi;

Secara rincian target dan proyeksi pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PAD pada RKPK 2026 tercatat sebesar Rp.131.032.309.014,- hanya meningkat 1,11% dibandingkan dengan APBK 2025, sehingga secara umum dapat dikatakan cenderung stagnan. Peningkatan terjadi pada komponen pajak daerah, dari Rp. 27,785,358,369.- menjadi Rp. 36,158,221,424.- dan Retribusi Daerah, dari Rp. 923,257,475.- menjadi Rp. 59,766,547,672.- Hal ini dapat diasumsikan sebagai hasil dari optimalisasi pemungutan retribusi dan/atau perluasan objek retribusi, misalnya retribusi jasa umum atau jasa usaha. Namun, peningkatan tersebut diimbangi dengan penurunan signifikan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah, yang turun Rp. 58,813,290,197.- miliar.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Pemerintah Pusat dan Pendapatan transfer antar Daerah. Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp. 50,328,999,092.- (sekitar 0,95%), dari Rp1.058.551.971.868 pada APBK 2025 menjadi Rp. 1,007,799,446,833.- di RKPK 2026. Penurunan terutama terjadi pada Transfer Pemerintah Pusat, yakni turun Rp. 50,328,999,092.- Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Insentif Fiskal yang bersifat selektif dan berbasis kinerja. Selain itu, penurunan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 423,525,943.- juga mencerminkan kemungkinan berkurangnya mekanisme bagi hasil atau kerja sama antarwilayah yang selama ini menjadi sumber transfer horizontal.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan**.** Komponen ini tetap Rp0,00, tidak mengalami perubahan antara APBK 2025 dan RKPK 2026.

Dukungan pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep atau Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar Dimana Perusahaan itu berada. Organisasi atau Perusahaan sebagai suatu system diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial dalam Masyarakat. Semakin besar suatu organisasi atau Perusahaan tersebut maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau Perusahaan tersebut. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroaan terbatas menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun Masyarakat pada umumnya. Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun Masyarakat pada umumnya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber dana alam wajib melaksanakan TJSL. TJSL ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaan nya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal ini Perseroan tidak melaksanakan TJSL maka Perseroan yang bersangkutan dikenai saksi sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menerima Dana TJSLP/CSR dari Perusahan yang ada di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Dana CSR Perusahaan tersebut berkontribusi membantu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam Pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Ada 23 perusahaan di Kabupaten Nagan Raya yang melaksanakan dana CSR, dimana Perusahaan tersebut berperan serta dalam Pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun Masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui Partisipasi Mitra Pembangunan Nagan Raya Melalui Dana TJSLP/CSR Total 23 Perusahan Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

## Tabel 3.4
## Realisasi Perusahaan Dana TJSLP/ CSR
## Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

| NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMITMEN BESARAN | REALISASI | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DANA HASIL MUSRENBANG TJSLP/CSR TAHUN 2024 (Rp.) | REALISASI TAHUN 2024 | PERSENTASE (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PT. BARA ENERGI LESTARI | 13,358,680,213 | 13,269,891,611 | 99.34% | |
| 2 | PT. SOCFINDO SEUMANYAM | 740,000,000 | 697,585,887 | 94.27% | 42,414,113 |
| 3 | PT. SOCFINDO SEUNAGAN | 743,000,000 | 762,674,281 | 103% | (19,674,281) |
| 4 | PT. KALLISTA ALAM | 320,000,000 | 224,000,000 | 70% | 96,000,000 |
| 5 | PT. UJONG NEUBOK DALAM | 292,500,000 | | 0% | |
| 6 | PT. SAWIT NAGAN RAYA MAKMUR | 209,100,000 | 132,552,000 | 63% | 76,548,000 |
| 7 | PT. KHARISMA ISKANDAR MUDA | 185,000,000 | 84,112,000 | 45% | 100,888,000 |
| 8 | PT. WATU GEDE UTAMA | 40,000,000 | | 0% | |
| 9 | PT. ENSEM LESTARI JAYA | 168,400,000 | 96,400,000 | 57% | 72,000,000 |
| 10 | PT. SURYA PANEN SUBUR I | 625,000,000 | 473,000,000 | 76% | 152,000,000 |
| 11 | PT. SURYA PANEN SUBUR II | 760,000,000 | 469,903,000 | 62% | 290,097,000 |
| 12 | PT.BEURATA SUBUR PERSADA | 190,000,000 | 190,000,000 | 100% | - |
| 13 | PT. RAJA MARGA | 196,500,000 | 133,455,500 | 68% | 63,044,500 |
| 14 | PT. AGRO SINERGI NUSANTARA | 73,550,000 | | 0% | RENJA BLUM ADA, LAPORAN REALISASI TIDAK TERVERIFIKASI |
| 15 | PT. ENERGI TAMBANG GEMILANG | 30,000,000 | 12,600,000 | 42.00% | 17,400,000 |
| 16 | PT. MEGA MULTI CEMERLANG | 210,000,000 | 73,000,000 | 34.76% | 137,000,000 |
| 17 | PT. SENAGAN ENERGI | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | - |
| 18 | PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM | | 20,000,000 | 0% | |
| 19 | PT. WIRATACO MITRA MULIA | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | - |
| 20 | PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS | 207,735,000 | 273,950,000 | 132% | (66,215,000) |
| 21 | PT. PLN (Persero) ULP JEURAM | 50,000,000 | | 0% | |
| 22 | PT. PLN NUSANTARA POWER UPK NAGAN RAYA | 350,000,000 | 365,000,000 | 104.29% | (15,000,000) |
| 23 | PT. MEULABOH POWER GENERATION | 150,000,000 | 276,480,000 | 184% | (126,480,000) |
| | **JUMLAH** | **18,964,465,213** | **17,619,604,279** | **92.91%** | |
| | **SISA** | **1,344,860,934** | | | |

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menerima dana CSR pada Tahun 2024 sebesar Rp. 18.964.465.213,- Dana yang terealisasi dari Komitmen Dana Hasil Musrenbang Dana TJSLP/CSR Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 17.619.604.279,- Hal ini disebabkan adanya Perusahaan yang tidak merealisasikan Dana CSRnya sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. 1.344.860.934.

Pada tahun 2024 Dana CSR diprogramkan untuk program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, program sektor keagamaan, program peningkatan kualitas Pendidikan, program sosial kemasyarakatan dan program pengembangan Kabupaten Layak Anak.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6. Sosial.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan yang dilaksanakan sesuai kewenangan antara lain :

1. Tenaga kerja; 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan hidup; 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi dan informatika; 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;

12. Penanaman modal; 13. Kepemudaan dan olahraga; 14. Statistik; 15. Kebudayaan; 16. Perpustakaan; dan 17. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Perdagangan; 5. Perindustrian; dan 6. Transmigrasi. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: 1. Sekretariat Daerah, 2. Sekretariat DPRD. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi : 1. Perencanaan; 2. Keuangan; 3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4. Penelitian dan pengembangan; dan Unsur pengawasan urusan pemerintahan yakni inspektorat; Unsur kewilayahan meliputi 10 Kecamatan; Unsur pemerintahan umum yakni kesatuan bangsa dan politik.

Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPK Nagan Raya Tahun 2025 ini harus lebih fokus terhadap pelaksanaan pesta demokrasi, peningkatan SDM dan Pengentasan kemiskinan.

Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2. Belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), belanja modal, belanja, dan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Belanja daerah digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik.

4. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, Propinsi Aceh dan tujuan RPK Nagan Raya Tahun 2026.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
7. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRK, dan Pegawai ASN dan Pegawai PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari alokasi belanja daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta pemberian gaji pada PPPK yang sudah dialokasikan anggarannya;
   b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
   c. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRK serta ASN/ PNS Daerah;
   e. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih mengalokasikan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS kepada seluruh PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui usulan DAK Non Fisik;

8. Barang dan Jasa, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Belanja jas non ASN tetap dianggarkan untuk pemenuhan gaji tenaga kontrak yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan metode outsourcing sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat.
9. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, yang bersumber dari APBK mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
10. Belanja Bagi Hasil, yaitu Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10 % dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota pada Tahun Anggaran 2026. Dalam RKPK Nagan Raya Tahun 2026, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga memberikan tambahan penghasilan perangkat desa guna pembayaran iuran BPJS bagi perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa.
11. Belanja Bantuan Keuangan
    a. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK provinsi dan DPRK pada tahun 2026 sesuai hasil Pemilihan Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2026.

12. Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
13. Kewajiban Anggaran Belanja Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
    a. Anggaran Kesehatan

       Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 % agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

    b. Anggaran Pendidikan

       Dalam RKPD Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurangkurangnya 20 % dari belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Hal ini sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

    c. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan

       Dalam RKPD Tahun 2026, pagu indikatif untuk pendidikan dan pelatihan (peningkatan kompetensi) aparatur sipil negara sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja daerah.

    d. Alokasi Anggaran untuk Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam RKPD Tahun 2026, pagu indikatif untuk penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sekurangkurangnya sebesar 0,75 % dari total belanja daerah.

## Tabel 3.5
## Target Tahun 2025 dan Perencanaan Tahun 2026
## Kabupaten Nagan Raya

| KODE | URAIAN | | APBK 2025 | RKPK 2026 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | **117,637,122,558.00** | **131,032,309,014.00** | **13,395,186,456.00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | | 27,785,358,369.00 | 36,158,221,424.00 | 8,372,863,055.00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | | 923,257,475.00 | 59,766,547,672.00 | 58,843,290,197.00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 2,037,246,764.00 | 2,037,246,764.00 | 0.00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | | 86,891,259,950.00 | 33,070,293,154.00 | -53,820,966,796.00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | | **1,058,551,971,868.00** | **1,007,799,446,833.00** | **-50,752,525,035.00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | 1,020,515,989,133.00 | 970,186,990,041.00 | -50,328,999,092.00 |
| 4.1.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | | 38,035,982,735.00 | 37,612,456,792.00 | -423,525,943.00 |
| | | **Jumlah Pendapatan** | **1,176,189,094,426.00** | **1,138,831,755,847.00** | **-37,357,338,579.00** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | **856,226,603,146.00** | **813,466,018,560.75** | **-42,760,584,585.25** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | 517,196,216,304.00 | 471,112,650,063.95 | -46,083,566,240.05 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 326,714,259,157.00 | 324,932,443,311.80 | -1,781,815,845.20 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | | 922,500,000.00 | 0.00 | -922,500,000.00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | 902,627,685.00 | 7,063,299,685.00 | 6,160,672,000.00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | | 10,491,000,000.00 | 10,357,625,500.00 | -133,374,500.00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | **123,159,367,796.00** | **76,541,412,757.25** | **-46,617,955,038.75** |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | 18,757,540,938.00 | 16,946,680,548.00 | -1,810,860,390.00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | 31,200,958,474.00 | 32,712,843,382.25 | 1,511,884,908.25 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | 72,497,203,384.00 | 24,159,520,827.00 | -48,337,682,557.00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | 617,565,000.00 | 2,631,868,000.00 | 2,014,303,000.00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | | 86,100,000.00 | 90,500,000.00 | 4,400,000.00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | | **14,100,000,000.00** | **14,100,000,000.00** | **0.00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | | 14,100,000,000.00 | 14,100,000,000.00 | 0.00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | | **244,926,336,641.00** | **255,189,841,766.00** | **10,263,505,125.00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | | 2,436,193,366.00 | 2,436,193,366.00 | 0.00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | | 242,490,143,275.00 | 252,753,648,400.00 | 10,263,505,125.00 |
| | | **Jumlah Belanja** | **1,238,412,307,583.00** | **1,159,297,273,084.00** | **-79,115,034,499.00** |
| | | **Total Surplus/ (Defisit)** | **-62,223,213,157.00** | **-20,465,517,237.00** | **41,757,695,920.00** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **62,223,213,157.00** | **20,465,517,237.00** | **-41,757,695,920.00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | 62,223,213,157.00 | 20,465,517,237.00 | -41,757,695,920.00 |
| | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **Pembiayaan Netto** | **62,223,213,157.00** | **20,465,517,237.00** | **-41,757,695,920.00** |
| | | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | **1,238,412,307,583.00** | **1,159,297,273,084.00** | **-79,115,034,499.00** |

*Sumber : BPKD/ Bappeda, 2025 (diolah)*

Berdasarkan tabel di atas rincian jumlah pendapatan dan belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 tidak terdapat terdapat defisit. Adapun proyeksi APBK Nagan Raya Tahun 2026 sebesar Rp. 131,032,309,014.- rupiah berkurang sekitar 1,11 persen dari Tahun 2025 yang sebesar Rp. 117,637,122,558.- rupiah. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya jumlah pendapatan yang secara keseluruhan berkurang 19,86 persen. Kekurangan tersebut terjadi pada dua sektor pendapatan daerah yaitu sektor Pendapatan Tranfer pusat sebesar 0,95 persen, sektor Pendapatan Transfer dalam hal ini bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah berkurang sebesar 0,99 persen dari tahun sebelumnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar 0,38 persen. Selain itu, besarnya selisih Silpa tahun 2025 sebesar 0,94 persen dari tahun 2024.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber penerimaan pembiyaan daerah Kabupaten Nagan Raya terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sebagaimana amanat Permendagri 77 Tahun 2021 bahwa penyertaan modal untuk dilengkapi dengan kajian analisis penyertaan modal (Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko), maka di struktur pembiayaan belum di masukan penyertaan modal.

**Tabel. 3.6**
**Target dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dan 2025**

| KODE | URAIAN | | APBK 2025 | RKPK 2026 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 6:01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | 62,223,213,157.00 | 20,465,517,237.00 | -41,757,695,920.00 |
| 6:01:01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | 62,223,213,157.00 | 20,465,517,237.00 | -41,757,695,920.00 |
| | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Pembiayaan Netto | 62,223,213,157.00 | 20,465,517,237.00 | -41,757,695,920.00 |
| | | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL APBD | 1,238,412,307,583.00 | 1,145,902,086,629.18 | -92,510,220,953.82 |

*Sumber : BPKD/ Bappeda, 2025 (diolah)*

**a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPK Tahun 2026 sebesar 20.465.517.237 rupiah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan target anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 62.223.213.157,- rupiah.

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 yaitu penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah belum di anggarkan.

# Tabel 3.7
# Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 s.d Tahun 2025

| KODE | URAIAN | JUMLAH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALISASI TAHUN 2022 | REALISASI TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2024 | REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025 | APBK 2025 | PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2026 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1,084,624,753,744.38** | **1,037,958,138,502.42** | **1,183,399,037,363.70** | **493,407,710,156.56** | **1,971,272,346,559.00** | **1,138,831,755,847.00** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **101,119,970,381.36** | **94,084,217,501.42** | **99,766,667,381.70** | **40,699,078,346.56** | **117,637,122,558.00** | **131,032,309,014.00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 18,426,878,404.77 | 17,768,866,666.25 | 16,128,332,945.80 | 14,948,607,511.00 | 27,785,358,369.00 | 36,158,221,424.00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1,183,379,250.00 | 1,093,067,000.00 | 1,137,787,475.00 | 447,041,948.00 | 923,257,475.00 | 59,766,547,672.00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2,482,458,904.00 | 2,412,126,948.00 | 2,037,246,764.00 | 2,056,156,156.00 | 2,037,246,764.00 | 2,037,246,764.00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 79,027,253,822.59 | 72,810,156,887.17 | 80,463,300,196.90 | 23,247,272,731.56 | 86,891,259,950.00 | 33,070,293,154.00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **963,176,192,363.02** | **931,437,230,885.00** | **1,076,413,284,619.00** | **452,708,631,810.00** | **1,853,635,224,001.00** | **1,007,799,446,833.00** |
| 4.2.01 | Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 656,320,396,160.00 | 683,058,190,280.00 | 809,271,103,553.00 | 356,023,445,151.00 | 795,083,252,133.00 | 0.00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 167,595,609,000.00 | 172,000,868,700.00 | 190,440,290,900.00 | 85,419,226,000.00 | 1,020,515,989,133.00 | 970,186,990,041.00 |
| 4.2.03 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 139,260,187,203.02 | 76,378,171,905.00 | 76,701,890,166.00 | 11,265,960,659.00 | 38,035,982,735.00 | 37,612,456,792.00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **20,328,591,000.00** | **12,436,690,116.00** | **7,219,085,363.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 20,328,591,000.00 | 963,978,880.00 | | | | |
| 4.3.02 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | - | 11,472,711,236.00 | 7,219,085,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1,054,972,506,127.60** | **1,085,588,844,276.74** | **1,177,271,853,782.16** | **391,580,674,164.73** | **1,238,412,307,583.00** | **1,159,297,273,084.00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **644,815,808,407.60** | **761,202,034,264.98** | **814,373,565,800.59** | **258,851,984,965.73** | **856,226,603,146.00** | **813,466,018,560.75** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 344,044,294,865.60 | 379,206,677,922.22 | 400,790,074,495.00 | 188,956,685,295.00 | 517,196,216,304.00 | 471,112,650,063.95 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 289,447,825,000.00 | 355,390,019,399.76 | 362,585,423,341.59 | 66,199,649,670.73 | 326,714,259,157.00 | 324,932,443,311.80 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | - | - | 265,000,000.00 | 298,000,000.00 | 922,500,000.00 | 0.00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 956,258,803.00 | 16,078,601,240.00 | 41,849,500,926.00 | 0.00 | 902,627,685.00 | 7,063,299,685.00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 10,367,429,739.00 | 10,526,735,703.00 | 8,883,567,038.00 | 3,397,650,000.00 | 10,491,000,000.00 | 10,357,625,500.00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **194,833,615,431.00** | **93,804,449,757.76** | **125,640,000,722.57** | **16,571,769,148.00** | **123,159,367,796.00** | **76,541,412,757.25** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | - | - | 960,665,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan mesin | 29,090,438,045.00 | 33,680,360,590.00 | 32,741,612,863.00 | 3,146,235,580.00 | 18,757,540,938.00 | 16,946,680,548.00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 68,711,198,542.00 | 25,189,196,798.00 | 33,705,436,282.00 | 6,274,442,110.00 | 31,200,958,474.00 | 32,712,843,382.25 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 95,479,091,431.00 | 33,241,549,951.76 | 55,575,747,261.57 | 7,151,091,458.00 | 72,497,203,384.00 | 24,159,520,827.00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap lainnya | 1,552,887,413.00 | 1,693,342,418.00 | 2,506,144,214.00 | 0.00 | 617,565,000.00 | 2,631,868,000.00 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset lainnya | - | - | 150,394,112.00 | 0.00 | 86,100,000.00 | 90,500,000.00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **2,905,296,040.00** | **3,294,947,000.00** | **3,821,570,584.00** | **32,500,000.00** | **14,100,000,000.00** | **14,100,000,000.00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 2,905,296,040.00 | 3,294,947,000.00 | 3,821,570,584.00 | 32,500,000.00 | 14,100,000,000.00 | 14,100,000,000.00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **212,417,786,249.00** | **227,287,413,254.00** | **233,436,716,675.00** | **116,124,420,051.00** | **244,926,336,641.00** | **255,189,841,766.00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1,518,876,149.00 | 2,342,758,179.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436,193,366.00 | 2,436,193,366.00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 210,898,910,100.00 | 224,944,655,075.00 | 233,436,716,675.00 | 116,124,420,051.00 | 242,490,143,275.00 | 252,753,648,400.00 |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **32,326,776,396.16** | **61,979,023,985.94** | **14,348,318,211.62** | **12,489,300,143.08** | **62,223,213,157.00** | **20,465,517,237.00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 32,326,776,396.16 | 61,979,023,985.94 | 14,348,318,211.62 | 12,489,300,143.08 | 62,223,213,157.00 | 20,465,517,237.00 |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6.2.01 | Penyertaan Modal Daerah | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO** | **32,326,776,396.16** | **61,979,023,985.94** | **14,348,318,211.62** | **12,489,300,143.08** | **62,223,213,157.00** | **20,465,517,237.00** |

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, maka Visi Pemabngunan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**"BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045"**

Makna dari visi diatas adalah mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Untuk pencapaian visi diatas, terdapat 8 (delapan) misi yang dituangkan kedalam Delapan Asta Cita yang meliputi sebagai berikut;

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatuf serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penlundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Indonesia Emas 20245, maka Asta cita yang merupakan misi dari Presiden memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

**Gambar 4.1**

**17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat**

| 17 Program Prioritas | 8 Program Hasil Terbaik Cepat |
|---|---|
| 1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;<br>2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;<br>3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;<br>4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;<br>5. Pemberantasan kemiskinan;<br>6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;<br>7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;<br>8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi;<br>9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;<br>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;<br>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;<br>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;<br>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi, baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yangh membutuhkan;<br>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya<br>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;'<br>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;<br>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. | 1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;<br>2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;<br>3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;<br>4. Membangun sekolah sekolah unggul terintegrasi dis etiap kabupaten dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu direnovasi;<br>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;<br>6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat negara;<br>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);<br>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23 persen. |

### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

RKPA Tahun 2026 merupakan RKPA yang disusun bersamaan dengan disusunnya Rancangan Awal RPJMA Tahun 2025-2029, mengacu pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 adalah

**"ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN"**

Makna Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebaga berikut:

**Islami** adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariat Islam.

**Maju** adalah dimaknai sebagai kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi;

**Bermartabat** adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh mMasayarakat Aceh yang religius, memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan tinggi sebagai sebuah bangsa;

**Berkelanjutan** adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi yang meliputi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan syariat islam dan perdamaian melalui kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA;
2. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan maritim Aceh;
4. Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olah raga;
5. Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas;
7. Menggerakkan tranformasi digitalilasi dan teknologi modern untuk semua sektor;

8. Mewujudkan reformasi politik, hukum dan tata kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba;
9. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat aceh.

Sesuai dengan penjelasan diatas, terlihat keselarasanantara Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi Pembnagunan Aceh Tahun 2025-2029. Lebih jelas keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**Keselarasan Antara Visi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029**

| Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 | Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045 | ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN |

*Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Visi/Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Terpilih*

**Tabel 4.2**

**Keselarasan Antara Misi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029**

| No | Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 | Misi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM); | Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan maritim Aceh |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga |

| No | Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 | Misi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | Meningkatkan keseimbangan dan inklusif regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan |
| 5 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas |
| 6 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | Mewujudkan Reformasi Politik, Hukum danTata Kelola Birokrasi, dan Memperkuat Pencegahan Korupsi, serta Berpartisipasi dalam Pemberantasan Narkoba |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteran Rakyat Aceh |

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai tindakan sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 166 menyebutkan Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMK Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJP Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Prioritas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menguraikan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diselesaikan atas kondisi aktual dan sejalan dengan kebijakan. Visi yang Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan dalam masa kampaye menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

***" Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Mandiri dan Madani"***

1. **Mandiri**

   Mandiri secara ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat daya saing daerah.

2. **Madani**

   Daerah yang berperadaban, maju, berintelektual serta menjunjung tinggi etika dan moralitas.

**Tabel 4.3**

**Penyelarasan Visi**

| Visi Presiden (RPJMN 2025-2029) | Visi Gubernur Aceh (RPJMA 2025-2029) | Visi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 | Visi Bupati Nagan Raya | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045' | Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | Nagan Islami, Maju, Berkelanjutan | Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Mandiri dan Madani | Mandiri | Mandiri Secara Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah |
| | | | | Madani | Daerah Yang memiliki peradaban, Maju, Berintelektual Serta Menjunjung Tinggi Etika dan Moralitas |

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Tertib, Damai, dan Demokratis **(Nagan Raya Islami dan Demokratis)**
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, terampil dan berkarakter **(Nagan Raya Cerdas dan Berkarakter)**
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Merata, Responsif Gender, Anak, Disabilitas, dan Inklusi Sosial **(Nagan Raya Sehat dan Sejahtera)**
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur merata, berkeadilan, terkoneksi, dan

Berkualitas **(Nagan Raya Maju)**

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan **(Nagan Raya Makmur)**
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, ketahanan Sosial Budaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan dan berkelanjutan **(Nagan Raya Lestari dan Berkelanjutan)**
7. Mewujudkan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas **(Nagan Raya Bersih dan Responsif)**
8. Mewujudkan Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan identitas yang kuat Adat istiadat berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya **(Nagan Raya Berbudaya dan Beradat)**

**Tabel 4.4**
**Penyelarasan antar Misi RPJMN, RPJMA, RPJP,**
**Dan Misi Bupati Nagan Raya**

| No | Misi RPJMN (2025-2029) | Misi RPJMA (2025-2026) | Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 | Misi Kabupaten Nagan Raya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Asta Cita 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA; | Mewujudkan Transformasi sosial menuju Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Sejahtera | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Tertib, Damai, dan Demokratis |
| 2 | **Asta Cita 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui suasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. | Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; | Mewujudkan transformasi ekonomi Melalui Penguatan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Peningkatan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, terampil, dan berkarakter |
| 3 | **Asta Cita 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewajudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh; | Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berintegritas dan Profesional | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Merata, Responsif Gender, Anak, Disabilitas, dan Inklusi Sosial |
| 4 | **Asta Cita 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas. | Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga; | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Damai dan Demokratis | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur merata, berkeadilan, terkoneksi, dan Berkualitas |

| No | Misi RPJMN (2025-2029) | Misi RPJMA (2025-2026) | Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 | Misi Kabupaten Nagan Raya |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Asta Cita 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan; | Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan |
| 6 | **Asta Cita 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas; | Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, ketahanan Sosial Budaya, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan dan berkelanjutan |
| 7 | **Asta Cita 7** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor; | Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui | Mewujudkan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas |
| 8 | **Asta Cita 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, sena peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba; dan | Mewujudkan Kesinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan | Mewujudkan Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan identitas yang kuat Adat istiadat berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya |
| 9 | | Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh. | | |

Untuk mewujudkan visi dan misi, diperlukan langkah operasional yang jelas yang dituangkan dalam rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun ke depan adalah fondasi keberhasilan, yang terukur dan realistis dicapai baik kualitatif maupun kuantitatif. Tabel berikut akan memaparkan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029.

## Tabel 4.5

## Visi, Misi, Tujuan dan sasaran

| No | VISI /MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Mandiri dan Madani** | | | | |
| 1 | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Tertib, Damai, dan Demokratis **(Nagan Raya Islami dan Demokratis)** | 1.1 | Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat | 1.1.1 | Meningkatkan Pengetahuan Syariat Islam secara mendalam dan menurunkan pelanggaran syariat |
| | | | | 1.1.2 | Optimalisasi Pengelolaan zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya |
| | | | | 1.1.3 | Peningkatan Mutu, kemandirian dayah serta pendidikan vokasi untuk dayah |
| | | 1.2 | Meningkatkan Keamanan, ketertiban, menjaga perdamaian dan penegakan demokrasi | 1.2.1 | Pengurangan Angka Pelanggaran Terhadap Qanun |
| | | | | 1.2.2 | Meningkatnya Indeks Demokrasi |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, terampil dan berkarakter **(Nagan Raya Cerdas dan Berkarakter)** | 2.1 | Transformasi sosial melalui meningkatkan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Merata, inklusif, dan Berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP | 2.1.1 | Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan yang unggul, merata, inklusi, dan berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP |
| | | | | 2.1.2 | Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum |
| | | | | 2.1.3 | Pemerataan dan Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | | 2.2 | Optimalisasi Pembangunan literasi Masyarakat | 2.2.1 | Meningkatkan Indeks Pembangunan literasi Masyarakat |
| | | 2.3 | Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan kepramukaan | 2.3.1 | Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan |
| | | 2.4 | Meningkatnya Daya Saing Olah Raga | 2.3.2 | Meningkatnya Daya Saing Olah Raga |
| 3 | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Merata, Responsif Gender, Anak, Disabilitas, dan Inklusi Sosial **(Nagan Raya Sehat dan Sejahtera)** | 3.1 | Meningkatnya Akses, Kualitas Layanan dan Derajat Kesehatan Secara Merata | 3.1.1 | Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal |
| | | | | 3.1.2 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | 3.1.3 | Penurunan Prevalensi Stunting |
| | | 3.2 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Responsif Penyandang Disabilitas, Inklusi Sosial, Kelompok Rentan, Gender, Perempuan dan Anak | 3.2.1 | Pemberdayaan Sosial |
| | | | | 3.2.2 | Meningkatnya Cakupan Penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri |
| | | | | 3.2.3 | Mengurangi Angka Pengangguran |
| | | | | 3.2.4 | Mengurangi Ketimpangan Pengarusutamaan Gender |
| | | | | 3.2.5 | Perlindungan Anak |
| | | | | 3.2.6 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk |

| No | VISI /MISI | NO | TUJUAN | NO | SASARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur merata, berkeadilan, terkoneksi, dan Berkualitas (**Nagan Raya Maju**) | 4.1 | Meningkatkan infrastruktur dasar dan Permukiman berkualitas, responsif bencana, merata. Ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan kawasan ekonomi masyarakat | 4.1.1 | Pemenuhan dan penyediaan Infratruktur yang berkualitas, merata, dan Ramah Lingkungan berorientasi pengurangan risiko bencana |
| 5 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan **(Nagan Raya Makmur)** | 5.1 | terwujudnya transformasi Ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan keragaman berbasis Sumber Daya Alam lokal dan Unggulan yang berkelanjutan | 5.1.1 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| | | | | 5.1.2 | Meningkatnya Keberagaman Usaha dan produk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hilirisasi Sumber Daya Alam berbasis lokal dan Unggulan serta Pengembangan Parawisata dan ekonomi kreatif |
| | | | | 5.1.3 | Peningkatan Nilai Investasi dan Penanaman Modal |
| | | | | 5.1.4 | Pengembangan dan Penguatan Koperasi dan UMKM Sektor Unggulan |
| | | 5.2 | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | 5.2.1 | Meningkatkan Cadangan Pangan Daerah |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, ketahanan Sosial Budaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan dan berkelanjutan **(Nagan Raya Lestari dan Berkelanjutan)** | 6.1 | Terwujudnya Ketahanan Ekologis dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan | 6.1.2 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Alam berkelanjutan |
| | | 6.2 | Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Masyarakat Tangguh Bencana | 6.1.2 | Pengurangan Risiko Bencana |
| 7 | Mewujudkan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan beritegritas **(Nagan Raya Bersih dan Responsif)** | 7.1 | Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas | 7.1.1 | Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) |
| | | | | 7.1.2 | Meningkatkan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| | | | | 7.1.3 | Meningkatkan Pelayanan dan keterbukaan Informasi Publik |
| | | | | 7.1.4 | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, dan akuntabel |
| | | | | 7.1.5 | Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Kepegawaian |
| | | | | 7.1.6 | Meningkatkan Tata Kelola Gampong |
| | | | | 7.1.7 | Meningkatkan Pelayanan Publik berorientasi kepentingan publik |
| 8 | Mewujudkan Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan identitas yang kuat Adat istiadat berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya **(Nagan Raya Berbudaya dan Beradat)** | 8.1 | Terwujudnya Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan identitas Adat istiadat, dan Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya | 8.1.1 | Mengembangkan dan melestarikan budaya berbasis kearifan lokal Nagan Raya |
| | | | | 8.1.2 | Meningkatkan Peranan Adat |
| | | | | 8.1.3 | Pembinaan dan meningkatkan edukasi bagi Lembaga dan Komoditas seni budaya |

Operasionalisasi dari indikator kinerja dan target masing-masing tujuan dan sasaran dimaksud pada Tahun 2026, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.6**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada masing-masing tujuan Tahun 2025-2029**

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Mewujudkan Kabupaten Mandiri dan Madani** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Tertib, Damai, dan Demokratis** | **1.1** | **Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat** | **Indeks Pembangunan Syariat Islam** | Indeks | | | | | | |
| | | 1.1.1 | Meningkatkan Pengetahuan Syariat Islam secara mendalam dan menurunkan pelanggaran syariat | Jumlah Kasus pelanggaran Syariat Islam | Kasus | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| | | 1.1.2 | Optimalisasi Pengelolaan zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya | Jumlah ZISWAF yang terkumpul | Juta | 8.426,8 | 8.600,7 | 8.774,6 | 8.948,5 | 9.122,4 | |
| | | 1.1.3 | Peningakatan Mutu, kemandirian dayah serta pendidikan vokasi untuk dayah | Persentase Dayah yang teakreditasi | % | | | | | | |
| | | **1.2** | **Meningkatkan Keamanan, ketertiban, menjaga perdamaian dan penegakan demokrasi** | **Indeks Demokrasi (IUP 30)** | Indeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 1.2.1 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Qanun | Persentase penegakan hukum Qanun (IUP 28 a) | % | | | | | | |
| | | 1.2.2 | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Indeks Reformasi Hukum (IUP 24) | Indeks | 71.78 | 74.63 | 77.48 | 80,33 | 83.18 | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 28 b) | % | | | | | | |
| | | | | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (IUP 29) | % | | | | | | |
| | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (IUP 38) | Indeks | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, terampil, dan berkarakter** | **2.1** | **Transformasi sosial melalui meningkatkan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Merata, inklusif, dan Berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP** | **Harapan Lama Sekolah (IUP 5.d)** | tahun | 14,20 | 14,21 | 14,22 | 14,24 | 14,25 | |
| | | 2.1.1 | Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan yang unggul, merata, inklusi, dan berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | Angka | | | | | | |
| | | | | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP 5.c) | Tahun | 9.47 | 9.61 | 9,75 | 9.89 | 10.03 | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP 6) | % | 10.31 | 10.38 | 10.45 | 10.51 | 10.58 | |
| | | | | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (IUP 7) | % | | | | | | |
| | | 2.1.2 | Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum | Angka Literasi (IUP 5) | Angka | | | | | | |
| | | | | Angka Numerasi (IUP 5) | Angka | | | | | | |
| | | 2.1.3 | Pemerataan dan Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan | Indeks Pemerataan Guru | Indeks | | | | | | |
| | | **2.2** | **Optimalisasi Pembangunan literasi Masyarakat** | **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** | Indeks | 72,20 | 78,84 | 85,48 | 92,12 | 98,76 | |
| | | 2.2.1 | Meningkatkan Indeks Pembangunan literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72,20 | 78,84 | 85,48 | 92,12 | 98,76 | |
| | | **2.3** | **Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan kepramukaan** | Indek Pembangunan Kepemudaan | Indeks | | | | | | |
| | | 2.3.1 | Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan | Indek Pembangunan Kepramukaan | Indeks | | | | | | |
| | | **2.4** | **Meningkatnya Daya Saing Olah Raga** | **Indeks Pembangunan Olah Raga** | **Indeks** | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2.4.1 | Meningkatkan Daya Saing Olah Raga | Prestasi Olah Raga | Indek | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Merata, Responsif Penyandang Disabilitas, Kelompok Rentan, Inklusi Sosial, Gender, dan Anak** | **3.1** | **Meningkatnya Akses, Kualitas Layanan, dan Derajat Kesehatan Secara Merata** | **Angka Usia Harapan Hidup (IUP 1)** | Angka | 72,93 | 73,06 | 73,19 | 73,33 | 73,46 | |
| | | 3.1.1 | Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | |
| | | | | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (IUP 3.a) | % | | | | | | |
| | | | | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (IUP 3.b) | % | | | | | | |
| | | | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP 4) | % | | | | | | |
| | | | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IUP 39) | Indeks | | | | | | |
| | | 3.1.2 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak | Angka Kematian Ibu (IUP 2.a) | Angka/ 100.000 kelahiran hidup | 97.25 | 88.75 | 80.25 | 71.75 | 63.25 | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka/ 1.000 kelahiran hidup | 12.08 | 10.58 | 9.08 | 7.58 | 6.08 | |
| | | 3.1.3 | Penurunan Prevalensi Stunting | Persentase prevalensi stunting (IUP 2.b) | % | 29,17 | 28,72 | 28,27 | 27,82 | 27,37 | |
| | | **3.2** | **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Responsif Penyandang Disabilitas, Inklusi Sosial, Kelompok Rentan, Gender, dan Anak** | Tingkat Kemiskinan (IUP 8) | % | 16,76 | 16,34 | 16,30 | 16,12 | 15,93 | |
| | | 3.2.1 | Pemberdayaan Sosial | Jumlah Masyarakat miskin yang diberdayakan | Jiwa | | | | | | |
| | | 3.2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif | Indeks Kesejahteraan Sosial | % | | | | | | |
| | | | | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP 9) | % | | | | | | |
| | | | | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (IUP 10) | % | | | | | | |
| | | | | Rumah tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan (IUP 23 b) | | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2.3 | Mengurangi Angka Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP 15.a) | % | 4.67 | 4.36 | 4.05 | 3.74 | 3.43 | |
| | | | | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (IUP 16) | % | | | | | | |
| | | 3.2.4 | Mengurangi Ketimpangan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 91.84 | 92.1 | 92.37 | 92.64 | 92.9 | |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP 40) | Indeks | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | |
| | | 3.2.5 | Perlindungan Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 68.44 | 69.54 | 70.64 | 71.74 | 72.84 | |
| | | 3.2.6 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk | Indeks | 1.71 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.51 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman berkualitas, merata, ramah Lingkungan dan terkoneksi antar wilayah** | **4.1** | **Meningkatkan infrastruktur dasar dan Permukiman berkualitas, responsif bencana, merata. Ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan kawasan ekonomi masyarakat** | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | | | | | | |
| | | | | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (IUP 42.b) | % | 83.5 | 84.25 | 85 | 85.75 | 86.5 | |
| | | 4.1.1 | Pemenuhan dan penyediaan Infratruktur yang berkualitas, merata, dan Ramah Lingkungan berorientasi pengurangan risiko bencana | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Indeks | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | c. Pengelolaan Sampah (IUP 42.c) | | | | | | | |
| | | | | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | | | | | | |
| | | | | - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % RT | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Mewujudkan transformasi Ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan keragaman berbasis Sumber Daya Alam lokal dan Unggulan yang berkelanjutan** | **5.1** | **terwujudnya transformasi Ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan keragaman berbasis Sumber Daya Alam lokal dan Unggulan yang berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | % | 4,25 - 4,65 | 4,20 - 4,70 | 4,15 - 4,75 | 4,10 - 4,80 | 4,05 - 4,85 | |
| | | | | Rasio Pajak terhadap PDB (IUP 31) | % | | | | | | |
| | | | | Tingkat Inflasi (IUP 32) | % | | | | | | |
| | | 5.1.1 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rasio PAD terhadap APBK | % | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1.2 | Meningkatnya Keberagaman Usaha dan produk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hilirisasi Sumber Daya Alam berbasis lokal dan Unggulan Serta Pengembangan Parawisata dan ekonomi kreatif | PDRB Perkapita | Juta Rupiah | 48.6 | 50.04 | 51.48 | 52.92 | 54.37 | |
| | | | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dari Pengembangan Sektor Pariwisata (IUP 12.a) | % | | | | | | |
| | | | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP 12.b) | orang | | | | | | |
| | | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (IUP 13) | % | | | | | | |
| | | | | Rasio kewirausahaan daerah (IUP 14.b) | % | | | | | | |
| | | | | Ekspor Barang dan Jasa (IUP 22) | (% PDRB) | | | | | | |
| | | | | Proporsi kontribusi PDRB wilayah kota terhadap kabupaten (IUP 23 a) | % | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (IUP 33) | % | | | | | | |
| | | | | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Perkapita (IUP 33.a) | % | | | | | | |
| | | | | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (IUP 33.b) | % | | | | | | |
| | | | | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (IUP 33.c) | Rupiah | | | | | | |
| | | | | d. Total Kredit/PDRB (IUP 33.d) | % | | | | | | |
| | | 5.1.3 | Peningkatan Nilai Investasi dan Penanaman Modal | Pembentukan Modal Tetap Bruto (IUP 21) | % PDRB | | | | | | |
| | | | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (IUP 15.b) | % | | | | | | |
| | | | | Return on Asset (ROA) BUMD (IUP 14.d) | % | | | | | | |
| | | 5.1.4 | Pengembangan dan Penguatan Koperasi dan UMKM Sektor Unggulan | Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP 11.a) | % | 5.43 | 5.71 | 6.00 | 6.28 | 6.57 | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11.b) | % | | | | | | |
| | | | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (IUP 14.a) | % | | | | | | |
| | | | | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (IUP 14.c) | % | | | | | | |
| | | **5.2** | **Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah** | **Indeks Ketahanan Pangan Daerah** | Indeks | | | | | | |
| | | 5.2.1 | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | | | | | | |
| | | 5.2.2 | Meningkatkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah tingkat Kabupaten (IUP 20) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Mewujudkan Ketahanan Ekologis dan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan dan** | **6.1** | **Terwujudnya Ketahanan Ekologis dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan** | **Indeks Ekonomi Hijau Daerah (IUP 18 a)** | Indeks | | | | | | |
| | | | | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan : (IUP 43) | | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **ketahanan Sosial Budaya berkelanjutan** | | | a. Ketahanan Energi (IUP 43.a) | % | | | | | | |
| | | | | - Konsumsi listrik per kapita | kWh | | | | | | |
| | | | | - Intensitas energi primer | SBM/Rp milyar | | | | | | |
| | | | | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP 43.b) | % | | | | | | |
| | | | | c. Ketahanan Air (IUP 43.c) | % | | | | | | |
| | | | | - Kapasitas Tampungan Air | m3/kapita | | | | | | |
| | | | | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | % | | | | | | |
| | | 6.1.1 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Alam berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IUP 42.a) | Indeks | 80.85 | 81.45 | 82.05 | 82.65 | 83.25 | |
| | | | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (IUP 18 b) | % | | | | | | |
| | | | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IUP 41) | Indeks | | | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) : (IUP 45) | | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. Kumulatif (IUP 45.a) | % | | | | | | |
| | | | | b. Tahunan (IUP 45.b) | % | | | | | | |
| | | **6.2** | **Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Masyarakat Tangguh Bencana** | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | |
| | | 6.2.1 | Pengurangan Risiko Bencana | Indeks Resiko Bencana (IUP 44) | Indeks | 188.49 | 185.91 | 183.33 | 180.75 | 178.18 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan beritegritas** | **7.1** | **Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas** | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 71.53 | 74.93 | 78.33 | 81.73 | 85.13 | |
| | | 7.1.1 | Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai SAKIP | Nilai | 68.25 | 72.25 | 76.25 | 80.25 | 84.25 | |
| | | 7.1.2 | Meningkatkan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Angka | | | | | | |
| | | 7.1.3 | Meningkatkan Pelayanan dan keterbukaan Informasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | | | | | | |
| | | 7.1.4 | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, dan akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| | | 7.1.5 | Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Kepegawaian | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | 73.4 | 75.4 | 77.4 | 79.4 | 81.4 | |
| | | | | Indeks Integritas Nasional (IUP 27) | Indeks | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.6 | Meningkatkan Tata Kelola Gampong | Indeks Desa membangun | Indeks | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | |
| | | | | Persentase desa mandiri (IUP 23 c) | % | | | | | | |
| | | 7.1.7 | Meningkatkan Pelayanan Publik berorientasi kepentingan publik | Indeks Pelayanan Publik (IUP 26) | Indeks | 11.35 | 13.28 | 15.12 | 17.02 | 18.91 | |
| | | 7.1.8 | Meningkatnya Tingkat Penguasaan Iptek dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (IUP 17) | Indeks | 57.85 | 62.35 | 66.85 | 71.36 | 75.86 | |
| | | 7.1.9 | Meningkatnya Transformasi Digital | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IUP 19) | Indeks | | | | | | |
| | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IUP 25) | Indeks | 3.77 | 4.14 | 4.53 | 4.91 | 5.30 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Mewujudkan Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan indentitas Adat istiadat, dan Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya** | **8.1** | **Terwujudnya Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan indentitas Adat istiadat, dan Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya** | **Indek Pembangunan Kebudayaan (IUP 37)** | Indeks | | | | | | |
| | | 8.1.1 | Mengembangkan dan melestarikan budaya berbasis kearifan lokal Nagan Raya | Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan | % | | | | | | |
| | | 8.1.2 | Meningkatkan Peranan Adat | Persentase lembaga adat yang dibina | % | | | | | | |
| | | 8.1.3 | Pembinaan dan meningkatkan edukasi bagi | Persentase lembaga seni budaya, komunitas seni | % | | | | | | |

| NO | VISI/ MISI | NO | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Lembaga dan Komoditas seni budaya | budaya yang terfasilitasi untuk Edukasi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## 4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

### 4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Sesuai dengan arahan presiden yang menekankan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang harus mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya serta meningkatkan produktifitas, maka tema RKP Tahun 2026 adalah **" Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Sesuai dengan tema diatas, maka penekanan prioritas pembangunan RKP tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) yang meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi local melalui koperasi desa/kelurahan merah putih;
2. Penerapan digitalilasi pendidikan;
3. Pengentasan kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan
4. Pengelolaan sampah terpadu;
5. Memberikan fasilitasi pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui sekolah rakyat.

Fokus pembangunan RKP tahun 2026 juga mencakup 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Gender dan inklusi Sosial, dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan; terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan sasaran menguatnya pelaksanaan SDGs melalui integrasi perencanaan, pelaporan serta rekognisi;
3. Pembangunan Rendah Karbon, dengan sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK);
4. Transformasi digital, dengan sasaran meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional dan terwujudnya pemerintahan berbasis digital yang transparan, inklusif dan efesiensi;
5. Pembangunan bertahanan iklim, dengan sasaran menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor pertanian prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian) dan kesehatan.

Merujuk pada trisula pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat tiga pilar utama pembangunan nasional yang menjadi sasaran pembangunan nasional tahun 2026 yaitu (1) Pertumbuhan Ekonomi berkelanjutan, (2) Penurunan Kemiskinan dan (3)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.7**

**Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026**

| | |
|---|---|
| Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,8 - 6,3 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 37,14 |
| GNI Per Capita | 5.870 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 76,67 |
| Penurunan Kemiskinan | |
| Kemiskinan Ektrem (%) | 0,0 - 0,5 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5 - 7,5 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44 - 4,96 |
| Rasio Gini | 0,377 - 0,380 |
| Sumber Daya Manusia Berkualitas | |
| Indeks Modal Manusia (IMM) | 0,57 |

Sumber: Rancangan RKP 2026

Untuk mencapai sasaran diatas, maka terdapat 8 (Delapan) Prioritas Nasional (PN) tahun 2026 yang meliputi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk menigkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyulundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### 4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

#### 4.2.2.1. Tema Pembangunan Aceh Tahun 2026

RKPA Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMA Tahun 2025-2029.pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Merujuk pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMA Tahun 2025-2029 ditetapkan Tema RKPA Tahun 2026 **"Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja"**

Tema Pembangunan tersebut memiliki makna bahwa Pembangunan Aceh Tahun 2026 diarah kan untuk (1) mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan serta ketimpangan, (2) mewujudkan hilirisasi dan industrilisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan daeerah dan stabilitas ekonomi makro, dan (3) mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal serta industri kreatif.

Target sasaran Pembangunan Aceh tahun 2026 dapat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.8

Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026

| Swasembada Pangan dan Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan | |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,0 - 5,3 |
| PDRB per Kapita (Rp. Juta) | 48,9 - 50,2 |
| Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 1,1 |
| Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) | 32,91 - 37,47 |
| Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 83,06 |
| **Penurunan Kemiskinan** | |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,46 - 10,46 |
| Rasio Gini | 0,280 - 0,290 |
| Indek Modal Manusia | 0,58 |
| **Penciptaan Lapangan Kerja** | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,12-5,47 |

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

#### 4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

Untuk mendukung terwujudnya ssaran pembangunan Aceh tahun 2026 dan selaras dengan 9 misi pembangunan Aceh Tahun 2025-2029, maka dirumuskan 9 (sembilan) Prioritas Aceh (PA) tahun 2026. Lebih jelas mengenai 9 prioritas pembangunan Aceh tahun 2026 dan keselarasan dengan misi RPJMA tahun 2025-2029 dan Prioritas Nasional (PN) tahun 2026. Dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut;

**Gambar 4.2**
**9 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026**




### 4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026

Arah pembangunan Aceh tahun 2026, sesuai tahapan Rancangan RPJMA Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9**

**Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2026**

| No. | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Misi 1 - Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA | Arah kebijakan penting untuk mewujudkan Misi 1 dalam pelaksanaan syariat islam dan perdamaian difokuskan pada penguatan Kekhususan, Keistimewaan, dan Perdamaian Aceh yang diimplementasikan dengan strategi antara lain: a. penguatan perdamaian dan penjaminan stabilitas Aceh-Nasional; b. Pemerataan pembangunan antar kabupaten-kota dan wilayah pedesaan; c. Pengawalan keberlanjutan dana Otonomi Khusus sebagai sumber utama pembangunan; d. Peningkatan kapasitas dan peran Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal perdamaian Aceh |
| 2 | Misi 2 - Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Arah kebijakan penting untuk mewujudkan Misi 2 yang mendukung terciptanya kemandirian rakyat dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan masyarakat Aceh dengan strategi antara lain: a. Perlindungan sosial dan adaptif; b. Percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin; c. Menciptakan swasembada pangan dan energi; d. Mewujudkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. |
| 3 | Misi 3 - Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh | Arah kebijakan penting untuk untuk mewujudkan Misi 3 difokuskan pada pembangunan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim dengan strategi antara lain: a. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan hasil laut; b. Penyiapan tenaga kerja terampil yang sesuai dan dibutuhkan oleh usaha hilirisasi dan industrilisasi; c. Penyediaan infrastruktur pendukung hilirisasi dan industrilisasi; d. Penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi |
| 4 | Misi 4 - Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga | Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 4 dalam penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan strategi antara lain: a. Peningkatan akses kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan; b. Pemenuhan infrastruktur dasar pendukung perekonomian; c. Mengembangkan industri pariwisata, halal, dan |

| No. | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | kreatif; d. Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan. |
| 5 | Misi 5 - Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan | Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 5 difokuskan pada peningkatan keseimbangan pembangunan dan inklusi regional Aceh yang didukung oleh infrastrutur yang berkualitas dilakukan dengan strategi antara lain: a. Membangun infrastruktur yang terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; b. membangun infrastruktur dasar; dan c. Membangun infrastruktur pendukung investasi sesuai standar negara maju. |
| 6 | Misi 6 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas | Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 6 untuk peningkatan sumber daya manusia yang mengusai sains dan teknologi dengan strategi antara lain; a. Beasiswa unggulan Aceh yang inklusif; b. Pembangunan sekolah-sekolah unggul; c. peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru; dan d. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Aceh; |
| 7 | Misi 7 - Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor | Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 7 yang berkaitan dengan Transformasi Digital yang Terintegrasi diimplementasikan melalui strategi antara lain: a. Pembangunan dan penguatan infrastruktur digital pemerintahan; b. Peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi yang mumpuni. |
| 8 | Misi 8 - Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba | Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 8 dalam peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah dengan strategi antara lain: a. Penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas; b. Peningkatan kapasitas badan pengelolaan keuangan Aceh; c. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung kemandirian fiskal; d. peningkatan profesionalisme ASN. |
| 9 | Misi 9 - Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteran rakyat Aceh | Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi 9, pembangunan difokuskan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan strategi yang dilakukan antara lain: a. mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dan biru; b. Pembentukan dana abadi lingkungan dan dana CSR yang bersumber dari hilirisasi sumber daya alam dan maritim secara berkelanjutan; c. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif. |

Sumber: Rancangan RPJMA Tahun 2025-2029

**Tabel 4.10**

**Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2025-2030**

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | **Nagan Raya Mandiri dan Madani** | | |
| **1** | **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Tertib, Damai, dan Demokratis** | ▪ Peningkatan Pemahaman Syariat Islam secara mendalam mencakup Aqidah, Ibadah dan Akhlak dan menurunkan Tingkat Pelanggaran Syariat,<br>▪ Peningkatan peran ulama dan masyarakat dalam pengawasan, Penguatan fungsi dan peran Baitul Mal,<br>▪ Peningkatan Pengelolaan zakat, Infaq, wakaf dan harta agama lainnya secara profesional, inovatif, dan terpadu Meningkatkan kepatuhan membayar Zakat,<br>▪ Peningkatan Mutu dan akreditasi, Peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia,<br>▪ Pemberdayaan dayah serta pendidikan vokasi untuk dayah, peningkatan kualitas perdamaian,<br>▪ peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, serta<br>▪ peningkatan kesetaraan dan keadilan bagi semua Masyarakat Nagan Raya,<br>▪ Penyusunan/perumusan kebijakan spesifik di bidang hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban, sosial dan ekonomi, serta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.<br>▪ Pemberian kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah garapan, pemberdayaan masyarakat, | ▪ Peningkatan implementasi syariat Islam melalui pembinaan akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, penguatan peran dan fungsi masjid, penguatan fungsi lembaga lainnya Penguatan peran ulama<br>▪ optimalisasi Pengelolaan zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal dan meningkatkan Kepatuhan membayarnya<br>▪ Peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah serta pendidikan vokasi untuk dayah<br>▪ Menciptakan Nagan Raya yang aman, damai, adil, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas perdamaian, peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, serta peningkatan kesetaraan dan keadilan bagi semua Masyarakat Nagan Raya<br>▪ Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis HAM, yang diimplementasikan melalui kebijakan spesifik di bidang hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban, sosial dan ekonomi, serta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.<br>▪ Pemberian kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah garapan, serta penyelesaian sengketa yang adil bagi semua pihak yang terlibat, pemberdayaan masyarakat, khususnya petani penggarap, dalam memperoleh hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan, mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan mediasi, serta menghindari kekerasan dan konflik yang berkepanjangan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | ▪ penyelesaian sengketa yang adil, dan peningkatan produktivitas pertanian | peningkatan produktivitas pertanian melalui penyelesaian sengketa tanah garapan. |
| 2 | **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, terampil, dan berkarakter** | ▪ Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, pengembangan literasi, penyediaan sarana dan prasana sesuai standar, regulasi bantuan pendidikan,<br>▪ Mengembangkan Pembelajaran dan Kurikulum yang mengakomodasikan kebutuhan Siswa (Berdiferensiasi) dan kurikulum berbasis talenta dan karakter, Meningkatkan Kompetensi dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan,<br>▪ pengembangan literasi inovatif<br>▪ §peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja global bagi pemuda<br>▪ penciptaan ekosistem kewirausahaan<br>▪ peningkatan keterampilan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi peningkatan partisipasi aktif dalam kegiatan positif yang membangun karakter<br>▪ penguatan jaringan dan kolaborasi antar pemuda dengan berbagai pihak<br>▪ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan kapasitas olahragawan Peningkatan pelaksanaan event olahraga<br>▪ Pengembangan Program kepramukaan yang Inklusif dan Beragam melalui Modernisasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran kepramukaan agar relevan dengan perkembangan zaman dan minat generasi | ▪ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.aga kependidikan<br>▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, erbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.<br>▪ Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pembangunan ekosistem literasi yang mendukung pengembangan literasi inovatif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, keluarga, dan masyarakat.<br>▪ pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja global, penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas, peningkatan keterampilan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan partisipasi aktif dalam |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | muda, Peningkatan Kualitas Pembina dan Pelatih, Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan: | kegiatan positif yang membangun karakter, serta penguatan jaringan dan kolaborasi antar pemuda dengan berbagai pihak, guna menciptakan generasi muda yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing tinggi.<br>▪ Pembangunan ekosistem yang komprehensif melalui peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar, pengembangan SDM berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan atlet, peningkatan kualitas event olahraga untuk prestasi dan sport tourism, serta penguatan pendanaan olahraga yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan akhir meningkatkan prestasi olahraga dan memberdayakan masyarakat melalui olahraga<br>▪ pengembangan program yang inklusif dan beragam melalui modernisasi kurikulum dan metode pembelajaran kepramukaan agar relevan dengan perkembangan zaman dan minat generasi muda, peningkatan kualitas pembina dan pelatih melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung kegiatan kepramukaan yang optimal, peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung program kepramukaan |
| 3 | **Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Merata, Responsif Penyandang** | ▪ Peningkatan infrastruktur kesehatan, Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Pemanfaatan teknologi informasi<br>Peningkatan akses jangkauan kesehatan masyarakat,<br>Penguatan sistem rujukan<br>▪ Pendidikan dan Sosialisasi<br>▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Sarana Prasarana<br>▪ Pemberdayaan Masyarakat<br>▪ Kerjasama Lintas Sektor | ▪ Pemerataan dan peningkatan akses layanan serta kualitas kesehatan sesuai standar dan pemenuhan capaian SPM kesehatan, Pemerataan Tenaga Kesehatan /Tenaga Medis Profesional secara merata,, Peningkatan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit<br>▪ Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan<br>▪ penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan melalui pemberian santunan dan bantuan modal yang tepat sasaran |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | **Disabilitas, Kelompok Rentan, Inklusi Sosial, Gender, dan Anak** | ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program PHBS.<br>▪ Pemberian santunan kepada Anak Yatim, Fakir miskindan janda serta Menyediakan subsidi dan bantuan modal kepada masyarakat miskin dan<br>▪ Peningkatan kesejahteraan PMKS<br>▪ Peningkatan Kualitas Pendidikan meningkatkan keterampilan praktis.<br>▪ Peningkatan kualitas dan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan, memperluas jangkauan program pelatihan keterampilan, terutama di daerah-daerah terpencil.<br>▪ Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja, Membangun platform digital yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja. Memperkuat jaringan pengaman sosial untuk kelompok rentan. Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan<br>▪ Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, politik, sosial budaya, memberdayakan perempuan secara ekonomi, meningkatkan kesetaraan gender.Perberdayaan Perempuan dan Peningkatan kapasitas kelompok perempuan.<br>▪ Perkuatan peran keluarga dalam upaya preventif terkait penanganan persoalan sosial, kasus kekerasan, narkoba, dll | untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim, fakir miskin, dan janda mendorong dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.<br>▪ meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PMKS melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan mencakup aspek-aspek rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan psikososial. Kebijakan ini menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat PMKS, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan PMKS<br>▪ mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, memperluas akses terhadap pelatihan keterampilan terutama di daerah terpencil, membangun sistem informasi pasar kerja yang efisien, memperkuat jaringan pengaman sosial bagi kelompok rentan, serta menjalin kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan dan pelatihan, guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.<br>▪ peningkatan akses dan kesetaraan perempuan di semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, politik, sosial budaya, dan ekonomi, melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan kapasitas kelompok perempuan, dan penguatan peran keluarga dalam pencegahan masalah sosial, didukung oleh strategi penyusunan kebijakan responsif gender, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas ASN, dan kerja sama lintas sektor, yang diimplementasikan melalui komitmen bersama, rencana aksi terukur, serta monitoring dan evaluasi berkala, guna mewujudkan masyarakat |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | ▪ Penguatan Sistem Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi, Peningkatan Akses Layanan. Dan Pemberdayaan Anak dan Keluarga<br>▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Keluarga Berencana (KB), Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kesadaran dan Perubahan Perilaku, Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti kebijakan tentang usia perkawinan dan cuti melahirkan | yang adil dan setara di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan dan keluarga memiliki peran yang kuat dalam mencegah masalah sosial.<br>▪ menguatkan regulasi dan kebijakan perlindungan anak serta pemenuhan pelayanan berdasarkan kebutuhan anak,<br>▪ Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga Sejahtera |
| **4** | **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman berkualitas, merata, ramah Lingkungan dan terkoneksi antar wilayah** | ▪ Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah<br>▪ Peningkatan sarana dan prasarana kawasan strategis<br>▪ Peningkatan dan pembangunan kualitas infrastuktur pertanian<br>▪ Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan resiko bencana<br>▪ Peningkatan akses sanitasi dan air minum<br>▪ Penyediaan rumah layak huni<br>▪ Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau<br>▪ Penyediaan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif<br>▪ Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin<br>▪ Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana sentra produksi dan rumah promosi ekonomi kreatif | ▪ Pembangunan Infrastruktur difokuskan pada peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas Jalan Kabupaten, mendorong kerja sama antar kabupaten terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terkoneksi<br>▪ memastikan Infrastruktur lainnya dalam kondisi baik dan berkualitas yang merata di seluruh wilayah kecamatan.<br>▪ Infrastruktur berkualitas difokuskan pada memastikan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkan aksesibilitas antar wilayah dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan serta memastikan terpenuhinya infrastruktur dasar lainnya yang berkualitas dan ramah lingkungan. |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | ▪ Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur air bersih dan pendukung sanitasi | |
| **5** | **Mewujudkan transformasi Ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan keragaman berbasis Sumber Daya Alam lokal dan Unggulan yang berkelanjutan** | ▪ Penguatan Kemandirian Ekonomi dan Fiskal Daerah<br>▪ Peningkatan Daya Saing dan Inovasi<br>▪ Pengembangan Sektor Unggulan<br>▪ Memperkuat kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<br>▪ Mengembangkan sentra produksi olahan hasil pertanian.<br>▪ Mengembangkan sektor pariwisata halal secara komprehensif (akses, infrastruktur, paket wisata, SDM).<br>▪ Peningkatan Investasi dan Lapangan Kerja:<br>▪ Pengembangan Infrastruktur dan Pusat Pertumbuhan:<br>▪ Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan baru.<br>▪ Mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Padang Turi.<br>▪ Meningkatkan Kapasitas UMKM Sektor Unggulan. Penguatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan. | ▪ Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan fiskal daerah. dalam segala sektor termasuk kemandirian ekonimi masyarakat guna mendukung kemandirian perekonomian Aceh,<br>▪ peningkatan penguasaan Iptek, kemandirian UMKM ,kemandirian pangan, pengembangan sentra produksi olahan hasil pertanian<br>▪ pengembangan sektor pariwisata halal meliputi akses, infrastruktur, sarana dan prasarana, paket wisata, dan sumber daya manusia.<br>▪ Pengembangan industri kreatif melalui penguatan SDM dan akses modal untuk mewujudkan produktivitas ekonomi. perluasan lapangan dan kesempatan kerja, peningkatan investasi regional dan nasional dan memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran, penguatan riset dan inovasi daerah, peningkatan Kapasitas UMKM Sektor Unggulan, menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Padang Turi. |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | ▪ Peningkatan akses modal bagi UMKM dan industri kreatif.Mencapai kemandirian pangan.<br>Peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran bagi UMKM.<br>▪ Penguatan jaringan dan kemitraan antar pelaku ekonomi | |
| **6** | **Mewujudkan Ketahanan Ekologis dan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan dan ketahanan Sosial Budaya berkelanjutan** | ▪ Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi dengan Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat adat, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan Membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam<br>▪ Pengendalian Kerusakan Lingkungan dengan mencegah kerusakan hutan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, melakukan koordinasi efektif dalam penanganan penambangan ilegal.<br>▪ Mengintensifkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.<br>▪ Optimalisasi Investasi Ramah Lingkungan dengan mendorong investasi yang berwawasan lingkungan.<br>▪ Mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi.<br>▪ Memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Menegakkan | ▪ Ketahanan ekologis peningkatan kerjasama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan.<br>▪ Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Indistri Terpadu (KIT) Padang Turi, Kecamatan Kuala Pesisir,<br>▪ penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.<br>▪ Ketahanan sosial budaya difokuskan pada terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara pastisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | hukum secara konsisten terhadap pelanggaran lingkungan.<br>▪ Penerapan Energi Bersih dan Ramah Lingkungan dengan penggunaan energi bersih dan terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang merusak lingkungan.<br>▪ Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan<br>▪ Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor.<br>▪ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.<br>▪ Penilaian dan Pemetaan Risiko, Mitigasi Bencana, Kesiapsiagaan Bencana, dan Tanggap Darurat dan Pemulihan<br>▪ Kolaborasi dan Koordinasi, Kemitraan dengan Berbagai Pihak: | |
| 7 | **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan beritegritas** | ▪ Reformasi birokrasi yang komprehensif.<br>▪ Penguatan pengawasan internal dan eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.<br>▪ Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik informatif<br>▪ Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja<br>▪ Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.<br>▪ Membangun sistem pengendalian internal yang komprehensif dan terintegrasi. | ▪ Transformasi Tatakelola dititik beratkan pada terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang adaptif<br>▪ pengembangan sistem pengawasan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi dan kolusi, kemandirian masyarakat dalam berbagai sektor.<br>▪ penerapan total sistem pemerintahan berbasis teknologi informasil termasuk pada pusat pelayanan terpadu satu pintu<br>▪ mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, mencegah |

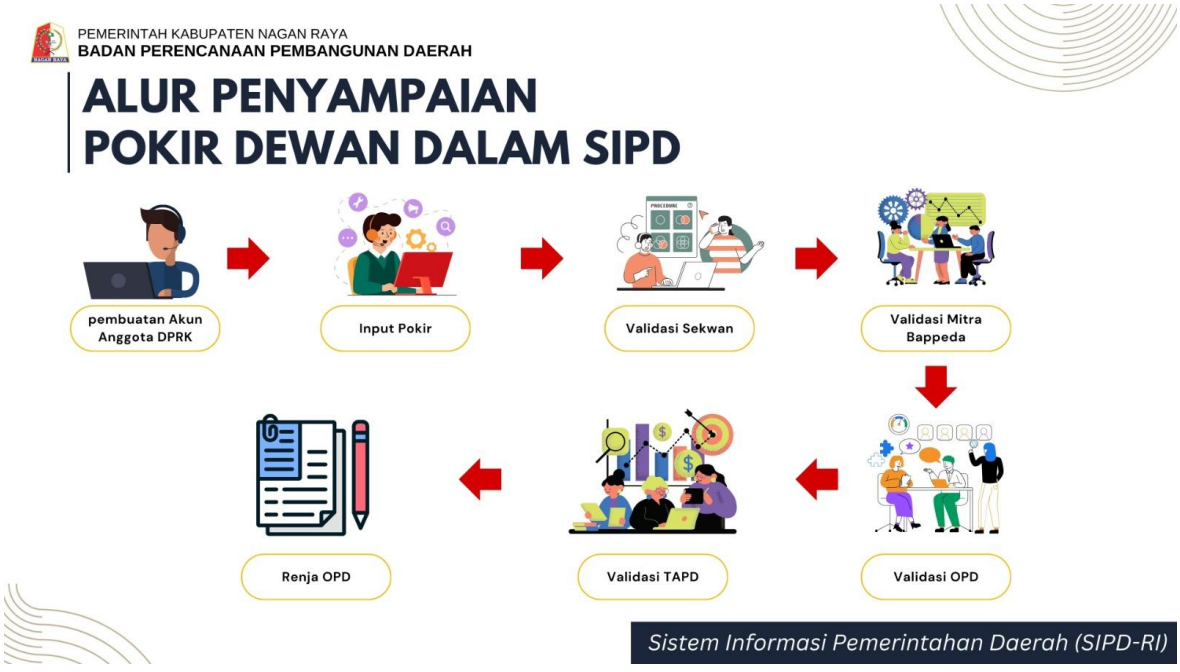
| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | ▪ Meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan<br>▪ Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan real-time.<br>▪ Penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM.<br>▪ Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong:<br>▪ Penguatan Partisipasi Masyarakat<br>▪ Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas<br>▪ Pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)<br>▪ Peningkatan Kualitas Layanan Publik sesuai Standar Pelayanan Publik | penyimpangan, meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.<br>▪ SDM ASN yang kompetitif dan profesional melalui optimalisasi sistem meritokrasi,<br>▪ meningkatkan tata kelola gampong melalui penguatan regulasi dan kelembagaan dengan menyusun dan memperbarui peraturan desa serta memperkuat peran *Tuha Peut*, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa/gampong dengan memastikan alokasi yang tepat sasaran, mendorong kerja sama antar Gampong dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan melalui peran pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan partisipasi masyarakat.<br>▪ Pelaksanaan mekanisme pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik |
| **8** | **Mewujudkan Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan indentitas Adat istiadat, dan Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya** | ▪ Dokumentasi dan revitalisasi tradisi lisan, seni pertunjukan, dan kerajinan lokal. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Pengembangan destinasi wisata budaya berbasis kearifan lokal. Penyelenggaraan festival dan acara budaya secara berkala. .Mendukung kegiatan kelompok-kelompok yang melestarikan budaya lokal.<br>▪ Penguatan lembaga adat dan peran tokoh adat dalam penyelesaian masalah sosial.Penyusunan regulasi yang mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, Peningkatan kapasitas tokoh adat melalui pelatihan dan pendidikan.<br>▪ Sosialisasi peran dan fungsi lembaga adat kepada masyarakat.<br>▪ Menjalin kemitraan dengan Lembaga pemerintahan. | ▪ melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal melalui serangkaian tindakan terpadu, yaitu mendorong penelitian dan dokumentasi budaya untuk memastikan tradisi tetap hidup,<br>▪ mengintegrasikan muatan lokal dalam pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai budaya pada generasi muda, membangun infrastruktur pariwisata budaya yang ramah lingkungan sebagai sarana promosi<br>▪ memberikan dukungan finansial dan fasilitas untuk penyelenggaraan acara budaya, serta memberikan ruang dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang aktif dalam pelestarian budaya<br>▪ memperkuat peran lembaga adat dalam pembangunan melalui pengakuan dan dukungan sebagai mitra pemerintah, mendorong harmonisasi hukum adat dan hukum positif, meningkatkan kompetensi tokoh adat melalui pelatihan, mengembangkan media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi tentang peran adat, |

| NO | VISI/ MISI/ | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | | serta membangun forum komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah untuk membahas isu-isu terkait adat |

### 4.2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Berdasarkan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 867 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas anggaran. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan tahapan sebagai berikut:

**Gambar 4.3**
**Alur Penyampaian Pokir Pokir Dewan Dalam SIPD**




Pokok pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu wujud nyata peran politik legislatif dalam memperjuangkan Aspirasi Masyarakat pada proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya. Melalui mekanisme, DPRD menyampaikan 411 usulan yang kemudian dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk diselaraskan dengan prioritas Pembangunan. Dari total usulan tersebut, sebanyak 349 dapat diakomodir dalam

RKPK Tahun 2026, sementara sisanya belum dapat ditampung sepenuhnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan perlu penyesuaian dengan program strategis daerah. Kkondisi ini mencerminkan adanya proses politik yang dinamis, dimana aspirasi legislatif harus diharmonisasikan dengan kebijakan teknokratis agar menghasilkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Kamus usulan pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD tahun Perencanaan 2026 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**
**Laporan Kamus Usulan Pokir Tahun 2026**
**Kabuapten Nagan Raya**

| Bidang Urusan | Uraian Permasalahan | OPD Tujuan | Program |
|---|---|---|---|
| **Aceh** | | | |
| | Masih Rendahnya Standarisasi Dayah | DINAS SYARIAT ISLAM | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH |
| | Belum Optimalnya Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam | DINAS SYARIAT ISLAM | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH |
| **Kelautan dan Perikanan** | | | |
| | Masih Kurang Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
| | Belum Optimal Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
| **Kepemudaan dan Olahraga** | | | |
| | Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| **Kesehatan** | | | |
| | Masih Kurang Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan | DINAS KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | Masih Tingginya Angka Stunting | DINAS KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | |
| | Masih Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi Produk UMKM | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| **Lingkungan Hidup** | | | |
| | Belum Optimalnya Pencegahan Kerusakan Lingkungan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| **Pangan** | | | |
| | Masih Kurangnya Ketahanan Pangan | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | |

| Bidang Urusan | Uraian Permasalahan | OPD Tujuan | Program |
|---|---|---|---|
| | Belum Optimalnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Air Bersih | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| | Kurang Meratanya Pembangunan Jalur Antar Desa/Gampong yang Strategis | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Air Limbah | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| **Pendidikan** | | | |
| | Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan yang Memadai | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| **Pertanian** | | | |
| | Masih Rendahnya Sarana dan Prasarana Perkebunan | DINAS PERKEBUNAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pertanian | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | |
| | Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Umum Yang Merata | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| **Tenaga Kerja** | | | |
| | Masih Tinggi Angka Pengangguran | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |

Perumusan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2026 dilakukan dengan mempedomani pada tema RKPK Nagan Raya Tahun 2026, RPJMA Tahun 2026, Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2026 adalah **"Memantapkan Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan untuk Kemandirian Ekonomi serta Pengentasan Kemiskinan".**

Untuk pencapaian Tema 2026 perlu adanya rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya diantaranya sebagai berikut :

1. Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal;
2. Mengembangkan Ekonomi Keunggulan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang Berkualitas;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
7. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi;
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih.

**Gambar 4.4.**
**Fokus Pembangunan Nagan Raya Tahun 2026**




Terkait pencapaian pada SPM khususnya bidang pendidikan merujuk pada Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dapat dilihat indikator pencapaian target sebagai berikut:

**Tabel 4.12**
**Daftar Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2026 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | Persentase | 79,29 | 79,29 |
| 2 | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Persentase | 98,50 | 98,50 |
| 3 | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | Persentase | 21,18 | 21,18 |
| 4 | Iklim Keamanan SMP | Nilai | 71,44 | 71,44 |
| 5 | Iklim Kebhinekaan SD | Nilai | 68,44 | 68,44 |
| 6 | Iklim Kebinekaan SMP | Nilai | 70,59 | 70,59 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | 59,77 | 59,77 |
| 8 | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | 60,00 | 60,00 |
| 9 | Iklim Keamanan SD | Nilai | 72,78 | 72,78 |
| 10 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 53,42 | 53,42 |
| 11 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 50,55 | 50,55 |
| 12 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 63,36 | 63,36 |
| 13 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,96 | 58,96 |
| 14 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 60,98 | 60,98 |
| 15 | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV | % | 79,44 | 79,44 |

Selain itu, Kegiatan untuk mencapai target SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.13**
**Daftar Kegiatan/ Subkegiatan untuk Pencapaian SPM**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026**

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5,610,302,870.86 |
| 2 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 661,465,450.00 |
| 3 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 152,256,150.00 |
| 4 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 117,130,000.00 |
| 5 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2,037,634,408.60 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 735,540,000.00 |
| 7 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 120,151,550.00 |
| 8 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 91,074,600.00 |
| 9 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4,454,200,000.00 |
| 10 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 204,748,400.00 |
| 11 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 661,465,450.00 |
| 12 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 117,130,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 735,540,000.00 |
| 14 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 120,151,550.00 |
| 15 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 17,852,000.00 |
| 16 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4,454,200,000.00 |
| 17 | A | SPM Bidang Pendidikan | 1 | Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 204,748,400.00 |
| 18 | A | SPM Bidang Pendidikan | 2 | Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 661,465,450.00 |
| 19 | A | SPM Bidang Pendidikan | 2 | Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 117,130,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | A | SPM Bidang Pendidikan | 2 | Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1,500,000,000.00 |
| 21 | A | SPM Bidang Pendidikan | 2 | Pendidikan Anak Usia Dini | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 204,748,400.00 |
| 22 | A | SPM Bidang Pendidikan | 44 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4,454,200,000.00 |
| 23 | A | SPM Bidang Pendidikan | 44 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 225,000,000.00 |
| 24 | A | SPM Bidang Pendidikan | 44 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2,037,634,408.60 |
| 25 | A | SPM Bidang Pendidikan | 44 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4,454,200,000.00 |
| 26 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5,610,302,870.86 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 661,465,450.00 |
| 28 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 152,256,150.00 |
| 29 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 117,130,000.00 |
| 30 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 120,151,550.00 |
| 31 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 1,029,655,000.00 |
| 32 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 91,074,600.00 |
| 33 | A | SPM Bidang Pendidikan | 45 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 225,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A | SPM Bidang Pendidikan | 47 | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 735,540,000.00 |
| 35 | A | SPM Bidang Pendidikan | 47 | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 661,465,450.00 |
| 36 | A | SPM Bidang Pendidikan | 47 | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 735,540,000.00 |
| 37 | A | SPM Bidang Pendidikan | 50 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 661,465,450.00 |
| 38 | A | SPM Bidang Pendidikan | 50 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 117,130,000.00 |
| 39 | A | SPM Bidang Pendidikan | 50 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1,500,000,000.00 |
| 40 | A | SPM Bidang Pendidikan | 50 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 204,748,400.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | SPM Bidang Kesehatan | 10 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 597,315,000.00 |
| 42 | B | SPM Bidang Kesehatan | 11 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 22,178,850.00 |
| 43 | B | SPM Bidang Kesehatan | 13 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 90,000,000.00 |
| 44 | B | SPM Bidang Kesehatan | 14 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100,000,000.00 |
| 45 | B | SPM Bidang Kesehatan | 15 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 267,132,100.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | B | SPM Bidang Kesehatan | 16 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 262,800,000.00 |
| 47 | B | SPM Bidang Kesehatan | 17 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 90,000,000.00 |
| 48 | B | SPM Bidang Kesehatan | 55 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 994,308,500.00 |
| 49 | B | SPM Bidang Kesehatan | 56 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 276,512,900.00 |
| 50 | B | SPM Bidang Kesehatan | 57 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 97,783,500.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 51 | B | SPM Bidang Kesehatan | 58 | Pelayanan Kesehatan Balita | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 64,215,000.00 |
| 52 | B | SPM Bidang Kesehatan | 59 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 597,315,000.00 |
| 53 | B | SPM Bidang Kesehatan | 6 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 994,308,500.00 |
| 54 | B | SPM Bidang Kesehatan | 60 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 22,178,850.00 |
| 55 | B | SPM Bidang Kesehatan | 62 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 90,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 56 | B | SPM Bidang Kesehatan | 63 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100,000,000.00 |
| 57 | B | SPM Bidang Kesehatan | 64 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 267,132,100.00 |
| 58 | B | SPM Bidang Kesehatan | 65 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 262,800,000.00 |
| 59 | B | SPM Bidang Kesehatan | 66 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 90,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | B | SPM Bidang Kesehatan | 7 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 276,512,900.00 |
| 61 | B | SPM Bidang Kesehatan | 8 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 97,783,500.00 |
| 62 | B | SPM Bidang Kesehatan | 9 | Pelayanan Kesehatan Balita | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 64,215,000.00 |
| 63 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 20 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 332,250,000.00 |
| 64 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 20 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 200,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 20 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 500,000,000.00 |
| 66 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 21 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 100,000,000.00 |
| 67 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 67 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 332,250,000.00 |
| 68 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 67 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 200,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 67 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 500,000,000.00 |
| 70 | C | SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 68 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 100,000,000.00 |
| 71 | D | SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 24 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 5,000,000.00 |
| 72 | D | SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 25 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 1,000,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | D | SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 73 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 1,000,000,000.00 |
| 74 | D | SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 74 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 5,000,000.00 |
| 75 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 28 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 86,400,000.00 |
| 76 | E | SPM Bidang Ketentraman dan | 31 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 158,317,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ketertiban Umum | | | | | | |
| 77 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 31 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 125,063,700.00 |
| 78 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 32 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 72,661,000.00 |
| 79 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 76 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 86,400,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 78 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | 79,373,481.00 |
| 81 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 79 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 158,317,000.00 |
| 82 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 79 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 125,063,700.00 |
| 83 | E | SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 80 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 72,661,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 19,999,865.00 |
| 85 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1,147,660,000.00 |
| 86 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 55,316,811.00 |
| 87 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | 184,255,981.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | |
| 88 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 82,006,000.00 |
| 89 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43,258,000.00 |
| 90 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | 162,287,500.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | 60,595,000.00 |
| 92 | F | SPM Bidang Sosial | 34 | Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |
| 93 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 19,999,865.00 |
| 94 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1,147,660,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | |
| 95 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 55,316,811.00 |
| 96 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 184,255,981.00 |
| 97 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 82,006,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43,258,000.00 |
| 99 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | 162,287,500.00 |
| 100 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | 60,595,000.00 |
| 101 | F | SPM Bidang Sosial | 35 | Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | |
| 102 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 19,999,865.00 |
| 103 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1,147,660,000.00 |
| 104 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 55,316,811.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 184,255,981.00 |
| 106 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 82,006,000.00 |
| 107 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43,258,000.00 |
| 108 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Penyediaan Alat Bantu | 162,287,500.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | |
| 109 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | 60,595,000.00 |
| 110 | F | SPM Bidang Sosial | 36 | Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |
| 111 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 19,999,865.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1,147,660,000.00 |
| 113 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 55,316,811.00 |
| 114 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 184,255,981.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 82,006,000.00 |
| 116 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43,258,000.00 |
| 117 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | 162,287,500.00 |
| 118 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Penyediaan Permakanan | 60,595,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | |
| 119 | F | SPM Bidang Sosial | 37 | Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |
| 120 | F | SPM Bidang Sosial | 38 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | 42,000,000.00 |
| 121 | F | SPM Bidang Sosial | 38 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 34,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | daerah kabupaten/kota | | | | |
| 122 | F | SPM Bidang Sosial | 38 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | 103,900,000.00 |
| 123 | F | SPM Bidang Sosial | 38 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | F | SPM Bidang Sosial | 38 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 100,000,000.00 |
| 125 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 19,999,865.00 |
| 126 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1,147,660,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 55,316,811.00 |
| 128 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 184,255,981.00 |
| 129 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 82,006,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 43,258,000.00 |
| 131 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | 162,287,500.00 |
| 132 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | 60,595,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | F | SPM Bidang Sosial | 86 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |
| 134 | F | SPM Bidang Sosial | 87 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | 42,000,000.00 |
| 135 | F | SPM Bidang Sosial | 87 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 34,000,000.00 |

| NO | ABJAD | SPM | KODE LAYANAN | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | F | SPM Bidang Sosial | 87 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | 103,900,000.00 |
| 137 | F | SPM Bidang Sosial | 87 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | 31,546,290.00 |
| 138 | F | SPM Bidang Sosial | 87 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 100,000,000.00 |

Dalam hal Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya , Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.14**
**Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dengan Prioritas Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2026**

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 45,000,000.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 30,000,000.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 35,362,550.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 199,959,700.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 155,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 970,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 260,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 2,000,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,300,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 200,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 1,032,250,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13,310,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3,148,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 500,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 50,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 25,066,556,575.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 711,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 1,150,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 2,479,600,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1,210,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 1,331,640,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 15,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3,030,800,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 3,500,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 100,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 11,983,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 402,820,000.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota | 41,340,000.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | - | DINAS PERHUBUNGAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | DINAS PERHUBUNGAN |
| Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 579,372,841.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 283,380,700.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas | Mewujudkan Tata Kelola | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Lingkungan Hidup | Pemerintahan yang Baik dan Bersih | | | |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 72,661,000.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 19,554,076.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 70,716,473.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 246,000,000.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 28,169,815.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7,092,375.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 42,161,870.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 48,142,606.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 43,816,275.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 433,776,252.50 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 212,130,402.50 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 278,853,880.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 8,979,770.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 2,753,531,193.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pembangunan Prasarana Pertanian | 2,995,772,461.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 66,300,000.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengembangan Prasarana Pertanian | 311,787,000.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 300,000,000.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 1,300,000,000.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 318,882,000.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pembangunan Prasarana Pertanian | 2,341,675,475.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 298,505,000.00 | DINAS PERKEBUNAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 716,188,000.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 88,680,000.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 754,965,660.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 49,874,500.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | DINAS SOSIAL |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 167,550,000.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 88,555,230.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 288,775,000.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 428,900,000.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1,766,925,582.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 19,999,865.00 | DINAS SOSIAL |
| | Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 500,000,000.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | 14,075,241.50 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | 13,498,800.60 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 419,657,213.50 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 29,270,175.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 11,893,000.00 | KECAMATAN BEUTONG |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | dan Perdamaian Aceh | | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 3,430,500.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 9,751,000.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 12,508,000.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 7,451,078.00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 9,863,663.00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 19,792,069.00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 15,027,402.00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14,113,060.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2,739,450.00 | KECAMATAN KUALA |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 70,201,840.00 | KECAMATAN KUALA |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 6,420,000.00 | KECAMATAN KUALA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 68,088,010.00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 5,250,000.00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 15,120,940.00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 137,970,532.00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3,200,000.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 91,018,192.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 700,000.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6,850,000.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 49,350,000.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 9,300,000.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 79,997,210.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | 55,241,355.00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | 99,721,364.00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | 71,079,957.50 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 824,150,845.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1,689,433,590.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 75,011,482.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 19,983,391.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 996,776,017.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5,640,866,870.86 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 220,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | - | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 6,481,014,550.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1,673,620,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 34,592,598,741.39 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 14,668,341,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 73,276,000.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 92,796,000.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 116,549,200.00 | DINAS KESEHATAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 264,735,800.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 248,225,000.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 211,402,000.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 213,961,000.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1,095,922,700.00 | DINAS KESEHATAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Peningkatan Pelayanan BLUD | 74,839,652,036.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 16,144,340,165.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 23,081,422,752.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 258,970,827.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 1,436,007,518.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 641,327,376.41 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | | dan Pengelolaan SDA | | | |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 250,934,492.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 65,490,000.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Pengelolaan Sampah | 658,495,987.59 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50,480,000.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 559,064,973.20 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 100,000,000.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | | dan Pengelolaan SDA | | | |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 137,314,400.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 55,090,000.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35,638,279.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 200,129,640.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Transformasi Digital yang Terintegrasi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 135,415,000.00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Transformasi Digital yang Terintegrasi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 870,859,122.50 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Transformasi Digital yang Terintegrasi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 11,655,000.00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Transformasi Digital yang Terintegrasi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 161,658,221.25 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | - | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 349,264,159.50 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 7,820,000.70 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Penataan Organisasi | 2,475,300.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 23,700,560.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 3,943,058.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 350,800,000.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 20,176,120.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 520,000,000.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 200,000,000.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 129,941,645.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 259,343,820.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 214,000,000.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 498,345,361.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 264,000,000.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 250,000,000.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 886,081,234.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2,027,891,696.50 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 267,301,862.50 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 484,853,494.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 474,552,837.50 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 342,927,437.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 210,003,457.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 140,683,062.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 630,468,870.50 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1,670,243,902.00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 899,178,833.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 1,224,221,970.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2,681,673,283.00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 44,164,500.00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 232,000,000,000.00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Mutasi dan Promosi ASN | 321,467,965.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 192,038,610.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengembangan Kompetensi ASN | 154,767,400.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 310,184,145.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 131,387,940.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | 11,798,392,256.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pengelolaan Pendidikan Dayah | 3,301,816,559.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam | 505,592,541.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam | 1,287,454,082.48 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama | - | DINAS SYARIAT ISLAM |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | 165,947,435.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran | 2,122,247,350.87 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah | 2,129,869,201.15 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh | 32,388,950.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | 63,076,624.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penerbitan Izin Membuka Tanah | 38,563,241.00 | DINAS PERTANAHAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 81,458,159.00 | DINAS PERTANAHAN |
| | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim | Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan | 72,635,617.50 | DINAS PERTANAHAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72,141,568.00 | DINAS PERTANAHAN |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | 7,000,000,000.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam | 5,000,000.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | 60,458,387.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 162,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 198,933,344,902.25 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,066,444,574.50 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 659,010,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 305,900,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,110,390,991.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 48,000,000.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,296,800,934.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 616,039,432.50 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50,000,000.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 250,401,104.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,000,000.00 | DINAS SYARIAT ISLAM |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 665,485,472.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 82,829,952.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 18,500,000.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 302,559,775.75 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 500,000.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 104,716,644,922.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,777,754,300.00 | DINAS KESEHATAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 940,051,404.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5,676,200,836.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 91,076,609.00 | DINAS KESEHATAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 298,000,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,936,982,862.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 782,313,966.50 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 980,873,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 273,726,000.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 802,614,958.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27,029,894.50 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,418,813,910.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 762,897,545.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 262,000,000.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 303,108,322.00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,053,563,780.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 318,474,519.94 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 148,759,200.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 86,400,000.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 51,600,000.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh | Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh | - | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,176,954,300.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 44,400,000.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,859,821,577.50 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 444,251,298.50 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 381,057,000.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,690,069,340.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | DINAS SOSIAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,174,618,833.00 | DINAS SOSIAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 662,303,524.00 | DINAS SOSIAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96,450,000.00 | DINAS SOSIAL |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 455,921,104.00 | DINAS SOSIAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16,485,000.00 | DINAS SOSIAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,063,307,074.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 213,006,914.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 25,400,000.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 165,806,012.00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,420,306,835.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 307,936,806.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 2,493,645,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 19,771,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 47,563,070.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 117,142,760.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 445,800,068.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 338,458,072.50 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 276,785,788.50 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40,000,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 12,638,500.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 3,715,000,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 328,448,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 55,482,500.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 135,335,610.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15,000,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10,000,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 431,774,206.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyelenggaraan Penataan Desa | - | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,415,000.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | DINAS PERTANAHAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,308,191,100.00 | DINAS PERTANAHAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 242,890,990.00 | DINAS PERTANAHAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75,526,000.00 | DINAS PERTANAHAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13,890,692.50 | DINAS PERTANAHAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 170,940,000.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,404,504,171.50 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 687,487,607.50 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50,037,900.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,095,742,565.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 5,407,249,100.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,404,636,489.50 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 430,557,583.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelayanan Pencatatan Sipil | 28,991,740.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 28,137,990.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47,750,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 27,591,740.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 284,474,613.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyusunan Profil Kependudukan | 27,561,990.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32,476,500.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 114,600,000.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,947,325,556.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 219,699,469.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 367,154,150.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6,500,000.00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 976,707,360.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,994,425.00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,873,870,704.00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 208,518,315.81 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20,000,000.00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 618,182,736.00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,079,509.44 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,657,127,859.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 164,464,193.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,224,301,300.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 287,698,000.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,879,859,948.00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 284,247,569.00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39,000,000.00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 214,882,604.00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 500,637,293.00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 150,595,066.50 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32,856,000.00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34,143,600.00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 521,058,836.00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,433,316,519.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 245,523,963.49 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 59,936,000.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 285,410,224.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26,243,440.00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18,000,000.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,554,587,624.50 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 734,163,442.50 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,750,000.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 716,164,324.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21,354,438.00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,294,943,370.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 465,123,498.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 63,500,000.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 467,023,863.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23,500,845.00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9,557,995,636.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 598,943,445.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 87,800,000.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 541,829,390.00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,665,092,693.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 623,601,040.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57,870,000.00 | DINAS PERKEBUNAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 253,539,880.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37,500,000.00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 52,107,618.50 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 351,862,119.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10,861,034,185.50 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Tata Pemerintahan | 1,183,046,506.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4,375,563,698.00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 565,832,407.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1,731,944,500.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 451,689,305.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 547,990,822.50 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 411,023,886.50 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 939,193,195.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 58,886,838.00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,390,874,000.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penataan Organisasi | 900,184,190.50 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 172,383,000.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 540,953,555.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,602,817,480.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65,178,915.00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 987,022,301.00 | KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,783,168,168.20 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2,606,818,180.50 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Fasilitasi Tugas DPRD | 6,239,278,000.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Layanan Administrasi DPRD | 218,105,630.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 632,900,420.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 331,090,300.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 196,087,030.00 | SEKRETARIAT DPRK |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 616,843,260.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 476,315,688.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 47,773,800.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1,829,492,135.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,897,061,040.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 780,793,650.00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12,249,776,719.00 | DPRK |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 69,398,636.50 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,395,409,783.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 778,385,829.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 129,153,000.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 788,603,650.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 111,606,793.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 45,025,920,543.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,167,315,826.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 749,069,745.00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2,289,002,996.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1,351,570,026.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9,278,236,785.00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 211,435,795.50 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,782,028,641.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 677,059,570.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123,600,000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,737,500.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 270,050,255.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24,084,666.00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,204,098,719.00 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,278,025,373.00 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 489,339,728.46 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 385,038,118.00 | INSPEKTORAT |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pendampingan dan Asistensi | 690,776,697.85 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 528,545,370.00 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 409,513,161.00 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 814,375,719.00 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2,510,976,814.69 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 134,956,000.00 | INSPEKTORAT |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | KECAMATAN BEUTONG |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,818,109,968.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 138,268,225.80 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29,400,000.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | KECAMATAN BEUTONG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 212,885,172.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,448,000.00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,872,173,827.00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 136,946,031.00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17,500,000.00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 261,987,027.00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,866,946,347.00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 80,191,232.00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47,500,000.00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 245,989,928.00 | KECAMATAN SEUNAGAN |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,127,000.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,724,128,559.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 35,245,952.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 108,800,000.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 31,746,000.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46,866,123.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,482,632.00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,021,913,590.00 | KECAMATAN KUALA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 113,486,708.00 | KECAMATAN KUALA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29,300,000.00 | KECAMATAN KUALA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 152,790,736.00 | KECAMATAN KUALA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | KECAMATAN KUALA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,105,431,481.00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 143,338,183.00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 13,993,300.00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 144,670,212.00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,538,944,772.00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 129,955,913.50 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30,000,000.00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 135,636,428.00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10,000,000.00 | KECAMATAN TADU RAYA |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4,500,000.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,529,339,002.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 124,657,731.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26,000,000.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,170,000.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 383,001,518.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14,774,020.00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,032,200,470.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 75,517,022.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 27,500,000.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 142,405,736.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8,709,156.00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10,200,000.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,043,357,289.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 120,017,544.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 52,969,566.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 27,500,000.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 18,841,444.00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,772,406,209.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 178,535,898.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31,089,900.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 35,520,000.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 171,531,552.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13,321,134.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 784,279,680.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 471,540,092.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 133,250,000.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |

| PRIORITAS | | | KEGIATAN | PAGU | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | PROVINSI | KABUPATEN | | | |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 49,816,800.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 676,691,196.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17,861,040.00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 757,517,501.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 127,322,491.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 23,448,000.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 464,239,090.00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |

Dalam hal Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPK Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada Pelaksanaan Tahun 2025 dan RKPK Nagan Raya Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.15**
**Konsistensi Tujuan dan Sasaran**
**RPK Nagan Raya Pelaksanaan Tahun 2026 dan RKPK Nagan Raya Tahun 2026**

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **1** | **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi** | | | **Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu** | **Persen** | **0.95** | **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi** | | | **Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu** | **Persen** | **0.95** |
| 1.1 | | Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran | | Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu | persen | 0.95 | | Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran | | Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu | persen | 0.95 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | lembaga demokrasi. | | | | | | lembaga demokrasi. | | | | |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pemahaman Wawasan Kebangsaan | Orang | 70 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pemahaman Wawasan Kebangsaan | Orang | 70 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Kegiatan pembinaan politik daerah | Kegiatan | Ada | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Kegiatan pembinaan politik daerah | Kegiatan | Ada |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tujuan** | **Sasaran** | **Program** | **Indikator** | **Satuan** | **Target** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Program** | **Indikator** | **Satuan** | **Target** |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Ada/tidak | Ada | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Ada/tidak | Ada |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing | Persen | 100 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing | Persen | 100 |
| **2** | **Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan** | | | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | **Persen** | **68** | **Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan** | | | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** | **Persen** | **68** |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | **pelayanan publik** | | | | | | **pelayanan publik** | | | | | |
| 2.1 | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | | Opini BPK | WTP/WDP | WTP | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | | Opini BPK | WTP/WDP | WTP |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| | | | | Opini Audit BPK atas laporan keuangan | WTP/WDP | WTP | | | | Opini Audit BPK atas laporan keuangan | WTP/WDP | WTP |
| | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP |
| | | | | Persentase SILPA | % | 0.6 | | | | Persentase SILPA | % | 0.6 |
| | | | | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 0.54 | | | | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 0.54 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | % | 1.08 | | | | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | % | 1.08 |
| | | | | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 21.65 | | | | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 21.65 |
| | | | | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10.82 | | | | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10.82 |
| | | | | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | % | 0.71 | | | | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | % | 0.71 |
| | | | | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 10.82 | | | | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 10.82 |
| | | | | Penetapan APBD | Tepat/Tidak Tepat Waktu | Tepat waktu | | | | Penetapan APBD | Tepat/Tidak Tepat Waktu | Tepat waktu |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini Audit BPK atas laporan keuangan | WTP/WDP | WTP | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini Audit BPK atas laporan keuangan | WTP/WDP | WTP |
| | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Level | 3 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Level | 3 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase tindak lanjut temuan | % | 96 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase tindak lanjut temuan | % | 96 |
| | | | | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0.37 | | | | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0.37 |
| | | | | Jumlah temuan BPK | Temuan | 14 | | | | Jumlah temuan BPK | Temuan | 14 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PEMERINTAHAN DESA | | | | | | PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada |
| | | | PROGRAM PENELITIAN | | | | | | PROGRAM PENELITIAN | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | | | | Persentase implementasi rencana kelitbangan. | Sudah/ Belum | sudah | | | | Persentase implementasi rencana kelitbangan. | Sudah/ Belum | sudah |
| | | | | Penerapan SIDa: | Sudah/Belum | sudah | | | | Penerapan SIDa: | Sudah/Belum | sudah |
| | | | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | % | 80 | | | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | % | 80 |
| | | | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | % | 80 | | | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | % | 80 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIA | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIA | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | N DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | N DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada |
| | | | | | | Ada | | | | | | Ada |
| | | | | | | Ada | | | | | | Ada |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada |
| | | | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Ada/ tidak | Ada | | | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Ada/ tidak | Ada |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM SURVEI PENGUKURAN | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM SURVEI PENGUKURAN | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | DAN PEMETAAN | | | | | | DAN PEMETAAN | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 78.29 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 | | | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 |
| | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | | | DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | |
| | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 |
| | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 75 |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | KETERTIBAN UMUM | | | | | | KETERTIBAN UMUM | | | |
| 2.2 | | Meningkatnya profesionalitas ASN | | Indeks profesionalitas ASN | Indeks | 70 | | Meningkatnya profesionalitas ASN | | Indeks profesionalitas ASN | Indeks | 70 |
| | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 4.67 | | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 4.67 |
| | | | | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | jabatan | 37 | | | | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | jabatan | 37 |
| | | | | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | jabatan | 2615 | | | | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | jabatan | 2615 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | jabatan | 2232 | | | | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | jabatan | 2232 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | | | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | jam | 120 | | | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | jam | 120 |
| | | | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 4.67 | | | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 4.67 |
| | | | | | | | | | | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 2.3 | | Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik | | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2.5 | | Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik | | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2.5 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 89 | | | | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 89 |
| | | | | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | jumlah | 89 | | | | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | jumlah | 89 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2.5 | | | | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2.5 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 0.075 | | | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 0.075 |
| | | | | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik | % | 97 | | | | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik | % | 97 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | secara terpusat dan terpadu | | | | | | secara terpusat dan terpadu | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunakasi Perangkat Daerah | % | 56 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunakasi Perangkat Daerah | % | 56 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu | % | 97 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu | % | 97 |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 99.4 | | | | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 99.4 |
| | | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 28,50 | | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 28,50 |
| | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | | | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 94 | | | | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 94 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu | % | 97 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu | % | 97 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| | | | | Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data | OPD | 9 | | | | Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data | OPD | 9 |
| | | | | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | Sudah | | | | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | Sudah |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan | Indeks | 170 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan | Indeks | 170 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelengg | | Nilai LPPD | Scor | Sangat Baik | | Meningkatnya Nilai Laporan Penyelengg | | Nilai LPPD | Scor | Sangat Baik |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | araan Pemerintah Daerah (LPPD) | | | | | | araan Pemerintah Daerah (LPPD) | | | | |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | Sangat Baik |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN | Nilai Laporan Penyelenggaraa | Scor | Sangat Baik | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN | Nilai Laporan Penyelenggaraa | Scor | Sangat Baik |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PEMERINTAHAN UMUM | n Pemerintah Daerah (LPPD) | | | | | PEMERINTAHAN UMUM | n Pemerintah Daerah (LPPD) | | |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| | | | | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | | | | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada |
| | | | | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda | Ada/Tidak | Ada | | | | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda | Ada/Tidak | Ada |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran | Ada/Tidak | Ada | | | | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran | Ada/Tidak | Ada |
| 2.5 | | Meningkatnya nilai SAKIP | | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B | | Meningkatnya nilai SAKIP | | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | Nilai | 70 B |
| | | | | Peningkatan Indeks Pelayanan | Indeks | B- | | | | Peningkatan Indeks Pelayanan | Indeks | B- |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| **3** | **Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat** | | | **Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam** | **Persen** | **85** | **Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat** | | | **Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam** | **Persen** | **85** |
| 3.1 | | Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan | | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 115 | | Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan | | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 115 |
| | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | | | | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | | | |
| | | | | Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) | Unit | 463 | | | | Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) | Unit | 463 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat | Orang | 222 | | | | Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat | Orang | 222 |
| | | | | Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat | Orang | 60 | | | | Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat | Orang | 60 |
| | | | | Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin | Mesjid | 75 | | | | Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin | Mesjid | 75 |
| | | | | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 115 | | | | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 115 |
| | | | | Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz | Orang | 120 | | | | Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz | Orang | 120 |
| | | | | Angka melek Al-Quran penduduk | % | 98 | | | | Angka melek Al-Quran penduduk | % | 98 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam | | | | | | usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam | | |
| | | | | Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam | % | 91 | | | | Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam | % | 91 |
| | | | | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada | | | | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada |
| | | | | Persentase Dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) | % | 89 | | | | Persentase Dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) | % | 89 |
| | | | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 115 | | | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 115 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 3.2 | | Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) | | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Rasio | 100 | | Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) | | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Rasio | 100 |
| | | | PROGRAM BAITUL MAL | | | | | | PROGRAM BAITUL MAL | | | |
| | | | | Jumlah ZIS yang terhimpun | Rp. Milyar | 964 | | | | Jumlah ZIS yang terhimpun | Rp. Milyar | 964 |
| | | | | Jumlah Penghimpunan ZISWAF | Jumlah Penghimpunan ZISWAF | 918 | | | | Jumlah Penghimpunan ZISWAF | Jumlah Penghimpunan ZISWAF | 918 |
| | | | | Jumlah ZISWAF yang disalurkan | Jumlah ZISWAF yang disalurkan | 918 | | | | Jumlah ZISWAF yang disalurkan | Jumlah ZISWAF yang disalurkan | 918 |
| 3.3 | | Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat | | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam | Persen | 85 | | Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat | | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam | Persen | 85 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) | % | 82 | | | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) | % | 82 |
| | | | | Persentase Penegakan PERDA | % | 75 | | | | Persentase Penegakan PERDA | % | 75 |
| | | | | Pembinaan Dinul Islam | Orang | 30 | | | | Pembinaan Dinul Islam | Orang | 30 |
| | | | | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam | % | 85 | | | | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam | % | 85 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA | Jumlah Mesjid yang melaksanakan | Mesjid | 75 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA | Jumlah Mesjid yang melaksanakan | Mesjid | 75 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tujuan** | **Sasaran** | **Program** | **Indikator** | **Satuan** | **Target** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Program** | **Indikator** | **Satuan** | **Target** |
| | | | N DAN PELAYANAN PUBLIK | shalat 5 waktu secara rutin | | | | | N DAN PELAYANAN PUBLIK | shalat 5 waktu secara rutin | | |
| 3.4 | | Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah | | Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi | Persen | 89 | | Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah | | Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi | Persen | 89 |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada |
| | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada |
| **4** | **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber** | | | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **74.42** | **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber** | | | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **74.42** |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | **Daya Manusia** | | | | | | **Daya Manusia** | | | | | |
| 4.1 | | Meningkatnya akses pendidikan | | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9.32 | | Meningkatnya akses pendidikan | | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9.32 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 98.71 | | | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 98.71 |
| | | | | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 99.36 | | | | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 99.36 |
| | | | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 76.98 | | | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 76.98 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Rasio Index | 62.08 | | | | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Rasio Index | 62.08 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 98.71 | | | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 98.71 |
| | | | | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 99.36 | | | | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 99.36 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 76.98 | | | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 76.98 |
| | | | | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Rasio Index | 62.08 | | | | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Rasio Index | 62.08 |
| 4.2 | | Meningkatnya kualitas pendidikan | | Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG) | Persen | 84.46 | | Meningkatnya kualitas pendidikan | | Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG) | Persen | 84.46 |
| | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | |
| | | | | Rasio guru/murid | Rasio Index | 75.52 | | | | Rasio guru/murid | Rasio Index | 75.52 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | sekolah pendidikan dasar | | | | | | sekolah pendidikan dasar | | |
| | | | | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio Index | 61.98 | | | | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio Index | 61.98 |
| | | | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Rasio Index | 74.03 | | | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Rasio Index | 74.03 |
| | | | | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | Rasio Index | 56.92 | | | | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | Rasio Index | 56.92 |
| | | | | Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 | % | 99.84 | | | | Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 | % | 99.84 |
| | | | | Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) | % | 84.46 | | | | Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) | % | 84.46 |
| 4.3 | | Meningkatnya kualitas Penduduk | | Angka Partisipasi Kasar | Persen | 100 | | Meningkatnya kualitas Penduduk | | Angka Partisipasi Kasar | Persen | 100 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | |
| | | | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 74.42 | | | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 74.42 |
| | | | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 43.88 | | | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 43.88 |
| | | | | APK SD/MI/Paket A | % | 100 | | | | APK SD/MI/Paket A | % | 100 |
| | | | | APK SMP/MTs/Paket B | % | 100 | | | | APK SMP/MTs/Paket B | % | 100 |
| | | | | APK SMA/SMK/ | % | 96.93 | | | | APK SMA/SMK/ | % | 96.93 |
| | | | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9.32 | | | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9.32 |
| | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.58 | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.58 |
| | | | | Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat | % | 99.66 | | | | Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat | % | 99.66 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat | % | 96.03 | | | | Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat | % | 96.03 |
| | | | | Angka Pendidikan Tamat Diploma I/II/III | % | 5.89 | | | | Angka Pendidikan Tamat Diploma I/II/III | % | 5.89 |
| | | | | Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1 | % | 61.33 | | | | Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1 | % | 61.33 |
| | | | | Angka Pendidikan Tamat S2/S3 | % | 3.75 | | | | Angka Pendidikan Tamat S2/S3 | % | 3.75 |
| | | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 97.88 | | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 97.88 |
| | | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 85.97 | | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 85.97 |
| | | | | Angka Melanjutkan | % | 99.59 | | | | Angka Melanjutkan | % | 99.59 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | | | | | | (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | | |
| | | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 93.18 | | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 93.18 |
| | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 90.68 | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 90.68 |
| | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 70.91 | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 70.91 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| | | | | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 5000 | | | | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 5000 |
| | | | | Koleksi buku yang tersedia di | koleksi | 46430 | | | | Koleksi buku yang tersedia di | koleksi | 46430 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | perpustakaan daerah | | | | | | perpustakaan daerah | | |
| | | | | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | /1.000 Penduduk | 2 | | | | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | /1.000 Penduduk | 2 |
| | | | | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 1500 | | | | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 1500 |
| | | | | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 20 | | | | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 20 |
| | | | | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 13121 | | | | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 13121 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |
| | | | | Persentase Perangkat | % | 15,35 | | | | Persentase Perangkat | % | 15,35 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Daerah yang mengelola arsip secara baku | | | | | | Daerah yang mengelola arsip secara baku | | |
| | | | | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 5 | | | | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 5 |
| | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 15,35 | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 15,35 |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 15,35 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 15,35 |
| 4.4 | | Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 40 | | Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga | | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 40 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 22 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 22 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah Organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 29 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah Organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 29 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Jumlah Organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 29 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Jumlah Organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 29 |
| 4.5 | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS | Persen | 95 | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS | Persen | 95 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | BIDANG KESEHATAN | | | | | | BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 4.3 | | | | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 4.3 |
| | | | | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100000 Kelahiran | 250.222 0988 | | | | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100000 Kelahiran | 250.222 0988 |
| | | | | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | | | | | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | |
| | | | | - Puskesmas | /1000 Penduduk | 0.08921 | | | | - Puskesmas | /1000 Penduduk | 0.08921 |
| | | | | - Puskesmas | Unit | 16 | | | | - Puskesmas | Unit | 16 |
| | | | | - Poliklinik | /1000 Penduduk | 0.06691 | | | | - Poliklinik | /1000 Penduduk | 0.06691 |
| | | | | - Poliklinik | Unit | 12 | | | | - Poliklinik | Unit | 12 |
| | | | | - Pustu | /1000 Penduduk | 0.27321 | | | | - Pustu | /1000 Penduduk | 0.27321 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | - Pustu | Unit | 49 | | | | - Pustu | Unit | 49 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi FKUB | Persen | 100 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi FKUB | Persen | 100 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 4,30 | | | | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 4,30 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100000 Kelahiran | 250,22 | | | | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100000 Kelahiran | 250,22 |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | /1000 Penduduk | 0,28 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | /1000 Penduduk | 0,28 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio Pustu | Unit | 49 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio Pustu | Unit | 49 |
| | | | | Rasio Pustu /1000 Penduduk | /1000 Penduduk | 0,28 | | | | Rasio Pustu /1000 Penduduk | /1000 Penduduk | 0,28 |
| | | | | Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup | /100000 Kelahiran | 250,22 | | | | Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup | /100000 Kelahiran | 250,22 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 4.6 | | Menurunnya angka stunting | | Prevalansi Stunting | Persen | 13 | | Menurunnya angka stunting | | Prevalansi Stunting | Persen | 13 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prevalansi Stunting | persen | 13 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prevalansi Stunting | persen | 13 |
| 4.7 | | Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 93.58 | | Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 93.58 |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 10 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 10 |
| | | | PROGRAM PENGARUSUT | Proporsi Kursi yang Diduduki | Persen | 20 | | | PROGRAM PENGARUSUT | Proporsi Kursi yang Diduduki | Persen | 20 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Perempuan di DPR | | | | | AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Perempuan di DPR | | |
| 4.8 | | Tercapainya status Kabupaten Layak Anak | | Kabupaten Layak Anak | Predikat | Nindya | | Tercapainya status Kabupaten Layak Anak | | Kabupaten Layak Anak | Predikat | Nindya |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Kabupaten Layak Anak | Predikat | Nindya | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Kabupaten Layak Anak | Predikat | Nindya |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Persen | 87 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Persen | 87 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase jumlah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga | Persen | 85 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase jumlah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga | Persen | 85 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Keterlibatan Perempuan dalam PUG dan Pemberdayaan Perrempuan | Persen | 83 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Keterlibatan Perempuan dalam PUG dan Pemberdayaan Perrempuan | Persen | 83 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayana | Persen | 85 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayana | Persen | 85 |
| 4.9 | | Tertangani nya Covid-19 | | Jumlah kasus Covid yang tertangani | Persen | 99 | | Tertangani nya Covid-19 | | Jumlah kasus Covid yang tertangani | Persen | 99 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan | Pasien | 250 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan | Pasien | 250 |
| | | | | | | | | | | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan | | Tipe Rumah Sakit Umum Daerah | Tipe | B | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan | | Tipe Rumah Sakit Umum Daerah | Tipe | B |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Akreditasi Rumah Sakit | Skor | B | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Akreditasi Rumah Sakit | Skor | B |
| 4.11 | | Meningkatnya life Skill masyarakat | | Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan | Persen | 23,42 | | Meningkatnya life Skill masyarakat | | Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan | Persen | 23,42 |
| | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA | | | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | S TENAGA KERJA | | | | | | S TENAGA KERJA | | | |
| | | | | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | 13,33 | | | | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | 13,33 |
| | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 3,64 | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 3,64 |
| | | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi | % | 23,42 | | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi | % | 23,42 |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 70,63 | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 70,63 |
| | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Besaran Pencari kerja yang | % | 0,07 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Besaran Pencari kerja yang | % | 0,07 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Terdaftar yang ditempatkan | | | | | | Terdaftar yang ditempatkan | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi Yang Dibina | Unit | 50 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi Yang Dibina | Unit | 50 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Pelatihan Untuk Pelaku UMKM | Persen | 0.1281 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Pelatihan Untuk Pelaku UMKM | Persen | 0.1281 |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 0.8125 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 0.8125 |
| 4.12 | | Meninngkatnya Kelestarian | | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 | | Meninngkatnya Kelestarian | | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | Kebudayaan | | | | | | Kebudayaan | | | | |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 3 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 3 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 3 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 3 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | unit | 8 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | unit | 8 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | | | | | | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | | | |
| | | | | Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi | gampong | 50 | | | | Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi | gampong | 50 |
| | | | | Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim | % | 50 | | | | Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim | % | 50 |
| | | | | Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah | % | 70 | | | | Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah | % | 70 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 5 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengembangan UMKM Terpadu | | | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 15 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengembangan UMKM Terpadu | | | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 15 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | **(Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran** | | | | | | **(Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran** | | | | | |
| 5.1 | | Menurunnya beban penduduk miskin | | Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 95 | | Menurunnya beban penduduk miskin | | Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 95 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan | % | 100 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan | % | 100 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Jumlah Penduduk Miskin | Orang | 28,28 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Jumlah Penduduk Miskin | Orang | 28,28 |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 100 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 100 |
| 5.2 | | Meningkatnya kemandirian desa | | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0.68 | | Meningkatnya kemandirian desa | | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0.68 |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 100 | | | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 100 |
| | | | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 222 | | | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 222 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 222 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 222 |
| | | | | Persentase LSM aktif | % | 100 | | | | Persentase LSM aktif | % | 100 |
| | | | | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | | | | Persentase Posyandu aktif | % | 100 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYA | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYA | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | |
| | | | | Persentase LPM Berprestasi | % | 100 | | | | Persentase LPM Berprestasi | % | 100 |
| | | | | Persentase PKK aktif | % | 100 | | | | Persentase PKK aktif | % | 100 |
| | | | | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | | | | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 |
| | | | | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | | | | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Terbentuknya kerja sama | % | 85 | | | PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Terbentuknya kerja sama | % | 85 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | KERJA SAMA DESA | Badan Usaha antar Gampong Kabupaten Nagan Raya | | | | | KERJA SAMA DESA | Badan Usaha antar Gampong Kabupaten Nagan Raya | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase jumlah keluarga yang dibina | % | 85 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase jumlah keluarga yang dibina | % | 85 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 222 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 222 |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 5.3 | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin | Persen | 200 | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin | Persen | 200 |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin | Persen | 200 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin | Persen | 200 |
| 5.4 | | Menurunnya tingkat penganggur an terbuka | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 3.64 | | Menurunnya tingkat penganggur an terbuka | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 3.64 |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |
| | | | | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | kasus | 47,62 | | | | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | kasus | 47,62 |
| | | | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi | % | 70,38 | | | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi | % | 70,38 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | peserta program Jamsostek | | | | | | peserta program Jamsostek | | |
| | | | | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri | Orang | 8033 | | | | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri | Orang | 8033 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Kawasan | 1 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Kawasan | 1 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | | Rasio daya serab tenaga kerja | % | 21 | | | | Rasio daya serab tenaga kerja | % | 21 |
| | | | | Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) | Investor | 72 | | | | Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) | Investor | 72 |
| | | | PROGRAM PROMOSI | Jumlah Nilai Investasi berskala | Rp Triliun | 2632 | | | PROGRAM PROMOSI | Jumlah Nilai Investasi berskala | Rp Triliun | 2632 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PENANAMAN MODAL | Nasional (PMDN/PMA) | | | | | PENANAMAN MODAL | Nasional (PMDN/PMA) | | |
| 5.5 | | Meningkatnya Pendapatan Daerah | | Jumlah Pemberdayaan ekonomi | Persen | 95 | | Meningkatnya Pendapatan Daerah | | Jumlah Pemberdayaan ekonomi | Persen | 95 |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 72 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 72 |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 15,75 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 15,75 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 8.28 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 8.28 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Rp (Milyar) | 205 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Rp (Milyar) | 205 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | |
| | | | | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 15,75 | | | | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 15,75 |
| | | | | Kunjungan Wisata | % | 91,18 | | | | Kunjungan Wisata | % | 91,18 |
| | | | | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan | Lokasi | 3 | | | | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan | Lokasi | 3 |
| 5.6 | | Meningkatnya ketahanan pangan | | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten | Indeks | 78.23 | | Meningkatnya ketahanan pangan | | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten | Indeks | 78.23 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Desa yang tahan pangan/ sangat tahan pangan | % | 41.89 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Desa yang tahan pangan/ sangat tahan pangan | % | 41.89 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI | Ketersediaan Pangan Utama | % | 100 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI | Ketersediaan Pangan Utama | % | 100 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | | UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 100 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 100 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH Konsumsi | Skor | 77 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor PPH Konsumsi | Skor | 77 |
| 5.7 | | Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian | | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB | Persen | 45.7 | | Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian | | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB | Persen | 45.7 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB | Persen | 4.65 | | | | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB | Persen | 4.65 |
| | | | | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB | Persen | 11.2 | | | | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB | Persen | 11.2 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi Hasil tangkapan nelayan | TON | 3943.99 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi Hasil tangkapan nelayan | TON | 3943.99 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Ikan Pembudidaya | TON | 1085.47 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Ikan Pembudidaya | TON | 1085.47 |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Berkurangnya Kasus IUU Fishing (%) | % | 75 | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Berkurangnya Kasus IUU Fishing (%) | % | 75 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan | ORANG | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan | ORANG | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| | | | | Produktivitas Sektor Pertanian Palawija | Ton | 3847.580322 | | | | Produktivitas Sektor Pertanian Palawija | Ton | 3847.580322 |
| | | | | Produktivitas Padi | Ton/ha | 104,490.14 | | | | Produktivitas Padi | Ton/ha | 104,490.14 |
| | | | | Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Peren | 100 | | | | Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Peren | 100 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | terhadap luas tanam Kelapa Sawit dan Perkebunan lainnya | | | | | | terhadap luas tanam Kelapa Sawit dan Perkebunan lainnya | | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | | Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) | ekor | 22522.28095 | | | | Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) | ekor | 22522.28095 |
| | | | | Populasi ternak kecil (kambing dan domba) | ekor | 17748.27913 | | | | Populasi ternak kecil (kambing dan domba) | ekor | 17748.27913 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat | ton/ha/tahun | 15884 | | | | Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat | ton/ha/tahun | 15884 |
| | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan | Unit | 55 | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan | Unit | 55 |
| | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Unit | 15 | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Unit | 15 |
| | | | | Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 35 | | | | Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 35 |
| | | | | Persentase Irigasi Kabupaten | Persen | 32.82 | | | | Persentase Irigasi Kabupaten | Persen | 32.82 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Dalam Kondisi Baik | | | | | | Dalam Kondisi Baik | | |
| | | | | Produktivitas Tanaman Perkebunan Lainnya | ton/ha/tahun | 10822 | | | | Produktivitas Tanaman Perkebunan Lainnya | ton/ha/tahun | 10822 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | | Produksi Sektor Pertanian Palawija | Ton | 3847.580322 | | | | Produksi Sektor Pertanian Palawija | Ton | 3847.580322 |
| | | | | Produksi Daging Ternak Besar (Sapi dan Kerbau) | Ton | 375 | | | | Produksi Daging Ternak Besar (Sapi dan Kerbau) | Ton | 375 |
| | | | | Produktivitas Padi | Ton | 10449 | | | | Produktivitas Padi | Ton | 10449 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar | Ton/Ha | 6.7 | | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar | Ton/Ha | 6.7 |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Laporan | 12 | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Laporan | 12 |
| | | | | Produktifitas Sawit Rakyat | Ton/Ha/Tahun | 16281 | | | | Produktifitas Sawit Rakyat | Ton/Ha/Tahun | 16281 |
| | | | | Produktifitas tanaman perkebunan lainnya | Ton/Ha/Tahun | 11092 | | | | Produktifitas tanaman perkebunan lainnya | Ton/Ha/Tahun | 11092 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| | | | | Cakupan Bina Kelompok Tani | % | 100 | | | | Cakupan Bina Kelompok Tani | % | 100 |
| | | | | Cakupan Bina Kelompok Petani | % | 60.61562747 | | | | Cakupan Bina Kelompok Petani | % | 60.61562747 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 1 | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 1 |
| | | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | 1 | | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | 1 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | |
| | | | | Jumlah industri Pengolahan | Unit | 4345 | | | | Jumlah industri Pengolahan | Unit | 4345 |
| | | | | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | Persen | 98 | | | | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | Persen | 98 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Persentase Koperasi Aktif | % | 81.25 | | | | Persentase Koperasi Aktif | % | 81.25 |
| | | | | Persentase Koperasi Tidak aktif | % | 18.75 | | | | Persentase Koperasi Tidak aktif | % | 18.75 |
| | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persen | 82.09 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persen | 82.09 |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | % | 47.69 | | | | Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | % | 47.69 |
| | | | | Persentase Koperasi Tidak aktif | % | 18.75 | | | | Persentase Koperasi Tidak aktif | % | 18.75 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Jumlah Sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Izin USP Koperasi | Kegiatan | 60 | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Jumlah Sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Izin USP Koperasi | Kegiatan | 60 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Cakupan Bina kelompok pengrajin | % | 82.62 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Cakupan Bina kelompok pengrajin | % | 82.62 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah Usaha Kecil Menengah Yang Berorientasi Ekspor | Unit | 10 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah Usaha Kecil Menengah Yang Berorientasi Ekspor | Unit | 10 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat Yang Revitalisasi Sesuai Standar | Unit | 4 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat Yang Revitalisasi Sesuai Standar | Unit | 4 |
| | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah UTTP yang Ditera/Teraulang | Unit | 298 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah UTTP yang Ditera/Teraulang | Unit | 298 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri | Dokumen | 4 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri | Dokumen | 4 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Dokumen | 10 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Dokumen | 10 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi SKA | Ada/Tidak | Ada | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi SKA | Ada/Tidak | Ada |
| | | | PROGRAM SATBILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam Satu Tahun | Kegiatan | 4 | | | PROGRAM SATBILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam Satu Tahun | Kegiatan | 4 |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | |
| | | | | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan | Dokumen | 100 | | | | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan | Dokumen | 100 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | | | Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | |
| | | | | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Dokumen | 650 | | | | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Dokumen | 650 |
| | | | | Persentase penyediaan Perizinan Usaha Pertanian | Persen | 100 | | | | Persentase penyediaan Perizinan Usaha Pertanian | Persen | 100 |
| | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang | Kegiatan | 8 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang | Kegiatan | 8 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Produksi Dalam Negeri | | | | | | Produksi Dalam Negeri | | |
| 5.8 | | Terkendalinya tingkat inflasi daerah | | Jumlah angka Inflasi | Persen | 0.5 | | Terkendalinya tingkat inflasi daerah | | Jumlah angka Inflasi | Persen | 0.5 |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengendalian Angka Inflasi | Persen | 0.5 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengendalian Angka Inflasi | Persen | 0.5 |
| 5.9 | | Meningkatnya kualitas jalan kabupaten | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 46.15 | | Meningkatnya kualitas jalan kabupaten | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 46.15 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | |
| | | | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 46.15 | | | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 46.15 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Index | 0.00655 5556 | | | | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Index | 0.00655 5556 |
| | | | | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | % | 33.09 | | | | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | % | 33.09 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | | Pemasangan Rambu-Rambu | % | 16 | | | | Pemasangan Rambu-Rambu | % | 16 |
| | | | | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | Rasio Index | 83.95 | | | | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | Rasio Index | 83.95 |
| | | | | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | Unit | 764 | | | | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | Unit | 764 |
| | | | | Rasio Ijin Trayek | Indeks | 36 | | | | Rasio Ijin Trayek | Indeks | 36 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 13.45 | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 13.45 |
| | | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 9.5 | | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 9.5 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah Pelabuhan Laut | Unit | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah Pelabuhan Laut | Unit | 5 |
| | | | | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Angkutan Darat) | Trayek | 7 | | | | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Angkutan Darat) | Trayek | 7 |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B) | Unit | 5 | | | | Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B) | Unit | 5 |
| | | | | Jumlah Bandar Udara | Unit | 1 | | | | Jumlah Bandar Udara | Unit | 1 |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Laut | Unit | 5 | | | | Jumlah Pelabuhan Laut | Unit | 5 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | Unit | 764 | | | | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | Unit | 764 |
| | | | | Pemasangan Rambu-Rambu | % | 16 | | | | Pemasangan Rambu-Rambu | % | 16 |
| | | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 9.5 | | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 9.5 |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 13.45 | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 13.45 |
| | | | | Rasio Ijin Trayek | Indeks | 36 | | | | Rasio Ijin Trayek | Indeks | 36 |
| | | | | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | Rasio Index | 83.95 | | | | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | Rasio Index | 83.95 |
| 5.10 | | Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani | | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 32.83 | | Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani | | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 32.83 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio jaringan irigasi | Rasio Index | 45.71 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio jaringan irigasi | Rasio Index | 45.71 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 32.82 | | | | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 32.82 |
| | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan | Unit | 55 | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan | Unit | 55 |
| | | | | Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat | Ton/Ha/Tahun | 15884 | | | | Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat | Ton/Ha/Tahun | 15884 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 35 | | | | Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 35 |
| | | | | Produktivitas Tanaman Perkebunan Lainnya | Ton/Ha/Tahun | 10822 | | | | Produktivitas Tanaman Perkebunan Lainnya | Ton/Ha/Tahun | 10822 |
| | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Unit | 15 | | | | Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Unit | 15 |
| 5.11 | | Meningkatnya kualitas dan akses air bersih | | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 9.37 | | Meningkatnya kualitas dan akses air bersih | | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 9.37 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | |
| | | | | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | % | 9,37 | | | | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | % | 9,37 |
| | | | | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan | % | 15,78 | | | | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan | % | 15,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5.12 | | Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi | | Persentase Rumah tangga bersanitasi | Persen | 75.48 | | Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi | | Persentase Rumah tangga bersanitasi | Persen | 75.48 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 75.48 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 75.48 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | AN SISTEM DRAINASE | | | | | | AN SISTEM DRAINASE | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 75.48 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 75.48 |
| | | | | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 75.48 | | | | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 75.48 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5.13 | | Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau | | Jumlah rumah layak huni yang terbangun | Unit | 1229 | | Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau | | Jumlah rumah layak huni yang terbangun | Unit | 1229 |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun | Unit | 202 | | | | Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun | Unit | 202 |
| | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab | Unit | 100 | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab | Unit | 100 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun | Unit | 202 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun | Unit | 202 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | |
| | | | | Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun | Unit | 202 | | | | Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun | Unit | 202 |
| | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab | Unit | 100 | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab | Unit | 100 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 5.14 | | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 | | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Ada/ tidak ada | Ada | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Ada/ tidak ada | Ada |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | Persen | 14 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | Persen | 14 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | Persen | 36.15 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | Persen | 36.15 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 58.11 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan | Unit | 2000 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan | Unit | 2000 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 58.11 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 58.11 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| 5.15 | | Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencanaan | | Indeks Kapasitas Daerah | Indeks | 0.42 | | Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencanaan | | Indeks Kapasitas Daerah | Indeks | 0.42 |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana | Indeks | 0.42 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana | Indeks | 0.42 |
| | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana | Indeks | 0.42 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana | Indeks | 0.42 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Penyediaan Logistik Penanganan | Paket | 1 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Penyediaan Logistik Penanganan | Paket | 1 |

| NO | RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | | RKPK TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Satuan | Target |
| | | | | Bencana Kabupaten | | | | | | Bencana Kabupaten | | |

Dalam hal Konsistensi Target Program dan Pagu Pendanaan RPK Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada Pelaksanaan Tahun 2026 dan RKPK Nagan Raya Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.16**
**Konsistensi Tujuan dan Sasaran**
**RPJMK/RPK Nagan Raya Pelaksanaan Tahun 2026 dan RKPK Nagan Raya Tahun 2026**

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| **1.1** | **Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat** | **Indeks Pembangunan Syariat Islam** | Indeks | | **Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat** | **Indeks Pembangunan Syariat Islam** | Indeks | |
| 1.1.1 | Meningkatkan Pengetahuan Syariat Islam secara mendalam dan menurunkan pelanggaran syariat | Jumlah Kasus pelanggaran Syariat Islam | Kasus | 6 | Meningkatkan Pengetahuan Syariat Islam secara mendalam dan menurunkan pelanggaran syariat | Jumlah Kasus pelanggaran Syariat Islam | Kasus | 6 |
| 1.1.2 | Optimalisasi Pengelolaan zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya | Jumlah ZISWAF yang terkumpul | Juta | 8,426.80 | Optimalisasi Pengelolaan zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya | Jumlah ZISWAF yang terkumpul | Juta | 8,426.80 |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 1.1.3 | Peningakatan Mutu, kemandirian dayah serta pendidikan vokasi untuk dayah | Persentase Dayah yang teakreditasi | % | | Peningakatan Mutu, kemandirian dayah serta pendidikan vokasi untuk dayah | Persentase Dayah yang teakreditasi | % | |
| **1.2** | **Meningkatkan Keamanan, ketertiban, menjaga perdamaian dan penegakan demokrasi** | **Indeks Demokrasi (IUP 30)** | Indeks | 100 | **Meningkatkan Keamanan, ketertiban, menjaga perdamaian dan penegakan demokrasi** | **Indeks Demokrasi (IUP 30)** | Indeks | 100 |
| 1.2.1 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Qanun | Persentase penegakan hukum Qanun (IUP 28 a) | % | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Qanun | Persentase penegakan hukum Qanun (IUP 28 a) | % | |
| 1.2.2 | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Indeks Reformasi Hukum (IUP 24) | Indeks | 71.78 | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Indeks Reformasi Hukum (IUP 24) | Indeks | 71.78 |
| | | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 28 b) | % | | | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 28 b) | % | |
| | | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (IUP 29) | % | | | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (IUP 29) | % | |
| | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (IUP 38) | Indeks | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (IUP 38) | Indeks | |
| | | | | | | | | |
| **2.1** | **Transformasi sosial melalui meningkatkan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Merata, inklusif, dan Berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP** | **Harapan Lama Sekolah (IUP 5.d)** | tahun | 14.2 | **Transformasi sosial melalui meningkatkan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Merata, inklusif, dan Berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP** | **Harapan Lama Sekolah (IUP 5.d)** | tahun | 14.2 |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 2.1.1 | Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan yang unggul, merata, inklusi, dan berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | Angka | | Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan yang unggul, merata, inklusi, dan berkeadilan melalui Pemenuhan Capaian SPM dan SNP | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | Angka | |
| | | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP 5.c) | Tahun | 9.47 | | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP 5.c) | Tahun | 9.47 |
| | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP 6) | % | 10.31 | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP 6) | % | 10.31 |
| | | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (IUP 7) | % | | | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (IUP 7) | % | |
| 2.1.2 | Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum | Angka Literasi (IUP 5) | Angka | | Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum | Angka Literasi (IUP 5) | Angka | |
| | | Angka Numerasi (IUP 5) | Angka | | | Angka Numerasi (IUP 5) | Angka | |
| 2.1.3 | Pemerataan dan Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan | Indeks Pemerataan Guru | Indeks | | Pemerataan dan Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan | Indeks Pemerataan Guru | Indeks | |
| **2.2** | **Optimalisasi Pembangunan literasi Masyarakat** | **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** | Indeks | 72.2 | **Optimalisasi Pembangunan literasi Masyarakat** | **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** | Indeks | 72.2 |
| 2.2.1 | Meningkatkan Indeks Pembangunan literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72.2 | Meningkatkan Indeks Pembangunan literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72.2 |
| **2.3** | **Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan kepramukaan** | Indek Pembangunan Kepemudaan | Indeks | | **Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan kepramukaan** | Indek Pembangunan Kepemudaan | Indeks | |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 2.3.1 | Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan | Indek Pembangunan Kepramukaan | Indeks | | Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan | Indek Pembangunan Kepramukaan | Indeks | |
| **2.4** | **Meningkatnya Daya Saing Olah Raga** | **Indeks Pembangunan Olah Raga** | **Indeks** | | **Meningkatnya Daya Saing Olah Raga** | **Indeks Pembangunan Olah Raga** | **Indeks** | |
| 2.4.1 | Meningkatkan Daya Saing Olah Raga | Prestasi Olah Raga | Indek | | Meningkatkan Daya Saing Olah Raga | Prestasi Olah Raga | Indek | |
| | | | | | | | | |
| **3.1** | **Meningkatnya Akses, Kualitas Layanan, dan Derajat Kesehatan Secara Merata** | **Angka Usia Harapan Hidup (IUP 1)** | Angka | 72.93 | **Meningkatnya Akses, Kualitas Layanan, dan Derajat Kesehatan Secara Merata** | **Angka Usia Harapan Hidup (IUP 1)** | Angka | 72.93 |
| 3.1.1 | Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | 0.29 | Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | 0.29 |
| | | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (IUP 3.a) | % | | | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (IUP 3.a) | % | |
| | | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (IUP 3.b) | % | | | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (IUP 3.b) | % | |
| | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP 4) | % | | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP 4) | % | |
| | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IUP 39) | Indeks | | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IUP 39) | Indeks | |
| 3.1.2 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak | Angka Kematian Ibu (IUP 2.a) | Angka/ 100.000 kelahiran hidup | 97.25 | Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak | Angka Kematian Ibu (IUP 2.a) | Angka/ 100.000 kelahiran hidup | 97.25 |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| | | Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka/ 1.000 kelahiran hidup | 12.08 | | Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka/ 1.000 kelahiran hidup | 12.08 |
| 3.1.3 | Penurunan Prevalensi Stunting | Persentase prevalensi stunting (IUP 2.b) | % | 29.17 | Penurunan Prevalensi Stunting | Persentase prevalensi stunting (IUP 2.b) | % | 29.17 |
| **3.2** | **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Responsif Penyandang Disabilitas, Inklusi Sosial, Kelompok Rentan, Gender, dan Anak** | Tingkat Kemiskinan (IUP 8) | % | 16.76 | **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Responsif Penyandang Disabilitas, Inklusi Sosial, Kelompok Rentan, Gender, dan Anak** | Tingkat Kemiskinan (IUP 8) | % | 16.76 |
| 3.2.1 | Pemberdayaan Sosial | Jumlah Masyarakat miskin yang diberdayakan | Jiwa | | Pemberdayaan Sosial | Jumlah Masyarakat miskin yang diberdayakan | Jiwa | |
| 3.2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif | Indeks Kesejahteraan Sosial | % | | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif | Indeks Kesejahteraan Sosial | % | |
| | | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP 9) | % | | | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP 9) | % | |
| | | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (IUP 10) | % | | | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (IUP 10) | % | |
| | | Rumah tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan (IUP 23 b) | | | | Rumah tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan (IUP 23 b) | | |
| 3.2.3 | Mengurangi Angka Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP 15.a) | % | 4.67 | Mengurangi Angka Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP 15.a) | % | 4.67 |
| | | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (IUP 16) | % | | | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (IUP 16) | % | |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 3.2.4 | Mengurangi Ketimpangan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 91.84 | Mengurangi Ketimpangan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 91.84 |
| | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP 40) | Indeks | 0.45 | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP 40) | Indeks | 0.45 |
| 3.2.5 | Perlindungan Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 68.44 | Perlindungan Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 68.44 |
| 3.2.6 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk | Indeks | 1.71 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk | Indeks | 1.71 |
| | | | | | | | | |
| **4.1** | **Meningkatkan infrastruktur dasar dan Permukiman berkualitas, responsif bencana, merata. Ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan kawasan ekonomi masyarakat** | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | | **Meningkatkan infrastruktur dasar dan Permukiman berkualitas, responsif bencana, merata. Ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan kawasan ekonomi masyarakat** | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | |
| | | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (IUP 42.b) | % | 83.5 | | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (IUP 42.b) | % | 83.5 |
| 4.1.1 | Pemenuhan dan penyediaan Infratruktur yang berkualitas, merata, dan Ramah Lingkungan berorientasi pengurangan risiko bencana | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Indeks | | Pemenuhan dan penyediaan Infratruktur yang berkualitas, merata, dan Ramah Lingkungan berorientasi pengurangan risiko bencana | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Indeks | |
| | | c. Pengelolaan Sampah (IUP 42.c) | | | | c. Pengelolaan Sampah (IUP 42.c) | | |
| | | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | | | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| | | - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % RT | | | - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % RT | |
| | | | | | | | | |
| **5.1** | **terwujudnya transformasi Ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan keragaman berbasis Sumber Daya Alam lokal dan Unggulan yang berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | % | 4,25 - 4,65 | **terwujudnya transformasi Ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan keragaman berbasis Sumber Daya Alam lokal dan Unggulan yang berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | % | 4,25 - 4,65 |
| | | Rasio Pajak terhadap PDB (IUP 31) | % | | | Rasio Pajak terhadap PDB (IUP 31) | % | |
| | | Tingkat Inflasi (IUP 32) | % | | | Tingkat Inflasi (IUP 32) | % | |
| 5.1.1 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rasio PAD terhadap APBK | % | | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rasio PAD terhadap APBK | % | |
| 5.1.2 | Meningkatnya Keberagaman Usaha dan produk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hilirisasi Sumber Daya Alam berbasis lokal dan Unggulan Serta Pengembangan Parawisata dan ekonomi kreatif | PDRB Perkapita | Juta Rupiah | 48.6 | Meningkatnya Keberagaman Usaha dan produk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hilirisasi Sumber Daya Alam berbasis lokal dan Unggulan Serta Pengembangan Parawisata dan ekonomi kreatif | PDRB Perkapita | Juta Rupiah | 48.6 |
| | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dari Pengembangan Sektor Pariwisata (IUP 12.a) | % | | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dari Pengembangan Sektor Pariwisata (IUP 12.a) | % | |
| | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP 12.b) | orang | | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP 12.b) | orang | |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (IUP 13) | % | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (IUP 13) | % | |
| | | Rasio kewirausahaan daerah (IUP 14.b) | % | | | Rasio kewirausahaan daerah (IUP 14.b) | % | |
| | | Ekspor Barang dan Jasa (IUP 22) | (% | | | Ekspor Barang dan Jasa (IUP 22) | (% | |
| | | | PDRB) | | | | PDRB) | |
| | | Proporsi kontribusi PDRB | % | | | Proporsi kontribusi PDRB | % | |
| | | wilayah kota terhadap | | | | wilayah kota terhadap | | |
| | | kabupaten (IUP 23 a) | | | | kabupaten (IUP 23 a) | | |
| | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (IUP 33) | % | | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (IUP 33) | % | |
| | | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Perkapita (IUP 33.a) | % | | | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Perkapita (IUP 33.a) | % | |
| | | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (IUP 33.b) | % | | | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (IUP 33.b) | % | |
| | | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (IUP 33.c) | Rupiah | | | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (IUP 33.c) | Rupiah | |
| | | d. Total Kredit/PDRB (IUP 33.d) | % | | | d. Total Kredit/PDRB (IUP 33.d) | % | |
| 5.1.3 | Peningkatan Nilai Investasi dan Penanaman Modal | Pembentukan Modal Tetap Bruto (IUP 21) | % PDRB | | Peningkatan Nilai Investasi dan Penanaman Modal | Pembentukan Modal Tetap Bruto (IUP 21) | % PDRB | |
| | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (IUP 15.b) | % | | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (IUP 15.b) | % | |
| | | Return on Asset (ROA) BUMD (IUP 14.d) | % | | | Return on Asset (ROA) BUMD (IUP 14.d) | % | |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 5.1.4 | Pengembangan dan Penguatan Koperasi dan UMKM Sektor Unggulan | Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP 11.a) | % | 5.43 | Pengembangan dan Penguatan Koperasi dan UMKM Sektor Unggulan | Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP 11.a) | % | 5.43 |
| | | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11.b) | % | | | Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11.b) | % | |
| | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (IUP 14.a) | % | | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (IUP 14.a) | % | |
| | | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (IUP 14.c) | % | | | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (IUP 14.c) | % | |
| **5.2** | **Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah** | **Indeks Ketahanan Pangan Daerah** | Indeks | | **Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah** | **Indeks Ketahanan Pangan Daerah** | Indeks | |
| 5.2.1 | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | |
| 5.2.2 | Meningkatkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah tingkat Kabupaten (IUP 20) | | | Meningkatkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah tingkat Kabupaten (IUP 20) | | |
| | | | | | | | | |
| **6.1** | **Terwujudnya Ketahanan Ekologis dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan** | **Indeks Ekonomi Hijau Daerah (IUP 18 a)** | Indeks | | **Terwujudnya Ketahanan Ekologis dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan** | **Indeks Ekonomi Hijau Daerah (IUP 18 a)** | Indeks | |
| | | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan : (IUP 43) | | | | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan : (IUP 43) | | |
| | | a. Ketahanan Energi (IUP 43.a) | % | | | a. Ketahanan Energi (IUP 43.a) | % | |
| | | - Konsumsi listrik per kapita | kWh | | | - Konsumsi listrik per kapita | kWh | |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| | | - Intensitas energi primer | SBM/Rp milyar | | | - Intensitas energi primer | SBM/Rp milyar | |
| | | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP 43.b) | % | | | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP 43.b) | % | |
| | | c. Ketahanan Air (IUP 43.c) | % | | | c. Ketahanan Air (IUP 43.c) | % | |
| | | - Kapasitas Tampungan Air | m3/kapita | | | - Kapasitas Tampungan Air | m3/kapita | |
| | | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | % | | | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | % | |
| 6.1.1 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Alam berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IUP 42.a) | Indeks | 80.85 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Alam berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IUP 42.a) | Indeks | 80.85 |
| | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (IUP 18 b) | % | | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (IUP 18 b) | % | |
| | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IUP 41) | Indeks | | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IUP 41) | Indeks | |
| | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) : (IUP 45) | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) : (IUP 45) | | |
| | | a. Kumulatif (IUP 45.a) | % | | | a. Kumulatif (IUP 45.a) | % | |
| | | b. Tahunan (IUP 45.b) | % | | | b. Tahunan (IUP 45.b) | % | |
| **6.2** | **Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Masyarakat Tangguh Bencana** | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0.39 | **Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Masyarakat Tangguh Bencana** | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0.39 |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 6.2.1 | Pengurangan Risiko Bencana | Indeks Resiko Bencana (IUP 44) | Indeks | 188.49 | Pengurangan Risiko Bencana | Indeks Resiko Bencana (IUP 44) | Indeks | 188.49 |
| | | | | | | | | |
| **7.1** | **Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas** | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 71.53 | **Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas** | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 71.53 |
| 7.1.1 | Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai SAKIP | Nilai | 68.25 | Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai SAKIP | Nilai | 68.25 |
| 7.1.2 | Meningkatkan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Angka | | Meningkatkan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Angka | |
| 7.1.3 | Meningkatkan Pelayanan dan keterbukaan Informasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | | Meningkatkan Pelayanan dan keterbukaan Informasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | |
| 7.1.4 | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, dan akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | #REF! | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, dan akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | #REF! |
| 7.1.5 | Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Kepegawaian | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | 73.4 | Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Kepegawaian | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | 73.4 |
| | | Indeks Integritas Nasional (IUP 27) | Indeks | | | Indeks Integritas Nasional (IUP 27) | Indeks | |
| 7.1.6 | Meningkatkan Tata Kelola Gampong | Indeks Desa membangun | Indeks | 0.73 | Meningkatkan Tata Kelola Gampong | Indeks Desa membangun | Indeks | 0.73 |
| | | Persentase desa mandiri (IUP 23 c) | % | | | Persentase desa mandiri (IUP 23 c) | % | |
| 7.1.7 | Meningkatkan Pelayanan Publik berorientasi kepentingan publik | Indeks Pelayanan Publik (IUP 26) | Indeks | 11.35 | Meningkatkan Pelayanan Publik berorientasi kepentingan publik | Indeks Pelayanan Publik (IUP 26) | Indeks | 11.35 |
| 7.1.8 | Meningkatnya Tingkat Penguasaan Iptek dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (IUP 17) | Indeks | 57.85 | Meningkatnya Tingkat Penguasaan Iptek dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (IUP 17) | Indeks | 57.85 |

| NO | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | | RPJMD/ RPD TAHUN PELAKSANAAN 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | URAIAN TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
| 7.1.9 | Meningkatnya Transformasi Digital | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IUP 19) | Indeks | | Meningkatnya Transformasi Digital | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IUP 19) | Indeks | |
| | | Indeks Sistem Pemerintahan | Indeks | 3.77 | | Indeks Sistem Pemerintahan | Indeks | 3.77 |
| | | Berbasis Elektronik (IUP 25) | | | | Berbasis Elektronik (IUP 25) | | |
| | | | | | | | | |
| **8.1** | **Terwujudnya Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan indentitas Adat istiadat, dan Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya** | **Indek Pembangunan Kebudayaan (IUP 37)** | Indeks | | **Terwujudnya Tatanan Kehidupan berbudaya, dengan indentitas Adat istiadat, dan Kearifan Lokal Kabupaten Nagan Raya** | **Indek Pembangunan Kebudayaan (IUP 37)** | Indeks | |
| 8.1.1 | Mengembangkan dan melestarikan budaya berbasis kearifan lokal Nagan Raya | Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan | % | | Mengembangkan dan melestarikan budaya berbasis kearifan lokal Nagan Raya | Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan | % | |
| 8.1.2 | Meningkatkan Peranan Adat | Persentase lembaga adat yang dibina | % | | Meningkatkan Peranan Adat | Persentase lembaga adat yang dibina | % | |
| 8.1.3 | Pembinaan dan meningkatkan edukasi bagi Lembaga dan Komoditas seni budaya | Persentase lembaga seni budaya, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk Edukasi | % | | Pembinaan dan meningkatkan edukasi bagi Lembaga dan Komoditas seni budaya | Persentase lembaga seni budaya, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk Edukasi | % | |
| | | | | | | | | |

## 4.3 Inovasi Daerah

Inovasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi penentu daya saing suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui pengisian data secara elektronik pada laman resmi Kementerian Dalam Negeri (https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/). Penilaian atas laporan tersebut menjadi dasar pemberian penghargaan dan/atau insentif setiap tahun, yang diberikan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan daerah dalam berinovasi.

Bentuk inovasi daerah mencakup inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sasaran utama inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pelaksanaan inovasi berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, bebas dari konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, transparan, memenuhi nilai kepatutan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan pelaporan inovasi daerah sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10/2846/SJ tanggal 24 Juni 2024, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menyelesaikan seluruh tahapan pelaporan dan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, berhasil meraih predikat Inovatif dengan skor 44,68. Capaian ini menjadi sejarah baru karena merupakan predikat "Inovatif" pertama sejak tahun 2020, sekaligus menunjukkan lompatan skor yang signifikan sebesar 12,47 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang hanya mencapai 32,21 (predikat Kurang Inovatif).

**Pengembangan inovasi di Kabupaten Nagan Raya** dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan menjawab isu-isu strategis daerah yang meliputi berbagai bidang, antara lain:

- **Sosial Budaya & Keagamaan**: perlindungan khazanah budaya yang belum optimal, pelanggaran syariat, rendahnya standarisasi dayah, pengelolaan zakat/infak/sedekah yang belum optimal, dan tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- **Kualitas SDM**: rendahnya rata-rata lama sekolah, peran pemuda yang belum optimal, IPM di bawah rata-rata Provinsi Aceh, rendahnya literasi dan numerasi, rendahnya literasi digital, serta tingginya angka stunting.
- **Ekonomi**: ketergantungan pada sektor primer, belum optimalnya ekonomi kreatif dan pariwisata, rendahnya nilai tambah produk unggulan, serta ekosistem inovasi dan daya saing infrastruktur yang belum memadai.
- **Konektivitas & Infrastruktur**: keterbatasan jaringan antarwilayah, sarana-prasarana dasar yang belum merata, rendahnya persentase rumah layak huni, cakupan TIK belum merata, dan rendahnya luas RTH.
- **Lingkungan & Ketahanan Bencana**: deforestasi, alih fungsi lahan yang masif, pengeringan lahan gambut, rendahnya kapasitas mitigasi bencana, dan ancaman perubahan iklim.
- **Tata Kelola Pemerintahan**: belum optimalnya otonomi khusus, rendahnya nilai Indeks Pelayanan Publik, belum berkembangnya layanan berbasis elektronik, dan kurangnya inovasi pendukung pelayanan publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan berbagai inovasi di sejumlah SKPK. Beberapa inovasi unggulan yang relevan dengan isu strategis daerah antara lain:

- **Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**: *GO START* (Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Anak Stunting Kolaboratif) untuk percepatan penurunan stunting melalui dukungan donasi terarah; *Santunan Kematian (SAKENA)* untuk membantu keluarga kurang mampu yang kehilangan anggota keluarga; *Gerakan Peduli Lansia* untuk peningkatan kesejahteraan lansia.
- **Bidang Pendidikan dan Keagamaan**: *E-SAPA* (Elektronik Sistem Akuntabilitas Pendidikan) untuk meningkatkan kedisiplinan guru melalui absensi berbasis teknologi; *Standarisasi Dayah* untuk memperbaiki mutu pendidikan berbasis agama; *SATSEK* (Satpol PP Saweu Sekolah) untuk edukasi bahaya narkoba dan pencegahan tawuran antar pelajar.
- **Bidang Lingkungan dan Infrastruktur**: *SAMJUBER* (Saweu Mesjid Jumat Bersih) untuk menjaga kebersihan masjid dan mempererat silaturahmi masyarakat; *Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat* untuk mengurangi timbulan sampah; serta *Gerakan Menanam Pohon* guna menjaga lingkungan dan ruang terbuka hijau.

- **Bidang Tata Kelola dan Layanan Publik**: *PLAYSTATIONTARA* (Pelayanan Surat Tanah Online Kecamatan Tadu Raya) untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah secara digital; *Klinik Inovasi Daerah (Klinov Nara)* sebagai wadah asistensi dan pendampingan pengembangan inovasi di seluruh SKPK.

Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya memperbaiki pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjawab langsung isu-isu strategis seperti penurunan stunting, penguatan pendidikan, peningkatan mutu layanan keagamaan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

**TABEL 4.17**
**INOVASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**
**TAHUN 2024**

| NO | NAMA INOVASI | RANCANG BANGUN | TUJUAN | MANFAAT | HASIL INOVASI | WAKTU PENERAPAN | INISIATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAKENA | Santunan kematian adalah pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada masyarakat fakir miskin dalam Kabupaten Nagan Raya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 5 Tahun 2021 BAB V Penyaluran pasal 11 menerangkan bahwa santunan kematian diberikan kepada; Orang dewasa laki-laki dan/atau wanita janda sebagai Kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga diberikan sebesar Rp.5.000.000; Orang dewasa laki-laki dan/atau wanita janda sebagai Kepala keluarga yang tidak mempunyai tanggungan keluarga diberikan sebesar Rp.4.000.000;Orang dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp.3.000.000; Orang yang belum dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai anggota keluarga diberikan  sebesar Rp.2.000.000.Anak usia 5 tahun kebawah sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp.2.000.000. Maka Perlu dilakukan analisa yang mendalam untuk memahami permasalahan saat ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya. Beberapa permasalahan yang sekarang dialami diantaranya adalah sebagai berikut;<br>• Masih kurangnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat; | Tujuan yang diperoleh adalah terbantunya dana untuk penyelesaiyan fardukifayah terhatadap penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan yaitu santunan kematian | Membantu meringankan beban atau kebutuhan pemakaman keluarga yang berduka | Hasil yang diperoleh adalah terbantunya dana untuk penyelesaiyan fardukifayah terhatadap penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan yaitu santunan kematian dan Membantu meringankan beban atau kebutuhan pemakaman keluarga yang berduka | 10/10/2018 | BAGIAN KEISRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemberian bansos yang terkesan lambat dan terlalu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.<br>• Kurangnya koordinasi yang dilakukan SKPK yang yang membidangi keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini SKPK terkait sering mengabaikan fungsi Bagian Kesra yang merupakan pusat koordinasi kegiatan.<br>• Masih kurangnya informasi yang diberikan oleh SKPK terkait kegiatan dan hasil kegiatan yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan kesulitannya melakukan evaluasi terkait kegiatan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat<br>• Minimnya jumlah ASN dan SDM yang memadai; Masih banyaknya ASN yang tidak mampu menguasai teknoligi komputerisasi sehingga memperlambat dalam pemberian pelayanan dan penyimpanan data bansos.<br>• Pemberian bansos yang belum tepat sasaran; Adanya pemberian bansos yang belum tepat sasaran disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum akurat, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.<br>• Masih adanya masyarakat yang seharusnya masuk kedalam DTKS tetapi tidak terdata, hal ini menimbulkan resiko gejolak pada masyarakat. Ini mungkin disebabkan adanya kekeliruan dari pihak operator/aparatur gampong atau adanya ikatan kekeluargaan antara oknum operator dengan masyarakat tertentu.<br>• Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan koordinasi pendistribusian bantuan santunan kematian dari keluarga | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kurang mampu. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan pelayanan dan waktu yang tersedia ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial.<br>Dari hasil analisis masalah yang Mengembangkan suatu program atau aplikasi dalam rangka pemberian pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya bantuan santunan kematian dari keluarga tidak mampu. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan Tidak Maksimalnya proses pendistribusian bantuan santunan kematian dari keluarga tidak mampu Pelayanan masih dilakukan secara manual dan tatap muka, Masih menggunakan berkas fisik (hardcopy), Belum tersedianya aplikasi mandiri yang berbasis digital manfaat dari Santunan kematian meringankan adapun tujuan yang diperoleh adalah terbantunya dana untuk penyelesaian fardukifayah terhadap penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan yaitu santunan kematian manfaat Membantu meringankan beban atau kebutuhan | | | | | |
| 2. | SIGASEH | Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan<br>Tingginya angka prevalensi stunting yaitu 32.5 persen berdasarkan Survei Stuatus Gizi Indonesiapada Tahun 2021, serta rendahnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yaitu 57.0 persen diKabupaten Nagan Raya, maka Dinas Kesesehatan Kabupaten Nagan Raya berupaya menurunkan stunting dan meningkatkan cakupan imunisasi melalui Siuroe Gampong Sehat (SIGASEH) atau satu hari untuk kesehatan yang dilakukan setiap bulan di desa dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ikut turun ke posyandu | Tujuan Inovasi Daerah<br>1. Meningkatkan keterlibatan SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya dalam pelayanan Kesehatan Di Gampong;<br>2. Meningkatnya motivasi | Manfaat Yang Diperoleh<br>1. Terdeteksi lebih awal kasus stunting, masalah Gizi Lainnya untuk segera mendapat intervensi; | Hasil Inovasi<br>1. Meningkatnya cakupan kunjungan SPM;<br>2. Menurunya Prevalensi Stunting;<br>3. Meningkatnya cakupan imunisasi. | 11/01/2021 | DINAS KESEHATAN |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | guna memberi dukungan terlaksananya kegiatan SIGASEH sebagai dukungan pemerintah dalam menjalankan program.<br>Sehubungan dengan tingginya prevalensi stunting dan rendahnya cakupan imunisasi di Kabupaten Nagan Raya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berupaya menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan cakupan imunisasi dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten turut ikut ke posyandu untuk memberi dukungan kepada masyarakat agar mau membawa anaknya untuk dibawa kePosyandu guna untuk dilakukan pengukuran dan sekaligus untuk mendapat Makanan Tambahan (MT) baik dari anggaran Dana Desa maupun dari Dinas Kesehatan/Puskesmas Kabupaten Nagan Raya.<br>Program Inovasi SIGASEH di peruntukkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, PUS, Balita, Remaja, Usia Produktif dan Lansia.<br>Adapun tujuan dari inovasi SIGASEH ini adalah sebagai berikut:<br>1. Meningkatkan keterlibatan SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya dalam pelayanan Kesehatan di Gampong;<br>2. Meningkatnya motivasi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di posyandu;<br>3. Meningkatnya cakupan penimbangan balita di posyandu;<br>4. Terdeteksinya secara cepat status gizi balita, dan jika diangap tidak sesuai dengan status gizi untuk dapat segera di intervensi;<br>5. Menurunnya prevalensi stunting di tingkat gampong;<br>6. Meningkatnya cakupan IDL di Kabupaten Nagan Raya;<br>7. Sebagai Bahan Evaluasi Program Kesmas;<br>8. Sebagai bahan perencanaan di bidang Kesehatan;<br>Adapun manfaat dari inovasi sigaseh adalah sebagai berikut: | masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di posyandu;<br>3. Meningkatnya cakupan penimbangan balita di posyandu;<br>4. Terdeteksinya secara cepat status gizi balita, dan jika diangap tidak sesuai dengan status gizi untuk dapat segera di intervensi;<br>5. Menurunnya prevalensi stunting di tingkat gampong;<br>6. Meningkatnya cakupan IDL di Kabupaten Nagan Raya; | 2. Meningkatnya motivasi masyarakat untuk ke posyandu;<br>3. Menjaring Penyakit Menular dan Tidak menular;<br>4. Meningkatkan Cakupan SPM. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Terdeteksi lebih awal kasu stunting, masalah Gizi Lainnya untuk segera mendapat intervensi;<br>2. Meningkatnya motivasi masyarakat untuk ke posyandu;<br>3. Menjaring Penyakit Menular dan Tidak menular;<br>4. Meningkatkan Cakupan SPM. | 7. Sebagai Bahan Evaluasi Program Kesmas;<br>8. Sebagai bahan perencanaan di bidang Kesehatan. | | | | |
| 3. | SUPERKAGALA | Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Subbidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai merupakan salah satu unsur teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi di Subbidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai.<br>Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepala Subbidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai melaksanakan fungsi:<br>a. Membantu Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian dalam bidang tugasnya;<br>b. Mengkoordinir dan Mengawasi Kegiatan Penyusunan bahan persetujuan dan penetapan keputusan meliputi kenaikan | Adapun tujuan dari inovasi ini adalah sebagai berikut<br>•Tujuan Jangka Pendek, meliputi:<br>1. Adanya aplikasi cetak SPKGB;<br>2. Tersedianya QR Code pada SPKGB sehingga dapat dipindai keabsahannya secara online;<br>3. Adanya Pembaharuan Standar Operasional Prosedur SPKGB;<br>4. Berkurangnya kesalahan ketik | Adapun manfaat yang diperoleh adalah:<br>•Memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan Cetak SPKGB<br>•Memudahkan verifikasi SPKGB dikarenakan berkurangnya kesalahan ketik<br>•Mendapatkan kepuasan dari penerima layanan dengan tampilan SPKGB yang rapi dan menarik Meningkatkan | Penyediaan Aplikasi Cetak SPKGB dengan akronim "SUPERKAGALA" dapat mengoptimalkan pelayanan pemprosesan SPKGB pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya sehingga memaksimalkan kinerja layanan dan memberikan kepuasan kepada PNS penerima layanan, aplikasi ini juga diharapkan mampu memberikan | 22/11/2021 | BKPSDM Kab. Nagan Raya |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pangkat, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala dan mutasi lainnya dalam rangka tertibnya administrasi;<br>c. Mengelola Pelaksanaan Penyelesaian proses perpindahan unit atau wilayah kerja PNS sesuai ketentuan dan kebutuhan;<br>d. Mengkoordinir kegiatan pemberian nomor surat persetujuan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kepangkatan dan penggajian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;<br>e. Melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi menurut jenis dan klasifikasi dalam rangka tertib administrasi kepangkatan dan jabatan dan untuk memenuhi pihak – pihak yang membutuhkan; dan<br>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.<br>Merujuk pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/137/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, disebutkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Nagan Raya tahun 2020 adalah 40,08 dengan kategori Salah satu komponen penilaiannya adalah Kualitas Layanan Publik, dari bobot 10,00 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya hanya memperoleh nilai 4,50.<br>Kondisi yang masih harus diperhatikan adalah upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas | dalam proses cetak SPKGB;<br>5. Tampilan SPKGB menjadi lebih lebih rapi dan menarik.<br>•Tujuan Jangka Menengah (6 bulan s.d. 1 tahun), meliputi:<br>1. Pengembangan Aplikasi dengan penambahan fitur usulan berkas secara paperless;<br>2. Tersedianya SMS/WA Gateway Layanan SPKGB<br>•Tujuan Jangka Panjang (1 s.d. 2 tahun):<br>1. Adanya Pengembangan Aplikasi berbasis android | capaian kinerja Stakeholder / Penerima Layanan<br>•Mewujudkan pelayanan prima khususnya pelayanan SPKGB<br>•Mempercepat alur proses verifikasi dikarenakan berkurangnya kesalahan ketik<br>•Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan SPKGB yang diperbaharui<br>•Memperoleh persepsi positif dari penerima layanan atas peningkatan | kemudahan kepada petugas/operator yang akan memproses pencetakan SPKGB sehingga proses pencetakan SPKGB menjadi lebih cepat, akurat, efektif dan efisien. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pelayanan publik termasuk juga layanan administrasi kepegawaian dengan mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan kepada PNS penerima layanan.<br>Saat ini pada Subbidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM Kabupaten Nagan Raya terkait dengan layanan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, layanan usulan jabatan fungsional dan peninjauan masa kerja dan khusus untuk layanan administrasi kepegawaian usulan kenaikan gaji berkala dalam proses tata kelola pelaksanaannya masih dilakukan secara manual, misal untuk proses cetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala masih  menggunakan aplikasi sederhana berbasis Microsoft Excel sehingga sering menimbulkan kesalahan ketik pada SPKGB yang dicetak dan secara tidak langsung mengurangi kualitas layanan pemrosesan layanan kenaikan gaji berkala bagi PNS penerima layanan yang berdampak pada tidak optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian sehingga diperlukan adanya suatu terobosan untuk mengatasi persoalan tersebut. | | kualitas layanan SPKGB<br>•Mendapatkan Layanan SPKGB yang cepat dan terukur<br>•Mendapatkan SPKGB dengan tampilan yang rapi dan menarik dengan QR Code untuk validasi keabsahan dokumen<br>•Mendapatkan pelayanan prima dalam layanan SPKGB | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | KLINOV NARA | DASAR HUKUM<br>-Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional<br>-Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah<br>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah<br>Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 388 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. inovasi yang dimaksud merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah ditegaskan bahwa kepala daerah melaporkan inovasi daerah kepada menteri dalam negeri dan menteri dalam negeri melakukan penilaian terhadap hasil inovasi daerah tersebut. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah. Inovasi dapat terjadi pada setiap aspek seperti perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/instansi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Proses inovasi sendiri dapat terjadi secara perlahan atau bisa juga lahir dengan cepat. Hal tersebut | •Mendorong partisipasi Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Anggota DPRD, ASN dan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pencapaian indeks inovasi daerah.<br>•Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan inovasi daerah.<br>•Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan inovasi daerah.<br>•Melakukan penguatan regulasi dan | Dengan adanya klinik inovasi maka terfasilitasinya dan terbantunya SDM Aparatur dalam menciptakan dan mengembangan gagasan, ide dan inovasi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari seperti tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Lebih banyaknya muncul ide-ide atau gagasan inovasi daerah di Kabupaten Nagan Raya | 04/04/23 | BAPPEDA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bergantung pada kecepatan proses implementasi dan keberanian untuk mengungkapkan inovasi yang dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat suatu organisasi/instansi tumbuh, berubah, berkembang dan berhasil. Untuk dapat memunculkan suatu inovasi harus dimulai dari perubahan mindset atau pola pikir dalam melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan. Terkadang ditengah keterbatasan dan kekurangan dalam pekerjaan yang dilakukan, inovasi dapat muncul dalam setiap urusan pekerjaan karena inovasi bukanlah program, kegiatan bahkan anggaran. Inovasi adalah bukti dari solusi dalam terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang mnejadi kewenangan daerah.<br>Terdapat 5 kriteria inovasi daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah meliputi:<br>1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi<br>2. Memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat<br>3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai<br>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br>4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah<br>5. Dapat direplikasi | penguatan publikasi layanan inovasi daerah.<br>•Melakukan evaluasi terhadap progress dan capaian kegiatan pelaksanaan inovasi daerah.<br>•Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan inovasi daerah | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten Nagan Raya dalam pengumpulan Indeks Inovasi Daerah masih memiliki hasil yang kurang baik yaitu predikat kurang Inovatif. Oleh karena itu untuk lebih memaksimalkan hasil inovasi daerah Kabupaten Nagan Raya maka dibentuklah Klinik Inovasi Kabupaten Nagan Raya (Klinov Nara) untuk membantu SDM Aparatur dalam menerapkan inovasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan serta menjaring inovasi-inovasi yang telah diterapkan ataupun dikembangankan untuk memaksimalkan indeks inovasi daerah dan mampu menaikkan predikat Kabupaten Nagan Raya menjadi Sangat Inovatif. Klinik Inovasi ini merupakan klinik konsultasi dan pendampingan pengembangan inovasi bagi pelaksana inovasi. Klinik Inovasi Daerah sendiri merupakan bagian dari Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kabupaten Nagan Raya. | | | | | |
| 5. | GO START | Periode seribu hari bagi anak berusia di bawah lima tahun (balita) dikenal luas dalam dunia kesehatan dan gizi dengan istilah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) merupakan periode penting karena menyangkut awal kehidupan yang menentukan kualitas kehidupan masa depan. Diperlukan perhatian serius  kepada balita pada masa 1.000 HPK tersebut untuk mencegah jangan sampai balita mengalami stunting.<br>Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas) tahun 2018, angka prevalensi stunting di Indonesia sebanyak 8,7 juta atau 30,7% bayi berumur bawah lima tahun (balita), dalam hal ini angkanya masih di atas target yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian dalam penanganan masalah stunting, dapat kita lihat dalam Rencana | Tujuan inovasi adalah memfasilitasi atau mengorganisir aksi intervensi stunting, menyalurkan donasi pemangku kepentingan secara tepat guna yang transparan dan akuntabel dalam rangka penurunan | Dengan adanya GO START telah berhasil menurunkan prevalansi angka stunting di Kabupaten Nagan Raya serta memudahkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam memfasilitasi | Kegiatan GO START dilaksanakan selama 90 hari di mulai pada bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024, pada bulan November 2023 jumlah balita di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 11,007 jiwa, dengan jumlah balita stunting sebanyak | 01/11/2023 | BAPPEDA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menargetkan penurunan angka stunting paling tinggi 14% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan tugas berat yang masih harus diselesaikan terkait penanggulangan stunting di Indonesia.<br>Kegagalan penyelesaian masalah stunting ini berdampak sangat serius karena dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan nasional, dan risiko beban besar yang harus ditanggung negara akibat sangat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki daya saing. Target Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan tahun 2030 dan perwujudan Indonesia Unggul tahun 2045 pun tidak tercapai bila kita gagal dalam mengatasi masalah stunting.<br>Pelaksanaan strategi prioritas nasional penurunan stunting menetapkan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Sekretariat Pelaksana, dengan melibatkan mitra Kementerian /Lembaga terkait. Dalam Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN Pasti) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk:<br>a. menurunkan prevalensi stunting;<br>b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;<br>c. menjamin pemenuhan asupan gizi;<br>d. memperbaiki pola asuh;<br>e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan | prevalansi angka stunting di Kabupaten Nagan Raya. | dan mengorganisir aksi intervensi stunting. | 528 jiwa atau 4,8 persen. Pada bulan Januari 2024 jumlah balita sebanyak 10,920 jiwa, dengan jumlah balita stunting sebanyak 448 jiwa atau 4,1 pesen. Selama 90 hari kegiatan GO START terjadi penurunan balita stunting sebanyak 80 jiwa, atau 0,7 persen. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<br>Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yaitu:<br>a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;<br>b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;<br>c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;<br>d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan<br>e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.<br>Kabupaten Nagan Raya ditetapkan sebagai Kabupaten Lokasi Fokus (Lokus) stunting oleh Pemerintah pusat pada tahun 2020, sejak saat itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan di bentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten. Berdasar data E-PPGBM Dinas Kesehatan angka prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya sebesar 37.7 % pada tahun 2018, 29.4 % pada Tahun 2019, 26 % pada tahun 2020, 17.2 % pada tahun 2021 dan 10,4 % Tahun 2022. Angka | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prevalensi Stunting di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh karena intervensi yang dilakukan selama ini. Namun demikian angka prevalensi stunting Kabupaten Nagan Raya masih tinggi jika berdasarkan Data Survey Status gizi Indonesia (SSGI) yaitu sebesar 32.5 % pada tahun 2021 dan 28.8% pada tahun 2022. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nagan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk melakukan berbagai upaya dan inovasi agar terjadi percepatan penurunan stunting sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMN yaitu 14 % pada tahun 2024. Salah satu inovasi yang dilaksanakan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Anak Stunting Kolaboratif atau START GO START adalah Gerakan gotong royong seluruh pemangku kepentingan (orang perseorangan, Masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan) dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Nagan Raya.<br>Prioritas utama pelaksanaan program GO START ditujukan bagi bayi bawah dua tahun (baduta) dan bayi bawah tiga tahun (balita) dengan status sangat pendek dan pendek, berdasarkan pada data Elektronik Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPGBM) jika masih terdapat sisa donasi maka dapat dipergunakan untuk perluasan sasaran yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui.<br>Tata kelola GO START adalah sebagai berikut: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Donasi kepada sasaran berupa uang sebesar Rp 10.000/ hari / orang, diberikan kepada kader tim penggerak PKK Gampong untuk keperluan akomodasi dan memasak;<br>2. Orang tua asuh memberikan donasi berupa uang sebesar jumlah anak stunting yang menjadi tanggungannya melalui mekanisme trafer ke rekening a.n. PKK Gampong pada PT. Bank Aceh Syariah;<br>3. Donasi diberikan kepada sasaran intervensi Percepatan Penurunan Stunting selama 3 (tiga) bulan, atau total yang dibutuhkan adalah Rp 900.000, - /orang;<br>4. Seluruh donasi di salurkan oleh Tim penggerak PKK Gampong sesuai dengan lokasi sasaran penerima manfaat dalam bentuk makanan sehat yang diberikan setiap hari untuk 1 (satu) kali makan;<br>5. Biaya operasional Tim Penggerak PKK Gampong dalam melaksanakan kegiatan GO START dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).<br>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan<br>1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPMGP4, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Pemangku Kepentingan beserta Tim Penggerak PKK Kabupaten;<br>2. Monitoring dilakukan setiap minggu sekali untuk memantau perkembangan penerima manfaat dan pengelolaan dana;<br>3. Evaluasi dilakukan setiap bulan sekali;<br>4. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar tindak lanjut Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Tim Penggerak Gampong menjalankan program GO START;<br>5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten melaporkan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut paling sedikit 1 (satu) kali | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | setiap 1 (satu) bulan pelaksanaan kegiatan GO START Kepada Bupati Nagan Raya.<br>Untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, kegiatan GO START ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 400.7.1/416/Kpts/2023 tentang Gerakan Orang Tua Asus Atasi Anak Sunting GO START. | | | | | |
| 6. | PLAYSTATION TARA | Latar belakang dari penerapan surat tanah online di Indonesia berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses pendaftaran tanah. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi latar belakangnya: - *Kepastian Hukum*: Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Pendaftaran tanah secara online bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki seseorang *Efisiensi Proses*: Pendaftaran tanah online memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik dan yuridis tanah secara lebih efisien¹.- *Kemudahan Akses*: Dengan sistem online, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran tanah tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan* Transparansi*: Sistem online memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses pendaftaran tanah, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa tanah *Pelayanan Publik*: Inisiatif surat tanah online merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan[4].<br>Dengan adanya sistem pendaftaran tanah online, diharapkan proses administrasi tanah menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. | Untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat tanah | Surat Tanah dapat dengan mudah pengurusannya | Surat Tanah | 25/12/2023 | OPD KECAMATAN TADU RAYA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Latar belakang dari penerapan surat tanah online di Indonesia berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses pendaftaran tanah. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi latar belakangnya: - *Kepastian Hukum*: Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Pendaftaran tanah secara online bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki seseorang¹.- *Efisiensi Proses*: Pendaftaran tanah online memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik dan yuridis tanah secara lebih efisien *Kemudahan Akses*: Dengan sistem online, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran tanah tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan *Transparansi*: Sistem online memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses pendaftaran tanah, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa tanah sup2;.- *Pelayanan Publik*: Inisiatif surat tanah online merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan[4].<br>Dengan adanya sistem pendaftaran tanah online, diharapkan proses administrasi tanah menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. | | | | | |
| 7. | | Pada setiap hari jumat, seluruh SKPK (satuan kerja perangkat kabupaten) yang berada di kabupaten nagan raya akan melaksanakan kegiatan jumat bersih. kegiatan jumat bersih ini dilakukan dengan membersihkan seluruh area perkantoran masing-masing mulai dari halaman, ruangan hingga toilet. Selama ini telah dilakukan beberapa variasi kegiatan pada jumat bersih seperti berkebun hingga senam jantung sehat hal ini | Kegiatan Samjuber bertujuan agar tempat ibadah menjadi lebih bersih, kegiatan samjuber juga | Manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat yaitu kenyamanan dalam melakukan | Mesjid menjadi lebih bersih dan terawat | 08/02/2023 | OPD ECAMATAN BEUTONG |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAMJUBER | dilakukan agar kegiatan jumat bersih menjadi menyenangkan dan tidak bersifat monoton. Kecamatan beutong saat ini memiliki 24 (dua puluh empat) gampong dimana setiap gampong memiliki 1 (satu) buah mesjid yang dikelola. sesuai dengan kutipan "kebersihan adalah bagian dari iman" (HR. muslim) dan mayoritas masyarakat yang beragama muslim, fakta ini kemudian melahirkan sebuah inovasi bernama "SAMJUBER (saweu mesjid jumat bersih)" mesjid dinilai sebagai sarana yang efektif dalam menularkan sifat menjaga kebersihan bagi masyarakat.<br>Kegiatan Samjuber dilakukan dengan membersihkan mesjid-mesjid yang ada disetiap gampong secara bergiliran setiap hari jumat, selama ini kegiatan berjalan dengan lancar karena adanya koordinasi yang baik antara camat, keuchik, imum mukim, dan aparat tuha peut gampong. Kegiatan samjuber dilakukan dengan pembersihan secara merata pada seluruh area mesjid terutama toilet dan area wudhu. Masyarakat setempat juga menyambut kegiatan ini dengan antusias hal ini ditandai oleh adanya masyarakat yang turut serta membantu proses pembersihan mesjid. Selain bertujuan agar tempat ibadah menjadi lebih bersih, kegiatan samjuber juga digunakan sebagai sarana memper-erat tali silaturrahmi dengan masyarakat sehingga tercapai harmonisasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.<br>Kegiatan Samjuber telah dilaksanakan sejak tanggal 10 maret 2023, manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat yaitu kenyamanan dalam melakukan ibadah dimana mesjid yang sebelumnya kotor dan tidak terurus setelah adanya program ini menjadi lebih terjaga kebersihannya hal ini membuat | digunakan sebagai sarana memper-erat tali silaturrahmi dengan masyarakat sehingga tercapai harmonisasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. | ibadah dimana mesjid yang sebelumnya kotor dan tidak terurus setelah adanya program ini menjadi lebih terjaga kebersihannya hal ini membuat masyarakat bersemangat dalam melakukan proses peribadatan | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | masyarakat bersemangat dalam melakukan proses peribadatan. kami berharap respon positif dan semangat menjaga kebersihan dapat terus ditularkan kepada masyarakat luas dan kegiatan positif seperti ini dapat berlanjut menjadi sebuah kebiasaan yang membawa dampak baik. | | | | | |
| 8. | E-SAPA | E-Sapa Adalah Sistem Akuntabilitas Pendidikan Nagan Raya dan merupakan Sistem Absensi elektronik yang digunakan Dinas Pendidikan sebagai Aplikasi Presensi Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mehadirkan keterbukaan infomasi Publik, dimana kehadiran Guru dan Tenaga Pendidik di Sekolah dapat di lihat secara REAL-TIME oleh Masyarakat Umum. E-Sapa ini merupakan sebuah aplikasi absensi secara daring atau absensi wajah (Face Recognition) bagi para guru mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah(SMP) Kedisiplinan para guru tentu menjadi hal yang sangat penting terlebih dalam dunia pendidikan. Dengan berbasis sebuah Aplikasi E- Sapa atau Elektronik Sistem Akuntabilitas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya mampu menciptakan kehadiran guru meningkat hampir 100 persen. Terciptanya aplikasi ini setelah pihaknya melakukan evaluasi kedisiplinan dan kehadiran para guru ke sejumlah sekolah yang tersebar dalam Kabupaten Nagan Raya. Disitu terlihat banyak guru yang masih datang terlambat bahkan tidak hadIr, aplikasi E-Sapa yang sudah berjalan ini tidak hanya bisa akses oleh Dinas Pendidikan saja, akan tetapi para orang tua wali murid termasuk masyarakat juga bisa melihat langsung kedisiplinan atau kehadiran para guru tersebut bagi para guru yang berhalangan atau tidak bisa hadir ke sekolah dengan cara | Tujuan E-sapa Untuk meningkatkan kedisplinan guru dan memudahkan monitoring kehadiran guru disekolah | Dengan berbasis sebuah Aplikasi E- Sapa atau Elektronik Sistem Akuntabilitas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya mampu menciptakan meningkatkan kehadiran guru | Aplikasi E- Sapa atau Elektronik Sistem Akuntabilitas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya mampu menciptakan kehadiran guru meningkat hampir 100 persen | 01/01/2023 | OPD DINAS PENDIDIKAN |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mendadak, maka para guru tersebut harus memberitahukan pihak sekolah sehingga nanti diberikan kebijakan. Penggunaan E-sapa sangat mudah karena hanya melakukan foto wajah di lokasi yang telah ditentukan karena menggunakan akses gps untuk mengakses lokasi jika pengguna berada diluar lokasi maka tidak dapat melakukan absensi. Penggunaan juga hanya perlu mengunakan smartphone untuk mengunakan absensi tersebut, namun ada beberapa sekolah tidak dapat menggunakan E-sapa dengan maksimal karena di beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan jaringan Internet sehingga untuk melakukan absensi tersebut akan seidkit terlambat karena harus menunggu jaringan normal untuk itu Dinas Pendidikan perlu bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya khususnya Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Nagan raya untuk meningkatkan akses jaringan pada wilayah tersebut. | | | | | |
| 9. | SATSEK | Satsek adalah Satpol PP Saweu Sekolah, Satsek ini dibentuk karena dengan memperhatikan perkembangan perubahan lingkungan yang sangat tajam terhadap anak usia muda yang sangat cepat terpengaruh dengan lingkungan, apa lagi terhadap anak sekolah yang sangat mudah terengaruh dengan lingkungan maka Satsek ini memberikan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan taurwan antar sekolah terhadap anak didik di sekolah-sekolah, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang begitu sakral terhadap anak didik sekolah, | Satsek yang bertujuan untuk memahami tentang bahaya nya narkoba dan kerugian yang diakibatkan oleh tawuran antar sekolah sehingga anak-anak didik terhindar dari bahaya narkoba | Satsek ini memberikan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan taurwan antar sekolah terhadap anak didik di sekolah-sekolah, dengan memperhatikan perkembangan | Satsek ini menetralisir Narkoba dan taurwan antar sekolah terhadap anak didik di sekolah-sekolah, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang begitu sakral | 15/03/2023 | OPD SATPOL PP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan diharapkan setiap anak didik ini dapat merupakan penyambung informasi terhadap lingkuang yang ditempatinya. Satset ini juga merupakan salah satu inovasi daerah dalam rangka pembagunan daerah. | lingkungan yang begitu sakral terhadap anak didik sekolah, | terhadap anak didik sekolah, | | |
| 10. | DUPLIK TAJAM | DULIK TAJAM ADALAH DISKUSI PUBLIK SATU JAM<br>Inovasi Pelayanan publik ini adalah suatu usaha Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakan dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu  pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Adapun inovasi yang dilakukan Kecamatan Suka Makmue yaitu DUPLIK TAJAM (DISKUSI PUBLIK SATU JAM)<br>Ada banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan di Pemerintahan baik Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, | Diskusi Publik ini bertujuan mempercepat mencari sosusi setiap permaslahan yang ada Gampong Gampong secara umum dan secara khusus mencari solusi terhadap | Diskusi Publik Satu jam ini sangat bermanfaat yang langsung di rasakan oleh Manyarakat dalam Kecamatan Suka Makmue di karenakan setiap | Hasil inovasi Duplik Tajam ini adalah langsung menjawab seluruh tantangan yang dihadapi dalam Lingkungan Masyarakat Kecamatan Suka Makmue. | 15/11/2023 | OPD KECAMATAN SUKA MAKMUE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tidak jelasnya waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan, serta panjangnya prosedur untuk menyelesaikan satu jenis pelayanan.<br>Duplik tajam ini dibuat bertujuan mempercepat mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam wilayah kecamatan Suka Makmue dan dilalukan diskusi Publik dalam waktu satu jam sehingga semua persoalan yang ada dan isu isu stragis dapat terpecahkan.<br>Kedekatan perangkat Kecamatan tehadap permasalahan yang berkembang di wilayahnya membuat Kecamatan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat atau apa yang mereka hadapi. Kecamatan Suka Makmue berhadapan langsung dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Karena itu, Kecamatan sering juga dijadikan sebagai mediasi atas konflik yang muncul di antara kelompok masyarakat. Dalam realitas obyektif, wajah pemerintahan Kecamatan dewasa ini sesungguhnya ditandai dengan pelayanan masih banyak dikeluhkan, relatif belum optimal dan pengaturan kerja staf kurang efisien. Masih diperlukan, pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan. dengan adannya Inovasi duplik tajam ini berarti segala permasalahan di Desa dapat di Pecahkan secara efisien di Kecamatan Suka Mamue,<br><br>Dapat memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif;<br>Mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik;<br>Dapat mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan terhadap publik/masyarakat.Dapat meningkatkan kualitas Pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas | persoalan yang mendesak untuk selanjutnya di sampaikan kepada Bupati Nagan Raya melalui instansi terkait.<br>Dengan adanya inovasi Duplik Tajam suatu pelayanan  publik yang dilakukan Kecamatan Suka Makmue diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih baik yang dapat memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat | pemasalahan atau persoalan langsung ada solusinya melalui kegiatan ini. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kepada masyarakat, Terlaksananya pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. Duplik Tajam ini merupakan suatu inisiatif yang dilakukan oleh Kecamatan Suka Makmue untuk menjangkau seluruh Gampong dalam menyerapkan Permasalahan dan Isu-isu Strategis, sehingga semua kebutuhan Masyarakat dalam Wilayah Suka Makmue dan disampaikan ketingkat Kabupaten melalui intansi terkait. | dalam proses tercapainya seluruh program yang selaras dengan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. | | | | |
| 11. | PETERPAN NAGAN RAYA | Agribisnis merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendukung dan menunjang perkonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi krisis moneter maupun krisis pandemi Corona Virus Disease (COVID) – 19, agribisnis tetap dapat berjalan dan bertahan walaupun kondisi perekonomian yang sedang sulit. Agribisnis dalam hal ini sangatlah luas, baik itu pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.<br>Agribisnis peternakan merupakan salah satu sektor agribisnis yang memiliki peran yang penting dalam mendukung dan menunjang perkonomian masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Dalam pemeliharaan hewan ternak, masyarakat khususnya pelaku peternak berhadapan dengan ancaman penyakit yang berpotensi menimbulkan kerugian pada peternak. Penyakit pada ternak bisa berupa penyakit menular maupun yang tidak bersifat menular. Baik penyakit menular maupun yang tidak menular, penanganan penyakit yang tepat diperlukan untuk kesembuhan ternak yang mengalami penyakit. Tindakan penanganan penyakit pada ternak dapat dilakukan secara operatif maupun non operatif, perbedaan yang mendasar terdapat pada teknis dan juga biaya yang dibutuhkan oleh | Tujuan Adapun inovasi PETERPAN Nagan Raya memiliki tujuan untuk:<br>1.Mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terkait layanan kesehatan hewan pada hewan ternak yang mengalami penyakit; | MANFAAT YANG DIPEROLEH Program inovasi PETERPAN Nagan Raya diperuntukkan untuk masyarakat peternak di Kabupaten Nagan Raya. | HASIL YANG DIHARAPKAN Adapun inovasi PETERPAN memiliki manfaat sebagai berikut:<br>1.Tersedianya layanan kesehatan hewan pada ternak Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang mengalami penyakit; | 01/03/2023 | OPD DISTANAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | peternak untuk menyembuhkan penyakit pada hewan ternak yang sedang sakit.<br>Upaya penanganan penyakit pada ternak yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya memiliki beberapa hambatan teknis yaitu<br>1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Nagan Raya tidak berada di setiapkecamatan<br>2. Tidak adanya alat transportasi untuk mengantarkan ternak ke lokasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.<br>Hambatan teknis yang dialami tersebut seringkali berujung pada kerugian peternak yang disebabkan oleh tidak sembuhnya penyakit dan ternak terancam mati, sehingga hewan ternak dipotong dalam keadaan sakit parah di kandang dan dijual murah daripada mengalami kematian.<br>Menjawab tantangan yang dialami oleh peternak khususnya di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan menerapkan inovasi Pengobatan Ternak Panggilan (PETERPAN) Nagan Raya. Makna pengobatan berarti kegiatan penganggulangan penyakit ternak masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang sakit, sedangkan makna Panggilan yakni kegiatan pengobatan ternak berdasar pada panggilan masyarakat. Pengobatan dilakukan langsung di lokasi kandang tempat<br>pemeliharaan sehingga masyarakat tidak perlu repot membawa hewan ternak yang sakit ke UPTD Pusat Kesehatan Hewan.<br>Adapun rancang bangun dan perubahan yang telah dilakukan adalah penerapan inovasi pengobatan ternak yang sakit dapat dilakukan di rumah melalui panggilan peternak di Kabupaten Nagan Raya kepada petugas. Petugas selanjutnya datang ke | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lokasi hewan ternak yang sakit, melakukan serangkaian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan hingga selanjutnya menegakkan diagnosa dan melakukan pengobatan yang tepat kepada penyakit yang diderita ternak masyarakat. | | | | | |
| 12. | ALADOKAN | Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memperoleh data kependudukan yang valid, akurat, dan akuntabel dalam mendukung sistem percepatan pembangunan Daerah melalui kebijakan Daerah yang strategis, perlu melakukan; pelayanan administrasi kependudukan. Dan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan, serta mengembangkan; kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasimelakukan inovasi pelayanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyrakat maka Dinas kependudukan Kabupaten Nagan Raya menciptakan Inovasi Aladokan (Anak Lahir Dapat Dokumen Kependudukan). Inovasi Aladokan merupakan Kerjasama antar Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Puskesmas – Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Nagan Raya yang melakukan pelayanan bersalin. Dengan adanya Inovasi Aladokan ini setelah si anak lahir maka pihak keluarga tidak perlu datang lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencaattan Sipil untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan, tapi cukup dengan melengkapi berkas/persyaratan adminduk dan diserahkan ke Rumah Sakit, | Meningkatkan kualitas pelayanan adminduk bagi masyarakat kabupaten Nagan Raya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus dokumen adminduk ke Disdukcapil. Dengan demikian masyarakat langsung dapat memperoleh dokumen kependudukan yang baru berupa : Kartu keluarga, Akte Kelahiran anak dan Kartu identitas Anak. | Mempermudah masyarakat yang melakukan persalinan memperoleh dokumen kependudukan untuk anak mereka sehingga anak-anak di Kabupaten Nagan Raya memiliki dokumen kependudukan berupa : Kartu keluarga, Akte Kelahiran anak dan Kartu identitas Anak | Meningkatkan percepatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang baru selesai melakukan persalinan | 17/10/2023 | ODP DISDUKCAPIL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | klinik ataupun Puskesmas di tempat mereka melakukan persalinan.<br>Tujuan diciptakan inovasi Aladokan ini adalah; Untuk mempermudah, mempercepat pelayanan masyarakat yang melahirkan di RSUD dan Klinik bersalin untuk langsung mendapatkan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga Baru, Akte Lahir dan Kartu Indentitas Anak (KIA)). Selain itu dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mencegah pemungutan liar, serta memberikan pelayanan prima dalam mendapatkan dokumen kependudukan.<br>Untuk saat ini Kerja sama dalam pelaksanaan Inovasi Aladokan telah berjalan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda dan Klinik Ibunda Perta Medika. Inovasi ini akan terus kami kembangkan, dimana pada tahun 2024 direncanakan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya akan melaksanakan kerjasama dengan Klinik bersalin Nastia dan dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator Puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya.<br>Mekanisme pengajuan permohonan untuk pengurusan administrasi Kependudukan yang diajukan melalui inovasi aladokan ini yaitu: semua bahan dan berkas yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan KK baru, Akte kelahiran dan KIA maka pihak pemohon cukup menyerahkan  bahan melalui Rumah sakit dan Klinik di tempat melakukan persalinan. Pihak Rumah Sakit atau Klinik Bersalin mengajukan permohonan melalui Aplikasi SIDAK, dan apabila ada kendala melalui aplikasi SIDAK maka cukup melalui WhatsApp. Dimana bahan tersebut dapat di PDF kan dan | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dikirim melalui WhatsApp. Proses selanjutnya pengimputan Data dilakukan oleh operator Disdukcapil, bahan yang sudah diproses kemudian dikirim kembali melalui Aplikasi Sidak ataupun WhatsApp.<br>Dengan adanya inovasi ini kami mengharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan sehingga dengan adanya dokumen beruap KK baru, Akte kelahiran dan KIA sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan BPJS dan layanan Publik lainnya, serta memudahkan akses masyarakat yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan layanan adminduk. | | | | | |
| 13. | SIDOKAN | Seiringan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, instansi penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima yang merupakan harapan bagi setiap masyarakat, Dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima, sangat diperlukan Inovasi pelayanan publik untuk memberikan akses yang lebih luas serta menciptakan keanekaragaman metode pelayanan. Sehingga Disduk capil Kabupaten Nagan Raya menciptakan *1Inovasi SIDOKAN (Siap Ijab Kabul Dapat Dokumen Kependudukan) merupakan Kerjasama antara Disduk Capil dengan KUA Suka Makmue untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh Dokumen kependudukan bagi para pasangan suami istri yang melakukan akad nikah melalui KUA Suka Makmue. Inovasi ini memiliki dasar hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Nomor 470/93.a/Kpts/2022 tentang | Tujuan pelaksanaan Inovasi SIDOKAN untuk memudahkan  dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk bagi pasangan yang baru menikah khususnya di KUA Suka Makmue, sehingga pasangan yang | Pasangan Suami Isteri yang melakukan pernikahan di KUA Suka Makmue lebih mudah mendapatkan Dokumen Kependudukan dengan status baru tanpa harus mendatangi kantor Dinas Pencatatan Sipil | Meningkatkan Pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan bagi pasangan suami isteri yang baru menikah di KUA Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. | 31/08/2022 | ODP DISDUKCAPIL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penunjukkan/Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Inovasi Layanan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022. Alasan diciptakan inovasi ini karena masih Banyak Kalangan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang setelah menikah tidak langsung melakukan perubahan status dokumen kependudukan, sehingga pada saat dokumen kependudukan dengan status baru diperlukan, menjadi suatu permasalahan atau kendala. Sebelum adanya Inovasi Sidokan Masyarakat melakukan pengurusan Adminstrasi kependudukan pada saat dibutuhkan misalnya ketika masuk rumah sakit dan keperluan lainnya dalam kondisi mendesak, sehingga pada saat sistem atau jarinagn mengalami gangguan masyarakat merasa Disdukcapil memperhambat dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan pelayanan Publik.Dengan adanya Inovasi SIDOKAN, masyarakat yang telah melakukan Pernikahan di KUA Suka Makmue, setelah Ijab Kabul selain mendapatkan Buku nikah juga langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan  (Kartu Keluarga orang tua pasangan, Kartu Keluarga dan KTP-El pasangan suami-isteri). Dimana pada saat mendaftarkan pernikahan di KUA mereka juga melampirkan persyaratan untuk perubahan dokumen kependudukan.Program SIDOKAN sangat bermanfaat untuk Pasangan Suami -isteri yang telah melangsungkan pernikahan di KAU Suka Makmue, karena tanpa harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil para Pasangan setelah Ijab Kabul selain mendapatkan buku nikah juga mendapatkan Dokumen Kependudukan (KK dan KTP | baru menikah tidak perlu lagi mengurus dokumen adminduk berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el dengan status kawin ke Disdukcapil, karena setalah Ijab kabul di KUA para pasangan langsung memperoleh dokumen kependudukan status terbaru.60 | cukup melenkapi persyaratan perubahan Adminduk melalui KUA Suka Makmue. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | baru Pasangan suami Isteri dan KK baru orang tua kedua mempelai. | | | | | |
| 14. | RELING | UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubaha dalam UU nomor 20 Tahun 2023 telah mengamanatkan ASN untuk menjadi pelayan publik dan memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas terhadap masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 11 tahun 2023, Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan (DKPP) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang kelautan, perikanan dan pangan yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu memberikan kewenangan kepada DKPP untuk menerbitkan surat rekomendasi BBM bersubsidi kepada nelayan.<br>BBM merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh nelayan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut. Saat ini di lapangan banyak ditemukan nelayan kesulitan melaut dikarenakan akses untuk memperoleh BBM ini terkendala di surat resmi untuk mengambil di SPBU terdekat, oleh sebab itu nelayan cenderung membeli BBM subsidi pada pengecer dengan harga lebih mahal dari harga yang dijual resmi di SPBU. Mahalnya BBM ini terkadang tidak bisa diimbangi dengan hasil | Inovasi RELING ini memiliki tujuan yakni:<br><br>Mempercepat layanan birokrasi dengan memudahkan nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi bbm bersubsidi tanpa direpotkan harus mengurus ke dinas<br>Memberikan pelayanan administrasi pemberian surat rekomendasi yang efektif dan | Inovasi RELING ini juga memiliki beberapa manfaat yang berguna seperti:<br>1. Nelayan dapat menghemat waktu, ongkos transportasi serta jarak untuk mendapatkan surat rekomendasi<br>2.Menghilangkan stigma negatif terhadap pelayanan pemerintahan yang berbelit-belit serta susah untuk diakses | Kegiatan inovasi ini menargetkan nelayan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya yang menggunakan BBM bersubsidi jenis solar dapat dipermudah untuk mendapatkan akses surat rekomendasi sehingga tidak dipersulit oleh birokrasi administrasi. Sedangkan hasil akhirnya yakni tersalurkannya surat rekomendasi BBM bersubsidi kepada nelayan | 06/01/2022 | ODP DKPP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tangkapan yang sedikit sehingga banyak nelayan merugi dikarenakan ongkos operasional tinggi.<br>DKPP melakukan inovasi untuk mempermudah nelayan mendapatkan rekomendasi dengan melahirkan inovasi Rekom Keliling (RELING) yang bertujuan memberikan quick access pelayanan publik sehingga nelayan dimudahkan dengan adanya pemberian surat rekomendasi langsung di tempat (on the spot). Selain dari sisi pelayanan publik yang efektif dan efisien, nelayan lebih menghemat waktu dan ongkos transportasi ke kantor DKPP serta yang paling penting dapat bertukar informasi terkait permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis terhadap dunia kelautan.<br>Setelah melengkapi persyaratan seperti surat-surat resmi kapal, fotokopi ktp, kk serta kartu KUSUKA, nelayan dapat langsung diberikan surat rekomendasi dan langsung menuju SPBU terdekat untuk mengambil kuota BBM bersubsidi resmi dengan harga yang jauh lebih murah dari pengecer sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga serta mendukung kemandirian pangan di Kabupaten Nagan Raya. | efisien langsung di tempat berkomunikasi dan membangun silaturahmi langsung dengan masyarakat nelayan terkait persoalan/keluhan yang dihadapi di lapangan<br>Memastikan agar penggunaan BBM nelayan bersubsidi tepat sasaran | 3. Mengetahui persoalan / keluhan yang terjadi di lapangan dan menginventarisir permasalahan tersebut untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan ke pimpinan<br>4.Meminimalisir penyalahgunaan BBM nelayan bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan | dan BBM tersebut dapat digunakan tepat sasaran sesuai peruntukannya untuk aktifitas nelayan. | | |
| | | Inovasi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Perlu membuat Inovasi di masing - masing SKPK untuk membuat Inovasi daerah, maka Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Membuat Kegiatan Inovasi yaitu (SAJELIS) | TUJUAN INOVASI DAERAH<br>1.Memberikan pemahaman ilmu agama bagi masyarakat agar lebih baik dalam menghadapi | MANFAAT YANG DIPEROLEH<br>1.Masyarakat mendapatkan ilmu agama yang dapat langsung | Hasil inovasi sajelis ini bisa dapat langsung diterima oleh masyarakat yang mengikuti safari majelis ini dan dapat langsung | 12/09/2023 | ODP DINAS SYARIAT ISLAM |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | SAJELIS | Kegiatan (SAJELIS) Safari Majelis Taklim adalah salah satu agenda kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Syariat islam kabupaten Nagan Raya, sebelumnya Kegiatan Safarai Majelis Taklim diadakan untuk memberikan pemahaman ilmu agama islam bagi masyarakat di wilayah kabupaten nagan raya terbagi di 10 kecamatan.<br>majelis taklim juga diakui oleh negara melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departemen agama tahun 2006.<br>Hukum menuntut ilmu yang salah satunya dilakukan melalui majelis taklim adalah kewajiban. Sebagaimana sabda Rasul: Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim (Hadits sahih, diriwayatkan dari beberapa sahabat diantaranya: Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Al-Khudri Radhiallahu Anhum. Lihat: Sahih al-jami: 3913).<br>Bagi Anda yang sering menghadiri majelis taklim, maka bergembiralah karena majelis taklim adalah salah satu obat hati dalam islam dan sebagaimana Keutamaan berilmu dalam islam ada banyak keutamaan lain menghadiri majelis taklim<br>Kegiatan ini juga disisi oleh uztad/uztazah yang berkompeten guna memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat hal ini dilakukan guna mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam rumah tangga maupun didalam desa seperti contoh kekerasan dalam rumah tangga, acara mendidik anak, dan juga | cobaan dalam rumah tangga<br>2.Menghindari konflik antar warga baik antar dusun,tetangga dan konflik antar desa | diterapkan dalam bermasyarakat agar menjadi hidup lebih baik dalam bermasyarakat.<br>2. Berkurangnya kejadian konflik didalam masyarakat dikarnakan sudah adanya pemahaman ilmu agama yang didapatkan dengan diadakannya safari majelis (SAJELIS). | diterapkan dalam bermasyarakat. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | hal-hal lainnya yang berkaitan dalam berumah tangga, demikian juga didalam bermasyarakat.<br>Dengan demikian diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini masyarakat nagan raya dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan damai dan rukun saling menghargai seperti ajaran agama islam yang kita cintai. | | | | | |
| 16. | SIDUM NARA | Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Nagan Raya setiap tahunnya semakin meningkat, diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan daerah serta perputaran ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang, dalam mengelola data UMKM keseluruhan baik yang pemula maupun yang berkelanjutan serta yang aktif/tidak aktif sangat dibutuhkan sebuah Aplikasi.<br>SIDUMNARA merupakan singkatan dari (Sistem Informasi Data UMKM Terpadu Kab. Nagan Raya) Aplikasi yang dibangun ini untuk mengintegrasikan data UMKM  secara terpusat dan tersingkronisasi, juga sebagai manajemen arsip berkas data fisik ke digital yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya. Aplikasi ini sebagai Bank Data/Data base UMKM (yang didalamnya berisi data pedagang, pedagang  kaki lima, data pasar, data koperasi, pelaku industri, data perusahaan besar dan lain-lain), sebagai media promosi produk umkm dan juga sebagai pusat informasi harga pasar. Dengan adanya aplikasi ini ter-update data pelaku umkm aktif dan pasif dan memudahkan para pelaku umkm dalam mengakses informasi tentang pengembangan usahanya terkait pengurusan dalam mengajukan permohonan bantuan, Advokasi Bisnis, | Pelaku UMKM agar terpusat di Data Base SIDUMNARA dengan Tujuan Aplikasi ini yang sudah dilaksanakan dapat terwujud dan menyeluruh ke semua pelaku usaha dalam Kabupaten Nagan Raya | Dengan adanya Aplikasi SIDUMNARA/Bank Data UMKM dalam Kabupaten Nagan Raya diharapkan kedepan agar para pelaku UMKM semua terdaftar dan terus meningkatkan inovasi dari produk yang dihasilkan bisa dipromosi melalui menu dalam SIDUMNARA serta meningkatkan | Semua UMKM terdaftar di Database Sidumnara termasuk didalamnya Perizinan dan Hak Mrek | 25/08/2023 | ODP DISPERINDAGKOP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pendampingan Legalisasi usaha yang didalamnya ada NIB, Sertifikasi Halal dan Hak Merek dagang serta sebagai Informasi berbagai macam Informasi Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi bagi pelaku UMKM dalam Kabupaten Nagan Raya.<br>Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Berbagai program pemberdayaan dilaksanakan untuk mengembangkan UMKM, meningkatkan kapasitas SDM melalui Pelatihan, mengikutsertakan disetiap Pameran, membantu penunjang usaha berupa bantuan peralatan/bermesin dan memperluas jaringan pemasaran.<br>Hal ini dilakukan karena Pelaku UMKM dalam Kabupaten Nagan Raya masih minimnya SDM, usahanya sering macet dan pemasarannya terbatas, Salah satu penyebabnya adalah mayoritas UMKM menggunakan usahanya hanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. Pada dasarnya UMKM mulai dari  skala ultra mikro, mikro dan kecil, yang memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar naik kelas. | | daya saing di pasaran yang lebih luas serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan ekstrim. | | | |
| | | Inovasi Ini merupakan inovasi Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya, bentuk inovasi ini berupa Tata kelola Pemerintahan yang bersifat digital. Dasar hukum yang yang mengatur inovasi Sata Nara:<br>a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, | Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan | Transparansi Publik<br>b. Inovasi<br>c.Peningkatan Efisiensi | Tersedianya SDM Administrator Satu Data Nagan Raya di masing masing unit kerja yang telah mengikuti soialisasi | 17/07/2023 | Kepala Daerah DISKOMINFOTIK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | SATA NARA | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36830);<br>b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);<br>d.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);<br>e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);<br>f. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 Tahun 2021;<br>g. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor:048/384/Kpts/2022Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi;<br>h. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 500.14/256/Kpts/2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.<br>Tingkat Penyajian data Portal Open Data Satanara hanya menyajikan data kecamatan sedangkan Portal Open Data Aceh Menyajikan Data Kabupaten/Kota. | tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;<br>B. Mewujudkan Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembangunan;<br>c.Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan | | Peningkatan Kapasitas  SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Portal Satanara sudah memiliki template tabel dengan struktur tabel yang siap untuk diolah dan dianalisis sedangkan Portal SDI memiliki struktur tabel yang bervariatif karena merupakan kompilasi dari seluruh Portal Open Data seluruh Provdan Kab/Kota.<br>Kondisi sebelum adanya inovasi daerah ini kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang statistik sering terjadinya tumpang tindih data, data yang ada di OPD tidak berkesinambungan, kualitas data yang dihasilkan oleh produsen data OPD tidak seragam dan tidak sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Kondisi setelah adanya inovasi ini tersedianya SDM Administrator Portal Satu Data Nagan Raya pada masing - masing SKPK berdasarkan surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 500.14.1/250/Kpts/2023 yang telah mengikuti sosialisasi dan Bimtek Sata Nara sehingga munculnya pemahaman Sumber Daya Manusia Administrator SKPK terhadap keseragaman data dan data mulai terkelola dengan baik sesuai prinsip Satu Data Indonesia. | perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data; dan d.Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. | | | | |
| 18. | BANSIWAN ARA | Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh dengan ibukotanya Suka Makmue. Kabupaten ini terbentuk secara definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tepatnya tanggal 2 Juli 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Kabupaten Nagan | Adapun tujuan dari inovasi yang akan dilaksanakan dapat dibagi dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang | Ada Dua Manfaat Yang Diperoleh Yaitu<br><br>Manfaat bagi masyarakat (peserta pendaftaran) | Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran calon peserta penerima bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Nagan Raya serta Menghemat waktu | 15/06/2023 | ODP BAGIAN KEISRA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Raya sebesar 3.544,91 km2 (354,491 ha), atau sekitar 6,25 persen dari luas Provinsi Aceh.<br>Maka perlu dilakukan analisa yang mendalam untuk memahami permasalahan saat ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya. Beberapa permasalahan yang sekarang dialami diantaranya adalah sebagai berikut;<br>1.Masih kurangnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;<br>Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemberian bansos yang terkesan lambat dan terlalu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.<br>2.Kurangnya koordinasi yang dilakukan SKPK yang yang membidangi keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.<br>Dalam hal ini SKPK terkait sering mengabaikan fungsi Bagian Kesra yang merupakan pusat koordinasi kegiatan.<br>3.Masih kurangnya informasi yang diberikan oleh SKPK terkait kegiatan dan hasil kegiatan yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan kesulitannya melakukan evaluasi terkait kegiatan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat<br>4. Minimnya jumlah ASN dan SDM yang memadai;<br>Masih banyaknya ASN yang tidak mampu menguasai teknoligi komputerisasi sehingga memperlambat dalam pemberian pelayanan dan penyimpanan data bansos.<br>5. Pemberian bansos yang belum tepat sasaran; | sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:<br>1.Tujuan Jangka Pendek (sampai selesai diklat)<br>1.Terbangunnya aplikasi pendaftaran calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk santri dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu<br>2.Uji coba Aplikasi<br>3.Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan biaya pendidkan tentang aplikasi pendaftaran ini<br>4.Penggunaan Aplikasi | Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran calon peserta penerima bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Nagan Raya<br>Menghemat waktu dan biaya pendaftaran<br><br>Manfaat bagi Bagian Kesra Kab. Nagan Raya<br><br>Tidak menimbulkan penumpukan massa<br>Memudahkan dalam melakukan | dan biaya pendaftaran | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adanya pemberian bansos yang belum tepat sasaran disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum akurat, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.<br>Masih adanya masyarakat yang seharusnya masuk kedalam DTKS tetapi tidak terdata, hal ini menimbulkan resiko gejolak pada masyarakat. Ini mungkin disebabkan adanya kekeliruan dari pihak operator/aparatur gampong atau adanya ikatan kekeluargaan antara oknum operator dengan masyarakat tertentu.<br>6.Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan koordinasi pendistribusian bantuan biaya pendidikan untuk santri dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan pelayanan dan waktu yang tersedia ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial.<br>Oleh karena itu Isu Utama yang harus diselesaikan yaitu tidak maksimalnya proses pendistribusian bantuan biaya pendidikan untuk santri dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dengan cara:<br>1.Menciptakan pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan pada masyarakat dalam pengurusan berbagai Bantuan Sosial yang ada pada Bagian Keisra Setdakab Nagan Raya.<br>2. Mengembangkan suatu program atau aplikasi dalam rangka pemberian pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya bantuan biaya pendidikan untuk santri dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.<br>Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan Tidak Maksimalnya proses pendistribusian bantuan biaya | 2.Tujuan Jangka Menengah (6 bulan s.d 1 tahun)<br>Pendistribusian Bantuan Sosial secara terjadwal dan tepat waktu<br>3.Tujuan Jangka Panjang (1 s.d 2 Tahun)<br>Penambahan fitur aplikasi seperti fitur notifikasi ke akun pemohon tentang langkah-langkah setelah pendaftaran dan pengumuman lainnya | rekapitulasi calon penerima bantuan<br>Meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pendidikan untuk santri dan mahasisiwa dari keluarga tidak mampu yaitu:<br>1.Pelayanan masih dilakukan secara manual dan tatap muka<br>2. kesenjangan akses internet antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak.<br>3.Masih menggunakan berkas fisik (hardcopy)<br>4.Belum tersedianya aplikasi mandiri yang berbasis digital<br>Apabila permasalahan Tidak Maksimalnya Proses Pendistribusian bantuan biaya pendidikan untuk santri dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini diabaikan dan tidak segera dicari solusi pemecahannya maka akan berdampak sebagai berikut:<br>1. Rendahnya kinerja ASN pada Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Nagan Raya;<br>2. Rendahnya kinerja organisasi secara keseluruhan;<br>3.Persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik menjadi kurang baik;<br>Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan Tidak Maksimalnya proses pendistribusian bantuan biaya pendidikan untuk santri dan mahasisiwa dari keluarga tidak mampu yaitu:<br><br>Pelayanan masih dilakukan secara manual dan tatap muka Kesenjangan akses internet antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Masih menggunakan berkas fisik (hardcopy) Belum tersedianya aplikasi mandiri yang berbasis digital<br>Berdasarkan analisis masaah dan dalam rangka penegembangan kinerja organisasi, terobosan/inovasi yang | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | akan dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pandistribusian bantuan biaya pendidikan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah membangun suatu Aplikasi yang akan digunakan dalam proses Pendaftaran Peserta penerima bantuan sosial yang bertajuk BANSIWANARA (Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Santri Dan Mahasiswa Nagan Raya). | | | | | |
| 19. | ROMA | RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH<br>A. DASAR HUKUM<br>a. Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).<br>b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Definisikan sebagai Semua Bentuk Pembaharuan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<br>c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).<br>d. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya Nomor 041/10/Kpts/2023 tentang Penunjukkan dan Penetapan Panitia Kegiatan Roadshow Membaca Bersama (ROMA) sebagai Inovasi Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.<br>B. PERMASALAHAN<br>a) Permasalahan Makro | Meningkatkan minat baca terutama pada anak-anak kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar ( SD ) di wilayah Kabupaten Nagan Raya. | Anak-anak siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD) mempunyai minat membaca buku agar dapat menambah ilmu pengetahuanny a. | Meningkatnya jumlah anak-anak sekolah dasar yang bisa membaca sejak usia dini.serta meningkatlkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nagan Raya. | 07/02/2022 | DINAS PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya yang masih kurang terampil sesuai dengan tupoksi masing-masing dari ASN tersebut. Kemudian masalah pendanaan untuk pelaksanaan inovasi pelayanan publik tersebut yang belum tersedia.<br>b) Permasalahan Mikro<br>Kendala seperti kebijakan, iklim dan budaya organisasi serta infrastruktur yang kurang menyesuaikan dengan dinamika zaman.<br><br>C. ISU STRATEGIS<br>Masih banyak siswa-siswi sekolah dasar yang belum bisa membaca serta Rendahnya angka capaian Literasi Kabupaten Nagan Raya yang masih berada dibawah angka Nasional.<br>D. METODE PEMBAHARUAN<br>a) Kondisi Sebelum Adanya Inovasi<br>Siswa-siswi sekolah yang dikunjungi saat perpustakaan keliling yang masih ada anak-anak tidak mau untuk mengambil buku dimobil Perpustakaan keliling dengan alasan ada beberapa siswa yang kelas rendah belum bisa membacaserta mereka malu  ditertawakan teman-temannya.<br>b) Kondisi Setelah Adanya Inovasi<br>Terciptalah ide untuk membuat inovasi ROMA ini dengan membaca bersama anak-anak yang tidak bisa membaca mereka bisa menyimak untuk menambah ilmu pengetahuannya dan tertarik untuk terus belajar sampai mereka bisa membaca.<br>E. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN<br>Program ROMA sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama anak-anak yang masih kelas satu dan dua yang belum bisa | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | membaca bahkan ada juga beberapa sekolah yang agak jauh dari pusat Kabupaten Nagan Raya sampai kelas 6 belum lancar membaca sehingga dengan kita membaca bersama sama mereka tertarik untuk terus membaca sendiri sampai mereka jadi lancar membaca.<br>F. TAHAPAN INOVASI / PENGGUNAAN PRODUK<br>Tahapan Inovasi / Penggunaan Produk:<br>-Kebijakan pembentukan ROMA<br>Persiapan administrasi, tempat dan kelengkapan media kegiatan ROMA<br>Persiapan tenaga untuk Storytelling dan pemilihan tema cerita Pelaksanaan ROMA<br>Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program ROMA | | | | | |
| 20. | SIPETARUN G NARA | DASAR HUKUM<br>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Definisikan sebagai Semua Bentuk Pembaharuan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<br>b. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.<br>c.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).<br>d.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.<br>e. Keputusan Bupati Nagan Raya No. 600.3/300/Kpts/2023 tentang Pembentukan Tim Efektif Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital di Kabupaten Nagan Raya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. | Sebagai upaya memberikan informasi tata ruang Kabupaten Nagan Raya kepada publik  yang berkesinambunga n. | Memudahkan masyarakat, stakeholder dan investor mendapatkan layanan informasi pola ruang Kabupaten Nagan Raya. | Berdampak langsung kepada pelaksanaan pemamfaatan dan pembangunan daerah sesuai dengan arahan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Nagan Raya baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder. | 23/10/2023 | ODP PUPR |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya No. 600/28/2023 tentang Pembentukan Tim Pendukung Kegiatan Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital di Kabupaten Nagan Raya 2023.<br>g. Keputusan Bupati Nagan Raya No. 600.3.1/360/Kpts/2023 tentang Penetapan Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital di Kabupaten Nagan Raya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tahun 2023.<br><br>B. PERMASALAHAN<br>a) Permasalahan Makro<br>Pada zaman keterbukaan informasi dan globalisasi sekarang ini, masyarakat kapubaten Nagan Raya maupun stakeholder dan investor masih kesulitan mendapatkan pelayanan informasi tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Nagan Raya.<br><br>b) Permasalahan Mikro<br>Kendala seperti kebijakan dan budaya organisasi serta infrastruktur yang kurang menyesuaikan dengan dinamika zaman.<br><br>C. ISU STRATEGIS<br>Masyarakat, stakeholder dan investor masih tidak mendapatkan kemudahan urusan dan layanan informasi pola ruang di Kabupaten Nagan Raya.<br><br>D. METODE PEMBAHARUAN | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a) Kondisi Sebelum Adanya Inovasi<br>Masyarakat, stakeholder dan investor masih menggunakan layanan manual terkait informasi pola ruang di Kabupaten Nagan Raya.<br>b) Kondisi Setelah Adanya Inovasi<br>Terciptanya pelayanan publik yang mudah, cepat dan efektif serta dapat berdampak langsung kepada pelaksanaan pemanfaatan dan pembangunan daerah sesuai dengan arahan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Nagan Raya.<br><br>E. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN<br>Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital (SIPETARUNG) sangat mudah diakses oleh masyarakat, stakeholder dan investor. Perubahan layanan dari manual ke digitalisasi layanan publik ini dapat berdampak langsung kepada pelaksanaan pemamfaatan dan pembangunan daerah.<br><br>F. TAHAPAN INOVASI / PENGGUNAAN PRODUK<br>Tahapan Inovasi / Penggunaan Produk:<br>Mengumpulkan pejabat eselon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menggali masalah terkait dengan penyediaan informasi publilk pada Bidang Penataan Ruang.<br>Mencari cara penyelesaian permasalahan pelayanan publik pada Bidang Penataan Ruang.<br>Menentukan peta stackholder yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.<br>Penetapan draft Peraturan Bupati tentang Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital (SIPETARUNG). | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penetapan surat Keputusan Bupati tentang Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital (SIPETARUNG).<br>Melakukan pengembangan kapasitas SDM (IT, operator peta dan admin) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.<br>Melakukan uji coba input data ke dalam Sistem Pengembangan Informasi Tata Ruang Berbasis Digital (SIPETARUNG).<br>Pelaksanaan FGD/Sosialisasi SIPETARUNG” dengan OPD Kabupaten dan penandatanganan dukungan.<br>Monitoring dan evaluasi hasil uji coba. | | | | | |
| 21. | SABENJANI | Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana.<br>Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Qanun Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013. Salah satu tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana. Nagan Raya memiliki potensi bencana sepanjang tahun salah satunya banjir, tanah longsor, gempa dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya berupaya melakukan langkah pengurangan resiko bencana atau kerap disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan adanya pengetahuan tentang aspek-aspek | Menumbuhkan Sikap Tanggap Bencana Menambahkan Pengetahuan Tentang Kebencanaan | Tumbuhnya Sikap Tanggap Bencana Bertambahnya Pengetahuan Tentang Kebencanaan | Tumbuhnya Sikap Tanggap Bencana Bertambahnya Pengetahuan Tentang Kebencanaan | 05/02/2023 | OPD BPBD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kebencanaan. Pemberian pengetahuan pada anak usia dini dilakukan secara sederhana, yaitu dengan bermain peran, simulasi bencana, hingga pengenalan alat pemadam kebakaran. Sebagai lembaga yang konsen terhadap kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk terus berupaya melakukan mitigasi kebencanaan, dalam hal ini mitigasi pada anak usia ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada anak usia dini terhadap bahaya bencana dan mengembangkan perilaku tanggap bencana. Di Kabupaten Nagan Raya, pendidikan terkait bencana dan penanggulangannya belum mencapai sasaran yang luas dan menjangkau siswa didik usia dini, sehingga kurangnya keingintahuan siswa terkait bencana dianggap perlu untuk diminimalkan  dengan  kegiatan penyampaian informasi kebencanaan dengan membentuk sebuah Tim Sadar Bencana Sejak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan upaya  membentuk perilaku kesiapsiagaan bencana sejak usia dini. Kegiatan Sadar Bencana disertai dengan pengenalan alat damkar dengan metode demonstrasi hingga simulasi.<br>Dalam rangka menumbuhkan pengetahuan tanggap bencana pada peserta didik usia dini maka dibutuhkan suatu inovasi. Inovasi tersebut dapat menambah pengetahuan pada peserta didik usia dini dengan informasi kebencanaan sebagai upaya pengurangan resiko bencana dan upaya pembentukan perilaku kesiapsiagaan bencana sejak usia dini. Kegiatan sadar bencana sejak usia dini disertai dengan pengenalan alat damkar dengan metode demonstrasi hingga simulasi. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya menciptakan suatu inovasi berupa kegiatan Sadar Bencana Sejak Usia Dini (SABENJANI). | | | | | |
| 22. | PATEN NARA | Dasar hukum:<br>1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<br>2.Undang-UndangNomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>3.Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja<br>4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan<br>5.Surat Edaran Bupati Nagan Raya Nomor 500.15.9.1/255/2023 tentang Prioritas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Nagan Raya dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka<br>Permasalahan:<br>Kegiatan pelayanan antar kerja (PATEN NARA) adalah salah satu agenda kegiatan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya. Pelayanan antar kerja dilakukan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri | Tujuan inovasi daerah:<br>1. Memaksimalkan penyediaan informasi lowongan pekerjaan baik melalui media sosial maupun wa grup.<br>2. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan sehingga diharapakan banyak perusahaan yang melaporkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga | Manfaat inovasi daerah:<br>1. Data pencari kerja telah tertata dengan baik karena berbasis teknologi informasi sehingga mudah dalam penarikan data untuk kebutuhan laporan.<br>2.Lowongan kerja yang dipublikasikan lebih terjamin keasliannya.<br>3. Lebih efisien, bebas penipuan dan hemat | Hasil inovasi:<br>Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang tenaga kerja bahwa pada  tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pelayanan antar kerja dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Nagan Raya, diperoleh jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebanyak 21 orang dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 15 orang. | 19/06/2023 | OPD DISNAKERTRANS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990).<br>Sebelum tahun 2023 semua proses kegiatan dilaksanakan secara manual dan masih sangat minim penggunaan media sosial maupun sistem informasi ketenagakerjaan dari kementerian ketenagakerjaan. Minimnya perusahaan yang melaporkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahapan publikasi lowongan kerja menggunakan brosur dan masih kurang memanfaatkan media sosial, tahap pendaftaran pencari kerja (dalam membuat kartu AK I) yang mana mereka harus datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan registrasi secara manual (pengisian melalui bangko khusus), dan penyampaian data penempatan tenaga kerja dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.<br>Isu strategis:<br>Mengingat kegiatan pelayanan antar kerja sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nagan Raya khususnya, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terutama media sosial dan  sistem informasi ketenagakerjaan dari kementerian ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu melakukan kegiatan  pelayanan antar kerja, hal ini agar memadainya lowongan kerja (informasi pasar kerja) yang disebarkan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya.<br>Metode pembaharuan: | Kerja dan Transmigrasi.<br>3. Sosialisasi ke perusahaan tentang wajib lapor lowongan pekerjaan, pemanfaatan karirhub sebagai tempat penyebaran lowongan pekerjaan dan Surat Edaran Prioritas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Nagan Raya.<br>4.Memaksimalkan upaya dalam mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. | biaya karena tidak memerlukan berkas fisik untuk melamar pekerjaan, cukup softcopy lamaran yang dibutuhkan sehingga dapat meringankan beban pencari kerja. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Untuk menyampaikan laporan terkait penempatan tenaga kerja, Dinas kesulitan dalam memperoleh lowongan kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan, dikarenakan  minimnya kesadaran perusahaan untuk melaporkannya ke Dinas, serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan ke perusahaan terkait wajib lapor lowongan pekerjaan.<br>Melalui inovasi Pelayanan Antar Kerja Kabupaten Nagan Raya (PATEN NARA) dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, diperoleh lowongan kerja yang kemudian kita publikasikan melalui media sosial. Tidak lupa pula kita sosialisasikan terkait<br>wajib lapor lowongan pekerjaan, pemanfaatan karirhub sebagai wadah penyebaran informasi lowongan kerja  maupun prioritas penggunaan pekerja lokal Kabupaten Nagan Raya. Tentunya terjadi peningkatan pada penempatan tenaga kerja, dan dampak yang diperoleh dari inovasi ini yaitu sudah ada perusahaan yang rutin melaporkan lowongan kerja nya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.<br>Keunggulan dan kebaharuan:<br>Terlebih dalam kondisi yang serba praktis seperti saat ini, penggunaan media sosial dan sistem informasi ketenagakerjaan (Siapkerja) dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi sangat relevan karena menjadi media untuk mengurangi pengangguran yang mana selain efektif, fleksibel dan juga lebih efisien tentunya.<br>Tahapan inovasi:<br>Sejak tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kunjungan ke perusahaan -perusahaan di Kabupaten Nagan Raya atau lebih dikenal dengan istilah job canvassing. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pada kegiatan ini dilakukan wawancara dengan pihak perusahaan apakah terdapat lowongan kerja yang sedang dibuka atau tidak. Jika  terdapat lowongan kerja, maka Pengantar Kerja mengisi form Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP 1) dimana pada form tersebut sudah memuat seluruh syarat kerja dan hak-hak pekerja yang harus terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.  selain itu juga dilakukan sosialisasi ke pihak perusahaan terkait lowongan kerja yang wajib didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, dan prioritas penggunaan pekerja lokal Kabupaten Nagan Raya.<br>Tahapan selanjutnya setelah diperolehnya lowongan kerja, lowongan kerja tersebut dipublikasikan melalui instagram dan facebook nya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<br>Admin  merespon setiap pertanyaan dari pencari kerja dan membantu jika ada kendala dalam pendaftaran baik melalui media sosial maupun yang datang langsung ke kantor.<br>Setelah melalui proses rekrutmen tersebut, pihak perusahaan diharuskan untuk melaporkan data tenaga kerja yang di tempatkan (WLLP 2) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga diperolehlah data penempatan tahun 2023.<br>Tujuan inovasi daerah:<br>1.Memaksimalkan penyediaan informasi lowongan pekerjaan baik melalui media sosial maupun wa grup.<br>2. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan sehingga diharapakan banyak perusahaan yang melaporkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Sosialisasi ke perusahaan tentang wajib lapor lowongan pekerjaan, pemanfaatan karirhub sebagai tempat penyebaran lowongan pekerjaan dan Surat Edaran Prioritas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Nagan Raya.<br>4. Memaksimalkan upaya dalam mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.<br>Manfaat inovasi daerah:<br>1. Data pencari kerja telah tertata dengan baik karena berbasis teknologi informasi sehingga mudah dalam penarikan data untuk kebutuhan laporan.<br>2. Lowongan kerja yang dipublikasikan lebih terjamin keasliannya.<br>3. Lebih efisien, bebas penipuan dan hemat biaya karena tidak memerlukan berkas fisik untuk melamar pekerjaan, cukup softcopy lamaran yang dibutuhkan sehingga dapat meringankan beban pencari kerja.<br><br>Hasil inovasi:<br>Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang tenaga kerja bahwa pada  tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pelayanan antar kerja dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Nagan Raya, diperoleh jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebanyak 21 orang dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 15 orang.<br><br>Waktu Uji Coba Inovasi Daerah:<br>Inovasi Pelayanan Antar Kerja Kabupaten Nagan Raya (PATEN NARA) dibentuk sejak 2 Mei 2023, telah melalui tahapan analisis dampak dan di uji coba pada 22 Mei 2023. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Waktu Implementasi:<br>Inovasi Pelayanan Antar Kerja Kabupaten Nagan Raya (PATEN NARA) mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023. | | | | | |
| 23. | JEMPOL HI | Dasar hukum<br>1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<br>2.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja<br>4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan<br>5.Permenpan RB No 83 Tahun 2020 tentang Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial<br>6. KeputusanDirektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/276/HI.04.00/III/2022 tentang Strategi Penilaian Hubungan Industrial dalam Mencegah Konflik Hubungan Antar Pekerja dan Pengusaha<br>Permasalahan:<br>Jemput Bola Data Hubungan Industrial (JEMPOL HI)  merupakan  kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2023.  JEMPOL HI merupakan bentuk partisipasi | Tujuan inovasi:<br>Untuk memperoleh data kondisi sarana Hubungan Industrial yang memenuhi segala unsur ketenagakerjaan secara efektif dikarenakan belum adanya kesadaran sepenuhnya dari perusahaan lingkup kabupaten untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara langsung dapat | Manfaat inovasi:<br>1.Mengetahui data kondisi sarana hubungan industrial di lingkup Kabupaten Nagan Raya<br>2.Hasil pendataan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dan deteksi dini terhadap potensi munculnya perselisihan hubungan | Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang tenaga kerja bahwa pada  tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan JEMPOL HI dengan mengunjungi 30 perusahaan di Kabupaten Nagan Raya dan 10 perusahaan yang mengirimkan data melalui WhatsApp, diperoleh jumlah tenaga kerja sebanyak 8229 orang. Sedangkan tenaga kerja disabilitas sebanyak 8 orang, | 06/06/2023 | OPD DISNAKERTRANS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis guna memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan kondisi hubungan industrial di Kabupaten Nagan Raya, sehingga dengan terwujudnya pendataan sarana Hubungan Industrial tersebut, dapat mencegah maupun mendeteksi segala hal yang mungkin berpotensi menimbulkan perselisihan Hubungan Industrial.<br><br>Dalam melaksanakan aktivitas hubungan industrial, perusahaan wajib untuk menginformasikan perkembangan kondisi ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi  belum ada kesadaran perusahaan untuk melaporkan data, walaupun sudah dipermudah dengan adanya sistem online Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Meskipun ada perusahaan yang mengirimkan data setiap bulannya, data tersebut belum mencakup seluruh komponen data ketenagakerjaan sebagai laporan yang diminta oleh instansi terkait seperti BAPPEDA, Bagian Pemerintahan Setdakab, Diskominfotik maupun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Sebelum tahun 2023, kegiatan pendataan hubungan industrial dilakukan dengan cara merekapituasi data yang masuk (data yang dikirim perusahaan langsung) dan mengirim permintaan data melalui whatsApp. Akan tetapi hal ini masih kurang efektif, karena masih ada perusahaan yang tidak melaporkan data nya, serta format pelaporannya masih belum menyeluruh. | mengimplementasikan kegiatan pembinaan hubungan industrial kepada perwakilan perusahaan dan pekerja. | industrial di perusahaan 3.JEMPOL HI dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik selanjutnya | pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7705 serta jumlah pekerja yang di-PHK sebagai 354 orang. Sedangkan untuk data lainnya seperti kontak person perusahaan, struktur skala upah dan lain lain telah diarsipkan dengan baik. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inovasi yang memudahkan pendataan  serta diperoleh data yang sesuai dan valid yaitu dengan cara jemput bola data hubungan industrial langsung ke perusahaan, sehingga data langsung didapatkan sesuai format yang kita berikan.<br><br>Isu strategis:<br>Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan, poin pentingnya yaitu kebijakan tata kelola data Pemerintah di Sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan Data Ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pagaikan antar Instansi Pusat dan daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya perlu melakukan pendataan  hubungan industrial, hal ini agar terwujudnya pendataan sarana Hubungan Industrial yang akurat dan terpercaya sangat memiliki nilai manfaat yang tinggi dalam proses pembangunan ketenagakerjaan. Karena, dari data yang tersedia tersebut, dapat dijadikan sebagau acuan maupun pedoman terkait kondisi ketenagakerjaan.<br>Metode pembaharuan:<br>Untuk menyampaikan laporan terkait kondisi hubungan industrial, Dinas kesulitan dalam memperoleh data yang valid dikarenakan data yang masuk tidak mencakup semua komponen ketenagakerjaan dan masih banyak perusahaan yang belum melaporkan datanya ke dinas. Melalui inovasi Jemput Bola Data Hubungan Industrial, diperoleh data yang akurat dan | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mencakupi seluruh komponen ketenagakerjaan yang kemudian dianalisa oleh Mediator Hubungan Industrial yang dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, Laporan Kondisi Sarana Hubungan Industrial sekarang ini dapat dikelola dan dimonitoring dengan baik, serta dapat dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan dalam pelaksanaan Hubungan Industrial di setiap tempat kerja yang pada akhirnya mendukung terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.  Sedangkan untuk pelaporan data selanjutnya, perusahaan dapat melanjutkan mengirim data sesuai form yang telah kita berikan (dalam bentuk softcopy) melalui WhatsApp petugas atau Mediator Hubungan Industrial  , tanpa perlu datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.<br>Keunggulan dan kebaharuan:<br>Keunggulan Inovasi Jemput Bola Data Hubungan Industrial adalah memudahkan perolehan  data terkait kondisi Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan pada Kabupaten/Kota terkait.<br>Tahapan inovasi:<br>Jemput Bola Data Hubungan Industrial memudahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendapatkan data yang valid, dengan membawa format khusus serta memandu pengisian  ke pihak perusahaan sehingga data ketenagakerjaan langsung kita peroleh. Selain itu, pendataan juga tetap dilakukan melalui WhatsApp, apabila saat jemput bola data belum terisi sepenuhnya, maka pihak perusahaan dapat konsultasi dan mengirimkan data tersebut.<br>Tujuan inovasi: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Untuk memperoleh data kondisi sarana Hubungan Industrial yang memenuhi segala unsur ketenagakerjaan secara efektif dikarenakan belum adanya kesadaran sepenuhnya dari perusahaan lingkup kabupaten untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<br>2. Secara langsung dapat mengimplementasikan kegiatan pembinaan hubungan industrial kepada perwakilan perusahaan dan pekerja.<br><br>Manfaat inovasi:<br>1.Mengetahui data kondisi sarana hubungan industrial di lingkup Kabupaten Nagan Raya<br>2.Hasil pendataan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dan deteksi dini terhadap potensi munculnya perselisihan hubungan industrial di perusahaan<br>3. JEMPOL HI dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik selanjutnya<br>Hasil inovasi:<br>Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang tenaga kerja bahwa pada  tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan JEMPOL HI dengan mengunjungi 30 perusahaan di Kabupaten Nagan Raya dan 10 perusahaan yang mengirimkan data melalui WhatsApp, diperoleh jumlah tenaga kerja sebanyak 8229 orang Sedangkan tenaga kerja disabilitas sebanyak 8 orang, pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7705 serta jumlah pekerja yang di-PHK sebagai 354 orang. Sedangkan untuk data lainnya seperti kontak person perusahaan, struktur skala upah dan lain lain telah diarsipkan dengan baik. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Waktu Uji Coba Inovasi Daerah:<br>Jemput Bola Data Hubungan Industrial (JEMPOL HI) dibentuk sejak 2 Maret 2023, telah melalui tahapan analisis dampak dan di uji coba pada 22 Mei 2023.<br>Waktu Implementasi:<br>Jemput Bola Data Hubungan Industrial (JEMPOL HI) mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023. | | | | | |
| 24. | SMARTGOV | Dalam rangka melaksanakan kententuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Qanun Kabupten Nagan Raya Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Untuk maksud tersebut Kabupaten Nagan Raya mengembangkan sistem informasi Pajak Daerah yang diberi nama SmartGov Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan terhadap masyarakat serta upaya meningkatkan target penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merasa perlu untuk melakukan pembenahan di dalam pengelolaan pajak daerah yang diselaraskan dengan peningkatan penggunaan sistem informasi terkini untuk menjamin integritas dan akurasi serta ketersediaan data yang up to date dan lebih cepat. Dengan adanya sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi, ketersediaan basis data yang up to date dan analisa data pajak | Aplikasi SmartGov Merupakan sebuah Aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKD, Program Aplikasi SmartGov dengan tujuan membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah Khususnya 11 (sebelas) Mata Pajak Daerah, Aplikasi SmartGov dengan tujuan untuk memudahkan | BPKD yang merupakan salah satu unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya Aplikasi SmartGov pengelolaan Pendapatan | Pelaksanaan Pelayanan, Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelaporan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SmartGov menghasilkan output berupa dokumen-dokumen SPPT, STTS dan DHKP dam SKPD secara otomatis akan menghasilkan catatan akuntansi seperti Laporan Detail Penerimaan, Laporan Rekap | 02/01/2023 | OPD BPKD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | daerah yang tepat, diharapkan dapat memaksimalkan potensi perpajakan yang mampu dihimpun.<br>Dalam rangka melaksanakan kententuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Qanun Kabupten Nagan Raya Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Untuk maksud tersebut Kabupaten Nagan Raya mengembangkan sistem informasi Pajak Daerah yang diberi nama SmartGov Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan terhadap masyarakat serta upaya meningkatkan target penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merasa perlu untuk melakukan pembenahan di dalam pengelolaan pajak daerah yang diselaraskan dengan peningkatan penggunaan sistem informasi terkini untuk menjamin integritas dan akurasi serta ketersediaan data yang up to date dan lebih cepat. Dengan adanya sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi, ketersediaan basis data yang up to date dan analisa data pajak daerah yang tepat, diharapkan dapat memaksimalkan potensi perpajakan yang mampu dihimpun. | wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.<br>mempunyai tujuan:<br>1. Terwujudnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengelolaan Pajak Daerah; | Daerah dapat diimplementasikan secara terintegrasi yang menggunakan teknologi multi user dan tegnologi server, mulai dari Pelayanan, Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelaporan<br>Manfaat yang diperoleh adalah:<br><br>Efisiensi dalam melakukan input data, hanya Membutuhkan satu kali input data Objek Pajak (OP)/ transaksi, sehingga | Penerimaan, Laporan Harian Penerimaan, Daftar Tunggakan dan laporan Piutang Pajak Daerah untuk memudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | menghemat waktu, tenaga dan biaya; Lebih Ekfektif dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah di semua Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya; Pengendalian transaksi Penerimaan Pajak terjamin; Menghasilkan informasi Wajib Pajak, Objek Pajak dengan Cepat dan Akurat. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | KKPD | Kapasitas fiskal Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan PMK No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah berada pada kategori sedang dengan rasio 1,606 sementara kontribusi PAD terhadap realisasi belanja APBK masih relative kecil yaitu sekitar 12% pada tahun anggaran 2022. Guna menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan anggaran yang telah dianggarkan dalam APBK semestinya dapat direalisasikan secara maksimal, namun sesuai LKPD 2022 terdapat angka silpa yang relatif besar yaitu Rp61,9 miliar hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja masih belum maksimal dan diperlukan terobosan agar serapan anggaran lebih maksimal.   Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) adalah kartu kredit yang dapat digunakan melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan OPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. Penggunaan KKPD dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.<br>Selanjutnya penggunaan KKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD guna mendukung Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden serta untuk mewujudkan birokrasi tangkas dan kompetensi digital pada birokrasi. Selain | Penggunaan KKPD bertujuan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai (cashless), mengurangi fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan.  Dari sisi administrasi, pembayaran dan belanja daerah melalui KKPD mengurangi banyak sekali aspek administrasi pelaporan, hal ini karena pelaporannya tercatat secara otomatis dan | 1.Adanya percepatan realisasi anggaran 2. Meningkatkan efisiensi anggaran 3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai 4. Adanya perubahan mind-set terhadap perubahan pada OPD 5.Terciptanya digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah 6. Memberikan kenyamanan bagi pelaksana kegiatan dalam | 1. Terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah 2. Pelaksanaan pembangunan daerah lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 3.Terkendalinya Inflasi daerah 4.Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih cepat 5. Meningkatnya investasi daerah 6.Mendukung progam Pemerintah berupa Gerakan Nasional Non Tunai.7. Mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang | 07/09/2023 | OPD BPKD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | itu menindaklanjuti Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meningkatkan efisiensi biaya administrasi fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund/Idle Cash, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan dinamika kebijakan dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. | tentunya membantu pemegang kartu dari masing-masing OPD dalam mengelola keuangannya. | mengeksekusi anggaran 7. Serapan anggaran daerah lebih maksimal. | Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 9.Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. | | |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan pembangunan yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya, yang penyajiannya dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan. Seluruh program dan kegiatan dalam RKPK ini berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi Rencana Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2026.

Permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang begitu luas secara subtansi tidak mungkin diatasi dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBK Nagan Raya yang sangat terbatas. Disamping itu, pada kenyataannya proses pembangunan yang sudah berjalan selama ini sudah merupakan perwujudan dari dukungan seluruh peran pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya, baik melalui pendanaan APBN, APBA, pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Status kegiatan pada RKPK ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2026 disusun berdasarkan Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPK, dengan berbagai sumber seperti Dana Transfer Pusat, Otonomi Khusus (Otsus) dan APBK. Untuk sumber dana dari transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus baik dari Fisik maupun Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan lainnya dialokasikan mengacu pada Tahun n-1 dan akan disesuaikan dengan hasil pertimbangan alokasi Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Tahun 2026. Untuk program/ kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

## Tabel 5.1
## Rekapitulasi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
## Pada OPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026

| NO. | OPD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.0.00.0.00.05.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 2 | 7 | 15 | 1.165.340.774 |
| 2 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 9 | 21 | 102 | 266.089.378.751 |
| 3 | 1.01.9.01.0.00.02.0000 DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | 3 | 14 | 66 | 22.718.042.713 |
| 4 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN | 5 | 18 | 98 | 222.398.549.971 |
| 5 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11 | 21 | 78 | 40.517.925.508 |
| 6 | 1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9 | 19 | 54 | 25.674.428.968 |
| 7 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 2 | 8 | 19 | 3.835.751.800 |
| 8 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3 | 12 | 33 | 6.941.019.747 |
| 9 | 1.06.1.05.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL | 7 | 16 | 48 | 7.034.275.248 |
| 10 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 5 | 12 | 28 | 3.414.751.256 |
| 11 | 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 13 | 25 | 56 | 11.563.833.049 |
| 12 | 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN | 4 | 9 | 22 | 1.905.297.368 |
| 13 | 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9 | 17 | 46 | 13.016.084.222 |
| 14 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 9 | 16 | 3.312.178.646 |
| 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN | 3 | 12 | 25 | 5.593.295.782 |
| 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5 | 9 | 25 | 3.887.238.609 |
| 17 | 2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 9 | 14 | 28 | 5.913.913.602 |
| 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 4 | 7 | 18 | 2.417.990.121 |
| 19 | 2.22.9.01.0.00.03.0000 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 2 | 8 | 15 | 1.465.333.472 |
| 20 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6 | 15 | 31 | 4.048.972.611 |
| 21 | 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 7 | 18 | 49 | 5.761.228.289 |

| NO. | OPD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.26.2.19.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 7 | 16 | 42 | 8.715.766.289 |
| 23 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 6 | 13 | 29 | 20.107.365.053 |
| 24 | 3.27.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN | 6 | 10 | 19 | 8.954.118.525 |
| 25 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 18 | 58 | 33.678.841.060 |
| 26 | 4.01.0.00.0.00.02.0000 KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH | 1 | 1 | 2 | 987.022.301 |
| 27 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRK | 2 | 13 | 39 | 20.641.104.352 |
| 28 | 4.02.0.00.0.00.02.0000 DPRK | 1 | 1 | 1 | 12.249.776.719 |
| 29 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 4 | 14 | 47 | 9.023.311.825 |
| 30 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 4 | 13 | 66 | 327.281.126.381 |
| 31 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 11 | 33 | 5.082.406.692 |
| 32 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT | 3 | 10 | 31 | 11.441.146.871 |
| 33 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BEUTONG | 5 | 12 | 22 | 3.274.964.041 |
| 34 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR | 3 | 6 | 13 | 2.305.921.626 |
| 35 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEUNAGAN | 3 | 6 | 13 | 2.272.455.528 |
| 36 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SUKA MAKMUE | 2 | 8 | 18 | 1.964.509.326 |
| 37 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KUALA | 4 | 8 | 16 | 2.396.852.324 |
| 38 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KUALA PESISIR | 3 | 6 | 13 | 2.689.299.386 |
| 39 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TADU RAYA | 3 | 7 | 16 | 1.997.628.586 |
| 40 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DARUL MAKMUR | 3 | 9 | 18 | 3.177.660.463 |
| 41 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN TRIPA MAKMUR | 4 | 10 | 25 | 1.352.532.384 |
| 42 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG | 2 | 7 | 14 | 1.352.883.053 |
| 43 | 8.01.0.00.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 11 | 33 | 6.213.760.018 |
| 44 | 9.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT BAITUL MAL | 2 | 9 | 34 | 12.024.004.308 |
| 45 | 9.01.0.00.0.00.04.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 3 | 6 | 11 | 1.437.985.469 |
| **TOTAL** | | **134** | **251** | **1485** | **1.159.297.273.084** |

**Highlight Intervensi RKPK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026**

1. **Penguatan Layanan Dasar**
   - Peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan melalui alokasi terbesar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 265,5 miliar, 101 sub kegiatan).
   - Penguatan layanan kesehatan, termasuk infrastruktur dan SDM kesehatan (Rp 231,2 miliar, 97 sub kegiatan).
2. **Pengembangan Infrastruktur dan Permukiman**
   - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik melalui Dinas PUPR (Rp 58,95 miliar, 78 sub kegiatan).
   - Penataan kawasan permukiman dan perumahan rakyat (Rp 27,4 miliar, 40 sub kegiatan).
3. **Penguatan Ketahanan Sosial dan Penanggulangan Bencana**
   - Peningkatan perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan layanan kesejahteraan (Dinas Sosial Rp 6,97 miliar).
   - Penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui BPBD (Rp 7,35 miliar).
4. **Pemberdayaan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**
   - Dukungan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, UMKM, dan perdagangan (alokasi gabungan lebih dari Rp 35 miliar).
   - Penguatan investasi dan perizinan untuk menarik modal swasta (Rp 2,41 miliar).
5. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**
   - Optimalisasi fungsi perencanaan, riset, dan inovasi daerah (Rp 8,82 miliar).
   - Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui BPKD (Rp 298,59 miliar, terbesar kedua setelah pendidikan).
   - Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui BKPSDM (Rp 5,08 miliar).
6. **Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan**
   - Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran (Rp 13,56 miliar).
   - Program konservasi sumber daya alam berbasis masyarakat.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**
**KAB. NAGAN RAYA**
**TAHUN 2026**

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | 265.210.272.450,50 | | | | | | | 6.852.044.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 264.140.225.950,50 | | | | | | | 6.852.044.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 264.140.225.950,50 | | | | | | | 6.852.044.000,00 | |
| 1 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LAKIP | - | | | 81 A Nilai | 197.681.607.250,50 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah<br>Tersedianya Peralatan, Perlengkapan dan Sarpas | - | | | 100 %<br>100 % | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | | | | 3 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 100 % | 194.472.015.369,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1980/14 Orang/bulan | 194.093.775.369,50 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Bulan Dokumen | 378.240.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 369 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 369 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen dan Peningkatan SDM Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 162.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 20 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 156.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 1.041.975.286,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 62.609.650,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 0 Paket | 6.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Tahun Paket | 426.527.954,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Tahun Paket | 47.577.042,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 Laporan | 152.660.640,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun Laporan | 346.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Tahun Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersdianya pendukung Operasional | - | | | 100 % | 305.900.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 305.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercapainya Kegiatan Adminitrasi Kantor | - | | | 100 % | 960.706.595,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan Laporan | 216.406.595,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan Laporan | 729.300.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercapainya Kegiatan dan Operasional | - | | | 100 % | 739.010.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 31.050.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 20 Unit | 35.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 60 Unit | 78.960.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 594.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional<br>Indeks Iklim Inklusivitas SD<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SD<br>Indeks Iklim Keamanan SD<br>Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | - | | | 50,55 Persen<br>53,42 Persen<br>59,77 Indeks<br>68,44 Indeks<br>72,78 Indeks<br>98,50 Persen | 59.279.290.700,00 | | | | | | - | 6.649.044.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tercapainya Kebutuhan Satuan Pendidikan | - | | | 100 % | 35.755.803.150,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 2.395.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 40 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 17 Unit | 3.769.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 357.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 8 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 7 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 900 Paket | 1.080.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1000 Peserta Didik | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 201.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 36 Orang | 91.074.600,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 40 Orang | 17.852.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 18.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 450 Satuan Pendidikan | 735.540.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 736.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 136 Satuan Pendidikan | 16.337.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 82 Orang | 63.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | | | | 5 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 47 Orang | 120.151.550,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 40 Orang | 117.130.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 8 Dokumen | 204.748.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | 21 Komunitas | 152.256.150,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 158.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | | | | 136 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 2 Ruang | 3.879.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Blang Muko | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 10 Unit | 1.956.180.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 280 Orang | 661.465.450,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 666.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 136 Satuan Pendidikan | 225.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 226.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 48 Ruang | 4.617.450.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 8 Paket | 1.169.655.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tercapainya Kebutuhan Satuan Pendidikan | - | | | 100 % | 15.977.193.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.529.044.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 350.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 13 Ruang | 3.294.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 12 Unit | 1.293.630.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 530.307.750,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 600 Peserta Didik | 150.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 151.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 40 Orang | 17.852.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 18.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 266 Satuan Pendidikan | 460.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 461.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 41 Satuan Pendidikan | 8.943.642.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 43 Orang | 113.443.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 113.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 5 Dokumen | 67.567.750,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 8 Dokumen | 101.954.700,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | 11 Komunitas | 92.895.950,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 95.044.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 84 Satuan Pendidikan | 160.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 161.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 10 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 250 Orang | 401.899.750,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 410.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tercapainya Kebutuhan Satuan Pendidikan | - | | | 100 % | 7.190.334.550,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 2.025.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 10 Unit | 1.000.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 25 Orang | 17.852.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 18.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 182 Satuan Pendidikan | 1.500.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 173 Satuan Pendidikan | 4.019.810.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 173 Orang | 127.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 30 Orang | 92.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 2 Dokumen | 49.937.750,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 22.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 8 Dokumen | 45.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 20 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 150 Orang | 336.634.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 340.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tercapainya Kebutuhan Satuan Pendidikan | - | | | 100 % | 355.960.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 700.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 12 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | 9 Satuan Pendidikan | 100.160.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 18 Orang | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 255.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0047 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 10 Ruang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal (mulok) | - | | | - Persen | 220.000.000,00 | | | | | | - | 141.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 2.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | - | | | - | 220.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 141.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | | | | 30 Orang | 220.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 141.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4 | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Indeks Pemerataan Guru<br>Persentase pendidik dengan ijazah D-IV / S-1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi. | - | | | - Indeks<br>- Persen | 6.959.328.000,00 | | | | | | - | 62.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Guru di setiap Satuan Pendidikan | - | | | % | 6.959.328.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 62.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 2 Dokumen | 30.564.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 31.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 4 Laporan | 6.928.764.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 31.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.070.046.500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | 1.070.046.500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Penyelenggaraan festival seni dan budaya<br>Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan | - | | | - Festival<br>- Persen | 549.725.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 221.310.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 5 Objek | 36.270.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina | | | | 150 Orang | 185.040.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 296.925.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 5 Objek | 99.390.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | 1 Laporan | 197.535.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 31.490.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 5 Objek | 31.490.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6 | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan<br>festival seni dan budaya yang diselenggarakan | - | | | 7 Persen<br>- Event | 305.875.500,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 305.875.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 50 Orang | 105.875.500,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 1 Lembaga | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 7 | 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Literasi sejarah<br>Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal | - | | | - Dokumen<br>- Persen | 89.286.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 04 | 2.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 89.286.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 04 | 2.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | | | | 75 Orang | 89.286.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 8 | 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Cagar Budaya yang dipugar/dilestarikan | - | | | 7 Objek | 125.160.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 74.940.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | | | | 10 Objek | 74.940.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.220.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 10 Objek | 38.220.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | | | | 3 Objek | 12.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 9 | 2 | 22 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan | - | | | - Rasio | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | | | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | | | | | | 879.106.300,50 | | | | | | | 878.930.468,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 879.106.300,50 | | | | | | | 878.930.468,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 879.106.300,50 | | | | | | | 878.930.468,00 | |
| 10 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LAKIP | - | | | 81 A Nilai | 879.106.300,50 | | | | | | - | 878.930.468,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah<br>Tersedianya Peralatan, Perlengkapan dan Sarpas | - | | | 100 %<br>100 % | 1.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 100 % | 677.552.616,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 677.552.616,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 120 Orang/bulan | 665.392.616,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 665.392.616,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 12.160.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 12.160.000,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 24.469.288,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 25.293.456,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.989.288,50 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 15.693.456,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2.880.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 3.000.000,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 6.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 6.600.000,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercapainya Kegiatan Administrasi Kantor | - | | | 100 % | 176.084.396,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 176.084.396,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 38.518.200,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 38.518.200,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 137.566.196,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 137.566.196,00 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR |
| | | | | | | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | | | | | 22.718.042.713,00 | | | | | | | 26.367.586.553,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4.481.010.213,00 | | | | | | | 9.780.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 4.481.010.213,00 | | | | | | | 9.780.000.000,00 | |
| 11 | 1 | 01 | 07 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | Persentase Dayah Terakreditasi Standarisasi Pendidikan Dayah | - | | | 54 Persen Ada Ada/Tidak | 4.481.010.213,00 | | | | | | - | 9.780.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | | Pengelolaan Pendidikan Dayah | Persentase Dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) | - | | | 12 Bulan | 4.481.010.213,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 9.780.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0001 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun | | | | 25 Unit | 1.440.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 3.200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0002 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0003 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya | | | | 100 Orang | 86.989.830,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0004 | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan | | | | 200 Peserta Didik | 2.544.376.184,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 3.250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0005 | Pembinaan Manajemen Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan | | | | 10 Satuan Pendidikan | 158.695.899,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 340.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan | | | | 10 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0007 | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 10 Satuan Pendidikan | 120.219.345,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0008 | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia | | | | 1500 Buku | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0009 | Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0010 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | | | | 1 Dokumen | 62.827.110,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0011 | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi | | | | 20 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0012 | Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya | | | | 53 Satuan Pendidikan | 67.901.845,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0013 | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 63 Satuan Pendidikan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 340.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0014 | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0015 | Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar | | | | 50 Peserta Didik | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0016 | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | | | | | UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN | | | | | | 18.237.032.500,00 | | | | | | | 16.587.586.553,00 | |
| | 9 | 01 | | | | KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | 18.237.032.500,00 | | | | | | | 16.587.586.553,00 | |
| 12 | 9 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 68.25 Nilai<br>70 Indeks | 3.200.332.725,00 | | | | | | - | 3.997.586.553,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 18.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | - | 21.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 3.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 3.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 3.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 3.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 3.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 3.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | umlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 2.296.800.934,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | - | 2.799.275.449,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 2.030.980.794,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 2.584.375.449,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 258.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 209.400.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 7.220.140,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 5.500.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 1 Kegiatan | 0,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | - | 55.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 40 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 55.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 12 Bulan | 550.615.411,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | - | 527.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.876.320,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 11.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 163.105.610,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 100.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 31.899.481,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 16.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1000 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 244.734.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 284.916.380,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | - | 255.511.104,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 9.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 10.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 84.490.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 85.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 191.426.380,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 160.511.104,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 12 Bulan | 50.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | - | 339.800.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 30.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 9.800.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH | | 100.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| 13 | 9 | 01 | 02 | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Persentase Jumlah Jamaah Haji yang di fasilitasi<br>Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat<br>Persentase Gampong yang menyelenggarakan pengajian<br>Persentase BKM Masjid/Mushalla yang aktif | - | | | 100 Persen<br>222 Orang<br>75 Persen<br>85 Persen | 15.036.699.775,00 | | | | | | - | 12.590.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | - | | | 3 Kegiatan | 0,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 550.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0001 | Pelatihan Mawaris | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0005 | Seminar Problematika Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam | | | | 222 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0006 | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya | | | | 200 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 02 | 7.02 | | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran | Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ | - | | | 10 Kegiatan | 2.133.454.871,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 3.120.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan | | | | 2 Lembaga | 331.644.799,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis | | | | 100 Orang | 78.204.122,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 120.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.02 | 0004 | Pelaksanaan MTQ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ | | | | 520 Orang | 1.723.605.950,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 2.500.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.03 | | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama | Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam | - | | | 1 Kegiatan | 0,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 150.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.03 | 0001 | Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | Jumlah Dokumen, Pelatihan Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | - | | | 7 Kegiatan | 9.701.309.221,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 4.650.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0001 | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | | | | 1 Dokumen | 176.309.221,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0005 | Pelatihan Takmir Mesjid | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan | | | | 200 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0006 | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam | | | | 60 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0007 | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina | | | | 3 Gampong | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0008 | Pengiriman Khatib Jum"at Ke Gampong | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Khatib Jum"at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0009 | Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0013 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya | | | | 25 Unit | 9.525.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 3.200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Pelatihan dan Pembinaan Syariat Islam | - | | | 5 Kegiatan | 505.592.541,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.450.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0003 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | 222 Orang | 250.926.955,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0006 | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat | | | | 444 Orang | 254.665.586,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 250.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0007 | Pembinaan Badan Kemakmuran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | | | | 444 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0008 | Pembinaan Qari Qariah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah | | | | 15 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Pengawasan Regulasi Syariat Islam | - | | | 13 Kegiatan | 1.014.174.396,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.900.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0001 | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0003 | Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0006 | Pengawasan Penegakan Hukum Syariat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0007 | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | | | | 1 Laporan | 657.459.905,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0009 | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah | | | | 125 Orang | 356.714.491,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.07 | | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Agung Daerah | - | | | 5 Kegiatan | 1.682.168.746,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 770.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | | | | 1 Lembaga | 1.682.168.746,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0003 | Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 130.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0004 | Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 90.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0005 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | | | | | | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | | 1.165.340.773,75 | | | | | | | 1.285.098.613,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.165.340.773,75 | | | | | | | 1.285.098.613,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 1.165.340.773,75 | | | | | | | 1.285.098.613,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 60 Nilai<br>- Indeks | 1.069.875.199,75 | | | | | | - | 1.085.098.613,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | tersusunnya dokumen rencana tahunan dan rencana kerja jangka menengah | - | | | 1 nilai | 500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 10.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | - | | | 1 nilai | 665.485.472,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 541.398.613,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 8 Orang/bulan | 662.854.772,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 518.398.613,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 2.630.700,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 23.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | tersediannya anggaran administrasi umum sekretariat MPD | - | | | 1 nilai | 82.829.952,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 156.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 21.259.544,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.989.108,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 47.581.300,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | tersediannya jasa pelayanan umum | - | | | 1 nilai | 302.559.775,75 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 315.700.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 688.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 700.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 14.254.919,75 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 287.616.656,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | - | | | 1 nilai | 18.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 62.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 6.650.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 3.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 8.250.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| 15 | 1 | 01 | 08 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | Persentase Kebijakan yang dikeluarkan dengan target atau jumlah rekomendasi Sekretariat majelis Pendidikan Daerah yang menjadi kebijakan pemerintah kabupaten Nagan Raya | - | | | 85 Persen | 95.465.574,00 | | | | | | - | 200.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 08 | 7.03 | | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh | presentase kurikulum pendidikan islami yang dihasilkan | - | | | 1 nilai | 32.388.950,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 08 | 7.03 | 0002 | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | | | | 00 Dokumen | 32.388.950,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 08 | 7.05 | | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | presentase regulasi dan pelaporan pencapaian standar pendidikan | - | | | 1 nilai | 63.076.624,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0002 | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | | | | 75 Satuan Pendidikan | 39.402.904,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0003 | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya | | | | 200 Satuan Pendidikan | 23.673.720,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | | | | | | 105.289.319.992,00 | | | | | | | 11.054.500.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 105.289.319.992,00 | | | | | | | 11.054.500.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 105.289.319.992,00 | | | | | | | 11.054.500.000,00 | |
| 16 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 68.368.344.355,00 | | | | | | - | 3.553.500.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 5 Dokumen | 70.955.445,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 171.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 63.304.045,50 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 101.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 7.651.400,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administasi Keuangan | - | | | 14 Bulan | 63.549.315.854,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 612.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 879 Orang/bulan | 62.847.205.854,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 18 Dokumen | 702.110.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 612.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum | - | | | 12 Bulan | 336.098.219,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 1.528.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 33.797.058,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 202.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 38 Paket | 189.626.383,50 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 815.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.440.778,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 61.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 109.234.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan, UPTD dan 14 Puskesmas | - | | | 12 Bulan | 4.131.607.836,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 380.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 17 Laporan | 616.550.636,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 3.515.057.200,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 280.367.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 862.500.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 62.100.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 8.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 41 Unit | 208.167.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 17 Unit | 10.100.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 204.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 17 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup<br>AKI per 100,000 kelahiran hidup<br>Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup<br>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada Balita)<br>Angka Kesakitan | - | | | 10.81 Orang<br>109.00 Angka<br>11.63 Angka<br>17.50 Persen<br>9.13 Angka | 34.605.434.687,00 | | | | | | - | 6.666.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | UKP dan UKM dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | - | | | 100 Persen | 13.374.684.623,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 3.724.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | | | | 1 Unit | 753.933.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | | 1 Unit | 210.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 2 Unit | 2.871.690.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 4 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 1 Unit | 1.770.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 1 Unit | 1.650.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 1 Unit | 170.402.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 1 Paket | 5.729.586.454,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 2.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | | 2 Paket | 219.072.969,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 174.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | - | | | 100 Persen | 20.869.249.237,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | - | 2.261.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 13908 Orang | 894.308.500,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 202.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 16 Orang | 276.512.900,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 27816 Orang | 97.783.500,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 13908 Orang | 64.215.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 133.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 13908 Orang | 597.315.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 7.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 13908 Orang | 22.178.850,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 26.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 13908 Orang | 21.415.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 12828 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3227 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 92.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 55 Orang | 267.132.100,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 91.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 1842 Orang | 262.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 91.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 3334 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 91.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 34 Dokumen | 8.814.934.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 68.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 404 Dokumen | 181.391.806,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 82.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 774 Dokumen | 462.244.920,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 195.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 0 Dokumen | 582.880.194,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 1 Dokumen | 36.876.500,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 38.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 30 0 | 243.298.500,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 56.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 1 Orang | 127.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 16 Dokumen | 1.780.639.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 72.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 5 Dokumen | 75.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | | 0 Paket | 10.248.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 2 Dokumen | 3.339.255.432,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 2 Dokumen | 456.410.485,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 134.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 15 Unit | 111.245.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 1 Unit | 41.952.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 42.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 120 Orang | 70.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 72.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | | | | 2 Tatanan | 40.000.000,00 | - | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 41.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 503.255.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 3 Dokumen | 293.557.550,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 295.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 129.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 776.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 91.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | 51.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Laporan Sistem Informasi Kesehatan secara berkala | - | | | 100 Persen | 258.970.827,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 545.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 4 Dokumen | 258.970.827,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 545.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Kesehatan | - | | | 90 Persen | 102.530.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 136.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | | | | 15 Unit | 102.530.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 136.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 18 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan | - | | | 100 Persen | 1.342.820.950,00 | | | | | | - | 654.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 246.898.250,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 203.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 19 Dokumen | 51.480.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 58.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 30 Orang | 50.901.500,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 2 Dokumen | 144.516.750,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 145.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Peningkatan kompetensi | - | | | 14 Puskesmas | 1.095.922.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 451.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 184 Orang | 1.095.922.700,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 451.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 19 | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | - | | | 100 Persen | 592.687.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Izin Apotik, Toko Obat,Toko Alkes, Optikal dan UMOT | - | | | 20 Apotek dan Toko Obat | 116.549.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 1 Dokumen | 116.549.200,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 04 | 2.03 | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | | | 70 IRTP | 211.402.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 1 Dokumen | 211.402.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 04 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Pemeriksaan yang dilakukan | - | | | 6 IRTP | 264.735.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | | 30 Unit | 264.735.800,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 20 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | - | | | 85 Persen | 380.033.000,00 | | | | | | - | 181.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Upaya Promosi Kesehatan yang dilakukan | - | | | Puskesmas Puskesmas | 73.276.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | BIDANG KESEHATAN | - | 75.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 3 Dokumen | 73.276.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | BIDANG KESEHATAN | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 92.796.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 93.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 92.796.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 93.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Bimtek dan Supervisi | - | | | 14 Puskesmas | 213.961.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | - | 13.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 213.961.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | DINAS KESEHATAN | | 13.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA | | | | | | 101.167.820.042,00 | | | | | | | 114.271.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 101.167.820.042,00 | | | | | | | 114.271.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 101.167.820.042,00 | | | | | | | 114.271.000.000,00 | |
| 21 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks<br>BB Nilai | 97.936.970.774,00 | | | | | | - | 109.741.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 5 Dokumen | 20.121.163,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | - | 36.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 11.854.867,50 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 20.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 2.696.134,50 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 3.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 2.140.405,50 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 3.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 3.429.756,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 10.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administasi Keuangan | - | | | 14 Bulan | 37.701.129.068,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | - | 45.180.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 535 Orang/bulan | 37.494.589.068,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 45.000.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 206.540.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 180.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan, UPTD dan 14 Puskesmas | - | | | 12 Bulan | 1.382.430.345,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1.382.430.345,50 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 1.500.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 0,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 20.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | - | 25.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | RSUD | | 25.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 58.813.290.197,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 63.000.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 58.813.290.197,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 63.000.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| 22 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pasien Tertangani di RSUD<br>Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 kelahiran hidup | - | | | 100 Persen<br>- Angka | 2.203.500.000,00 | | | | | | - | 3.630.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | UKP dan UKM dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | - | | | 100 Persen | 2.203.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 3.630.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 1 Unit | 1.680.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PEMBANGUNAN RS PRATAMA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 1.500.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 5 Unit | 523.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 1.500.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 600.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| 23 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan | - | | | 100 Persen | 1.027.349.268,00 | | | | | | - | 900.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.027.349.268,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 900.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 500 Orang | 1.027.349.268,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 900.000.000,00 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS BEUTONG ATEUH | | | | | | 290.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 290.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 290.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| 24 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks<br>BB Nilai | 290.000.000,00 | | | | | | - | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 290.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang | - | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 290.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang | | 300.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS BEUTONG ATEUH |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS BEUTONG | | | | | | 1.531.140.000,00 | | | | | | | 1.550.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.531.140.000,00 | | | | | | | 1.550.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.531.140.000,00 | | | | | | | 1.550.000.000,00 | |
| 25 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks<br>BB Nilai | 1.531.140.000,00 | | | | | | - | 1.550.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.531.140.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Beutong | - | 1.550.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1.531.140.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Beutong | | 1.550.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS BEUTONG |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS UTEUN PULO | | | | | | 1.537.200.000,00 | | | | | | | 1.600.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.537.200.000,00 | | | | | | | 1.600.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.537.200.000,00 | | | | | | | 1.600.000.000,00 | |
| 26 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 1.537.200.000,00 | | | | | | - | 1.600.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.537.200.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Uteun Pulo | - | 1.600.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1.537.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Uteun Pulo | | 1.600.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS UTEUN PULO |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS JEURAM | | | | | | 1.684.791.718,00 | | | | | | | 1.700.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.684.791.718,00 | | | | | | | 1.700.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.684.791.718,00 | | | | | | | 1.700.000.000,00 | |
| 27 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 1.684.791.718,00 | | | | | | - | 1.700.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.684.791.718,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Jeuram | - | 1.700.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1.684.791.718,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Jeuram | | 1.700.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS JEURAM |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS COT KUTA | | | | | | 810.676.967,00 | | | | | | | 820.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 810.676.967,00 | | | | | | | 820.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 810.676.967,00 | | | | | | | 820.000.000,00 | |
| 28 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 810.676.967,00 | | | | | | - | 820.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 810.676.967,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Cot Kuta | - | 820.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 810.676.967,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Cot Kuta | | 820.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS COT KUTA |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS UJONG FATIHAH | | | | | | 1.318.293.856,00 | | | | | | | 1.350.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.318.293.856,00 | | | | | | | 1.350.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.318.293.856,00 | | | | | | | 1.350.000.000,00 | |
| 29 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 1.318.293.856,00 | | | | | | - | 1.350.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.318.293.856,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Ujong Fatihah | - | 1.350.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1.318.293.856,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Ujong Fatihah | | 1.350.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS UJONG FATIHAH |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS PADANG PANYANG | | | | | | 1.279.015.022,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.279.015.022,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.279.015.022,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| 30 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 1.279.015.022,00 | | | | | | - | 1.300.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.279.015.022,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Padang Panyang | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1.279.015.022,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Padang Panyang | | 1.300.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS PADANG PANYANG |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS PADANG RUBEK | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | | 420.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | | 420.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | | 420.000.000,00 | |
| 31 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 400.000.000,00 | | | | | | - | 420.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 400.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Padang Rubek | - | 420.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 400.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Padang Rubek | | 420.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS PADANG RUBEK |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS SIMPANG JAYA | | | | | | 842.680.538,00 | | | | | | | 850.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 842.680.538,00 | | | | | | | 850.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 842.680.538,00 | | | | | | | 850.000.000,00 | |
| 32 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 842.680.538,00 | | | | | | - | 850.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 842.680.538,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Simpang Jaya | - | 850.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 842.680.538,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Simpang Jaya | | 850.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS SIMPANG JAYA |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS KUALA TADU | | | | | | 312.370.268,00 | | | | | | | 320.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 312.370.268,00 | | | | | | | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 312.370.268,00 | | | | | | | 320.000.000,00 | |
| 33 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 312.370.268,00 | | | | | | - | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 312.370.268,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Kuala Tadu | - | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 312.370.268,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Kuala Tadu | | 320.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS KUALA TADU |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS ALUE BILIE | | | | | | 3.002.583.409,00 | | | | | | | 3.050.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3.002.583.409,00 | | | | | | | 3.050.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 3.002.583.409,00 | | | | | | | 3.050.000.000,00 | |
| 34 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 3.002.583.409,00 | | | | | | - | 3.050.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 3.002.583.409,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Alue Bilie | - | 3.050.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 3.002.583.409,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Alue Bilie | | 3.050.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS ALUE BILIE |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS SUKA MULIA | | | | | | 1.247.658.159,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.247.658.159,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.247.658.159,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 35 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 1.247.658.159,00 | | | | | | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.247.658.159,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Suka Mulia | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1.247.658.159,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Suka Mulia | | 1.300.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS SUKA MULIA |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS ALUE RAMBOT | | | | | | 870.000.000,00 | | | | | | | 900.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 870.000.000,00 | | | | | | | 900.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 870.000.000,00 | | | | | | | 900.000.000,00 | |
| 36 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.50 Indeks BB Nilai | 870.000.000,00 | | | | | | - | 900.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 870.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Alue Rambot | - | 900.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 870.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Alue Rambot | | 900.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS ALUE RAMBOT |
| | | | | | | BLUD UPTD PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT | | | | | | 815.000.000,00 | | | | | | | 820.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 815.000.000,00 | | | | | | | 820.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 815.000.000,00 | | | | | | | 820.000.000,00 | |
| 37 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68.25 Indeks 68.50 Nilai | 815.000.000,00 | | | | | | - | 820.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 815.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Lueng Kebeu Jagat | - | 820.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 815.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Lueng Kebeu Jagat | | 820.000.000,00 | BLUD UPTD PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT |
| | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 40.517.925.508,00 | | | | | | | 63.391.906.642,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 40.517.925.508,00 | | | | | | | 63.391.906.642,00 | |
| | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 40.517.925.508,00 | | | | | | | 63.391.906.642,00 | |
| 38 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 65 Indeks 77,5 Nilai | 8.746.404.681,00 | | | | | | - | 12.910.406.642,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 27.029.894,50 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 29.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 13.149.541,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 2.999.997,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 3.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 2.989.590,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 3.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 2.913.666,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 3.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 4.977.100,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 5.936.982.862,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 6.221.294.094,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 67 Orang/bulan | 5.476.332.394,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 5.818.154.094,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 445.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 388.140.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 9.851.990,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 4.998.478,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 140.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 76 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 63 Orang | 90.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 782.313.966,50 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 780.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 59.982.069,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 60.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 148.388.897,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 69.835.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 504.108.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 273.726.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 3.770.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 1.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 25 Unit | 123.876.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 149.850.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 802.614.958,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 795.549.048,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 22.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 260.865.910,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 519.549.048,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 525.549.048,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 783.737.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | - | 1.014.563.500,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 11 Unit | 72.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 8 Unit | 401.737.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 634.563.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 45 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Dinas PUPR | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 39 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Jumlah Luas Layanan Irigasi | - | | | 27,52 Hektar | 1.888.500.000,00 | | | | | | - | 12.348.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 690.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 3.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 1,025 KM | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 398,798 KM | 640.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | | | | 0 KM | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 1.198.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 8.848.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | | | | 0 KM | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 0 KM | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 5.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | | | | 0 KM | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 7,955 KM | 500.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | | | | 0 Lembaga | 100.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0044 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | | | | 0 Lembaga | 48.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 48.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0045 | Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi | | | | 0 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0046 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0 UNIT | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0048 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | | | | 2 UNIT | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | | | | 0 UNIT | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0054 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0 UNIT | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 40 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | - | | | 68,94 Persen | 388.900.000,00 | | | | | | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 388.900.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | | | | 0 Liter/Detik | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0 Unit | 188.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 0 SR | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 41 | 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan | - | | | 16,00 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan | | | | 0 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 42 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | - | | | 54,47 Persen | 300.000.000,00 | | | | | | - | 3.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 300.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 3.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | | | | 0 $M^3$/Hari | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0044 | Penyediaan Unit pengolahan setempat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | | | | 0 Rumah Tangga | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 43 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | - | | | 9,92 Persen | 100.000.000,00 | | | | | | - | 500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 100.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | | | | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 44 | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diberikan | - | | | 480 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | | | - | 50.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 45 | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Jumlah Kawasan yang dilakukan Penataan Bangunan dan Lingkungan | - | | | 10 Kawasan | 200.000.000,00 | | | | | | - | 1.150.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.150.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | | | | 0 Kawasan | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | | 0 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 46 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)<br>Persentase kemantapan jalan<br>Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | - | | | 33.09 Persen<br>43,15 Persen<br>46.15 Persen | 27.424.520.827,00 | | | | | | - | 26.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 27.424.520.827,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 26.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | | 0 KM | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 8,545 KM | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0053 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | | | | 87,88 KM | 6.935.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0055 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | | 0 KM | 79.520.827,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 3,750 KM | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0058 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi | | | | 0 Meter | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0059 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | | 28,205 KM | 19.450.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH, DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 13.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0061 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 1 Meter | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 1 Jembatan | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0069 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang jembatan yang dibangun | | | | 8 Meter | 560.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 47 | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Jumlah Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang dilatih | - | | | 35 Orang | 99.000.000,00 | | | | | | - | 710.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | - | - | | | - | 99.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 710.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | | | | 0 Orang | 99.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 710.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 48 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Nilai Kinerja Peyelenggaraan Penataan Ruang | - | | | 50,52 Nilai | 1.220.600.000,00 | | | | | | - | 3.723.500.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 450.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 2.200.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 385.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 1.540.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah publikasi informasi penataan ruang | | | | 25 Publikasi | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 180.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 286.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | | | | 5 Orang | 80.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 176.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | | | | 2 Kegiatan | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 155.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 170.500.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | | | | 5 Layanan | 80.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 88.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | 1 Sistem Informasi | 75.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 82.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 435.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.067.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | | | | 3 Kasus | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | | | | 3 Kasus | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 22.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 265.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 770.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0011 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0014 | Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 25.674.428.968,00 | | | | | | | 26.830.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 25.674.428.968,00 | | | | | | | 26.830.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 8.937.800.000,00 | | | | | | | 12.300.000.000,00 | |
| 49 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah dengan akses air minum layak | - | | | 68.94 Persen | 2.540.000.000,00 | | | | | | - | 2.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 Persen | 2.540.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 2.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | | | | 2 Liter/Detik | 510.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | | | | 20 Liter/Detik | 1.700.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 200 SR | 330.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 50 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | - | | | 54.47 Persen | 1.470.000.000,00 | | | | | | - | 2.200.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 Persen | 1.470.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat | - | 2.200.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 1 Unit | 630.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0044 | Penyediaan Unit pengolahan setempat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | | | | 200 Rumah Tangga | 840.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 51 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | - | | | 9.92 Persen | 4.727.800.000,00 | | | | | | - | 4.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 Persen | 4.727.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 4.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | | | | 5000 M | 3.002.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara | | | | 1500 Meter | 140.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | | | | 1 Sistem Drainase Lingkungan | 950.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0022 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 630.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 52 | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan Peraturan dan Perencanaan Tata Bangunan | - | | | 10.00 Persen | 200.000.000,00 | | | | | | - | 3.100.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksana Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 10 Kawasan | 200.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 3.100.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | | | | 1 Kawasan | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 16.736.628.968,00 | | | | | | | 14.530.000.000,00 | |
| 53 | 1 | 04 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 65.00 Indeks 80.15 Nilai | 3.848.388.968,00 | | | | | | - | 2.830.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 2.418.813.910,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | - | 2.600.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 2.216.625.910,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 2.400.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 197.180.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 5.008.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 78.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 9.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 6 Orang | 9.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 762.897.545,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | - | 0,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 8.067.924,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.520.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 71.025.169,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 16.198.452,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6 Laporan | 20.436.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 6 Laporan | 611.650.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 8.578.428,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | - | 70.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 8.578.428,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 318.099.085,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | - | 0,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 155.999.085,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 154.100.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 262.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkim | - | 10.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 28.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 234.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkim | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkim | | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 54 | 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase rumah layak huni | - | | | 65.72 Persen | 2.674.600.000,00 | | | | | | - | 3.900.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | - | | | 100 Persen | 15.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 300.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 02 | 2.02 | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 150.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | - | 500.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.02 | 0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | 50 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 02 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | | | 10 Unit | 2.479.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | - | 3.000.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | | | | 50 Unit Rumah | 1.000.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 20 Unit Rumah | 1.479.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 02 | 2.06 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 55 | 1 | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak | - | | | 10.00 Persen 64.26 Persen | 4.340.000.000,00 | | | | | | - | 4.250.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | - | - | | | - | 30.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 5 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 03 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | undefined | - | | | undefined undefined | 810.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 600.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | | | | 2 Dokumen | 800.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 03 | 2.03 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | | | 100 Persen | 3.500.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 3.550.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | | 60 Unit Rumah | 1.000.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 24 Unit | 2.500.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 3.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 56 | 1 | 04 | 04 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | - | - | | | - | 1.331.640.000,00 | | | | | | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 04 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.331.640.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | | 2 Unit Rumah | 591.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | | | | 3 Unit | 739.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 57 | 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | - | | | 7.50 Persen | 4.542.000.000,00 | | | | | | - | 2.050.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Terlaksana Penyelenggaraan PSU Perumahan | - | | | 100 Persen | 4.542.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | - | 2.050.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | 4 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | | | | 5 Kelompok | 15.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | | | | 2 Lokasi | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | | | | 10 Lokasi | 372.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | | | | 3 Lokasi | 3.705.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | | 3.835.751.799,94 | | | | | | | 4.012.622.866,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3.835.751.799,94 | | | | | | | 4.012.622.866,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 3.835.751.799,94 | | | | | | | 4.012.622.866,00 | |
| 58 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | - | | | 70 B Nilai | 3.697.751.799,94 | | | | | | - | 3.157.622.866,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | - | 2.500.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 2.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rentang Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 2.053.563.780,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | - | 1.985.612.866,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 33 Orang/bulan | 1.998.685.380,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 1.920.612.866,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 54.878.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lhok Beutong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentang Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 318.474.519,94 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | - | 598.500.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.844.373,44 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 5.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 13.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 149.960.158,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 155.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.009.988,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 157.660.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 400.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rentang Waktu Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | - | | | 12 bulan | 1.176.954.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | - | 323.100.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 35.454.300,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 58.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.141.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 265.100.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Terpelihara dengan baik | - | | | 100 persen | 148.759.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | - | 247.910.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 67.859.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 80.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 147.910.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| 59 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan PERDA<br>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)<br>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam | - | | | 75,00 Persen<br>82,00 Persen<br>85,00 Persen | 138.000.000,00 | | | | | | - | 535.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan). | - | | | 90 persen | 86.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 445.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 340.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 12 laporan | 86.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 105.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Terlaksananya Penegakan Perda | - | | | 1 laporan | 51.600.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | - | 90.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 12 Laporan | 51.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 90.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| 60 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan PERDA<br>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)<br>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam | - | | | 75,00 Persen<br>82,00 Persen<br>85,00 Persen | 0,00 | | | | | | - | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | | Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh | Terlaksananya Patroli Pengawasan Pelanggaran Qanun Syariat Islam | - | | | 1 Laporan | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | - | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0002 | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | 20 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 130.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0007 | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | 7 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 190.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | 6.941.019.747,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 6.941.019.747,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 6.941.019.747,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 61 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 67,47 Indeks<br>68,25 Nilai | 6.084.978.047,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 2 Dokumen<br>2 Dokumen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksana administrasi keuangan perangkat daerah | - | | | 100 Persen | 2.671.641.328,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 2.536.741.498,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 131.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 3.499.830,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksana administrasi kepegawaian perangkat daerah | - | | | 100 Persen | 44.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 44.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 444.251.298,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.885.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 51.504.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 65.013.488,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.850.810,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 317.998.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksana pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 Persen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 Persen | 2.584.618.420,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 62.881.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 2.518.237.420,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpelihara barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 Persen | 340.067.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 204.950.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 5.328.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 99.789.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 62 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana | - | | | 0.42 Indeks | 783.380.700,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten<br>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | - | | | 1 Dokumen<br>3 Laporan | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | | 1000 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana<br>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota<br>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota<br>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana<br>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota<br>Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | - | | | 1 Kegiatan<br>800 Orang<br>1 Paket<br>120 Orang<br>1 Paket<br>0 Dokumen<br>0 Dokumen | 500.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | | | | 100 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | | | | 200 Orang | 500.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | | | | 5 Kawasan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit<br>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | - | | | 20 Kejadian<br>1 Paket<br>0 Kejadian<br>15 Kejadian | 283.380.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | | 100 Orang | 158.317.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 1000 Orang | 125.063.700,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | 0 Kerjasama | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | | | | 10 Kegiatan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 63 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | - | | | 80 Persen | 72.661.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | - | | | 25 Kejadian<br>100 Orang<br>1 Paket | 72.661.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 72.661.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | | | 100 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | DINAS SOSIAL | | | | | | 7.034.275.248,00 | | | | | | | 8.998.000.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7.034.275.248,00 | | | | | | | 8.998.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| 64 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya<br>Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana<br>Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial | - | | | 70 Persen<br>75 Persen<br>undefined<br>undefined | 0,00 | | | | | | - | 100.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah pelayanan dan evakuasi korban bencana | - | | | 12 Bulan | 0,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 7.034.275.248,00 | | | | | | | 8.898.000.000,00 | |
| 65 | 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 79,25 Nilai 82,96 Indeks | 3.402.388.461,00 | | | | | | - | 3.728.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 32.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 100.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 32.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksanya Administrasi Keuangan Daerah | - | | | 14 Bulan | 2.174.618.833,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 2.250.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 21 Orang/bulan | 2.053.284.428,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 2.100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 99.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Alue Kambuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 4 Laporan | 22.134.405,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 50.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 21 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 662.303.524,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 640.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 29.998.971,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 56.148.977,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Alue Kambuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 272.725.594,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 120.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 17.999.982,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 285.430.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 437.016.104,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 578.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 6.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 8.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 57.615.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 372.901.104,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Alue Kambuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 96.450.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 110.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 49.950.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 46.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 66 | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial<br>Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosia | - | | | 100.00 Persen<br>12 Persen<br>1 Lembaga | 843.520.890,00 | | | | | | - | 1.160.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 2.01 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial | - | | | 12 Bulan | 754.965.660,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 800.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Keluarga | 754.965.660,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 800.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial kabupaten/kota | - | | | 12 Bulan | 88.555.230,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 360.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Keluarga | 88.555.230,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Lembaga | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 67 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | - | | | 65 Orang | 1.828.266.397,00 | | | | | | - | 2.710.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, Akta kelahiran, Surat nikah, dan kartu identitas anak<br>Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar<br>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spritual dan sosial<br>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga dissabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat<br>Pemberian layanan data dan pengaduan<br>Pemberian layanan kedaruratan<br>Pemberian layanan Penelusuran Keluarga<br>Pemberian layanan rujukan<br>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br>Penyandang Sandang<br>Penyediaan Alat Bantu<br>Penyediaan permakanan<br>Terpenuhinya Kebutuhan anak yang berhdapan dengan hukum | - | | | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 1.808.266.532,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 2.560.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 60.595.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 90.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 31.546.290,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 90.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 162.287.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Orang | 43.258.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 222 Orang | 55.316.811,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 90.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 222 Orang | 153.824.932,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 230.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1000 Orang | 1.219.431.999,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 1.500.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 500 Orang | 82.006.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 130.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Fasilitasi pembuatan nomor Induk Kepundudukan, Akata Kelahiran,, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak<br>kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota<br>Pemberiak akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar<br>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya buka korban HIV/AISD dan NAPZA<br>Pemberian layanan data dan pengaduan<br>pemberian layanan kedaruratan<br>Pemberian layanan penelusuran keluarga<br>Pemberian layanan Reunifikasi keluarga<br>Pemberian layanan rujukan<br>Penyediaan Alat Bantu<br>Penyediaan Perbekalan di luar panti<br>Penyediaan Permakanan<br>Penyediaan Sandang | - | | | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 19.999.865,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 150.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 19.999.865,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | 10 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 68 | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Jumlah Penduduk Miskin<br>Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin<br>Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan<br>Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | - | | | 28,28 Orang<br>undefined 41<br>undefined 45<br>undefined<br>Persen | 217.424.500,00 | | | | | | - | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 2.01 | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara | - | | | 12 Bulan | 49.874.500,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 90.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Orang | 49.874.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | - | | | 12 Bulan | 167.550.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 230.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | | | | 4 Usulan | 167.550.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 69 | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Penyediaan Logistik Penanganan Bencana Kabupaten<br>Persentase Masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya<br>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana<br>Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial | - | | | 1 Paket<br>63 Persen<br>75 Persen<br>85 Persen | 717.675.000,00 | | | | | | - | 900.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | - | | | 1 Paket | 428.900.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 550.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 103.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 149.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30 Orang | 34.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30 Orang | 42.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat Nagan Raya | | 120.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | - | | | 1 Paket | 288.775.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | - | 350.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 222 Kampung | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 28 Orang | 288.775.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 70 | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik | - | | | 6 Persen | 25.000.000,00 | | | | | | - | 80.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 25.000.000,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 80.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | | 6 Makam | 25.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | 3.414.751.255,60 | | | | | | | 4.759.111.745,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3.401.252.455,00 | | | | | | | 4.739.106.342,00 | |
| | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 3.401.252.455,00 | | | | | | | 4.739.106.342,00 | |
| 71 | 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | BB Nilai<br>- Indeks | 2.462.020.000,00 | | | | | | - | 3.697.387.892,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 7.584.667,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 3.300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 4.284.667,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | - | | | 12 bulan | 2.063.307.074,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 2.264.081.781,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 22 Orang/bulan | 2.001.547.074,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 2.201.701.781,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 61.760.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 62.380.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 12 bulan | 207.606.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 1.108.240.850,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.008.320,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 8.146.512,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 67.166.050,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 752.938.274,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 13.775.544,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 25.377.264,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 101.157.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 297.778.800,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 3 Dokumen | 20.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 24.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Sarpras Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 3 Unit | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 71.127.781,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 35.976.181,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 35.151.600,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi Perkantoran | - | | | 12 bulan | 165.706.012,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 184.852.813,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.430.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 6.349.200,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 38.720.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 42.592.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 123.556.012,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 135.911.613,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang ter pelihara dengan baik | - | | | 100 % | 25.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 61.500.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 38.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 5.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 23.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 72 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja terlatih yang memperoleh pekerjaan | - | | | 75 Persen | 500.000.000,00 | | | | | | - | 550.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan | - | | | 120 orang | 500.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penciptaan Lapangan Kerja<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi | - | 550.000.000,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 50 Orang | 500.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENGENTASAN KEMISKINAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penciptaan Lapangan Kerja<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi | | 550.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 73 | 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Besaran pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan | - | | | 0,43 Persen | 19.575.241,50 | | | | | | - | 26.161.287,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 2.01 | | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan | - | | | 20 orang | 14.075.241,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penciptaan Lapangan Kerja<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | - | 15.483.600,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | | 20 Orang | 14.075.241,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Penciptaan Lapangan Kerja<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | 15.483.600,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | | | | 50 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 04 | 2.03 | | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Sistem Online (Karir Hub) | - | | | 300 orang | 5.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | - | 10.677.687,00 | |
| | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | 3.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | | 210 Orang | 5.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | 7.177.687,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 74 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan | - | | | 100 Persen | 419.657.213,50 | | | | | | - | 465.557.163,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama | - | | | 20 perusahaan | 419.657.213,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | - | 465.557.163,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | | | 12 Perusahaan | 5.257.946,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | 7.485.090,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | | | | 3 Perusahaan | 2.799.267,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | 5.312.073,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | | | | 1 Laporan | 411.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SAWIT | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | 452.760.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah dan yang Diselesaikan | - | | | 5 Perkara | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | 5 Perkara | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | | | | 5 Perkara | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 13.498.800,60 | | | | | | | 20.005.403,00 | |
| | 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | 13.498.800,60 | | | | | | | 20.005.403,00 | |
| 75 | 3 | 32 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi | - | | | 1 Kawasan | 13.498.800,60 | | | | | | - | 20.005.403,00 | |
| | 3 | 32 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan | - | | | 1 kawasan | 13.498.800,60 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | - | 20.005.403,00 | |
| | 3 | 32 | 04 | 2.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | | | | 0 Kepala Keluarga | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3 | 32 | 04 | 2.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | | | | 2 Satuan Permukiman | 13.498.800,60 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | | 20.005.403,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | 11.563.833.049,00 | | | | | | | 12.243.871.547,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 11.563.833.049,00 | | | | | | | 12.243.871.547,00 | |
| | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | 393.162.440,00 | | | | | | | 623.669.000,00 | |
| 76 | 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase lembaga layanan Pengarusutamaan Gender Kabupaten | - | | | 1 Dokumen | 47.563.070,00 | | | | | | - | 60.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengarusutamaan Gender | - | | | 1 Dokumen | 47.563.070,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 50.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0014 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek | | | | 0 Orang | 47.563.070,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | | | | 20 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 77 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | - | | | 87 Persen | 135.335.610,00 | | | | | | - | 45.750.000,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan Sinkronisasi bagi perempuan Korban kekerasan | - | | | 50 Layanan | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 20 orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan perlindungan Perempuan | - | | | 1 Dokumen | 135.335.610,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 35.750.000,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan | | | | 30 Orang | 109.585.610,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek | | | | 2 orang | 25.750.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 25.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 78 | 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase jumlah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga Indeks Pembangunan Keluarga | - | | | 85 Persen - Indeks | 65.482.500,00 | | | | | | - | 202.630.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kualitas keluarga dalam mewujutkan kesetaraan Gender dan Hak Anak | - | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 32.630.000,00 | |
| | 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0007 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 32.630.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 04 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga | - | | | 1 Dokumen | 55.482.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 170.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 0005 | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan | | | | 0 Lembaga | 55.482.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 0007 | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas | | | | 2 Lembaga | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 79 | 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Keterlibatan Perempuan dalam PUG dan Pemberdayaan Perrempuan | - | | | 83 Persen | 15.000.000,00 | | | | | | - | 38.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyajian dan pemamfaatan data Gender dan Anak | - | | | 85 persen | 15.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 38.500.000,00 | |
| | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak | | | | 2 Lembaga | 15.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 38.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 80 | 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Kabupaten Layak Anak | - | | | Nindya Predikat | 117.142.760,00 | | | | | | - | 106.519.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota" | - | | | 100 persen | 117.142.760,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 106.519.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Lembaga | 107.141.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0004 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Orang | 10.001.760,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 6.519.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 81 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayana | - | | | 85 Persen | 12.638.500,00 | | | | | | - | 170.270.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak | - | | | 40 Layanan | 12.638.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 117.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | | 2 Dokumen | 12.638.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 53.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0009 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 63.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 08 | 07 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Bagi Anak | - | | | 1 Dokumen | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 53.270.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 2.03 | 0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 53.270.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | 4.187.777.541,00 | | | | | | | 4.548.660.479,00 | |
| 82 | 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | B Indeks<br>B Nilai | 3.238.338.882,00 | | | | | | - | 3.400.427.242,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 4 Dokumen | 18.415.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | - | 32.803.566,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 4 Dokumen | 15.825.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Berita Acara | 2.590.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 7.803.566,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | rentan waktu pelaksaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 14 bulan | 2.420.306.835,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | - | 2.420.306.835,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/bulan | 2.316.106.835,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 2.316.106.835,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 104.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 104.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan disiplin Aparatur | - | | | 85 persen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | - | 35.400.000,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 35 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 35.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 307.936.806,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | - | 294.008.840,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 6.752.380,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 6.010.440,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 7.770.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 112.678.026,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 10.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 15.534.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 15.534.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 165.202.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 161.564.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | rentang waktu pelaksanaan administrasi perkantoran | - | | | 12 bulan | 451.680.241,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | - | 375.908.001,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 7.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 116.537.665,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 46.184.517,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 9.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 30.636.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 319.742.576,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 291.387.484,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara | - | | | 100 persen | 40.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | - | 242.000.000,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPMGP4 | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 83 | 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | Jumlah Desa yang terfasilitasi | - | | | 25 Desa | 0,00 | | | | | | - | 204.371.000,00 | |
| | 2 | 13 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | Tertatanya pemerintahan Desa dengan baik | - | | | 25 Desa | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 204.371.000,00 | |
| | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya | | | | 222 Desa | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 204.371.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 84 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik<br>Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | - | | | 100.00 Persen<br>222 Kelompok | 522.090.813,00 | | | | | | - | 582.413.237,00 | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang terbina | - | | | 83 persen | 522.090.813,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 582.413.237,00 | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 4 Dokumen | 293.202.058,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 50.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 4 Dokumen | 39.057.382,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 4 Dokumen | 53.656.738,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 63.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 20 Orang | 24.866.423,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 47.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | 2 Laporan | 7.700.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 4 Dokumen | 30.236.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 33.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 4 Dokumen | 22.816.550,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | | 32.824.835,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 50 Orang | 16.448.662,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | | 55.468.402,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | 4 Laporan | 12.320.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 25.320.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 4 Dokumen | 21.787.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 85 | 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat | - | | | 100.00 Persen | 427.347.846,00 | | | | | | - | 361.449.000,00 | |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | - | | | 2 Dokumen | 427.347.846,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 361.449.000,00 | |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 4 Dokumen | 325.763.346,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 204.371.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 4 Laporan | 101.584.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 117.078.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 6.982.893.068,00 | | | | | | | 7.071.542.068,00 | |
| 86 | 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | "Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) "<br>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | - | | | - Angka<br>- "Kelahiran per 1000 | 0,00 | | | | | | - | 25.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 25.000.000,00 | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 87 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase jumlah keluarga yang dibina | - | | | 85,00 Persen | 6.982.893.068,00 | | | | | | - | 7.021.139.068,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB | - | | | 1 Kegiatan | 2.493.645.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 2.493.645.000,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 4 Unit | 129.645.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 129.645.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 12 Laporan | 638.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 638.800.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 12 Dokumen | 1.725.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 1.725.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | - | - | | | - | 3.715.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 3.740.415.000,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | 10 Organisasi | 3.715.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 3.715.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 25.415.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 328.448.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 328.448.000,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 12 Laporan | 328.448.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 328.448.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Manunggal TNI KB | - | | | 1 Kegiatan | 445.800.068,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 458.631.068,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah DASHAT di Kampung KB | | | | 5 Unit | 397.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 397.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0007 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | 4 Dokumen | 48.200.068,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 61.031.068,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 88 | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase Posyandu Aktif<br>Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | - | | | 100.00 Persen<br>222 Kelompok | 0,00 | | | | | | - | 25.403.000,00 | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | - | 25.403.000,00 | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | | | | 2 Kelompok | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Masyarakat Nagan Raya | | 25.403.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | | | | | | DINAS PERTANAHAN | | | | | | 1.905.297.368,00 | | | | | | | 1.448.000.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.905.297.368,00 | | | | | | | 1.448.000.000,00 | |
| | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | 1.905.297.368,00 | | | | | | | 1.448.000.000,00 | |
| 89 | 2 | 10 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 65,53 indeks<br>70,00 Nilai | 1.712.640.350,50 | | | | | | - | 1.448.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 10 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 13.890.692,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 13.000.000,00 | |
| | 2 | 10 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 13.890.692,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 13.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.308.191.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Pertanahan | - | 1.352.000.000,00 | |
| | 2 | 10 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/bulan | 1.256.651.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Pertanahan | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 51.540.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Pertanahan | | 52.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Pertanahan | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 0,00 | - | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 242.890.990,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 83.000.000,00 | |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.533.685,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 4.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 66.413.105,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 67.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 11.710.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 161.234.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 72.141.568,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 11.021.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 15.700.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 45.420.368,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 75.526.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 43.780.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 31.746.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 90 | 2 | 10 | 06 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Tersedianya tanah objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah obsentee | - | | | 36,21 Persen | 81.458.159,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 06 | 2.01 | | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 81.458.159,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 06 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | | | | 1 Dokumen | 81.458.159,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 91 | 2 | 10 | 09 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase izin yang diterbitkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan pertanahan yang berlaku | - | | | 15,95 Persen | 38.563.241,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 09 | 2.01 | | Penerbitan Izin Membuka Tanah | - | - | | | - | 38.563.241,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 09 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | | | | 1 Dokumen | 38.563.241,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 92 | 2 | 10 | 14 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN | persentase SDM bidang pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya | - | | | 65,00 Persen | 72.635.617,50 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 14 | 7.02 | | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan | - | - | | | - | 72.635.617,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 10 | 14 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan | | | | 35 Orang | 72.635.617,50 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 13.016.084.222,20 | | | | | | | 14.267.600.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 13.016.084.222,20 | | | | | | | 14.267.600.000,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 13.016.084.222,20 | | | | | | | 14.267.600.000,00 | |
| 93 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 80.85 Nilai<br>80 Indeks | 5.824.535.326,20 | | | | | | - | 6.553.600.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedia dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | - | | | 100 Persen<br>4 Dokumen | 36.768.809,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 28.600.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 16.425.785,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 11.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.199.831,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 5.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.073.192,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 5.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 10.070.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 6.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 2.404.504.171,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 2.431.500.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 2.283.491.954,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 2.300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 105.960.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 115.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.019.732,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 5.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 10.032.485,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 11.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 170.940.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 220.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 170.940.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 687.488.807,50 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | - | 769.700.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 32.488.812,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 67.332.600,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 264.823.120,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 270.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.159.990,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 273.587.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 330.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.097.285,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 5.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | DLH | | 30.200.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persen | 459.064.973,20 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 737.800.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 8.800.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 211.064.973,20 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 240.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 229.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persen | 2.065.768.565,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 2.366.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 148.900.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 15 Unit | 1.347.914.665,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 1.400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 3 Unit | 501.713.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 530.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 62.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 66.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 5.240.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 94 | 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase implementasi kebijakan lingkungan hidup | - | | | 100 Persen | 175.129.640,00 | | | | | | - | 210.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | "Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun" | - | | | 1 Dokumen | 75.129.640,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | | | | 1 Dokumen | 75.129.640,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 110.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 95 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pencemaran lingkungan<br>Indeks Kualitas Air | - | | | 100 Persen<br>79 Indeks | 6.099.510.968,41 | | | | | | - | 6.643.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | - | | | 1 Dokumen | 250.934.492,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 250.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 1 Dokumen | 100.004.900,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 100.038.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | | | | 10 Lokasi | 50.891.592,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | - | | | 1 Laporan | 441.327.376,41 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | 1 Laporan | 298.805.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 350.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | | | | 1 Titik | 142.522.376,41 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | - | | | 1 Dokumen | 5.407.249.100,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 5.893.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 348.904.940,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 800.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | | | | 1 Kegiatan | 5.058.344.160,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 5.093.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 96 | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Jumlah Kawasan Keanekaragaman Hayati yang terkelola<br>Luas RTH yang di kelola | - | | | 1 Kawasan<br>75 Ha | 65.490.000,00 | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | "Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota" | - | | | 30 ha | 65.490.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Ha | 65.490.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 97 | 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Limbah B3 yang terkelola | - | | | 100 Pelaku Usaha | 50.480.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 11 | 05 | 2.02 | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - | | | 1 Dokumen | 50.480.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 0,00 | |
| | 2 | 11 | 05 | 2.02 | 0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 50.480.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 98 | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase pemegang izin usaha yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup | - | | | 100 Persen | 50.037.900,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | - | | | 1 Dokumen | 50.037.900,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | - | 50.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0010 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | | 10 Usaha/Kegiatan | 50.037.900,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Dinas Lingkungan Hidup | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 99 | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan hidup | - | | | 5 Kelompok | 137.314.400,00 | | | | | | - | 138.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | - | | | 1 Lembaga | 137.314.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 138.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 88.266.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 88.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | | | | 10 Orang | 49.048.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 100 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | - | | | 100 Persen | 55.090.000,00 | | | | | | - | 55.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | - | | | 1 Dokumen | 55.090.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 55.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | | | | 5 Pengaduan | 55.090.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 101 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Jumlah Timbulan Sampah Perkotaan<br>Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten<br>Persentase Sampah Kabupaten yang tertangani<br>Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani | - | | | 1583.59 Ton<br>27051.48 Ton<br>54 Persen<br>59.71 Persen | 558.495.987,59 | | | | | | - | 518.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | jumlah sarana dan prasarana persampahan | - | | | 1700 Unit | 558.495.987,59 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | - | 518.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | | 2 Kelompok | 63.075.565,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 88.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | | 100 Unit | 199.999.999,84 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 51.368.193,25 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | 50 Ton | 143.292.276,50 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah | | | | 1 Tahun Dokumen | 60.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0030 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sampah yang terdaur ulang | | | | 1 Ton | 40.759.952,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA | Masyarakat | | 70.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 3.312.178.645,50 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3.312.178.645,50 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 3.312.178.645,50 | | | | | | | 0,00 | |
| 102 | 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 80,60 Nilai 88,63 Indeks | 3.199.895.185,50 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | - | | | 6 Dokumen | 32.476.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 24 Dokumen | 32.476.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rentan Waktu Pelaksanaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 14 Bulan | 2.404.636.489,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 22 Orang/bulan | 2.292.296.489,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 50 Dokumen | 112.340.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentan Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 430.557.583,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 14.412.240,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 263.374.943,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 9.158.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 143.612.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | - | | | 100 % | 284.474.613,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 126.848.275,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 152.626.338,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | - | | | 100 % | 47.750.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 31.750.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 16.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 103 | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital<br>Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)<br>Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak<br>Persentase Perekaman KTP Elektronik<br>Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk | - | | | 20,00 Persen<br>28,50 Persen<br>48 Persen<br>99,10 Persen<br>99.40 Persen | 28.137.990,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen | - | | | 100 % | 28.137.990,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | 10000 Dokumen | 28.137.990,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 104 | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan untuk yang melaporkan<br>Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan untuk yang melaporkan | - | | | 100,00 Persen<br>95,20 Persen | 28.991.740,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil | - | | | 100 % | 28.991.740,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | 10000 Dokumen | 28.991.740,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 105 | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - | - | | | - | 27.591.740,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | - | | | - | 27.591.740,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 12 Dokumen | 27.591.740,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 106 | 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Cakupan pengelolaan profil kependudukan | - | | | 100,00 Persen | 27.561.990,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Buku Profil | - | | | 20 Buku | 27.561.990,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | 0,00 | |
| | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | | | | 12 Dokumen | 27.561.990,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 5.593.295.782,00 | | | | | | | 7.910.407.954,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.593.295.782,00 | | | | | | | 7.910.407.954,00 | |
| | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 5.593.295.782,00 | | | | | | | 7.910.407.954,00 | |
| 107 | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 70 Indeks<br>70 Nilai | 3.628.212.782,00 | | | | | | - | 5.314.106.074,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlansananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 4 dokumen | 9.994.425,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | - | 10.996.651,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 9.994.425,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 10.996.651,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 bulan | 1.947.325.556,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | - | 2.266.020.788,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 21 Orang/bulan | 1.875.475.556,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 2.186.985.788,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 71.850.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 79.035.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 1 paket | 48.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dunas Perhubungan | - | 296.120.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dunas Perhubungan | | 146.520.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 6 Orang | 48.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dunas Perhubungan | | 149.600.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 bulan | 219.699.469,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | - | 347.851.588,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.024.970,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 5.527.467,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN | | 9.523.800,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 95.702.745,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 149.711.818,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.089.754,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 12.093.503,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 112.882.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 170.995.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan dan paket sarana dan prasarana gedung kantor | - | | | 12 Bulan | 6.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | - | 10.120.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 6.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 10.120.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 bulan | 976.707.360,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | - | 1.130.263.697,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 2.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 5.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 21.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 26.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 952.807.360,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 1.098.363.697,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 bulan | 419.985.972,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | - | 1.252.733.350,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 143.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 18 Unit | 369.985.972,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PERHUBUNGAN | | 791.357.600,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN | | 318.375.750,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 108 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Konektivitas Darat | - | | | 0,4 Rasio | 1.923.743.000,00 | | | | | | - | 2.543.853.880,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | tersedianya Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | - | | | 1 dokumen | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | - | 53.130,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 53.130,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | tersedianya Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | - | | | 15 persen | 1.470.923.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | - | 1.979.487.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1.320.923.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 1.800.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 30 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 179.487.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | - | | | - | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | - | 60.500,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 5 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 60.500,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | - | | | 12 bulan | 452.820.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | - | 564.253.250,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 452.820.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 563.684.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 569.250,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 109 | 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Konektivitas Laut | - | | | 0,6 Rasio | 41.340.000,00 | | | | | | - | 52.448.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya pengawasan pelayanan izin usaha pelayaran | - | | | 12 bulan | 41.340.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | - | 52.448.000,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 41.340.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS PERHUBUNGAN NAGAN RAYA | | 52.448.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 3.887.238.608,50 | | | | | | | 5.076.137.657,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3.887.238.608,50 | | | | | | | 5.076.137.657,00 | |
| | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 3.713.925.387,75 | | | | | | | 4.820.437.657,00 | |
| 110 | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 68.25 Nilai<br>71.53 Indeks | 2.707.651.265,25 | | | | | | - | 3.553.806.748,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 7.079.509,44 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 7.079.509,44 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 1.873.870.704,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 2.311.587.012,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang/bulan | 1.803.310.704,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 2.241.027.012,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 70.560.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 70.560.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 188.518.315,81 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 396.537.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 3.668.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 8.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 30.502.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 59.664.756,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 11.908.759,81 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 82.774.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 213.537.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persen | 618.182.736,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 735.682.736,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 523.092.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 523.092.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 95.090.736,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 212.590.736,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 20.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 70.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 111 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) | - | | | 89 Persen | 870.859.122,50 | | | | | | - | 1.116.630.909,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | - | | | 100 Persen | 870.859.122,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.116.630.909,00 | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | | | | 4 Laporan | 870.859.122,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 944.588.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | | | | 10 Komunitas | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | | | | 5 Permohonan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 36.712.153,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | | | | 5 Media | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | | | | 5 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 55.330.756,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 112 | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Nilai Indeks SPBE/ PEMDI<br>Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE | - | | | 2.96 Indeks<br>52 Persen | 135.415.000,00 | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | - | | | 100 Persen | 135.415.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | 1 Dokumen | 51.351.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | 44 Perangkat Daerah | 84.064.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 70.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 161.658.220,75 | | | | | | | 205.700.000,00 | |
| 113 | 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | - | | | 2.6 Indeks | 161.658.220,75 | | | | | | - | 205.700.000,00 | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | - | | | 100 Persen | 161.658.220,75 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 205.700.000,00 | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik | | | | 100 % | 1.421.051,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 550.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | | | | 100 % | 73.590.533,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | | | | 100 % | 72.063.311,75 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 70.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0020 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | | | | 3 Orang | 12.971.426,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0022 | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah | | | | 1 Laporan | 1.611.898,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 150.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 11.655.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| 114 | 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | - | | | 56 Persen | 11.655.000,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | - | | | 100 Persen | 11.655.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | 50.000.000,00 | |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 1 Laporan | 11.655.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | 5.913.913.602,00 | | | | | | | 4.969.503.153,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4.963.591.352,00 | | | | | | | 4.468.328.103,00 | |
| | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | 4.963.591.352,00 | | | | | | | 4.468.328.103,00 | |
| 115 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 0 Indeks<br>0 Nilai | 4.333.591.352,00 | | | | | | - | 4.468.328.103,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 0,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 10.089.900,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 10.089.900,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 2.657.127.859,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 2.669.127.859,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 31 Orang/bulan | 2.543.007.859,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 2.543.007.859,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 114.120.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 126.120.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 6 Kegiatan | 164.464.193,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 229.011.044,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 5.036.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 5.589.960,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan Paket | 48.983.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 57.487.700,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan Paket | 14.357.093,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 15.933.384,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 96.088.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 4 Kegiatan | 287.698.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 325.798.000,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan Laporan | 34.248.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 60.148.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 2.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 6.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 250.650.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 259.650.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 2 Kegiatan | 1.224.301.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 1.234.301.300,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 20.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 10.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 1.204.301.300,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 1.204.301.300,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 116 | 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Cakupan pengawasan Koperasi | - | | | 37,68 Persen | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabu | - | | | 114 Unit Usaha | 0,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 114 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | 114 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 117 | 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu<br>Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM<br>Persentase Koperasi Aktif | - | | | 0 Persen<br>52,16 Rasio<br>81.25 Persen | 150.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Adanya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | - | | | 95 Persen | 150.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 222 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 118 | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan pendapatan UMKM | - | | | 12,81 Persen | 200.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Adanya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | | | 4 Kegiatan | 200.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | | | | 0 Unit Usaha | 150.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | | 0 Unit Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | | | | 0 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 119 | 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah<br>Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil | - | | | 0 Persen<br>0 Rasio | 280.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | | | 1 Kegiatan | 280.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 0 Unit Usaha | 280.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 950.322.250,00 | | | | | | | 501.175.050,00 | |
| | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| 120 | 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhaan Pokok Dan Barang Penting | - | | | 30 Persen | 30.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | | | 5 Laporan | 30.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 0,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 4 Kali Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 30 | 04 | 2.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 5 Laporan | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 0,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | 10 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 121 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | - | | | 75 Persen | 45.000.000,00 | | | | | | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | - | | | - | 45.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 110.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | | 1 Tahun Unit | 45.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 110.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 875.322.250,00 | | | | | | | 391.175.050,00 | |
| 122 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB | - | | | 91,30 Persen | 499.959.700,00 | | | | | | - | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | | | 4 Kegiatan | 499.959.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | - | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 1 laporan Dokumen | 499.959.700,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 123 | 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase IKM yang dibantu tepat sasaran<br>Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan | - | | | 10,00 Persen<br>22,80 Persen | 375.362.550,00 | | | | | | - | 41.175.050,00 | |
| | 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Adanya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | 3 Dokumen | 375.362.550,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Disperindagkop | - | 41.175.050,00 | |
| | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 1 Dokumen | 375.362.550,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Disperindagkop | | 41.175.050,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 3 Dokumen<br>Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Disperindagkop | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 2.417.990.121,00 | | | | | | | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 2.417.990.121,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 2.417.990.121,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 124 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai SAKIP | - | | | 91.83 Indeks B Nilai | 2.417.990.121,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | rentang waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | - | | | 12 bulan | 1.879.859.948,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 1.816.837.088,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 58.780.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 4.242.860,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | rentang waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 1 bulan | 284.247.569,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.064.600,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 69.343.669,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 26.134.300,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 186.705.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | rentang waktu pelaksanaan administrasi perkantoran | - | | | 1 bulan | 214.882.604,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 6.827.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 40.844.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 167.211.104,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | tersedianya penunjang pemeliharaan brang milik daerah | - | | | 1 unit | 39.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 19.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 125 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah izin yang diterbitkan | - | | | 2900 Izin | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal | - | | | 65 pelaku usaha | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 50 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 50 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 126 | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Perusahaan yang difasilitasi | - | | | 17 Perusahaan | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kaupaten/kota | - | | | 43 kegiatan usaha | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | 38 Kegiatan Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 127 | 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat | - | | | 91,53 Persen | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 120 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | | | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | | 1.465.333.472,00 | | | | | | | 1.689.971.931,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 1.465.333.472,00 | | | | | | | 1.689.971.931,00 | |
| | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | 1.465.333.472,00 | | | | | | | 1.689.971.931,00 | |
| 128 | 2 | 22 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | Indeks Nilai | 1.239.290.795,50 | | | | | | - | 1.420.532.848,00 | |
| | 2 | 22 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 12 bulan | 500.637.293,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 567.937.112,00 | |
| | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5 Orang/bulan | 466.533.293,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 541.057.112,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 7 Laporan | 34.104.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 26.880.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Lancarnya Administrasi Perangkat daerah | - | | | 12 bulan | 150.595.066,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 195.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 20 Paket | 42.623.006,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 4.602.060,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35 Laporan | 103.370.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 34.143.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 44.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 19.980.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 14.163.600,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Barang dan Jasa | - | | | 12 bulan | 521.058.836,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 531.595.736,00 | |
| | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 9.443.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 18.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 34 Laporan | 511.615.736,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 513.595.736,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terawatnya Barang aset kantor MAA | - | | | 12 bulan | 32.856.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 82.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 22.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10.656.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 42.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| 129 | 2 | 22 | 07 | | | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | Jumlah Gampong yang telah menerapkan hukum adat | - | | | undefined Jumlah | 226.042.676,50 | | | | | | - | 269.439.083,00 | |
| | 2 | 22 | 07 | 7.01 | | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Terpeliharanya Pembinaan Adat Istiadat | - | | | 90 % | 55.241.355,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 70.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0002 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | | | | 1 Lembaga | 55.241.355,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 07 | 7.02 | | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | Terselenggaranya Pelatihan Adat | - | | | 90 % | 99.721.364,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 125.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 07 | 7.02 | 0001 | Penguatan Peradilan Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat | | | | 60 Orang | 51.359.423,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 07 | 7.02 | 0003 | Pembinaan Mediasi Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat | | | | 60 Laporan | 48.361.940,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 07 | 7.03 | | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Termeningkatnya peran dan fungsi Lembaga Adat | - | | | 87 % | 71.079.957,50 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | - | 74.439.083,00 | |
| | 2 | 22 | 07 | 7.03 | 0005 | Pembinaan Pemuda Pelopor Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 71.079.957,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Alue Kambuk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 74.439.083,00 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | 4.048.972.610,99 | | | | | | | 4.137.670.739,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4.048.972.610,99 | | | | | | | 4.137.670.739,00 | |
| | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | 3.923.898.513,99 | | | | | | | 4.072.670.739,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 130 | 2 | 23 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 73,00 Nilai<br>- Indeks | 3.191.644.354,49 | | | | | | - | 2.852.670.739,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Renggar dan Evaluasi Kinerja OPD | - | | | 100 Persen | 26.243.440,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 0,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 10.000.033,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 8.325.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 7.918.407,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD | - | | | 100 Persen | 2.433.316.519,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 2.436.316.519,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 2.361.916.519,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 2.361.916.519,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 71.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 74.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum OPD | - | | | 100 Persen | 309.142.503,49 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 210.770.000,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.464.300,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 15.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 66.073.860,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 69.749.479,49 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10.050.864,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 45.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 149.804.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 149.870.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang OPD | - | | | 100 Persen | 305.030.592,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 139.584.220,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 24 Laporan | 119.299.120,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 139.584.220,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 181.331.472,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Barang OPD | - | | | 100 Persen | 115.436.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 66.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 75.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 66.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 39.936.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | - | - | | | - | 2.475.300,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 0,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 1 Dokumen | 2.475.300,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 131 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | - | | | 4.700 Orang | 732.254.159,50 | | | | | | - | 1.200.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah | - | | | 100 Persen | 350.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 700.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | | | | 1000 Eksemplar | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 250.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1000 Eksemplar | 310.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 400.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 5000 Eksemplar | 40.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah | - | | | 100 Persen | 381.454.159,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | | | | 100 Orang | 59.031.699,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | | | | 18 Perpustakaan | 80.504.360,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Perpustakaan | 47.790.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | | 100 Orang | 44.128.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | 165 Lokus | 150.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 132 | 2 | 23 | 03 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Naskah Kuno Yang Terdata/Teridentifikasi | - | | | 50 Naskah | 0,00 | | | | | | - | 20.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 03 | 2.02 | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 20.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 03 | 2.02 | 0004 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 5000 Eksemplar | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 125.074.097,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |
| 133 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat ketersediaan arsip | - | | | 85,50 Persen | 96.694.543,50 | | | | | | - | 49.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 61.266.630,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 24.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 45 Laporan | 61.266.630,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 24.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Arsip Statis Daerah | - | | | 100 Persen | 14.488.058,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 4.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | | | | 257 Arsip | 14.488.058,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 4.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Simpul Jaringan Infromasi Kearsipan Nasional | - | | | 100 Persen | 20.939.855,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 21.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 45 Laporan | 20.939.855,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 21.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 134 | 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip | - | | | 10,12 Persen | 18.564.842,00 | | | | | | - | 10.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.01 | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Persentase Fasilitasi Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintahan Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | | | 100 Persen | 18.564.842,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 8.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | 2700 Arsip | 18.564.842,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | 03 | 2.04 | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 2.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.04 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | | | | 45 Arsip | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 2.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 135 | 2 | 24 | 04 | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase perizinan penggunaan arsip | - | | | - Persen | 9.814.711,50 | | | | | | - | 6.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | - | | | 100 Persen | 9.814.711,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 6.000.000,00 | |
| | 2 | 24 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | | | | 1 SOP SOP | 9.814.711,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | | | | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | | | | 5.761.228.289,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 164.542.871,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 164.542.871,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 136 | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan | - | | | 77 Skor | 144.221.165,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Angka Ketersedian Energi Perkapita | - | | | 3.239,50 kkal/kap/hari | 144.221.165,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | | | | 1 Laporan | 33.071.760,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 1 Laporan | 81.590.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | 1 laporan | 11.626.575,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 17.932.830,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0020 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | "Jumlah Total Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten yang Dikelola | - | | | 19 Ton | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 2 Ton | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | 2 Ton | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0008 | Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah LPM yang terfasilitasi | | | | 2 kelompok | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| 137 | 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | - | | | 34,65 Persen | 8.979.770,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Persentase dukungan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan kabupaten yang disusun | - | | | 100 Persen | 8.979.770,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | | | | 1 Dokumen | 8.979.770,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 04 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani | - | | | 6 Kecamatan | 0,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| 138 | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | "Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan " | - | | | 61 Persen | 11.341.936,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar asal Tumbuhan yang diregistrasi, Disertivikasi, dan Di Rekomendasi | - | | | 1 Pelaku Usaha | 11.341.936,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | | | | 1 Dokumen | 11.341.936,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 5.596.685.418,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 5.596.685.418,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 139 | 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | B Nilai<br>- Indeks | 3.789.593.096,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 4 Dokumen | 21.354.438,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 10.765.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 5.497.770,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 5.091.568,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | - | | | 14 BULAN | 2.554.587.624,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 35 Orang/bulan | 2.455.716.832,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 87.360.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 7.896.262,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 4 Dokumen | 3.614.530,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan disipilin aparatur | - | | | 85 PERSEN | 18.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 18.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 12 BULAN | 442.986.709,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7.946.712,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 64.829.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 122.443.997,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 6.105.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 227.262.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi Perkantoran | - | | | 12 BULAN | 707.164.324,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 612.164.324,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 45.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DKPP | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DKPP | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 25.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DKPP | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DKPP | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| 140 | 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | - | | | 3630,97 Ton | 187.465.012,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Produktivitas Hasil Tangkapan Nelayan (%) | - | | | 97 Persentase | 124.498.196,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 18.998.196,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | 165 Unit | 105.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Nelayan | - | | | 95 Persen | 30.221.166,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 20 Orang | 26.274.350,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 1 Kelompok | 3.946.816,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Penciptaan Lapangan Kerja Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Tersedianya Pelayanan | - | | | 12 Bulan | 25.653.275,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | 24 Layanan | 25.653.275,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.04 | | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 7.092.375,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia | | | | 1 Dokumen | 7.092.375,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| 141 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | - | | | 1085,47 Ton | 1.594.405.440,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil | - | | | 1 Kegiatan | 95.700.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | 1 Kelompok | 95.700.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rumah Tangga Perikanan yang di Bantu | - | | | 289 Rumah Tangga Perikanan | 1.498.705.440,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 11.872.095,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 1.097.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 389.833.345,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| 142 | 3 | 25 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Berkurangnya Kasus IUU Fishing (%) | - | | | 75 Persen | 25.221.870,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 05 | 2.01 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/ kota yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya | - | | | 10 Kecamatan | 25.221.870,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | - | 0,00 | |
| | 3 | 25 | 05 | 2.01 | 0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | 1 Pelaku Usaha | 9.599.820,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | 1 Pelaku Usaha | 15.622.050,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 05 | 2.01 | 0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | 1 Pelaku Usaha | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | masyarakat | | 0,00 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN |
| | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | 8.715.766.289,00 | | | | | | | 8.631.466.335,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7.481.766.289,00 | | | | | | | 7.161.466.335,00 | |
| | 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 7.481.766.289,00 | | | | | | | 7.161.466.335,00 | |
| 143 | 2 | 19 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 68 Indeks<br>71 Nilai | 3.316.219.975,00 | | | | | | - | 3.201.466.335,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumentasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 23.500.845,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | - | 23.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.630.456,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 5.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.768.865,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 5.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 3.380.719,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 3.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 9.720.805,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 10.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rentang Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 1 Tahun | 2.294.943.370,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | - | 2.130.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 2.173.520.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 2.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 111.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 9.583.370,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 10.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentang Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 1 Tahun | 467.251.897,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | - | 483.466.335,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 17.671.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.253.817,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 15.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 114.798.980,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 128.466.335,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 20.967.900,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 300.560.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rentang Waktu Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | - | | | 1 Tahun | 467.023.863,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | - | 505.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 5.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 75.600.735,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 37.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 349.423.128,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perawatan dan Pemeliharaan pada Kendaraan dan Kantor | - | | | 1 Tahun | 63.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | - | 60.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.250.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5.250.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 5.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 38.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | DISPARPORA | | 35.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 144 | 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persetase wirausaha pemuda yang dibina | - | | | 15 Persen | 1.016.022.879,00 | | | | | | - | 700.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 886.081.234,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 600.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | | 50 Orang | 690.884.330,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | 1 Kegiatan | 113.794.401,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | | 20 Orang | 81.402.503,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Adanya Peserta Kegiatan Pemuda | - | | | 1 Tahun | 129.941.645,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 40 Organisasi | 129.941.645,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 145 | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Prestasi Olahraga | - | | | 22 Prestasi | 3.149.523.435,00 | | | | | | - | 3.160.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Prestasi Atlit di Tingkat Kabupaten | - | | | 2 Dokumen | 2.027.834.254,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 750.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 199.997.570,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 250.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | | | | 200 Orang | 1.827.836.684,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Terbinanya Pengembangan Olahraga di Kabupaten Nagan Raya | - | | | 1 Tahun | 259.343.820,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 910.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | | | | 1 Orang | 199.989.848,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 210.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | | | | 20 Orang | 59.353.972,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | | 200 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Terbinanya Atlet Prestasi Daerah | - | | | 1 Tahun | 498.345.361,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | | | | 200 Dokumen | 498.345.361,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Adanya Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | - | | | 1 Tahun | 364.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 10 Unit | 364.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 146 | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase gerakan kepramukaan yang aktif | - | | | 60 Persen | 0,00 | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Terlaksananya Kegiatan Pramuka | - | | | 1 Tahun | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 1 Organisasi | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | 1 Organisasi | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 1.234.000.000,00 | | | | | | | 1.470.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 1.234.000.000,00 | | | | | | | 1.470.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 147 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan<br>Lama Kunjungan Wisatawan | - | | | 10.00 Persen<br>3 Hari | 514.000.000,00 | | | | | | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Kawasan Pariwisata | - | | | 1 Tahun | 250.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 850.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 2 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 50 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0009 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Adanya Sarpras Destinasi Wisata | - | | | 1 Tahun | 264.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 450.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | | | | 5 Lokasi | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 2 Unit | 214.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 148 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | - | | | 10.00 Persen | 200.000.000,00 | | | | | | - | 20.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Teraksesnya Data dan Informasi Kepada Publik | - | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 20.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 20.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 149 | 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tervalidasi | - | | | 5.00 Persen | 520.000.000,00 | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | - | | | - | 520.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 150.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | | | | 50 Orang | 450.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | | | | | | 20.107.365.053,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 20.107.365.053,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 20.107.365.053,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 150 | 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 79,05 Indeks B Nilai | 10.786.568.471,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kerja Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | - | | | 1 Paket<br>1 Dokumen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya peningkatan administrasi keuangan perangkat daerah | - | | | 1 Dokumen | 9.557.995.636,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 125 Orang/bulan | 9.366.555.636,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 191.440.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya peningkatan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 1 Paket | 598.943.445,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 22.716.527,40 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 51.814.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 210.697.517,60 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 11.255.400,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 81.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 220.560.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan daerah | - | | | 1 Laporan | 541.829.390,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 28.770.090,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 153.057.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 360.002.300,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah | - | | | 1 Unit | 87.800.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 10.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 67 Unit | 57.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 151 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah populasi ternak kerbau<br>Jumlah populasi ternak Kambing<br>Jumlah populasi ternak Domba<br>Produksi Daging<br>Jumlah Populasi Ternak Unggas | - | | | 11424 Ekor<br>17749 Ekor<br>2800 Ekor<br>370 Kg<br>89404 Ekor | 1.366.300.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Tersedianya Pengawasan terhadap sarana pertanian | - | | | 1 Laporan | 66.300.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 1 Laporan | 66.300.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan hijauan pakan ternak dalam Kabupaten Nagan Raya | - | | | 1 Paket | 1.300.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penciptaan Lapangan Kerja<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | | | | 50 Ekor | 1.300.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penciptaan Lapangan Kerja<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 152 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Indek Penanaman (IP)<br>Jumlah Lahan yang Dimanfaatkan untuk Persawahan/ Perkebunan/ Pengembalaan/ Budidaya Perairan<br>Produktivitas Padi | - | | | 200 indeks<br>5732,06 Ha<br>6,2 ton/Ha | 4.581.065.389,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pertanian yang dilakukan pengembangan | - | | | 1 Laporan | 311.787.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 2 Laporan | 311.787.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pertanian yang dilakukan pembangunan | - | | | 1 Unit | 4.269.278.389,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 15 Unit | 2.035.866.339,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | | | | 12 Unit | 2.233.412.050,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 153 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan parasit, bakteri dan virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar<br>Angka Kematian Ternak<br>Jumlah Populasi Ternak Yang Di Vaksinasi<br>Kasus Penyakit Ternak Yang Ditangani | - | | | 0,1 Rasio<br>139 Ekor<br>3264 Ekor<br>5039 Kasus | 0,00 | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kesehatan hewan<br>Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan | - | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya layanan laboratorium medik veteriner | - | | | 1 Laporan | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 154 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Luas panen pertanian | - | | | 11931 Ha | 619.900.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan | - | | | 1 Paket | 619.900.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 5 Ha | 619.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Petani Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| 155 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah Variasi Komoditi Pertanian | - | | | 7 Komoditi | 2.753.531.193,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nagan Raya | - | | | 10 Unit | 2.753.531.193,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Petani Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 10 Unit | 53.531.193,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Petani Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 10 Unit | 2.700.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Petani Nagan Raya | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN |
| | | | | | | DINAS PERKEBUNAN | | | | | | 8.954.118.525,00 | | | | | | | 7.401.534.088,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 8.954.118.525,00 | | | | | | | 7.401.534.088,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 8.954.118.525,00 | | | | | | | 7.401.534.088,00 | |
| 156 | 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 65,70 Indeks<br>80 Nilai | 3.637.603.613,00 | | | | | | - | 3.596.169.253,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 37.500.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 37.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 30.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.665.092.693,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | - | 2.662.692.693,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 2.554.992.693,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 2.554.992.693,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 110.100.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 107.700.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 623.601.040,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | - | 387.966.680,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 284.946.040,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 161.345.390,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.125.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 1.081.290,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 337.530.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 225.540.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 253.539.880,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | - | 477.539.880,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 1.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 225.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 45.137.120,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 45.137.120,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 207.402.760,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 207.402.760,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 57.870.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | - | 37.970.000,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 57.870.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Dinas Perkebunan | | 37.970.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| 157 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Luas lahan perkebunan yang menerima bantuan sarana produksi<br>Persentase petani perkebunan yang mengakses bantuan sarana pertanian | - | | | 3.264 ton/Ha<br>80 Persen | 358.608.000,00 | | | | | | - | 752.201.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | | | 1 Laporan | 358.608.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh<br>Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 752.201.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 1 Laporan | 214.608.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 577.121.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 144.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 175.080.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| 158 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produksi sektor perkebunan (Pinang)<br>Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)<br>Produksi sektor perkebunan (Sawit) | - | | | 219,62 Ton<br>276,43 Ton<br>560.559 Ton | 4.251.839.912,00 | | | | | | - | 1.914.838.000,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian | - | | | 30 Unit | 4.251.839.912,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.914.838.000,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 1 Unit | 1.636.839.912,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 914.838.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 1 Unit | 2.615.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| 159 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Keberhasilan Panen | - | | | 80 Persen | 88.680.000,00 | | | | | | - | 88.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota | - | | | 100 Ha | 88.680.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 88.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 100 Ha | 88.680.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 88.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| 160 | 3 | 27 | 06 | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Pertanian terhadap Izin Usaha | - | | | 99 Persen | 298.505.000,00 | | | | | | - | 295.171.000,00 | |
| | 3 | 27 | 06 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 1 Dokumen | 298.505.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 295.171.000,00 | |
| | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | 1 Dokumen | 214.745.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 213.171.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | | | | 1 Laporan | 83.760.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 82.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| 161 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Kelompok Tani Perkebunan yang Aktif Dibina<br>Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang mendapatkan kompetensi | - | | | 3 Persen<br>99 Persen | 318.882.000,00 | | | | | | - | 755.154.835,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | - | | | - | 318.882.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | - | 755.154.835,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 1 Unit | 166.682.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 116.000.000,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 1 Unit | 152.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penurunan Kemiskinan Masyarat Aceh Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi | Masyarakat Nagan Raya | | 639.154.835,00 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 33.678.841.060,00 | | | | | | | 29.701.397.984,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 33.678.841.060,00 | | | | | | | 29.701.397.984,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 33.678.841.060,00 | | | | | | | 29.701.397.984,00 | |
| 162 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 68,25 68,25<br>85,00 Indeks | 29.366.437.388,00 | | | | | | - | 26.554.755.902,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, DPA dan Perubahan DPA serta Laporan Kinerja SKPD | - | | | 100 % | 65.178.915,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 38.800.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 21.239.406,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 12.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 4 Dokumen | 26.713.482,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 17.226.027,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | penyediaan Gaji ASN dan Laporan Administrasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran SKPD | - | | | 100 % | 10.861.122.672,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 10.838.917.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/bulan | 10.195.929.762,20 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 10.200.717.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 547.530.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 560.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 43.892.952,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 48.597.798,60 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 21.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 25.172.159,20 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 22.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 52.107.618,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 52.665.048,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 54 Orang | 52.107.618,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 52.665.048,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Pelayanan penyediaan dan pemeliharaan | - | | | 100 % | 6.797.169.698,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 4.250.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 205.500.960,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 2.108.997.338,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 49.718.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 4.432.953.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | undefined | - | | | undefined undefined | 373.983.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 500.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Unit | 230.460.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 143.523.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.902.817.480,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 5.230.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 28.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 1.116.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 1.700.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 355.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 3.403.817.480,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 3.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 2.390.874.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 2.120.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 629.830.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 1.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 0 Unit | 233.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 237.980.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 1.289.564.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | | | - | 351.862.119,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 440.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 0 Paket | 206.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 0 Orang | 145.862.119,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 240.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | | | - | 1.731.944.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 1.270.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 0 Paket | 942.923.468,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 0 Paket | 739.521.508,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 0 Paket | 49.499.524,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | - | - | | | - | 900.184.190,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 1.192.234.119,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 53 Dokumen | 354.055.019,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 410.221.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 1 Laporan | 142.085.603,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 276.409.781,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 88 Dokumen | 268.605.844,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 371.488.525,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Dokumen | 135.437.723,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 134.114.813,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | - | | | - | 939.193.195,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 622.139.735,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 1 Laporan Laporan | 308.853.560,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 201.032.840,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 1 Laporan Laporan | 289.754.175,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 130.080.435,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 1 Laporan Laporan | 340.585.460,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 291.026.460,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 163 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kasus Hukum yang didampingi (litigasi)<br>Kategori hasil Evaluasi LPPD | - | | | 100 Persen<br>2,71 Kategori | 2.849.850.087,50 | | | | | | - | 2.498.896.913,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | - | | | 100 100 | 1.183.046.506,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 1.130.679.857,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 6 Dokumen | 328.929.039,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 470.405.251,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 30 Dokumen | 235.652.428,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 280.424.786,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 8 Dokumen | 618.465.038,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 379.849.820,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin | - | | | 100 % | 562.690.822,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 1.368.217.056,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 3 Dokumen | 200.119.186,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 456.072.352,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | 3 Dokumen | 258.092.319,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 456.072.352,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | 3 Dokumen | 104.479.316,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 456.072.352,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | | | 100 % | 1.104.112.759,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 500 Dokumen | 483.469.525,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 3 Kasus | 425.208.079,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 500 Dokumen | 195.435.155,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 164 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | - | | | 100 Persen | 1.462.553.584,50 | | | | | | - | 647.745.169,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Inflasi Daerah | - | | | 100 % | 411.023.886,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 22.745.169,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 1 Dokumen | 23.856.675,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 22.745.169,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 3 Laporan | 148.344.565,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 1 Dokumen | 27.198.375,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | 1 Dokumen | 27.324.293,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | 1 Dokumen | 184.299.978,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Terlaksananya Administrasi Pembangunan | - | | | 100 % | 451.689.305,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 300.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 145.654.740,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 1 Laporan | 132.503.970,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 4 Laporan | 173.530.595,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Penurunan angka inflasi | - | | | 100 % | 540.953.555,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 325.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 0 Dokumen | 231.435.555,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 0 Dokumen | 91.020.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 0 Orang | 218.498.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 125.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | - | | | 100 % | 58.886.838,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | | 1 Dokumen | 15.315.071,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | | 1 Dokumen | 16.093.923,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | | | 1 Dokumen | 27.477.843,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DAERAH | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH | | | | | | 987.022.301,00 | | | | | | | 1.400.000.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 987.022.301,00 | | | | | | | 1.400.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 987.022.301,00 | | | | | | | 1.400.000.000,00 | |
| 165 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 68,25 Nilai<br>85,00 Indeks | 987.022.301,00 | | | | | | - | 1.400.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | | | - | 987.022.301,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | - | 1.400.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bulan | 587.022.301,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | | 990.000.000,00 | KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | | 410.000.000,00 | KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH |
| | | | | | | SEKRETARIAT DPRK | | | | | | 20.641.104.351,70 | | | | | | | 19.198.605.129,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 20.641.104.351,70 | | | | | | | 19.198.605.129,00 | |
| | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 20.641.104.351,70 | | | | | | | 19.198.605.129,00 | |
| 166 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 0 Nilai<br>65 Indeks | 8.728.014.176,70 | | | | | | - | 9.243.865.594,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.783.168.168,20 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | - | 2.805.817.540,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 32 Orang/bulan | 2.592.183.353,20 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 2.592.183.353,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 179.160.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 201.220.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 11.824.815,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 12.414.187,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.682.363.230,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | - | 3.010.968.563,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 65.264.742,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 88.403.982,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 70.304.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 352.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 2.049.788.488,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 2.072.789.581,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 86.136.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 87.468.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 Laporan | 410.870.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | SEKRETARIAT DPRK | | 409.907.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.922.061.040,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | - | 2.022.227.916,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 20.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | | 20.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 305.950.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | | 306.116.876,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.595.611.040,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | | 1.695.611.040,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 476.315.688,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | - | 561.620.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 190.370.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | | 255.370.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 85.850.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | | 106.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 200.095.688,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Sekretariat DPRK | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | - | | | - | 629.000.420,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | - | 624.511.710,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 25 Orang/Bulan | 179.250.420,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 184.511.710,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 150 Paket | 249.750.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 25 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 240.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | - | - | | | - | 235.105.630,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | - | 218.719.865,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | 4 Dokumen | 86.389.630,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 69.993.185,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 12 Paket | 148.716.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 148.726.680,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| 167 | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Qanun APBK Tahun N | - | | | 100 Persen<br>9,00 Jumlah | 11.913.090.175,00 | | | | | | - | 9.954.739.535,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | - | | | - | 1.046.355.260,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 781.785.450,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 6 Dokumen | 993.953.150,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 700.153.150,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 6 Dokumen | 23.521.860,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 18.935.650,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 1 Dokumen | 28.880.250,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah | Kabupaten Nagan Raya | | 62.696.650,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | - | | | - | 331.090.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | - | 261.122.750,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 1 Dokumen | 50.273.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 49.673.800,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 1 Dokumen | 51.673.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 51.673.800,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen | 78.584.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 1 Dokumen | 66.023.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 63.246.900,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | | | | 1 Dokumen | 33.573.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 32.523.800,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 50.960.900,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 64.004.450,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | - | | | - | 49.173.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 47.980.000,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen | 49.173.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 47.980.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | - | - | | | - | 2.412.612.135,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | - | 1.930.191.700,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 80 Dokumen | 1.277.316.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 891.405.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 4 Orang | 300.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 240.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 5 Orang | 300.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 476.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 413.900.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 1 Dokumen | 3.896.135,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 4.886.700,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 25 Dokumen | 55.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | - | | | - | 875.293.650,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 757.958.100,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 25 Dokumen | 39.335.100,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 32.135.100,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 75 Dokumen | 835.958.550,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 725.823.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | - | - | | | - | 196.087.030,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 113.836.535,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 4 Dokumen | 196.087.030,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 113.836.535,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | - | - | | | - | 7.002.478.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | - | 6.061.865.000,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 450 Dokumen | 7.002.478.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Anggota DPRK | | 6.061.865.000,00 | SEKRETARIAT DPRK |
| | | | | | | DPRK | | | | | | 12.249.776.719,00 | | | | | | | 12.249.776.719,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 12.249.776.719,00 | | | | | | | 12.249.776.719,00 | |
| | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 12.249.776.719,00 | | | | | | | 12.249.776.719,00 | |
| 168 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Nilai LAKIP | - | | | 58 Nilai<br>65 Indeks<br>C Nilai | 12.249.776.719,00 | | | | | | - | 12.249.776.719,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.249.776.719,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPRK | - | 12.249.776.719,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 12.249.776.719,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | DPRK | | 12.249.776.719,00 | DPRK |
| | | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | | 9.023.311.824,97 | | | | | | | 3.329.403.664,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 9.023.311.824,97 | | | | | | | 3.329.403.664,00 | |
| | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | | | | | | 8.793.343.464,00 | | | | | | | 3.329.403.664,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 169 | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | - Indeks<br>- Nilai | 6.472.557.691,50 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Renggar dan Evaluasi Kinerja OPD | - | | | 4 Dokumen | 111.606.793,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 21.745.566,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 9.240.118,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 6.608.553,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.132.530,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 6.291.480,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 56.593.104,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 6.995.442,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Bappeda Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD | - | | | 12 Bulan | 4.395.409.783,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Orang/bulan | 4.280.229.783,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 115.180.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian OPD | - | | | 100 Persen | 69.398.636,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 69.398.636,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum OPD | - | | | 100 Persen | 778.385.829,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 11.224.764,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 247.412.098,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 45.626.967,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 474.122.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang OPD | - | | | 100 Persen | 788.603.650,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | - | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 18.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 203.224.510,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 566.979.140,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksanya Pemeliharaan Aset OPD | - | | | 100 Persen | 329.153.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 70.750.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 58.403.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BAPPEDA Kab. Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 170 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD | - | | | - Persen | 1.018.453.795,00 | | | | | | - | 1.916.176.074,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Tersedianya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | | | 100 Persen | 610.468.870,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.237.248.453,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 44 Berita Acara | 183.323.714,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 131.281.340,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 44 Berita Acara | 112.537.682,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 150.133.863,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 30 Usulan | 28.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | 286.607.474,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 940.833.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | 100 Persen | 267.301.862,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 295.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | | 1 Dokumen | 100.981.105,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 50 Orang | 166.320.757,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Transformasi Digital yang Terintegrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksanya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | 100 Persen | 140.683.062,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 383.927.621,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 2 Laporan | 98.449.139,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 355.717.092,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 3 Laporan | 42.233.922,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 28.210.529,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 171 | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Konsistensi strategi pembangunan RPD dengan RKPD | - | | | - Persen | 1.302.331.977,50 | | | | | | - | 1.413.227.590,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | | | 100 Persen | 474.551.046,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 570.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 25.245.350,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 27.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 3 Laporan | 36.211.559,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 53.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 24.604.925,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 7 Dokumen | 134.041.753,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 280.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Laporan | 15.991.910,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 16.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 2 Laporan | 238.455.549,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 169.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | | | 100 Persen | 342.927.437,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | - | 345.227.590,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 274.469.753,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 274.443.419,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 24.804.630,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 26.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 23.798.834,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 25.059.166,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 19.854.219,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Kabupaten Nagan Raya | | 19.725.005,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | | | 100 Persen | 484.853.494,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 498.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 165.178.294,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 170.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 12.913.650,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 14.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 7 Dokumen | 293.847.900,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 12.913.650,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 14.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 229.968.360,97 | | | | | | | 0,00 | |
| 172 | 5 | 05 | 03 | | | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | - | - | | | - | 229.968.360,97 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 5 | 05 | 03 | 2.01 | | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | - | - | | | - | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 5 | 05 | 03 | 2.01 | 0006 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | | | | 2 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 05 | 03 | 2.02 | | Invensi dan Inovasi | - | - | | | - | 229.968.360,97 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 5 | 05 | 03 | 2.02 | 0011 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | | | | 1 Laporan | 22.331.923,97 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 05 | 03 | 2.02 | 0014 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan | | | | 4 Laporan | 207.636.437,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | | | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | | | 327.281.126.380,55 | | | | | | | 298.408.079.979,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 327.281.126.380,55 | | | | | | | 298.408.079.979,00 | |
| | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | 327.281.126.380,55 | | | | | | | 298.408.079.979,00 | |
| 173 | 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | A Nilai Indeks undefined | 50.120.289.541,55 | | | | | | - | 58.777.538.411,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 211.435.795,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 212.493.000,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 99.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 99.840.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 Laporan | 111.595.795,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 112.653.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Adm Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan Dokumen | 32.388.566.524,55 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 45.026.147.436,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 30.966.124.968,05 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 43.603.478.987,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 1.144.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 1.144.840.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 0 Laporan | 47.273.720,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 47.500.613,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 0 Laporan | 230.327.836,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 230.327.836,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan ADM Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan Paket | 1.167.315.826,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 1.240.240.403,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 51.388.671,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 51.389.670,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 383.988.817,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 456.602.306,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 39.178.338,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 39.178.427,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 692.760.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 693.070.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 6 Unit | 3.989.002.996,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 2.289.020.000,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 3.500.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Alue Kambuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 400.567.187,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 200.574.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 88.435.809,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 88.446.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 4 Laporan | 11.614.898.653,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 9.211.329.572,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 7.457.581.757,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 7.457.503.572,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 1.810.655.028,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 1.743.826.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | - | | | 28 unit | 749.069.745,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 798.308.000,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 60.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 0 Unit | 313.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Transformasi Digital yang Terintegrasi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 313.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 32.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 32.600.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 214.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 228.900.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 128.969.745,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 163.308.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| 174 | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penyampaian laporan keuangan tepat waktu<br>Persentase Penurunan SILPA | - | | | Sesuai Sesuai/Tidak Sesuai undefined Persen | 274.139.022.910,50 | | | | | | - | 236.593.966.783,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | | | - | 2.681.673.283,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 2.284.406.732,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 0 Dokumen | 249.606.057,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 240.002.114,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 0 Dokumen | 296.794.218,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 0 Dokumen | 25.605.318,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 29.835.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 0 Dokumen | 44.269.739,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 43.160.174,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | | 0 Dokumen | 45.080.745,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 0 Dokumen | 33.173.502,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 33.056.851,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 0 Dokumen | 440.040.433,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 338.855.814,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 0 Dokumen | 584.838.333,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 499.858.129,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 0 Dokumen | 567.675.489,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 542.763.279,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 394.589.449,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 556.875.371,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | | | - | 1.224.164.528 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.229.852.640,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 0 Dokumen | 341.807.945,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 347.182.560,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | 0 Dokumen | 13.726.079,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 13.723.753,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 0 Dokumen | 295.384.599,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 295.532.598,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 0 Laporan | 269.656.092,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 269.758.538,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | 0 Dokumen | 28.876.177,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 28.876.230,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 0 Dokumen | 130.679.313,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 130.679.314,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 0 Dokumen | 144.034.323,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 144.099.647,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | | | - | 899.178.833,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.035.542.867,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | 0 Laporan | 94.267.006,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 108.471.864,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 0 Dokumen | 149.931.305,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 149.931.308,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 0 Laporan | 214.267.313,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 255.146.599,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 0 Laporan | 216.941.117,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 298.227.386,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 0 Dokumen | 86.033.991,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 86.027.609,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 0 Dokumen | 96.464.118,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 96.464.118,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Penyusunan Analisis Laporan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 Dokumen | 41.273.982,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 41.273.983,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | | | - | 259.019.855.082,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 232.000.000.000,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 0 Laporan | 266.853.648.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 230.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 0 Laporan | 2.436.193.366,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | - | - | | | - | 44.164.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 44.164.544,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | 0 Dokumen | 44.164.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 44.164.544,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| 175 | 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | - | | | 6,56 Persen | 1.351.570.026,50 | | | | | | - | 1.351.511.785,00 | |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | | | - | 1.351.570.026,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.351.511.785,00 | |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | | 0 Dokumen | 21.036.235,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 21.036.623,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 0 Dokumen | 20.236.662,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 20.250.615,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 0 Dokumen | 19.246.762,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Alue Kambuk | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 19.253.578,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 104.359.722,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 104.220.125,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 683.083.050,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 683.105.311,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 113.842.714,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 113.787.333,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 35.380.332,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 35.381.200,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 30.870.013,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 30.886.300,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 0 Dokumen | 20.526.862,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 20.543.500,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 96.681.358,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 96.723.200,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 0 Laporan | 110.644.632,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 110.658.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 95.661.682,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 95.666.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| 176 | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | - | | | 11,71 Persen | 1.670.243.902,00 | | | | | | - | 1.685.063.000,00 | |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | | | - | 1.670.243.902,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.685.063.000,00 | |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 139.431.288,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 156.216.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 137.084.700,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 137.084.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 0 Laporan | 268.292.166,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 268.321.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 0 Laporan | 342.747.750,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 342.192.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 0 Layanan | 209.157.592,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 209.100.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 0 Dokumen | 573.530.406,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 572.150.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | 5.082.406.692,00 | | | | | | | 6.549.500.000,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 5.082.406.692,00 | | | | | | | 6.549.500.000,00 | |
| | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | | | 4.951.018.752,00 | | | | | | | 5.279.500.000,00 | |
| 177 | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 76,51 Indeks<br>79,95 Nilai | 3.972.560.632,00 | | | | | | - | 4.173.500.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah buku perencanaan | - | | | 1 buku | 24.084.666,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | BKPSDM | - | 28.500.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 12.901.666,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | BKPSDM | | 14.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 11.183.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | BKPSDM | | 14.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan tunjangan | - | | | 12 bulan | 2.782.028.641,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 2.901.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 32 Orang/bulan | 2.670.312.328,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 2.800.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 100.720.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 90.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 10.996.313,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 11.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 100 % | 677.059.570,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 689.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 6.352.641,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 14.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 220.887.329,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 220.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 40.026.600,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 42.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 24 Dokumen | 9.880.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 3.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150 Laporan | 399.913.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 410.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Lakip | - | | | 100 % | 95.737.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 200.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit | 95.737.500,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Lakip | - | | | 100 % | 270.050.255,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 261.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5 Laporan | 10.000.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 11.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 110.000.255,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 80.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 150.050.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 170.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Lakip | - | | | 100 % | 123.600.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 94.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 36.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 27.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 22.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 66.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 36.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 178 | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada OPD<br>Persentase ASN yang ditingkatan kompetensinya<br>Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya<br>Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik<br>Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi | - | | | 84,09 Persen<br>85 Persen<br>90 Persen<br>95 Persen<br>- Persen | 978.458.120,00 | | | | | | - | 1.106.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah SK | - | | | 12 bulan | 192.038.610,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 217.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 2 Dokumen | 181.546.290,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 185.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 2 Dokumen | 5.144.610,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 7.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 2 Dokumen | 5.347.710,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | - | | | 4.67 Persen | 321.467.965,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 320.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | | 4 Dokumen | 20.159.315,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 4 Dokumen | 168.872.650,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 170.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 2 Dokumen | 132.436.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 125.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi pemerintah | - | | | 12 bulan | 154.767.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 118.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 6 Orang | 126.663.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 90.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | | 2 Orang | 23.004.400,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | 4 Dokumen | 5.100.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 8.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah | - | | | 12 bln | 310.184.145,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 451.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 6.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 4 Dokumen | 226.674.145,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 352.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | | 150 Orang | 19.810.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 22.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | | | | 10 Dokumen | 6.100.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 6.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | | | | 2 Laporan | 51.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 65.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | 131.387.940,00 | | | | | | | 1.270.000.000,00 | |
| 179 | 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar<br>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial | - | | | 3,5 Persen<br>3,80 Persen | 131.387.940,00 | | | | | | - | 1.270.000.000,00 | |
| | 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | - | | | 431 orang | 131.387.940,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.270.000.000,00 | |
| | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 121.387.940,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 170.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 5 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 1.100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | | | INSPEKTORAT | | | | | | 11.441.146.871,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 11.441.146.871,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 11.441.146.871,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 180 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | - Indeks<br>- Nilai | 7.429.516.469,46 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan,Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 2 Dokumen | 134.956.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 123.712.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Laporan | 11.244.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | OPD | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | - | | | 12 Bulan | 4.278.025.373,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Orang/bulan | 4.177.375.373,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 100.650.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | " Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah " | - | | | 38 orang | 1.204.098.719,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 32 Orang | 62.878.719,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 15 Orang | 1.141.220.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rentang waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 12 Bulan | 489.339.728,46 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.914.600,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 219.824.634,46 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5.944.494,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 258.656.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 2 paket | 528.545.370,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 123.343.200,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 405.202.170,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 409.513.161,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.030.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 164.503.179,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 40.000.970,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 199.979.012,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik | - | | | 97 persen | 385.038.118,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 90.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 8.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 54.600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 231.638.118,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | INSPEKTORAT DAERAH | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| 181 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Tindak Lanjut Temuan | - | | | 96 Persen | 3.320.853.703,69 | | | | | | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase penyelenggaraan pengawasan internal | - | | | 92 persen | 2.506.477.984,69 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 2 Laporan | 234.432.384,69 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 2 Laporan | 666.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 7 Laporan | 204.375.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 40 Laporan | 379.676.707,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 3 Kesepakatan | 204.013.744,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 20 Dokumen | 817.580.149,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | - | | | 90 persen | 814.375.719,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 1 Laporan | 154.425.812,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 2 Laporan | 659.949.907,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| 182 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kapabilitas APIP | - | | | 3 Level | 690.776.697,85 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | - | - | | | - | 690.776.697,85 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 20 perangkat daerah | 415.462.902,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 3 Kegiatan | 33.095.237,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 35 perangkat daerah | 242.218.558,85 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | KECAMATAN BEUTONG | | | | | | 3.274.964.040,80 | | | | | | | 3.317.229.615,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3.274.964.040,80 | | | | | | | 3.317.229.615,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 3.274.964.040,80 | | | | | | | 3.317.229.615,00 | |
| 183 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 63,66 Indeks<br>63,66 Nilai | 3.208.111.365,80 | | | | | | - | 3.254.739.940,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 9.448.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 10.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 9.448.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 2.818.109.968,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 2.818.109.968,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 33 Orang/bulan | 2.762.219.968,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 2.762.219.968,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 33 Dokumen | 55.890.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 55.890.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 4.604.280,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 4.604.280,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 138.268.225,80 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 155.027.920,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 20 0 | 7.006.764,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 10.069.920,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 35.336.666,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.999.295,80 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 4.521.500,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 76.404.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 77.958.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 20.712.600,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 20.712.600,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 212.885.172,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 213.885.172,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 4.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 18.529.620,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 18.529.620,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 190.355.552,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 191.355.552,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 29.400.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | - | 32.400.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 17.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 12.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Keude Seumot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Beutong | | 12.400.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| 184 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100,00 Persen | 3.430.500,00 | | | | | | - | 3.430.500,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Mesjid yang Melaksanakan Shalat 5 waktu Secara Rutin | - | | | 81 Persen | 3.430.500,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | - | 3.430.500,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 3.430.500,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 3.430.500,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| 185 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase status desa yang IDM meningkat | - | | | 27,00 Persen | 21.644.000,00 | | | | | | - | 17.252.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 11.893.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | - | 7.501.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 24 Lembaga Kemasyarakatan | 11.893.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 7.501.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 9.751.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | - | 9.751.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 24 Lembaga Kemasyarakatan | 9.751.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 9.751.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| 186 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi yang dilaksanakan | - | | | 50,00 Persen | 12.508.000,00 | | | | | | - | 12.508.000,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 12.508.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | - | 12.508.000,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 12.508.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 12.508.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| 187 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase gampong yang melaksanakan musrenbang tepat waktu<br>Persentase kegiatan desa yang selesai tepat waktu | - | | | 52,94 Persen<br>78,00 Persen | 29.270.175,00 | | | | | | - | 29.299.175,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 29.270.175,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | - | 29.299.175,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 4.500.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1 Laporan | 22.281.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 22.310.000,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 2.489.175,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Beutong | | 2.489.175,00 | KECAMATAN BEUTONG |
| | | | | | | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR | | | | | | 2.305.921.626,00 | | | | | | | 2.273.827.545,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2.305.921.626,00 | | | | | | | 2.273.827.545,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 2.305.921.626,00 | | | | | | | 2.273.827.545,00 | |
| 188 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 70.00 Indeks<br>70.00 Nilai | 2.288.606.885,00 | | | | | | - | 2.261.067.884,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 80 A Nilai | 1.872.173.827,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Kecamatan Seunagan Timur | - | 1.872.173.827,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 1.829.333.827,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Kecamatan Seunagan Timur | | 1.829.333.827,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 42.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | ASN Kecamatan Seunagan Timur | | 42.840.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Lancarnya Administrasi Kantor | - | | | 80 A | 136.946.031,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | - | 127.628.045,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 10.391.265,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 31.752.045,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | | 31.752.045,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 13.879.721,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | | 13.644.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 0 Laporan | 26.998.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 53.925.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | | 52.232.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Lancarnya Administrasi Perkantoran | - | | | Sangat Baik Scor | 261.987.027,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | kecamatan Seunagan Timur | - | 241.266.012,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | kecamatan Seunagan Timur | | 7.500.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 45.121.291,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | kecamatan Seunagan Timur | | 29.585.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 209.365.736,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | kecamatan Seunagan Timur | | 204.181.012,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara<br>Jumlah Gedung Bangunan | - | | | 80 A Nilai Sangat Baik Scor | 17.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | - | 20.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 17.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan Timur | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| 189 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 70.00 Persen | 9.863.663,00 | | | | | | - | 7.759.661,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | HUT RI dann HUT Nagan Raya Lancarnya Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA) | - | | | 222 Mesjid Sangat Baik Scor | 9.863.663,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 7.759.661,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | 0 Dokumen | 9.863.663,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 7.759.661,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| 190 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Status desa yang IDM meningkat | - | | | 60.00 Persen | 7.451.078,00 | | | | | | - | 5.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlasananya Monitoring Gampong Dalam Kecamatan | - | | | 222 Kelompok | 7.451.078,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 5.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 7.451.078,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan Timur, Keude Linteung | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 5.000.000,00 | KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR |
| | | | | | | KECAMATAN SEUNAGAN | | | | | | 2.272.455.528,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2.272.455.528,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 2.272.455.528,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 191 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 63.18 Indeks<br>66.25 Nilai | 2.237.636.057,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Adm. Keuangan OPD | - | | | 12 Bulan | 1.866.946.347,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecmatan Seunagan | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 1.847.101.347,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecmatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 19.845.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecmatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Adm. Umum OPD | - | | | 12 Bulan | 77.199.782,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 10.778.988,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 54.471.644,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 3.885.000,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 8.064.150,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang OPD | - | | | 12 Bulan | 245.989.928,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 41.318.640,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 204.671.288,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Barang OPD | - | | | 12 Bulan | 47.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 22.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| 192 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase status desa yang IDM meningkat | - | | | 35 Persen | 19.792.069,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | | | - | 19.792.069,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Kecamatan Seunagan | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 19.792.069,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| 193 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi yang dilaksanakan | - | | | 100 Persen | 15.027.402,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terwujudnya Koordinasi antar pimpinan kecamatan | - | | | 10 Koordinasi | 15.027.402,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 0 Dokumen | 15.027.402,00 | Kab. Nagan Raya, Seunagan, Parom | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Seunagan | | 0,00 | KECAMATAN SEUNAGAN |
| | | | | | | KECAMATAN SUKA MAKMUE | | | | | | 1.964.509.326,00 | | | | | | | 2.299.562.315,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.964.509.326,00 | | | | | | | 2.299.562.315,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 1.964.509.326,00 | | | | | | | 2.299.562.315,00 | |
| 194 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 60 Indeks<br>B Nilai | 1.950.396.266,00 | | | | | | - | 2.279.762.315,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 2.482.632,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.100.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 794.832,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1.687.800,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 1.100.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.724.128.559,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.998.112.164,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 1.657.396.609,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 1.923.312.164,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 63.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 69.300.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 19 Laporan | 3.731.950,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan ASN | - | | | 0 Keg | 1.127.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Suka Makmue | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1.127.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Suka Makmue | | 0,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.245.952,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 79.068.342,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.481.542,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 10.379.950,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 11.418.342,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 3.492.460,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 6.992.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 7.150.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20 Laporan | 9.900.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 60.500.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 31.746.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 50.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 31.746.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 50.000.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 46.866.123,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 129.481.809,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 2.200.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 22.554.395,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 11.022.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 22.311.728,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 116.259.809,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 108.800.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 22.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 88.800.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Blang Sapek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Kabupaten Nagan Raya | | 0,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| 195 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100 Persen | 14.113.060,00 | | | | | | - | 19.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 14.113.060,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 19.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1 Laporan | 14.113.060,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 19.800.000,00 | KECAMATAN SUKA MAKMUE |
| | | | | | | KECAMATAN KUALA | | | | | | 2.396.852.324,00 | | | | | | | 188.438.461,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2.396.852.324,00 | | | | | | | 188.438.461,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 2.396.852.324,00 | | | | | | | 188.438.461,00 | |
| 196 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 65.64 Indeks<br>66.25 Nilai | 2.317.491.034,00 | | | | | | - | 181.615.276,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen DPA/RKA dan LAKIP | - | | | 3 Dokumen | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 4 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN/ Jumlah orang yang menerima Tunjangan | - | | | 28 Orang | 2.021.913.590,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 1.976.449.603,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 42.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 2.623.987,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya/Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Kantor | - | | | 4 Paket | 113.486.708,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1.966.932,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 22.169.062,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.744.714,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 78.606.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | | 3 Laporan | 152.790.736,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 152.315.276,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 49.625.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 51.075.000,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 102.165.736,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 101.240.276,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa /Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan dan Mesin lainnya | - | | | 4 Unit | 29.300.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 29.300.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 20.000.000,00 | KECAMATAN KUALA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 9.300.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 9.300.000,00 | KECAMATAN KUALA |
| 197 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100 Persen | 70.201.840,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)<br>Pelaksanaan MTQ dan HBI di Tingkat Kecamatan Kuala<br>Peringatan HUT RI/HUT Nagan Raya | - | | | 5 Usulan<br>2 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 70.201.840,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 4 Laporan | 70.201.840,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Nagan Raya | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| 198 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi yang dilaksanakan | - | | | 50 Persen | 6.420.000,00 | | | | | | - | 6.823.185,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | - | 6.420.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 6.823.185,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 6.420.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 6.823.185,00 | KECAMATAN KUALA |
| 199 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase gampong yang melaksanakan musrenbang tepat waktu<br>Persentase kegiatan desa yang selesai tepat waktu | - | | | 52.94 Persen<br>60 Persen | 2.739.450,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pendampingan Desa di Kecamatan Kuala | - | | | 15 Laporan | 2.739.450,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Laporan | 2.739.450,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala, Ujong Patihah | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Kuala | | 0,00 | KECAMATAN KUALA |
| | | | | | | KECAMATAN KUALA PESISIR | | | | | | 2.689.299.386,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2.689.299.386,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 2.689.299.386,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 200 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 68,00 Nilai B Indeks | 2.615.961.376,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 1 Tahun<br>Dokumen | 2.207.827.681,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 tahun<br>Orang/bulan | 2.153.692.881,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 100 Dokumen | 50.760.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 3.374.800,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Atribut serta Kelengkapan lainnya | - | | | 1 Tahun Paket | 143.338.183,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.799.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 29.946.223,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 14.997.960,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 58 Laporan | 93.595.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Biaya Jasa Urusan kantor | - | | | 1 Tahun<br>Kegiatan | 144.670.212,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | - | 0,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 18.199.384,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 123.470.828,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | | | 1 Tahun Kegiatan | 120.125.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 120.125.300,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| 201 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100,00 Persen | 68.088.010,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya MTQ serta Hari Besar Islam di Kecamatan | - | | | 1 Tahun Kegiatan | 68.088.010,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 3 Laporan | 68.088.010,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| 202 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi yang dilaksanakan | - | | | 100,00 Persen | 5.250.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Tersedianya Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | - | | | 1 Tahun Kegiatan | 5.250.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 10 Dokumen | 5.250.000,00 | Kab. Nagan Raya, Kuala Pesisir, Padang Rubek | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | KECAMATAN KUALA PESISIR | | 0,00 | KECAMATAN KUALA PESISIR |
| | | | | | | KECAMATAN TADU RAYA | | | | | | 1.997.628.585,50 | | | | | | | 722.082.647,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.997.628.585,50 | | | | | | | 722.082.647,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 1.997.628.585,50 | | | | | | | 722.082.647,00 | |
| 203 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 72,00 Nilai<br>73,00 Indeks | 1.844.537.113,50 | | | | | | - | 565.082.647,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KegiatanRutin | - | | | 1 Tahun | 10.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | - | 12.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji ASN | - | | | 1 Tahun | 1.538.944.772,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | - | 207.082.647,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 1.487.584.772,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 155.322.647,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 46.360.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 46.760.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Rutin | - | | | 1 Tahun | 129.955.913,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | - | 139.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3.424.905,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 4.500.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 47.027.022,50 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 13.999.986,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 65.504.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 70.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiaan Rutin | - | | | 1 Tahun | 135.636.428,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | - | 175.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 3.500.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 14.565.600,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 16.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 118.070.828,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 156.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan Rutin | - | | | 1 Tahun | 30.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | - | 31.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tadu Raya | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| 204 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100 Persen | 137.970.532,00 | | | | | | - | 145.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kegiatan MTQ, HBI<br>Laporan Kegiata | - | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 137.970.532,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 145.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 5 Laporan | 137.970.532,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 145.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| 205 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase gampong yang melaksanakan musrenbang tepat waktu | - | | | 100 Persen | 15.120.940,00 | | | | | | - | 12.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Laporan Kegiata | - | | | 1 Tahun | 15.120.940,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 12.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 1 Dokumen | 15.120.940,00 | Kab. Nagan Raya, Tadu Raya, Alue Bata | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 12.000.000,00 | KECAMATAN TADU RAYA |
| | | | | | | KECAMATAN DARUL MAKMUR | | | | | | 3.177.660.463,00 | | | | | | | 3.275.617.604,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3.177.660.463,00 | | | | | | | 3.275.617.604,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 3.177.660.463,00 | | | | | | | 3.275.617.604,00 | |
| 206 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 72.00 Nilai<br>75.00 Indeks | 3.083.442.271,00 | | | | | | - | 3.169.217.604,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | - | | | 6 dokumen | 14.774.020,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 16.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 13.760.382,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 14.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1.013.638,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | - | | | 5 dokumen | 2.529.339.002,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 2.536.639.396,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 2.481.352.098,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 2.481.812.492,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 45.240.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 52.080.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 2.746.904,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 2.746.904,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | - | | | 3 dokumen | 4.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 9.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Orang | 4.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 9.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | - | | | 6 dokumen | 124.657.731,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 130.531.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.812.760,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 3.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 24.699.971,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 12.531.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 12.531.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 350 Laporan | 84.614.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 85.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket | - | | | 3 Paket | 1.170.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 50.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1.170.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 50.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | - | | | 3 dokumen | 383.001.518,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 384.447.208,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 69.554.310,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 70.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 308.447.208,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 308.447.208,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Paket Barang | - | | | 4 Paket | 26.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 42.600.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 35 Unit | 6.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 12.600.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| 207 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100 Persen | 91.018.192,00 | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan | - | | | 5 dokumen | 91.018.192,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 100.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 4 Laporan | 91.018.192,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 100.000.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| 208 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase gampong yang melaksanakan musyawarah tepat waktu<br>Persentase kegiatan desa yang selesai tepat waktu | - | | | 100 Persen<br>75 Persen | 3.200.000,00 | | | | | | - | 6.400.000,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Rekomendasi<br>Nilai Lakip | - | | | 1 Rekomendasi<br>81 A Nilai dokumen | 3.200.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | - | 6.400.000,00 | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 40 Dokumen | 3.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Darul Makmur, Alue Bilie | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Masyarakat Darul Makmur | | 6.400.000,00 | KECAMATAN DARUL MAKMUR |
| | | | | | | KECAMATAN TRIPA MAKMUR | | | | | | 1.352.532.384,00 | | | | | | | 1.909.964.599,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.352.532.384,00 | | | | | | | 1.909.964.599,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 1.352.532.384,00 | | | | | | | 1.909.964.599,00 | |
| 209 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 65 Indeks<br>66 Nilai | 1.286.332.384,00 | | | | | | - | 1.773.964.599,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 8.709.156,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 14.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 2.162.814,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 3.500.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1.388.922,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1.557.420,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 2.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 1.032.200.470,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 1.450.464.599,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 986.360.470,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 1.407.224.599,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 42.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 39.240.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 2.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 600.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 1.500.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai LAKIP | - | | | 81 A Nilai | 75.517.022,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 151.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.328.778,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 6.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 24.985.814,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 40.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 7.562.430,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 38.640.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | NIlai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 45.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 45.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 142.405.736,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 76.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 4.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 18.540.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 12.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 121.865.736,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 60.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 27.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 37.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 7.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 7.500.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| 210 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100 Persen | 56.200.000,00 | | | | | | - | 95.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Mesjid yang melaksanakan Shalat 5 Waktu secara Rutin<br>Nilai Lakip<br>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | - | | | 11 Mesjid<br>81 A Nilai<br>Sangat Baik Scor | 6.850.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 25.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 11 Dokumen | 6.850.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai Lakip | - | | | 81 A Nilai | 49.350.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 70.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 4 Laporan | 49.350.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 70.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| 211 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase status desa yang IDM meningkat | - | | | 35 Persen | 700.000,00 | | | | | | - | 29.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Nilai Lakip | - | | | 11 Desa | 700.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 29.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 17.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 11 Laporan | 700.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 12.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| 212 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi yang dilaksanakan | - | | | 50 Persen | 9.300.000,00 | | | | | | - | 12.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Nilai Lakip<br>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)<br>undefined | - | | | 81 A Nilai<br>Sangat Baik Scor undefined<br>undefined | 9.300.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | - | 12.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 11 Dokumen | 9.300.000,00 | Kab. Nagan Raya, Tripa Makmur, Kabu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kecamatan Tripa Makmur | | 12.000.000,00 | KECAMATAN TRIPA MAKMUR |
| | | | | | | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG | | | | | | 1.352.883.053,00 | | | | | | | 1.552.188.976,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 1.352.883.053,00 | | | | | | | 1.552.188.976,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 1.352.883.053,00 | | | | | | | 1.552.188.976,00 | |
| 213 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 72 Nilai<br>75 Indeks | 1.219.916.277,00 | | | | | | - | 1.398.188.976,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kesejahteraan ASN | - | | | 1 Tahun | 1.043.357.289,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | - | 1.138.188.976,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 13 Orang/bulan | 1.007.719.386,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 1.108.455.976,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 32.900.400,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 27.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 2.737.503,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 2.733.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan ASN | - | | | 1 Kegitan | 10.200.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | - | 15.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 10.200.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan Perkantoran | - | | | 1 Tahun | 120.017.544,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | - | 183.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.101.004,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 120.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 18.996.540,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 94.920.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 25.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum | - | | | 1 Tahun | 18.841.444,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | - | 22.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 18.841.444,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 22.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpiliharanya Barang Milik Daerah | - | | | 1 Tahun | 27.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | - | 40.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 17.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 25.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| 214 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase kegiatan daerah/instansi vertikal yang difasilitasi | - | | | 100 Persen | 132.966.776,00 | | | | | | - | 154.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 52.969.566,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 54.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1 Laporan | 52.969.566,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 54.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | - | | | - | 79.997.210,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 100.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 79.997.210,00 | Kab. Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang, Kuta Teungoh | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
| | | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 6.213.760.018,00 | | | | | | | 6.170.256.749,00 | |
| | 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | 6.213.760.018,00 | | | | | | | 6.170.256.749,00 | |
| | 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 6.213.760.018,00 | | | | | | | 6.170.256.749,00 | |
| 215 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 60,00 Indeks<br>65,00 Persen | 2.342.683.706,50 | | | | | | - | 2.320.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | - | | | 100 Persen | 7.771.249,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 23.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 3.522.634,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 4.248.615,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 7.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | | 10 Data | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 97 Tahun | 1.766.406.209,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 1.893.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 1.685.609.618,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 1.800.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 67.980.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 68.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 5.581.860,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 7.234.731,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor | - | | | 100 Persen | 205.530.898,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 179.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.327.668,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 5.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4.769.448,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 51.239.992,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 52.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9.866.790,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 2 Laporan | 36.970.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 12.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 98.357.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedian Sarana dan Prasarana Kantor | - | | | 100 Persen | 35.520.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 0,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 35.520.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan kantor | - | | | 100 Persen | 181.480.450,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 190.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 29.229.530,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 152.250.920,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 90.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | - | | | 100 Persen | 145.974.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 35.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 134.874.900,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 11.100.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 13.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 216 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pemahaman Wawasan Kebangsaan<br>Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan<br>Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | - | | | 120 Orang<br>80,00 Persen<br>85,00 Persen | 1.859.168.576,50 | | | | | | - | 1.816.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Terlaksananya Rapat Rutin Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan | - | | | 2 Kegiatan | 1.859.168.576,50 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 1.816.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 42.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 42.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 40 Orang | 345.873.358,50 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 32.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | | | | 2 Dokumen | 1.513.295.218,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 1.700.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 217 | 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Partai Politik yang dibina | - | | | 85,00 Persen | 999.376.017,00 | | | | | | - | 1.041.627.685,00 | |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | - | | | - | 999.376.017,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Partai Politik | - | 1.041.627.685,00 | |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | 12 Dokumen | 50.641.511,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Partai Politik | | 75.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | 12 Dokumen | 902.627.685,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Partai Politik | | 902.627.685,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 80 Orang | 30.827.134,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Partai Politik | | 46.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 1 Laporan | 15.279.687,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Partai Politik | | 18.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 218 | 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Pembinaan LSM/ORMAS | - | | | 65,00 Persen | 89.369.391,00 | | | | | | - | 22.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas dan LSM Serta Pembinaan Ormas | - | | | 2 Kegiatan | 89.369.391,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | LSM / Ormas | - | 22.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | 5 Dokumen | 89.369.391,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | LSM / Ormas | | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 219 | 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | "Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan" | - | | | 62 Persen | 75.011.482,00 | | | | | | - | 120.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Forum Kerukunan Umat beragama | - | | | 2 Kegiatan | 75.011.482,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | - | 120.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 32.532.741,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Masyarakat Nagan Raya | | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 80 Orang | 42.478.741,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Nagan Raya | | 65.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 220 | 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase penanganan potensi konflik sosial | - | | | 50 Persen | 848.150.845,00 | | | | | | - | 850.629.064,00 | |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terciptanya masyarakat kabupaten Nagan Raya yang Aman, tentram dan kondusif | - | | | 5 Kegiatan | 848.150.845,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | 850.629.064,00 | |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 60 Orang | 65.295.069,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 95.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 50 Orang | 366.076.303,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 345.629.064,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 4 Laporan | 49.984.950,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 60.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 366.794.523,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 350.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | | 12.024.004.308,00 | | | | | | | 13.330.500.000,00 | |
| | 9 | | | | | UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN | | | | | | 12.024.004.308,00 | | | | | | | 13.330.500.000,00 | |
| | 9 | 01 | | | | KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | 12.024.004.308,00 | | | | | | | 13.330.500.000,00 | |
| 221 | 9 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil Evaluasi SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | | | 58,00 Nilai<br>80,00 Indeks | 2.133.438.808,00 | | | | | | - | 3.485.500.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD | - | | | 3 Dokumen | 17.861.040,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 16.500.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 bulan Dokumen | 17.861.040,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 4.500.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 3 bulan Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 3 bulan Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan OPD | - | | | 12 Bulan | 784.279.680,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 849.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/bulan | 730.279.680,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 780.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 54.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan | Kabupaten Nagan Raya | | 54.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Kedisplinan Pegawai Baitul Mal | - | | | 100 % | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Baitul Mal | - | 55.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 30 Paket | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Baitul Mal | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 471.540.092,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | - | 935.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25.460.958,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 48.840.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 20 Paket | 196.174.134,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 20 Paket | 23.565.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 160.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 177.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 320.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 49.816.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | - | 270.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 33.166.800,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit | 16.650.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 12 Bulan | 676.691.196,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | - | 940.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 17.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 46.700.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 53.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 621.991.196,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 870.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | - | | | 100 % | 133.250.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | - | 420.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 55.750.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 27.500.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan<br>Mengembangkan Ekonomi Unggulan Masyarakat | Baitul Mal | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| 222 | 9 | 01 | 04 | | | PROGRAM BAITUL MAL | Jumlah Infak Yang disalurkan<br>Jumlah Infak Yang Terkumpul<br>Jumlah Zakat Yang disalurkan<br>Jumlah Zakat Yang Terkumpul | - | | | 1,33 Rupiah<br>2,66 Rupiah<br>4,74 Rupiah<br>7,90 Rupiah | 9.890.565.500,00 | | | | | | - | 9.845.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | - | | | 100 % | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | - | 1.150.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | 0001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf | | | | 300 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | 0002 | Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | 0004 | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | | | | 12 Dokumen | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Tersalurnya ZISWAF | - | | | 100 % | 9.890.565.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | - | 8.695.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0001 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir | | | | 1800 Orang | 2.400.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 1.850.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0002 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin | | | | 3590 Orang | 3.030.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 3.000.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0003 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil | | | | 40 Orang | 480.565.500,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0004 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf | | | | 50 Orang | 80.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0005 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin | | | | 30 Orang | 120.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0006 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah | | | | 100 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0007 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir | | | | 150 Orang | 1.480.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0008 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq | | | | 500 Orang | 2.100.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Kabupaten Nagan Raya | | 1.700.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0009 | Pengelolaan Wakaf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 210.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0010 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Guru SMA dan Sederajat yang Mendapatkan ZIS | | | | 20 Orang | 0,00 | Kab. Nagan Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Kabupaten Nagan Raya | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | | | | | | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | | 1.437.985.469,00 | | | | | | | 1.558.640.000,00 | |
| | 9 | | | | | UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN | | | | | | 1.437.985.469,00 | | | | | | | 1.558.640.000,00 | |
| | 9 | 01 | | | | KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | 1.437.985.469,00 | | | | | | | 1.558.640.000,00 | |
| 223 | 9 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Hasil Evaluasi SAKIP | - | | | 70 B Nilai<br>70 Indeks<br>70 Nilai | 1.372.527.082,00 | | | | | | - | 1.392.640.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik | - | | | 1 Tahun | 757.517.501,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 761.640.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 7 0 | 731.117.501,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 732.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 26.400.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 29.640.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 127.322.491,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 140.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 46.521.504,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 52.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10.002.987,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 11.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 70.798.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 77.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 464.239.090,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 465.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 19.114.090,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 19.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 445.125.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 446.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 23.448.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | - | 26.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 17.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 8.448.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Kabupaten Nagan Raya | | 9.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| 224 | 9 | 01 | 02 | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat<br>Persentase Jumlah Jamaah Haji yang di fasilitasi | - | | | undefined Orang<br>undefined Persen | 5.000.000,00 | | | | | | - | 6.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Kabupaten Nagan Raya | - | 6.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0007 | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Kabupaten Nagan Raya | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| 225 | 9 | 01 | 03 | | | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas ulama | - | | | 5 Jumlah | 60.458.387,00 | | | | | | - | 160.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 03 | 7.01 | | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Adanya sertifikatkasi halal | - | | | 1 Tahun | 60.458.387,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Kabupaten Nagan Raya | - | 160.000.000,00 | |
| | 9 | 01 | 03 | 7.01 | 0003 | Pendidikan Kader Ulama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan | | | | 50 Orang | 60.458.387,00 | Kab. Nagan Raya, Suka Makmue, Lueng Baro | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh<br>Memperkuat Syariat Islam dan Kearifan Lokal | Masyarakat Kabupaten Nagan Raya | | 160.000.000,00 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | | | | | | | | | | | **J U M L A H** | **1.159.297.273.084,00** | | | | | | | **760.192.036.277,00** | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 6.1. Indikator Makro

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro Kabupaten Nagan Raya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Tahun 2023-2026 terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, PDRB per Kapita dan Indeks Gini. Untuk lebih jelas target dari Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

**Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026-2030**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2030) | OPD | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | Bappeda | BPS |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 71,2 | 72,42 | 73,09 | 73,78 | 74,48 | 75,18 | 75,18 | Bappeda | BPS |
| 3 | Angka Kemiskinan | % | 17,8 | 17 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 15,8 | 15,8 | Bappeda | BPS |
| 4 | PDRB Per Kapita | Juta Rupiah | 45,68 | 46 | 46,16 | 46,33 | 46,51 | 46,68 | 46,68 | Bappeda | BPS |
| 5 | Indeks Gini | Indeks | 0,266 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 0,261 | 0,26 | 0,26 | Bappeda | BPS |

## 6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan suatu proses penilaian capaian strategi yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja yang efektif adalah kunci dalam memastikan apakah strategi yang telah dirancang berhasil dilaksanakan. Selain itu, pengukuran kinerja yang efektif juga dapat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah maka indikator kinerja mempunyai peranan yang sangat penting. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran dan program/kegiatan. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu, sehingga setiap program dan kegiatan harus mempunyai indikator kinerja yang terukur dan konkrit serta mendukung permasalahan, isu strategis dan pencapaian visi misi kepala daerah terpilih.

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada tahun kedua masa jabatan. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi target capaian indikator kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Dalam hal perubahan target yang ditetapkan pada RPD terhadap target RPKD Tahun 2025 menyesuaikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah dicapai. Ada beberapa indikator makro maupun IKU dan IKD Kabupaten Nagan Raya yang mengalami perubahan dikarenakan sudah tercapainya indikator yang ditargetkan di RPD untuk tahun 2025 sehingga diestimasikan target pada RKPD tahun 2026 terjadi penyesuaian berdasarkan hasil rakortekrenbang dengan OPD teknis terkait.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPK dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lebih jelas mengenai target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 disajikan pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

## Tabel 6.2
## Indikator Kinerja Utama (IKU)
## Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024-2026

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2024 | Target RPD | | TARGET RKPD 2026 | TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG | SKPK | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | Opini Audit BPK atas laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKD | BPKD |
| 2 | Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Inspektorat | Inspektorat |
| 3 | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Scor | N/A | baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Setdakab (Bag. Pemerintahan) | Setdakab (Bag. Pemerintahan) |
| 4 | Nilai SAKIP | Nilai | 60,02 | 65 | 70 | 70 | 70 | Setdakab (Bag. Organisasi) | Setdakab (Bag. Organisasi) |
| | | | B | B | B | B | B | | |
| 5 | Jumlah ZIS yang terhimpun | Rp. Milyar | 4,647 | 918 | 964 | 964 | 964 | Baitul Mal | Baitul Mal |
| 6 | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam | % | 67 | 85 | 85 | 85 | 85 | Satpol PP dan WH | Satpol PP dan WH |
| 7 | Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab | Unit | 50 | 100 | 100 | 100 | 627 | PERKIM | PERKIM |
| 8 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks | 2,30 | 2,98 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | | BPS |
| 9 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | Indeks | 0,45 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Dinsos | BPS |
| 10 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,22 | 3,78 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | Disnakertrans | Disnakertrans |
| 11 | Persentase akses sanitasi | % | 0,5 | 74,98 | 75,48 | 75,48 | 75,48 | PERKIM | PERKIM |
| 12 | Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu | % | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | DISKOMINFOTIK | DISKOMINFOTIK |
| 13 | Prevalansi Stunting | % | 3,17 | 14,2 | 75,48 | 75,48 | 75,48 | Dinkes | Dinkes |
| 14 | Kabupaten Layak Anak | Level | Belum keluar pengumuman resmi dari Kemen PPPA | madya | Nindya | Nindya | Nindya | DPMGP4 | DPMGP4 |
| 15 | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 8,36 | 8,12 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | BPKD | BPKD |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2024 | Target RPD 2025 | Target RPD 2026 | TARGET RKPD 2026 | TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG | SKPK | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) | Rp (Triliun) | 3.7 | 2580 | 2632 | 2632 | 2632 | DPMPTSP | DPMPTSP |

**Tabel 6.3**
**Indikator Kinerja Daerah (IKD)**
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026-2030**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | |
| 1 | PDRB per kapita ADHB | Juta Rupiah | 45,68 | 46 | 46,12 | 46,30 | 46,48 | 46,67 | 46,67 | Bappeda |
| 2 | Indek Gini Ratio | Indeks | 0,266 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 0,261 | 0,260 | 0,260 | Bappeda |
| 3 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa (Ribu) | 29,42 | 28,28 | 28,07 | 27,64 | 27,22 | 26,79 | 26,79 | Bappeda |
| 4 | Angka Melek Huruf | % | 98,28 | 98,62 | 98,81 | 98,98 | 99,15 | 99,33 | 99,33 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,18 | 9,32 | 9,44 | 9,54 | 9,64 | 9,75 | 9,75 | Dinas Pendidikan |
| 6 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,38 | 14,58 | 14,675 | 14,778 | 14,881 | 14,984 | 14,984 | Dinas Pendidikan |
| 7 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | % | 24,46 | 23,3 | 22,6 | 22,2 | 21,6 | 21,1 | 21,1 | Dinas Sosial |
| 8 | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB | % | 45,34 | 45,77 | 45,99 | 46,21 | 46,42 | 46,64 | 46,64 | Distanak / DKPP/ Disbun |
| 9 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB | % | 4,59 | 4,65 | 4,68 | 4,71 | 4,74 | 4,78 | 4,78 | Disperindagkop |
| 10 | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB | % | 10,5 | 11,10 | 11,40 | 11,70 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | Disperindagkop |
| 8 | Produksi sektor pertanian palawija | Ton | 3.840 | 3.848 | 3.852 | 3.856 | 3.860 | 3.864 | 3.864 | DISTANNAK |
| 9 | Produksi pertanian padi | Ton | 103.866 | 104.490 | 104.802 | 105.114 | 105.426 | 105.738 | 105.738 | DISTANNAK |
| 10 | Produksi perkebunan sawit rakyat | Ton | 569.934 | 588.685 | 598.061 | 607.437 | 616.812 | 626.188 | 626.188 | DISBUN |
| 11 | Produksi perkebunan | Ton | 5.595,41 | 5.878,68 | 6.019,73 | 6.162,34 | 6.303,91 | 6.446,17 | 6.446,17 | DISBUN |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | % | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | Bappeda |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2 | Pengeluaran Per Kapita | Rp (Ribu) | 8.343 | 8.464 | 8.524 | 8.585,33 | 8.645,78 | 8.706,81 | 8.706,81 | Bappeda |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 43,17 | 43,88 | 44,3555 | 44,675 | 45,175 | 45,585 | 45,585 | Dinas Pendidikan |
| 1.2. | Angka partisipasi kasar | | | | | | | | | |
| | APK SD/MI/Paket A | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | APK SMP/MTs/Paket B | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | APK SMA/SMK/ | % | 96,62 | 96,95 | 97,12 | 97,29 | 97,45 | 97,62 | 97,62 | Dinas Pendidikan |
| 1.3. | Angka pendidikan yang ditamatkan | | | | | | | | | |
| | Tamat SD Sederajat | % | 99,02 | 99,66 | 99,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | Tamat SLTP sederajat | % | 95,85 | 96,03 | 96,13 | 96,21 | 96,30 | 96,38 | 96,38 | Dinas Pendidikan |
| | Diploma I/II/III | % | 5,49 | 5,89 | 6,10 | 6,28 | 6,48 | 6,67 | 6,67 | Dinas Pendidikan |
| | Diploma IV/S1 | % | 60,96 | 61,33 | 61,51 | 61,71 | 61,89 | 62,08 | 62,08 | Dinas Pendidikan |
| | S2/S3 | % | 3,28 | 3,75 | 4,01 | 4,21 | 4,44 | 4,65 | 4,65 | Dinas Pendidikan |
| 1.4. | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 90,07 | 90,68 | 91 | 91,28 | 91,58 | 91,87 | 91,87 | Dinas Pendidikan |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 70,74 | 70,91 | 70,97 | 71,10 | 71,18 | 71,30 | 71,30 | Dinas Pendidikan |
| 1.5. | Angka partisipasi sekolah | | | | | | | | | |
| | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 97,55 | 97,88 | 98,04 | 98,21 | 98,38 | 98,54 | 98,54 | Dinas Pendidikan |
| | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 85,76 | 85,97 | 86,08 | 86,17 | 86,28 | 86,38 | 86,38 | Dinas Pendidikan |
| 1.6 | Angka Melanjutkan (AM): | | | | | | | | | |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 99,11 | 99,59 | 99,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 92,82 | 93,18 | 93,35 | 93,55 | 93,73 | 93,92 | 93,92 | Dinas Pendidikan |
| 1.7 | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 98,26 | 98,71 | 98,96 | 99,14 | 99,37 | 99,57 | 99,57 | Dinas Pendidikan |
| | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 98,9 | 99,36 | 99,52 | 99,76 | 99,95 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 1.8 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 76,51 | 76,98 | 77,14 | 77,30 | 77,46 | 77,63 | 77,63 | Dinas Pendidikan |
| 1.9 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Rasio Index | 61,97 | 62,08 | 62,12 | 62,20 | 62,25 | 62,32 | 62,32 | Dinas Pendidikan |
| 1.1 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Rasio Index | 74,98 | 75,52 | 75,75 | 76,09 | 76,35 | 76,67 | 76,67 | Dinas Pendidikan |
| 1.11 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | Rasio Index | 61,89 | 61,98 | 62,02 | 62,07 | 62,12 | 62,16 | 62,16 | Dinas Pendidikan |
| 1.12 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Rasio Index | 73,18 | 74,03 | 74,49 | 74,85 | 75,28 | 75,66 | 75,66 | Dinas Pendidikan |
| 1.13 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | Rasio Index | 56,79 | 56,92 | 56,99 | 57,05 | 57,11 | 57,17 | 57,17 | Dinas Pendidikan |
| 1.14 | Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 | % | 99,17 | 99,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 1.15 | Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) | % | 83,91 | 84,46 | 84,68 | 85,04 | 85,31 | 85,64 | 85,64 | Dinas Pendidikan |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 6,1 | 4,30 | 3,37 | 2,52 | 1,62 | 0,75 | 0,75 | Dinas Kesehatan |
| 2.2. | Angka kelangsungan hidup bayi | /1000 Kelahiran | 14,1 | 12,20 | 11,47 | 10,16 | 9,23 | 8,05 | 8,05 | Dinas Kesehatan |
| 2.3. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 15,3 | 11,20 | 9,17 | 7,09 | 5,04 | 2,97 | 2,97 | Dinas Kesehatan |
| 2.4. | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | /1000 Kelahiran | 16,6 | 13,70 | 12,37 | 10,72 | 9,29 | 7,71 | 7,71 | Dinas Kesehatan |
| 2.5. | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100000 Kelahiran | 307,3 | 250,20 | 222,20 | 192,73 | 164,24 | 135,10 | 135,10 | Dinas Kesehatan |
| 2.6. | Rasio posyandu per satuan balita | /1000 Balita | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2.7. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | | | | | | | | |
| | Puskesmas | /1000 Penduduk | 0,09131 | 0,08921 | 0,08815 | 0,08711 | 0,08606 | 0,08502 | 0,08502 | Dinas Kesehatan |
| | Puskesmas | Unit | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Dinas Kesehatan |
| | Poliklinik | /1000 Penduduk | 0,05136 | 0,06691 | 0,07377 | 0,08307 | 0,09074 | 0,09950 | 0,09950 | Dinas Kesehatan |
| | Poliklinik | Unit | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | Dinas Kesehatan |
| | Pustu | /1000 Penduduk | 0,027962 | 0,27321 | 0,26999 | 0,26681 | 0,26360 | 0,26041 | 0,26041 | Dinas Kesehatan |
| | Pustu | Unit | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Dinas Kesehatan |
| 2.8. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | /1000 Penduduk | 0,00571 | 0,00558 | 0,00551 | 0,00545 | 0,00539 | 0,00532 | 0,00532 | Dinas Kesehatan |
| | Rumah Sakit | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
| 2.9. | Rasio dokter per satuan penduduk | /1000 Penduduk | | | | | | | | |
| | Dokter Umum | /1000 Penduduk | 0,36522 | 0,37915 | 0,38614 | 0,39307 | 0,40003 | 0,40697 | 0,40697 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Umum | Orang | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Spesialis | /1000 Penduduk | 0,13125 | 0,15054 | 0,16022 | 0,16981 | 0,17946 | 0,18906 | 0,18906 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Spesialis | Orang | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi | /1000 Penduduk | 0,0856 | 0,10594 | 0,11615 | 0,12626 | 0,13643 | 0,14656 | 0,14656 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi | Orang | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi Spesialis | /1000 Penduduk | 0,01141 | 0,02230 | 0,02777 | 0,03318 | 0,03862 | 0,04404 | 0,04404 | Dinas Kesehatan |
| | Dokter Gigi Spesialis | Orang | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | Dinas Kesehatan |
| 2.11. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 73 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 94 | Dinas Kesehatan |
| 2.12. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2.13. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | Dinas Kesehatan |
| 2.14. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.15. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Dinas Kesehatan |
| 2.16. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.17. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2.18. | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | /100.000 penduduk | 211 | 180 | 162,67 | 150,22 | 134,52 | 120,99 | 29,4 | Dinas Kesehatan |
| 2.19. | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | /100.000 penduduk | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | Dinas Kesehatan |
| 2.20. | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.21. | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2.22. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.23. | Angka kejadian Malaria | /100.000 penduduk | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | Dinas Kesehatan |
| 2.24. | Cakupan kunjungan bayi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.26. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 95 | 96,6 | 97,4 | 97,8 | 98,2 | 98,6 | 98,6 | Dinas Kesehatan |
| 2.27. | Cakupan pelayanan nifas | % | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | Dinas Kesehatan |
| 2.28. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | Dinas Kesehatan |
| 2.29. | Cakupan pelayanan anak balita | % | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2.30. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 41 | Dinas Kesehatan |
| 2.31. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2.32. | Persentase balita gizi buruk | % | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Dinas Kesehatan |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Pekerjaan Umum:** | | | | | | | | | PU PR |
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 43,55 | 46,15 | 47,45 | 48,75 | 50,05 | 51,35 | 51,35 | PU PR |
| 3.1.2. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Rasio Index | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | PU PR |
| 3.1.3. | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | % | 29,86 | 33,09 | 34,7 | 36,31 | 37,92 | 39,53 | 39,53 | PU PR |
| 3.1.4 | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | % | 27,14 | 32,83 | 35,81 | 38,79 | 41,77 | 44,75 | 44,75 | PU PR |
| 3.1.5 | Rasio jaringan irigasi | Rasio Index | 45,66 | 45,71 | 45,73 | 45,75 | 45,77 | 45,79 | 45,79 | PU PR |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah rumah layak huni yang terbangun | Unit | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | PERKIM /Baitul Mal |
| 4.2 | Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab | Unit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | PERKIM |
| 4.3 | Persentase penduduk berakses air minum | % | 7,42 | 9,37 | 10,33 | 11,29 | 12,25 | 13,21 | 13,21 | PERKIM |
| 4.4 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | % | 11,79 | 15,78 | 17,75 | 19,72 | 21,69 | 23,66 | 23,66 | PERKIM |
| 4,5 | Persentase Rumah Tangga bersanitasi | % | 74,48 | 75,48 | 75,98 | 76,48 | 76,98 | 77,48 | 77,48 | PERKIM |
| **5** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 5.1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) | % | 75 | 22,3 | 25,3 | 28,3 | 31,3 | 3,4 | 3,4 | SATPOL PP dan WH |
| 5.2 | Persentase Penegakan PERDA | % | 67 | 15,3 | 19,3 | 23,3 | 27,3 | 31,3 | 31,3 | SATPOL PP dan WH |
| **6** | **Sosial** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS |
| 6.2. | Persentase PMKS yang tertangani (BPNT) | % | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS |
| 6.3. | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (BNPT) | % | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS |
| 6.4. | Adanya regulasi santunan kematian | Ada/ Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bagian Keisra |
| **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | kasus | 63,49 | 47,62 | 37,04 | 33,51 | 25,28 | 20,19 | 20,19 | Disnaker trans |
| 1.2 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 58,26 | 70,38 | 76,43 | 82,48 | 88,53 | 94,58 | 94,58 | Disnaker trans |
| 1.3 | Jumlah tenaga kerja di sektor industri | Orang | 7,99 | 8,03 | 8,05 | 8,07 | 8,09 | 8,11 | 8,11 | Disnaker trans |
| 1.4 | Besaran Tenagan Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | Disnaker trans |
| 1.5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 3,92 | 3,64 | 3,50 | 3,36 | 3,22 | 3,08 | 3,08 | Disnaker trans |
| 1.6 | Besaran Tenagan Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | Disnaker trans |
| 1.7 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 68,53 | 70,63 | 71,68 | 72,73 | 73,78 | 74,83 | 74,83 | Disnaker trans |
| 1.8 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 0,058 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,087 | 0,087 | Disnaker trans |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | |
| 2.2. | Kabupaten Layak Anak | Level | Pratama | Nindya | Nindya | Utama | Utama | KLA | KLA | DPMGP4 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2.3 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 17,0 | 20,0 | 21,5 | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 25,1 | DPMGP4 |
| 2,4 | Rasio KDRT | % | 0,050 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,027 | 0,023 | 0,023 | DPMGP4 |
| **3** | **Pangan** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Skor | 72,90 | 74,00 | 74,70 | 75,00 | 75,57 | 75,96 | 75,96 | DKPP |
| **4** | **Penanggulangan Bencana dan Kerusakan Lingkungan dan Penanganan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Ada/ tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | DLH |
| 4.2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Pembangunan kabupaten/kota | Ada/ tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | DLH |
| 4.3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Ada/ tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | DLH |
| 4.4 | Indeks Kapasitas ketahanan Bencana | Indeks | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | BPBD |
| 4.5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 57,65 | 58,11 | 58,34 | 58,57 | 58,8 | 59,03 | 59,03 | DLH |
| 4.6 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 34,85 | 36,15 | 36,76 | 37,37 | 37,98 | 38,59 | 38,59 | DLH |
| 4.7 | Jumlah Sarana prasarana persampahan | Unit | 1.500 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.775 | 3.025 | 3.025 | DLH |
| 4.8 | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 4,87 | 5,31 | 5,54 | 5,77 | 6,00 | 6,23 | 6,23 | DLH |
| **5** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 98,75 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| 5.2 | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 92,5 | 94,00 | 99,95 | 95,50 | 96,25 | 97,00 | 97,00 | Disdukcapil |
| 5.3 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Disdukcapil |
| 5.4 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 98,75 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| **6** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 6.2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | DPMGP4 |
| 6.3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | DPMGP4 |
| 6.4 | Persentase LSM aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.5 | Persentase LPM Berprestasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.6 | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.7 | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.8 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| 6.9 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| **7** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 2,5 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | DPMGP4 |
| 7.2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DPMGP4 |
| 7.3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Anak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DPMGP4 |
| 7.4 | Rasio Akseptor KB | % | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | DPMGP4 |
| 7.5 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | % | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | DPMGP4 |
| 7.6 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | /1.000 perempuan | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | DPMGP4 |
| 7.7 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMGP4 |
| **8** | **Perhubungan** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | | | | | | | |
| | Angkutan Darat | Trayek | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | Dishub |
| | Angkutan Udara | Frek | 720 | 1.440,00 | 1.728,00 | 2.030,40 | 2.332,80 | 2.635,20 | 2.635,20 | Dishub |
| 8.1 | Rasio ijin trayek | Indeks | 20 | 36 | 41 | 48 | 55 | 61 | 61 | Dishub |
| 8.2 | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | 368 | 764 | 979 | 1.194 | 1.409 | 1.624 | 1.624 | Dishub |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 8.3 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | | | | | | |
| | Jumlah Bandar Udara | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dishub |
| | Jumlah Terminal Tipe B | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dishub |
| | Pelabuhan Laut | Unit | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Dishub |
| 8.4 | Persentase layanan angkutan darat | % | 7,30 | 13,45 | 17,30 | 21,15 | 25,00 | 28,85 | 28,85 | Dishub |
| 8.5 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | 6,50 | 9,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 17,50 | 17,50 | Dishub |
| 8.6 | Pemasangan Rambu-rambu | % | 38 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 62 | Dishub |
| 8.7 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio Index | 89,10 | 94,41 | 98,57 | 102,73 | 106,89 | 111,05 | 111,05 | Dishub |
| 8.8 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | | | | | | | | | |
| | Angkutan Udara | Orang | 54.000 | 108.000 | 129.600 | 156.600 | 178.200 | 202.500 | 202.500 | Dishub |
| 8.9 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara / terminal per tahun | | | | | | | | | |
| | Bandara | Kg | 233.976 | 283.110 | 307.287 | 332.504 | 357.028 | 382.014 | 382.014 | Dishub |
| **9** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 0,66 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | DISKOMINFOTIK |
| 9.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | DISKOMINFOTIK |
| 9.3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | DISKOMINFOTIK |
| **10** | **Koperasi, UMKM** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase koperasi aktif | % | 75,16 | 81,25 | 83,98 | 87,19 | 90,40 | 93,61 | 93,61 | Disperindagkop dan UKM |
| 10.2 | Persentase koperasi tidak aktif | % | 24,84 | 18,75 | 16,02 | 12,81 | 9,60 | 6,39 | 6,39 | Disperindagkop dan UKM |
| 10.3 | Persentase pelatihan untuk pelaku UMKM | % | 6,89 | 12,81 | 10,52 | 13,47 | 14,00 | 14,33 | 14,33 | Disperindagkop dan UKM |
| 10.2 | Jumlah pemasaran UMKM | Unit | 94,00 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 129 | Disperindagkop dan UKM |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| **11** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | DPMPTSP |
| 11.2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp (Triliun) | 2.530 | 2.632 | 2.684 | 2.736 | 2.788 | 2.840 | 2.840 | DPMPTSP |
| 11.3 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Rp (Milyar) | 197 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 221 | DPMPTSP |
| 11,4 | Rasio daya serap tenaga kerja | % | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | DPMPTSP |
| 11,5 | Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan | Indeks | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 250 | DPMPTSP |
| **12** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | |
| 12.1. | Jumlah Organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Disbudparpora |
| 12.2. | Cakupan pembinaan olahraga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Disbudparpora |
| 12.3. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | % | 92,32 | 92,36 | 92,38 | 92,4 | 92,42 | 92,44 | 92,44 | Disbudparpora |
| 12.4. | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 55,52 | 55,62 | 55,67 | 55,72 | 55,77 | 55,82 | 55,82 | Disbudparpora |
| 12.5 | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 35 | 40 | 45 | 48 | 58 | 61 | 61 | Disbudparpora |
| 12.6 | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 21 | 22 | 20 | 24 | 25 | 28 | 28 | Disbudparpora |
| **13** | **Statistik** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | BPS |
| 13.2 | Buku ”kabupaten dalam angka” | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | BPS |
| 13.3 | Buku ”PDRB” | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | BPS |
| **14** | **Persandian** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | Diskominfotik |
| **15** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | |
| 15.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | Disbudparpora |
| 15.2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Disbudparpora |
| 15.3 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | unit | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | Disbudparpora |
| **16** | **Perpustakaan** | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 16.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 4.000 | 4.733 | 4.967 | 5.200 | 5.433 | 5.667 | 5.667 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | koleksi | 40.430 | 46.430 | 49.430 | 52.430 | 55.430 | 58.430 | 58.430 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | /1.000 Penduduk | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,3 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.4 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 1.000 | 1.400 | 1.550 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 2.000 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 11.121 | 13.121 | 14.121 | 15.121 | 16.121 | 17.121 | 17.121 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 16.6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **17** | **Kearsipan** | | | | | | | | | |
| 17.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 17.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Pariwisata** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Kunjungan wisata | % | 91,1 | 91,2 | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | Disbudparpora |
| 1.2. | Lama kunjungan Wisata | Hari | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | Disbudparpora |
| 1.3. | Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan | Lokasi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Disbudparpora |
| **2,** | **Pertanian** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | ton/ha | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | Distannak |
| 2.2. | Cakupan bina kelompok petani | % | 52 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | Distannak |
| **4** | **Perdagangan** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang | Unit | 74 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 224 | Disperindagkop dan UKM |
| **5** | **Perindustrian** | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 5.1. | Cakupan Bina kelompok pengrajin | % | 86,9 | 93,5 | 94,6 | 95,1 | 95,6 | 96,2 | 96,2 | Disperindagkop dan UKM |
| 5.2. | Jumlah industri Pengolahan | Unit | 4.245 | 4.345 | 4.395 | 4.445 | 4.495 | 4.545 | 4.545 | Disperindagkop dan UKM |
| 5.3. | Kawasan Industri | Unit | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disperindagkop dan UKM |
| **6** | **Tansmigrasi** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Jumlah transmigran lokal | KK | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Disnakertrans |
| 6.2 | Jumlah transmigrasi | UPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Disnakertrans |
| 6.3 | Jumlah Pengembangan Kawasan Trasmigrasi | Kawasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disnakertrans |
| **7** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Produksi perikanan | | | | | | | | | DKPP |
| | - Perikanan Tangkap | Ton | 3577 | 3.929 | 4.104 | 4.279 | 4.453 | 4.628 | 4.628 | DKPP |
| | - Perikanan Budidaya | Ton | 985 | 1.081 | 1.129 | 1.176 | 1.224 | 1.272 | 1.272 | DKPP |
| **8** | **Peternakan** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) | ekor | 22.432 | 22.521 | 22.566 | 22.610 | 22.655 | 22.699 | 22.699 | Distannak |
| 8.2 | Populasi ternak kecil (kambing dan domba) | ekor | 17.677 | 17.748 | 17.784 | 17.819 | 17.855 | 17.890 | 17.890 | Distannak |
| **9** | **Pertanahan** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 71,01 | 78 | 81 | 85 | 88 | 92 | 92 | Dinas Pertanahan |
| 9.2 | Penyelesaian kasus tanah negara | % | 69 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 87 | Dinas Pertanahan |
| **Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB | Ada/ tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1.4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN | Ada/ tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK | Ada/ tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK | Ada/ tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |
| 1.7. | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Ada/ tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Bappeda |
| **2** | **Keuangan** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP/WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKD |
| 2.2. | Persentase SILPA | % | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | BPKD |
| 2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | BPKD |
| 2.4. | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | % | Mohon dilengkapi | 7 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | BPKD |
| 2.5. | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20,81 | 21,63 | 22,04 | 22,45 | 22,86 | 23,27 | 23,27 | BPKD |
| 2.6. | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10,4 | 10,81 | 11,02 | 11,22 | 11,43 | 11,63 | 11,63 | BPKD |
| 2.7. | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | % | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | BPKD |
| 2.8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 10,4 | 10,81 | 11,02 | 11,22 | 11,43 | 11,63 | 11,63 | BPKD |
| 2.9. | Penetapan APBD | Tepat/Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKD |
| **3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | jam | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | BKPSDM |
| 3.2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | BKPSDM |
| 3.3. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 1,0273 | 1,0273 | 1,0273 | 1,0273 | 1,0273 | 1,0273 | 1,0273 | BKPSDM |
| 3.4. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi | jabatan | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | BKPSDM |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | pada instansi pemerintah | | | | | | | | | |
| 3.5. | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | jabatan | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | BKPSDM |
| 3.6. | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | jabatan | 2.232 | 2.265 | 2.290 | 2.315 | 2.340 | 2.365 | 2.365 | BKPSDM |
| 3.7. | Indeks profesionalitas ASN | Indeks | 60 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | BKPSDM |
| 3.8. | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi) |
| 3.9. | Meningkatnya nilai SAKIP | Unit | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Setdakab (Bag. Organisasi) |
| **4** | **Penelitian dan pengembangan** | | | | | | | | | |
| 4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | | | | | | | | | |
| | Penerapan SIDa: | Sudah/ Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | sudah | Bappeda |
| 4.3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | % | 30 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | Bappeda |
| 4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | Bappeda |
| **5** | **Pengawasan** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | % | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | Inspektorat |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | Inspektorat |
| 5.3. | Jumlah temuan BPK | Temuan | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | Inspektorat |
| **6** | **Sekretariat Dewan** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRK |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRK |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Pembentukan Perda | | | | | | | | | |
| 6.3. | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRK |
| 6,4 | Jumlah Qanun yang disahkan | Peraturan Daerah/ Qanun | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Sekretariat DPRK |
| **Keistimewaan dan Kekhususan Aceh** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz | Orang | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | DSI |
| 1.2. | Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam | % | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | DSI |
| 1.3. | Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam | % | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | DSI |
| 1.4. | Standarisasi Pendidikan Dayah | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | DSI |
| 1.5. | Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe) | % | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | DSI |
| **2** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi | gampong | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | Disbudparpora |
| 2.2. | Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim | % | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | Disbudparpora |
| 2.3. | Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah | % | 40 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | Disbudparpora |
| 2.4. | Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, | wilayah | 27 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | Disbudparpora |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) | SKPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur | | | | | | | | | |
| 2.5 | Jumlah warisan budaya lokal yang ditetapkan | Unit | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Disbudp arpora |
| **3** | **Keagamaan** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%) | Unit | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | DSI |
| 3.2. | Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat | Orang | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | DSI |
| 3.3. | Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat | Orang | 60 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 87 | DSI |
| 3.4. | Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin | Mesjid | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | DSI |
| 3.5. | Pembinaan Dinul Islam | Orang | 22 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | Satpol PP dan WH |
| 3.6. | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam | % | 76 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 91 | Satpol PP dan WH |
| 3.7. | Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi | Orang | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | Baitul Mal/DSI |
| 3.8. | Jumlah Penghimpunan ZISWAF | Rp (000) | 874 | 961 | 1004 | 1047 | 1090 | 1133 | 1133 | Baitul Mal |
| 3.9. | Jumlah ZISWAF yang disalurkan | Rp (000) | 874 | 961 | 1004 | 1047 | 1090 | 1133 | 1133 | Baitul Mal |
| **Keistimewaan dan Kekhususan Aceh** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Kesbang pol |
| 1.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | Kegiatan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Kesbang pol |
| 1.3. | Jumlah LSM | LSM | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | Kesbang pol |
| 1.4. | Meningkatnya partispasi pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak | persen | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | Kesbang pol |

# BAB VII
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dalam proses penyusunannya berdasarkan perencanaan tahun pertama Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2025-2029, RKPA dan RKP Tahun 2026. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang lebih efektif dan optimal untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian terdapat keterkaitan antar dokumen perencanaan karena dokumen yang lebih tinggi kedudukannya tersebut bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara optimal.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPK Tahun 2026, pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPK Tahun 2026; pedoman penyelarasan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2026; sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Nagan Raya dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Nagan Raya Tahun 2026; serta menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mendukung dan mensukseskan RKPK Nagan Raya Tahun 2026 ini demi mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang mandiri dan madani.

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H**